



Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia



SERI-A FoLU Net Sink 2030
Nomor: A-17/Renja-Lampung/09/2022

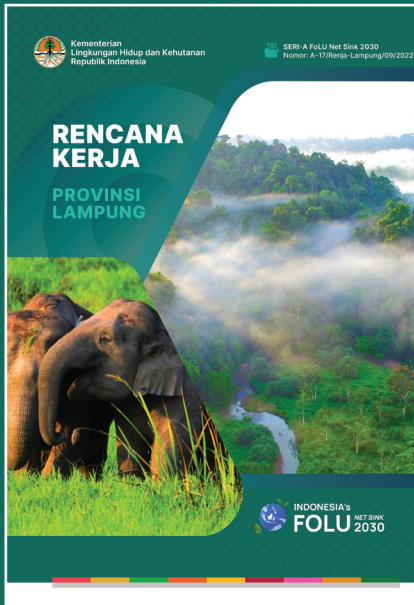
RENCANA KERJA

PROVINSI LAMPUNG



INDONESIA's
FOLU NET SINK
2030





RENCANA KERJA

PROVINSI LAMPUNG

Keterangan Gambar Sampul:

1. Hutan Bukit Barisan
2. Taman Nasional Way Kambas

Diterbitkan oleh:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat

ISBN:

XXX - XXXX - XXX - XX

© 2022 Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

EDITOR IN CHIEF:

Siti Nurbaya Bakar, Arinal Djunaidi..

REVIEWERS:

Bambang Hendroyono, Ruandha Agung Sugardiman, Agus Justianto, Fahrizal Darminto.

ASSOCIATE EDITORS:

Hanif Faisol Nurofiq, Ade Palguna Ruteka, Djaka Widada, Christine Wulandari, Arif Darmawan.

CONTRIBUTORS OF MOEF:

Istanto, Helmi Basalamah, Wiratno, M.R Karlansyah, Emma Rachmawaty, Tuti Alawiyah, Maryuna Pabutungan, Ismanto, Puji Iswari, Donald Hutasoit, Ferdian Krisnanto, Apri Dwi Sumarah, Idi Bantara, Subhan, Kuswandono.

CONTRIBUTORS OF PROVINCE LAMPUNG:

Yanyan Ruchyansyah, Emilia Kusumawati, Mulyadi Irsan, Dadat Dariatna, Kusnardi, Thomas Edwin, Lili Mawarti, Liza Dorni, Febrizal Levi Sukmana, Elvira Umihanni, Sahroli, Qodri, Ronald HP Panjaitan, Dwi Maylinda, Gunaidi, Ariyadi Agustiono, Sastrawijaya, Masagus Fresly, Budi Satria, Iskandar, Dadang Trianahadi, Edi Hermanto, Ali Sodikin, Wahyudi Kurniawan, Lingga Sakti Damayanti, Luluk Setyoko, Eny Puspasari, Puji Iswari.

FACILITATORS:

Puri Puspita Sari, Irma Yuliatwati, Nurlela Komalasari, Hasnawati Hamzah, Romilla Sari, Agung Bayu Nalendro, Purna Fitria, Danny Armando Wikongko, Claudia Meitrivane Silalahi, Subagyo, Helly Fitriyanti, Muamar Zulfikar.

Kata Pengantar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Indonesia sebagai pemilik hutan tropis terbesar ketiga di dunia, mempunyai arti sangat penting dalam upaya pengendalian iklim global. Hutan merupakan kunci untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mendinginkan udara dan melindungi kita dari kekeringan, panas ekstrem, dan banjir yang disebabkan oleh kerusakan iklim. Untuk itu, perlindungan yang lebih baik, dan peningkatan pengelolaan hutan di dunia merupakan salah satu solusi berbasis alam yang paling efektif.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen kepada dunia dalam penurunan gas rumah kaca dengan meratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 dan menegaskan menegaskan komitmennya kepada dunia melalui penyampaian *Enhanced NDC* kepada Sekretariat UNFCCC pada 23 September 2022 dengan target penurunan emisi dari 29% di first NDC dan *updated NDC* meningkat menjadi 31,89% tanpa syarat dan dari 41% meningkat menjadi 43,20% dengan dukungan internasional. *Enhanced NDC* ini adalah transisi menuju *Second NDC* yang akan diselaraskan dengan *Long Term Low Carbon and Climate Resilience Strategy (LTS-LCCR)* 2050 dengan visi untuk mencapai *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat, untuk membatasi kenaikan rata-rata suhu global di bawah 2°C dari tingkat pre-industrialisasi dan terus berupaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga di bawah 1,5°C.

Skenario LCCP ingin dicapai melalui implementasi Rencana Operasi Lapangan FOLU Indonesia 2030 adalah tingkat pencapaian emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030 dan seterusnya meningkat menjadi -304 juta ton CO₂e pada tahun 2050 sehingga emisi bersih di tingkat nasional (semua sektor) menjadi 540 juta ton CO₂e atau setara dengan 1,6 ton CO₂e per kapita.

Guna mendukung target tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Kebijakan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/ 2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* untuk Pengendalian Perubahan Iklim. Di dalam Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* telah diatur secara detail program



dan kegiatan mitigasi, lokus spasial rencana operasional, penanggung jawab kegiatan dan program, kebutuhan SDM, Sarana dan Prasarana, penganggaran dan tata waktu pelaksanaannya secara nasional tahun 2022-2030.

Dalam menjalankan komitmen pengendalian perubahan iklim serta untuk pencapaian target NDC serta mendukung Net Zero Emission, Pemerintah RI telah berupaya untuk melakukan berbagai upaya dalam mengurangi emisi GRK termasuk mengeluarkan pengaturan terkait *carbon pricing* atau Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dilakukan pada sektor dan sub sektor dengan pelaksana oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Melalui 4 (empat) mekanisme yaitu: Perdagangan Karbon; Pembayaran Berbasis Kinerja, Pungutan atas Karbon; dan/atau mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Guna menjabarkan target-target Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 agar dapat diimplementasikan pada tingkat tapak telah disusun Rencana Kerja Sub Nasional yang mendetailkan target-target aksi mitigasi Rencana Kerja bidang-bidang utama sektor FOLU yang meliputi: Bidang Pengelolaan Hutan Lestari; Bidang Peningkatan Cadangan Karbon; Bidang Konservasi; Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan Bidang Instrumen dan Informasi di tingkat Provinsi dengan memperhatikan landscape dan karakteristik wilayah.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat beserta Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* atas ditetapkannya Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di Provinsi Kalimantan Barat.

Akhir kata, semoga upaya dan kerja nyata semua pihak bermanfaat dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.

Jakarta, Januari 2023

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M. Sc

Kata Pengantar



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur mari sama sama kita persembahkan ke hadirat Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menyelesaikan tugas menyusun Rencana Kerja (Renja) Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Sub-Nasional Lampung.

Renja Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 merupakan dokumen perencanaan yang sangat strategis sebagai pedoman aksi mitigasi perubahan iklim global dan nasional yang dampak negatifnya semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari. Renja Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Sub-Nasional Lampung akan menjadi acuan dasar oleh berbagai pihak terkait untuk konsisten mengalokasikan sumberdayanya dengan upaya-upaya yang terstruktur dan sistematis serta terintegrasi dengan target pada pengurangan emisi karbon dioksida (CO₂) serta dan penyerapan emisi CO₂ di Provinsi Lampung yang juga secara agregatif akan berimplikasi terhadap capaian nasional pada masa-masa mendatang.

Perubahan iklim yang terjadi secara global telah berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. World Meteorological Organization (WMO) (2022) melaporkan secara global, suhu rata-rata dunia tahun lalu berada pada angka 1,1 derajat Celsius di atas suhu rata-rata dunia pada era pra-industri. Angka ini telah mendekati ambang batas 1,5 derajat Celsius, yaitu/yang menjadi batasan tertinggi suhu global untuk melindungi dunia dari bencana iklim yang lebih luas. Perubahan suhu global tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada alam dan kehidupan manusia, seperti kualitas dan kuantitas air, hutan, kesehatan, lahan pertanian dan berbagai tipe ekosistem lainnya.

Kami atas nama Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi komitmen serta upaya langkah kerja nyata dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia yang peduli terhadap isu pengendalian perubahan iklim. Hal ini didasari pada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) tahun 2021 di Glasgow, Skotlandia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah memperkenalkan kepada dunia tentang target dan ambisi pemerintah Indonesia melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Operasional Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 yang di rilis pada bulan Maret 2022.

Indonesia menargetkan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% atau setara 834 juta ton CO₂ dengan usaha sendiri atau sampai dengan 41% atau setara dengan 1.185 juta

ton CO2 dengan dukungan internasional yang memadai pada tahun 2030. Sektor kehutanan mempunyai porsi terbesar yaitu 17,2%, sementara sektor lain yaitu: 11% pada sektor energi, 0,32% pada sektor pertanian, 0,10% pada sektor industri, dan 0,38% pada sektor limbah.

Dokumen Rencana Kerja Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sub-Nasional Lampung m1 mencakup aksi-aksi mitigasi pada sektor Forestry and Other Land Use (FOLU) yang akan dilakukan oleh Pemerintah Sub-nasional Lampung pada periode 2023-2030. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi acuan dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan di Sub Nasional Lampung dalam melaksanakan pengelolaan hutan rendah karbon.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan akademisi diharapkan dapat bekerja bersama secara kolektif melalui aksi percepatan implementasi langkah-langkah mitigasi domestik, serta peran untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan alam dan ekosistem. Dengan demikian dapat memberikan manfaat untuk adaptasi dan mitigasi iklim dan juga memastikan perlindungan sosial dan lingkungan.

Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh Tim Penyusun, pemangku kepentingan, tokoh, narasumber dan tenaga ahli nasional maupun daerah yang sepenuhnya telah terlibat selama proses penyusunan dokumen ini. Marilah kita bersama merajut komitmen dan upaya konkret untuk mengimplementasikan Rencana Kerja Sub-Nasional Lampung Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Demikian yang dapat saya sampaikan,

semoga cita-cita besar kita mendapatkan ridha dari Allah swt.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung,

Oktober 2022


GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI



Daftar Isi

Halaman Judul	2
Kata Pengantar Gubernur Lampung	3
Daftar Isi	6
Daftar Tabel	8
Daftar Gambar	12
BAB I. Pendahuluan	16
1.1. Latar Belakang	16
1.2. Tujuan dan Sasaran	19
1.2.1. Tujuan	19
1.2.2. Sasaran	20
1.2. Dasar Hukum	20
BAB II. Kondisi Umum Wilayah Dan Kondisi Kehutanan Provinsi Lampung	25
2.1. Deskripsi Wilayah Provinsi Lampung ..	25
2.1.1. Kondisi Geografis dan Topografis ..	25
2.1.2. Kondisi Demografis	29
2.1.3. Tata Guna Lahan	37

2.2. Luas dan Perubahan Kawasan Hutan ..	38
2.3. Deforestasi di Provinsi Lampung	41
2.4. Kontribusi sub-sektor Kehutanan [Ekonomi, Ekologi dan Sosial Budaya]	42
2.4.1. Kontribusi pada Aspek Ekonomi ..	43
2.4.2. Kontribusi pada Aspek Ekologi ..	47
2.4.3. Kontribusi pada Aspek Sosial Budaya	48

BAB III. Rencana Kerja Aksi Mitigasi Sub-Nasi- onal Provinsi Lampung Tahun 2023-2030 . 57

3.1. Alur Proses Penetapan Lokasi Arahkan Aksi Mitigasi FOLU Net Sink 2030. . .	57
3.1.1. Peta Arahkan Optimasi Kawasan Hutan Berdasarkan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi [IJLT]	58
3.1.2. Peta Tipologi Kelembagaan	59
3.1.3. Peta Indeks Biogeofisik [IBGF] ...	60
3.2. Sinkronisasi Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia's (FOLU) Net Sink 2030 di Provinsi Lampung	69
3.3. Publikasi, Sosialisasi, Monitoring Evaluasi, Penegakan Hukum dan Standarisasi ..	77
3.4. Rencana Operasional Aksi Mitigasi - Pencegahan Deforestasi Mineral [RO1]. 78	



3.5. Rencana Operasional Aksi Mitigasi - Penerapan Pengayaan Hutan Alam [RO5]	128	Mitigasi Pengelolaan Hutan Lestari [RO6]	324
3.6. Rencana Operasional Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C [RO6]	134	4.4 Rencana Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi dengan Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi [RO7]	334
3.7. Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi [RO7]	146	4.5 Rencana Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa (Non) Rotasi [RO8]	350
3.8. Rencana Operasional Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa (Non) Rotasi [RO8]	162	4.6 Rencana Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi Restorasi Gambut [RO-9]	398
3.9. Rencana Aksi Mitigasi - Pelaksanaan Restorasi Gambut [RO-10]	186	4.7 Rencana Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi Konservasi Keanakeragaman Hayati [RO-11]	402
3.10. Rencana Aksi Mitigasi-Perlindungan Areal Konservasi Tinggi [RO-11]	192	4.8 Rencana Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove [RO-12]	438
3.11. Rencana Aksi Mitigasi - Pengelolaan Mangrove [RO-12]	270		
BAB IV. Pendanaan Kegiatan	282	BAB V. Monitoring Dan Evaluasi	448
4.1 Rencana Pendanaan Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral [RO1]	282	BAB VI. Penutup	454
4.2 Rencana Pendanaan Penerapan Pengayaan Hutan Alam [RO5]	318	Daftar Pustaka	456
4.3 Pendanaan Rencana Operasional Aksi			



Daftar Tabel

Tabel 2.1	Topografi Desa di Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota
Tabel 2.2	Perkembangan Penduduk Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/ota
Tabel 2.3	Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/ota
Tabel 2.4	Lapangan Usaha Penduduk Berdasarkan Sub-sektor di Provinsi Lampung
Tabel 2.5	Lapangan Usaha Penduduk Berdasarkan Sub-sektor di Provinsi Lampung (Lanjutan)
Tabel 2.5.	Luas Penutupan Lahan di Provinsi Lampung
Tabel 2.6	Luas Penutupan Lahan di dalam Kawasan Hutan di Provinsi Lampung
Tabel 2.7	Statistik Luas Deforestasi Netto Tahun 2013-2020 di Provinsi Lampung
Tabel 2.8.	Struktur PDRB Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Q1-2021 sd. Q2-2022
Tabel 2.9	Proporsi Penduduk Miskin di Perdesaan dan Perkotaan Provinsi Lampung Tahun 2014-2021
Tabel 2.10	Proporsi Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020-2021
Tabel 2.11	Indikator Penduduk Provinsi Lampung 1990-2020 dan Proyeksi 2021
Tabel 3.1	Tabel 3.1. Pengelompokan Prioritas Lokasi untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengelolaan Hutan Berdasarkan Nilai IPL
Tabel 3.2	Perhitungan Indeks Serapan
Tabel 3.3	Tingkat Indeks emisi
Tabel 3.4	Pengelompokan Prioritas Lokasi untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengelolaan Hutan Berdasarkan Nilai IPL
Tabel 3.5	Indek Prioritas Lokasi Pelaksanaan FOLU Net Sink 2030
Tabel 3.6	Indeks Prioritas Lokasi dan Indeks Jasa Lingkungan Provinsi Lampung
Tabel 3.7	Indeks Kelembagaan Provinsi Lampung
Tabel 3.8	Areal Pelaksanaan Aksi Mitigasi IFNET 2030 Per Fungsi Kawasan Hutan di Provinsi Lampung
Tabel 3.9	Areal Pelaksanaan Aksi Mitigasi IFNET 2030 Per Kabupaten di Provinsi Lampung
Tabel 3.10	Areal Pelaksanaan Aksi Mitigasi IFNET 2030 Per KPH di Provinsi Lampung

Tabel 3.11	Luas Areal RO1 - Pencegahan Deforestasi Mineral per Kabupaten dan Fungsi Kawasan
Tabel 3.12	Luas Areal RO1 - Pencegahan Deforestasi Mineral pada KPH per Kabupaten dan Fungsi Kawasan
Tabel 3.13	Rencana Kerja Operasional Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi Meneral (RO1) oleh UPT KLHK
Tabel 3.14	Rencana Aksi Mitigasi RO-1 dari Dinas Kehutanan [KPH] di Provinsi Lampung
Tabel 3.15	Rencana Aksi Mitigasi RO-1 dari OPD Terkait [OPD Non-Kehutanan] di Provinsi Lampung
Tabel 3.16	Luas Areal RO5 - Penerapan Pengayaan Hutan Alam per Kabupaten dan Fungsi Kawasan
Tabel 3.17	Luas Areal RO5 - Penerapan Pengayaan Hutan Alam pada KPH per Kabupaten dan Fungsi Kawasan
Tabel 3.18	Rencana Kerja Operasional Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan (RO5) oleh UPT KLHK
Tabel 3.19	Rencana Kerja Operasional Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan (RO5) oleh Dinas Kehutanan [KPH]
Tabel 3.20	Luas Areal RO6 - Penetapan RIL-C per Kabupaten dan Fungsi Kawasan
Tabel 3.21	Luas Areal RO6 - Penetapan RIL-C pada KPH per Kabupaten dan Fungsi Kawasan
Tabel 3.22	Luas Areal RO6 - Penetapan RIL-C pada PBPH per KPH
Tabel 3.23	Aksi Mitigasi RO-6 yang diampu oleh UPT Kementerian KLHK di Provinsi Lampung
Tabel 3.24	Aksi Kititigas RO-6 yang diampu oleh Dinas Kehutanan [KPH] di Provinsi Lampung
Tabel 3.25	Aksi Kititigas RO-6 yang diampu oleh OPD Terkait di Provinsi Lampung
Tabel 3.26	Luas Areal RO7 - Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi per Kabupaten dan Fungsi Kawasan
Tabel 3.27	Luas Areal RO7 - Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi pada KPH per Kabupaten dan Fungsi Kawasan
Tabel 3.28	Luas Areal RO7 – Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi pada PBPH per KPH
Tabel 3.29	Luas Areal RO7 – Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi pada PPKH per KPH
Tabel 3.30	Rencana Operasional Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi (RO7) oleh UPT KLHK di Provinsi Lampung

Tabel 3.31	Rencana Aksi Mitigasi RO-7 yang dilakuakn oleh Dinas Kehutanan [KPH] di Provinsi Lampung
Tabel 3.32	Luas Areal RO8 - Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi per Kabupaten dan Fungsi Kawasan
Tabel 3.33	Luas Areal RO8 - Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi pada KPH per Kabupaten dan Fungsi Kawasan
Tabel 3.34	Luas Areal RO8 - Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi pada PBPH per KPH
Tabel 3.35	Luas Areal RO8 - Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi pada PBPH per KPH
Tabel 3.36	Rencana Operasional Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa (Non) Rotasi (RO8) oleh UPT KLHK
Tabel 3.37	Rencana Aksi Mitigasi RO8 yang diampu oleh Dinas Kehutanan [KPH] di Provinsi Lampung
Tabel 3.38	Rencana Aksi Mitigasi RO8 yang diampu oleh OPD Teknis di Provinsi Lampung
Tabel 3.39	Luas Areal RO10 - Pelaksanaan Restorasi Gambut per Kabupaten dan Fungsi Kawasan di Provinsi Lampung
Tabel 3.40	Rencana Aksi Mitigasi Pelaksanaan Restorasi Gambut (RO-10) oleh UPT di Lingkungan KLHK
Tabel 3.41	Rencana Aksi Mitigasi Pelaksanaan Restorasi Gambut (RO-10) oleh OPD Terkait di Provinsi Lampung
Tabel 3.42	Luas Areal RO11 - Perlindungan Areal Konservasi Tinggi per Kabupaten dan Fungsi Kawasan
Tabel 3.43	Luas Areal RO11 - Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada PPKH per KPH
Tabel 3.44	Luas Areal RO11 - Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada PPKH per KPH
Tabel 3.45	Tabel Rencana Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove [RO-12] oleh unit di lingkungan KLHK
Tabel 3.46	Rencana Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove [RO-12] oleh Dinas Kehutanan [KPH] Terkait di Provinsi Lampung
Tabel 3.47	Luas Areal RO12 - Pengelolaan Mangrove per Kabupaten dan Fungsi Kawasan
Tabel 3.48	Rencana Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove [RO-12] oleh unit di lingkungan KLHK

- Tabel 3.49** Rencana Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove [RO-12] oleh Dinas Kehutanan [KPH] di Provinsi Lampung
- Tabel 3.50** Rencana Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove [RO-12] oleh OPD Terkait di Provinsi Lampung
- Tabel 4.1** Rencana Pendanaan Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral [RO1] oleh Unit di Lingkungan KLHK
- Tabel 4.2** Rencana Pendanaan Aksi Mitigasi RO-1 yang bersumber dari Dinas Kehutanan [KPH] Provinsi Lampung
- Tabel 4.3** Rencana Pendanaan Aksi Mitigasi RO-1 yang bersumber dari OPD Terkait di Provinsi Lampung
- Tabel 4.4** Rencana Pendanaan Penerapan Pengayaan Hutan Alam [RO-5] oleh UPT KLHK di Provinsi Lampung
- Tabel 4.5** Rencana Pendanaan Penerapan Pengayaan Hutan Alam [RO-5] oleh Dinas Kehutanan [KPH] Provinsi Lampung
- Tabel 4.6** Rekapitulasi Rencana Kegiatan dan Pencanaan Aksi Mitigasi RO 6, 7 dan 8 (Hektar dan Juta Rupiah) oleh UPT KLHK dan Dinas-dinas Non Kehutanan
- Tabel 4.7** Rincian Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi Pengelolaan Hutan Lestari (RO6) oleh UPT KLHK
- Tabel 4.8** Rincian Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi Pengelolaan Hutan Lestari Non Kehutanan (RO6) oleh Dinas Kehutanan [KPH]
- Tabel 4.9** Rincian Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi Pengelolaan Hutan Lestari Non Kehutanan (RO6) oleh OPD Terkait di Provinsi Lampung
- Tabel 4.10** Rincian Pendanaan RO Aksi Mitigasi dengan Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi (RO7) oleh UPT KLHK
- Tabel 4.11** Tabel 4.12. Rincian Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi dengan Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi Non Kehutanan (RO7) oleh Dinas Kehutanan [KPH]
- Tabel 4.12** Rincian Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi dengan Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi Non Kehutanan (RO7) oleh Dinas-dinas Non Kehutanan
- Tabel 4.13** Rencana Pendanaan Operasional Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa (Non) Rotasi (RO8) oleh UPT KLHK
- Tabel 4.14** Rencana Pendanaan Operasional Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa (Non) Rotasi Non Kehutanan (RO8) oleh Dinas Kehutanan [KPH]

<u>Tabel 4.15</u>	Rencana Pendanaan Operasional Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa (Non) Rotasi Non Kehutanan (RO8) oleh Dinas-dinas Non-Kehutanan Provinsi Lampung
<u>Tabel 4.16</u>	Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi Restorasi Gambut [RO-9] dari KLHK
<u>Tabel 4.17</u>	Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi Restorasi Gambut [RO-9] dari OPD Provinsi Lampung
<u>Tabel 4.18</u>	Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi Konservasi Kenakeragaman Hayati dari KLHK
<u>Tabel 4.19</u>	Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi Konservasi Kenakeragaman Hayati oleh Dinas Kehutanan [KPH] Provinsi Lampung
<u>Tabel 4.20</u>	Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove [RO-12] dari UPT KLH
<u>Tabel 4.21</u>	Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove [RO-12] dari OPD Terkait di Provinsi Lampung
<u>Tabel 4.22</u>	Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove [RO-12] dari OPD Kehutanan (KPH) Provinsi Lampung

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Logical Framework Keterkaitan Forest dan Other Land Use dan Implikasinya pada Pengendalian Perubahan Iklim
Gambar 2.1	Peta Wilayah Provinsi Lampung
Gambar 2.2	Sebaran Luas Kabupaten/Kota
Gambar 2.3.	Struktur Kependudukan Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota
Gambar 2.4	Piramida Penduduk Provinsi Lampung
Gambar 2.5	Alur Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Lampung
Gambar 2.6.	Penutupan lahan Provinsi Lampung
Gambar 2.7	Lahan yang berhutan dan tidak berhutan di Provinsi Lampung
Gambar 2.8	Skema Perijinan Pemanfaatan Hutan di Provinsi Lampung
Gambar 2.9	Sebaran Deforestasi di Provinsi Lampung
Gambar 2.10	Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Q to Q (%) Triwulan 1 2022
Gambar 2.11	Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Triwulan 1-2021, Triwulan IV-2021 dan Triwulan 1-2022

- Gambar 2.12** Rata-rata NTP Provinsi Lampung (2018=100), Q1-2021 sd Q1-2022
- Gambar 2.13** Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Lampung 2017-2021
- Gambar 2.14** Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung 2017-2021
- Gambar 2.15** Jumlah Penduduk Lampung (000 jiwa) Berdasarkan Hasil Sensus
- Gambar 2.16** Persentase Penduduk Lampung yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
- Gambar 3.1** Analisis Spasial Penentuan Prioritas Lokasi, Program/Kegiatan, dan Pola Pelaksanaan Kegiatan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca menuju FOLU Net Sink 2030
- Gambar 3.2** Analisis Spasial Arahan Optimasi Kawasan Hutan Berdasarkan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi
- Gambar 3.3** Diagram Alur Penyusunan Aksi Mitigasi
- Gambar 3.4** Peta Arahan Pelaksanaan Mitigasi Indonesia FOLU Net Sink 2030 Provinsi Lampung
- Gambar 3.5.** Sebaran Areal RO1 - Pencegahan Deforestasi Meneral di Provinsi Lampung
- Gambar 3.6.** Sebaran areal RO5 - Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Provinsi Lampung
- Gambat 3.7** Sebaran Areal RO6 - Penetapan RIL-C di Provinsi Lampung
- Gambar 3.8** Sebaran Areal RO7 - Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Provinsi Lampung
- Gambar 3.9** Sebaran Areal RO8 - Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Lampung
- Gambar 3.10** Sebaran Areal RO10 - Pelaksanaan Restorasi Gambut di Provinsi Lampung
- Gambar 3.11** Sebaran Areal RO11 - Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Provinsi Lampung
- Gambar 3.12** Sebaran Areal RO12 – Pengelolaan Mangrove di Provinsi Lampung
- Gambar 5.1** Mekansime Monitoring dan Evaluasi emisi GRK
- Gambar 6.1** Keterkaitan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dengan Indikator Makro dalam Konteks Pembangunan Nasional dan Daerah



BAB 01



PENDAHULUAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim merupakan ancaman yang sangat besar bagi tatanan kehidupan global dan merupakan salah satu aksi dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk pembangunan berkelanjutan rendah karbon dan berkeadilan. Hal ini disebabkan karena perubahan iklim akan berdampak nyata pada kenaikan suhu bumi sehingga akan mempengaruhi perubahan lingkungan dan kehidupan manusia, seperti musim kemarau yang berkepanjangan, pola curah hujan yang tidak teratur dan ekstrim, hingga suhu ekstrim yang dapat mempengaruhi produksi pangan pada lahan pertanian, menurunnya kuantitas air, ekosistem hutan dan kesehatan.

Perubahan iklim yang terjadi secara global dan tali temali antar region, negara dan daerah telah berdampak *negative* yang sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi yang sangat signifikan dari waktu ke waktu memiliki risiko dan dampak yang semakin berat. Laporan Badan Meteorologi Internasional/*World Meteorological Organization* [WMO] pada pertengahan Mei 2022 menyebutkan tingkat pemanasan bumi akibat naiknya level karbon dioksida [CO₂] dan metana [CH₄] di atmosfer mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan.

WMO (2022) melaporkan secara global suhu rata-rata dunia tahun lalu berada pada angka 1,1 derajat Celsius atau di atas suhu rata-rata dunia pada era pra-industri. Angka ini telah mendekati ambang batas 1,5 derajat Celsius, batasan tertinggi suhu global untuk melindungi dunia dari bencana iklim yang lebih luas. Perubahan suhu global tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi tetapi juga mengubah sistem iklim yang memengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia, seperti kualitas dan kuantitas air, habitat, hutan, kesehatan, lahan pertanian dan ekosistem wilayah pesisir.

Fenomena perubahan iklim menjadi ancaman yang paling serius terhadap ketahanan pangan global [*global food security*] di mana cuaca ekstrim sangat memengaruhi capaian hasil produksi pertanian dan peternakan di berbagai negara. Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (2022) menunjukkan sistem pangan berkontribusi terhadap 21-37% dari total emisi gas rumah kaca. Emisi yang disebabkan sistem pangan terdiri atas 9-14% terkait kegiatan produksi tanaman dan ternak, 5-14% berkaitan penggunaan dan konversi lahan, serta 5-10% berasal dari aktivitas rantai pasok pangan. Sebaliknya, perubahan iklim juga telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan produksi pangan secara global dalam 50 tahun terakhir dan memperparah masalah akses pangan masyarakat global (IPCC, 2022).

Berbagai laporan internasional menunjukkan dalam beberapa dekade terakhir dan diprediksi akan terus terjadi pada masa mendatang adalah problematika kemampuan dan stabilitas berbagai negara di dunia untuk dapat menjamin kebutuhan pangan, air dan energi bagi seluruh penduduknya (Subejo, 2022). Sebuah Laporan Kolaborasi FAO, IFAD, UNICEF, WFP dan WHO (2021) memperkirakan sekitar 720-811 juta orang di dunia menghadapi kelaparan pada tahun 2020 atau 61 juta orang lebih banyak dibandingkan tahun 2019, hampir 2,37 miliar orang tidak memiliki akses pangan yang cukup atau terjadi peningkatan 320 juta

orang hanya dalam waktu satu tahun.

Upaya peningkatan cadangan karbon merupakan langkah strategis dan taktis untuk dapat menurunkan gas rumah kaca (GRK) yang pada akhirnya dapat menjadi strategi pengendalian perubahan iklim terkait dengan inter relasi antara sektor kehutanan (*Forest*) dan penggunaan lahan yang lainnya (*Other Land Use-OLU*). Oleh karena strategi mitigasi perubahan iklim melalui *Forest and Other Land Use* (FOLU) memiliki urgensi yang tinggi baik pada tataran global maupun nasional. Upaya menjaga kondisi dan eksistensi *Forest* dapat berfungsi optimal sangat dipengaruhi pada aspek di luar *forest*, jika aspek di luar *forest* mengalami dinamika sehingga memberikan tekanan yang hebat pada *forest* maka fungsi *forest* akan terganggu dan berimplikasi langsung pada kemampuannya dalam meningkatkan cadangan karbon. Demikian juga pada sektor non-kehutanan yang memiliki potensi menambah cadangan karbon misalnya dengan pola intensifikasi pekarangan, intensifikasi pertanian, pola tumpang sari [*mixed cropping*] kayu dan tanaman pangan, kayu dan perkebunan yang dikelola dengan eksternal input rendah akan dapat menjamin tutupan lahan terjadi sepanjang tahun sangat potensial untuk menyerap karbon serta dapat memberikan sumber penghidupan (*livelihood*) sehingga tekanan pada penggunaan lahan hutan dapat menurun. Sektor non-pertanian juga memiliki kaitan baik secara langsung maupun dalam jangka waktu singkat (*short-term*) maupun jangka panjang (*long-term*) tidak langsung misalnya upaya pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah/UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata juga dapat menjadi sumber *livelihood* yang baik, penyerap tenaga yang menurunkan pengangguran serta menjadi *social safety net* bagi kemiskinan masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan yang juga akan berimplikasi minimnya tekanan pada sektor *forest*. *Logical framework* keterkaitan atau inter relasi antara *Forest dan Other Land Use* serta implikasinya pada peningkatan cadangan karbon, penurunan emisi GRK serta pengendalian perubahan iklim secara skematis disajikan pada Gambar 1.1.

Berkenaan dengan berbagai dampak negatif perubahan iklim global, Indonesia mempunyai komitmen nasional untuk penanganan perubahan iklim global sesuai dengan Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim. Komitmen Indonesia tersebut kemudian dituangkan dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang memuat target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Dalam dokumen NDC, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% jika ada dukungan internasional dari kondisi tanpa ada aksi (*business as usual*) pada tahun 2030 melalui sektor kehutanan (17,2%), energi (11%), pertanian (0.32%), industri (0.10%), dan limbah (0.38%). Oleh karena itu jika penurunan emisi berasal dari sektor kehutanan dan energi dapat dioptimalkan maka diperkirakan dapat menurunkan emisi sebesar 97% dari target yang akan dicapai pada tahun 2030. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah strategis di beberapa sektor yaitu *Forestry and Other Land Uses* (FOLU), energi, pertanian, pengolahan limbah, serta *Industrial Process and Product Uses* (IPPU).



Gambar 1.1. Logical Framework Keterkaitan Forest dan Other Land Use [FoLU] dan Implikasinya pada Pengendalian Perubahan Iklim

Indonesia FoLU Net-Sink 2030 merupakan komitmen Pemerintah Indonesia untuk penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya atau FoLU (*Forestry and other Land Use*) yang tertuang dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang “Indonesia’s Forestry And Other Land Use (Folu) Net Sink 2030” untuk Pengendalian Perubahan Iklim. Impelementasi ini merupakan bagian untuk mencapai NDC Indonesia bersama-sama dengan sektor lain. Dalam dokumen tersebut juga disebutkan bahwa sektor *Forestry and Other Land Use* (FoLU) atau sektor kehutanan dan lahan, diproyeksikan memberikan kontribusi sebesar 58% dari total target penurunan emisi GRK. Hal ini menunjukkan bahwa sektor kehutanan mempunyai peranan strategis dalam dalam penurunan emisi dan merupakan bagian penting dalam agenda *climate actions global*. Berkenaan dengan hal tersebut maka implementasi *FoLU Net Sink* 2030 salah satunya dilaksanakan di Provinsi Lampung.

Sebagaimana dimandatkan dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2011 bahwa aksi penurunan GRK tidak hanya dilakukan pada tingkat pusat saja, namun pemerintah provinsi dan kabupaten juga dituntut berkontribusi nyata dalam aksi penurunan GRK. Peran serta daerah dalam penurunan GRK tersebut dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Penurunan GRK (RAD-GRK) yang merujuk pada dokumen RAN-GRK.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32A Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 17,159 jt t CO₂e atau sebesar 38,59 % dari total Business As Usual Provinsi Lampung Tahun 2020 sebesar 27,9 jt tCO₂e dan ini berarti bahwa komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sudah on the track dalam upaya mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK secara Nasional.

Secara teknokratis, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah memasukkan isu-isu strategis dampak perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca sebagai isu penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 dan Perubahan RPJMD 2019-2024 sehingga menjadi pertimbangan berbagai perencanaan program pembangunan daerah. Selain itu juga beberapa program dan kegiatan pembangunan daerah tertentu yang dirancang sebagai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengimplementasikan rencana aksi mitigasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 A Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung dan menuangkannya dalam kegiatan Organisasi Perangkat Daerah [OPD] terkait setiap tahunnya. Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga berupaya agar program dan kegiatan Penurunan Emisi GRK ini menjadi prioritas dalam RKPD Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota setiap tahunnya.

Selanjutnya setelah menjadi kegiatan (DPA) OPD, secara periodik, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Pokja RAD GRK akan melakukan identifikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap capaian pelaksanaan RAD GRK di Provinsi Lampung sehingga bisa dilihat capaian tiap sektor penurunan emisi GRK dan bisa juga dilakukan penilaian terhadap capaian penurunan emisi apakah sesuai dengan target ataupun perlu dilakukan upaya-upaya optimasi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan RAD-GRK Provinsi Lampung ditangani oleh Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi, Kelompok Kerja, dan Kesekretariatan

Tim untuk Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (POKJA RADGRK) Provinsi Lampung melalui Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/56/VI.01/HK/2020. Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian target penurunan emisi GRK dalam RAN dan RADGRK serta untuk meningkatkan efektivitas implementasi aksi mitigasi penurunan emisi GRK, diperlukan penyusunan Dokumen RAD-GRK serta dapat dikaji ulang. Hal ini merupakan proses yang telah diamanatkan dalam Pasal 9 PERPRES 61 Tahun 2011, dimana disebutkan bahwa RAN-GRK dapat dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan dinamika internasional.

1.2 Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana kerja Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Sub-nasional Lampung adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan peta spasial untuk implementasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di Sub-nasional Lampung
- 2) Menetapkan rencana kerja program penurunan emisi karbon untuk mempercepat ketercapaian *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Sub-nasional Lampung
- 3) Penguatan kebijakan untuk pengendalian emisi untuk mencapai *Indonesia's FOLU Net*

Sink 2030 Sub-nasional Lampung

- 4) Identifikasi peran para pihak, mitra-mitra dan peluang strategi pendanaan dalam rencana, kebijakan, program dan kegiatan terkait pengendalian emisi untuk mencapai *Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Sub-nasional Lampung*

1.2.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 adalah tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030, mendukung net zero emission sektor kehutanan dan guna memenuhi NDC yang menjadi kewajiban nasional Indonesia sebagai kontribusi bagi agenda perubahan iklim global, dengan memperhatikan visi Indonesia yang lebih ambisius dalam dokumen LTS-LCCR

1.3 Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Sub-nasional Lampung adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573));
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7) Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim);
- 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 9) Peraturan Pemerintah; Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 5957);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6518) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 16) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 17) Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
- 18) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249)
- 19) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 338);
- 20) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
- 21) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 6 Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
- 22) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang

- Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
- 23) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
- 24) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1387);
- 25) Peraturan Gubernur Lampung No. 32 A tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung;
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 6 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pengendalian Kawasan Hutan di Provinsi Lampung;
- 27) Dokumen Kaji Ulang Aksi Penurunan Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung, Pokja RAD- GRK Provinsi Lampung Tahun 2021;
- 28) Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
- 29) Peraturan Daerah No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
- 30) Keputusan Gubernur Lampung No. G/609/V.24/HK/2022 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Kerja INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE NET SINK 2030 Sub Nasional Provinsi Lampung.

BAB 02



**RENCANA KERJA AKSI MITIGASI 2022 –
2030 DAN PENDANAAN SUB NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

BAB II. KONDISI UMUM WILAYAH DAN KONDISI KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

2.1. Deskripsi Wilayah Provinsi Lampung

2.1.1. Kondisi Geografis dan Topografis

Cakupan wilayah Provinsi Lampung meliputi areal dataran seluas 33.553,55 Km² termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatera. Wilayah Provinsi Lampung secara geografis dibatasi oleh:

- Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, di Sebelah Utara
- Selat Sunda, di Sebelah Selatan
- Laut Jawa, di Sebelah Timur
- Samudra Indonesia, di Sebelah Barat



Gambar 2.1. Peta Wilayah Provinsi Lampung

Sumber: Diadaptasi dari <https://lampung.bpk.go.id/peta-wilayah/>

Provinsi Lampung dengan Ibukota Bandar Lampung merupakan gabungan dari kota kembar Tanjung Karang dan Teluk Betung memiliki wilayah yang relatif luas, dan memiliki berbagai potensi sumberdaya alam termasuk potensi kelautan dan kehutanan yang sangat strategis. Pelabuhan utama Provinsi Lampung ada di Panjang dan Bakauheni serta Pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (Telukbetung), Tarahan, dan Kalianda di Teluk Lampung. Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung, dan di Laut Jawa terdapat pula pelabuhan nelayan seperti Labuhan Maringgai dan Ketapang. Di samping itu, Kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, Adapun di Samudra Indonesia terdapat Pelabuhan Krui.

Secara Geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan sebagai berikut:

- Timur - Barat berada antara: 103 ° 40'-105 50' Bujur Timur
- Utara - Selatan berada antara: 6 ° 45'- 3 ° 45' Lintang Selatan

Secara topografi daerah Provinsi Lampung dapat dibagi dalam 5 (lima) unit topografi dengan rincian sebagai berikut:

- Daerah topografis berbukit sampai bergunung
- Daerah topografis berombak sampai bergelombang
- Daerah dataran alluvial
- Daerah dataran rawa pasang surut
- Daerah River Basin

Daerah topografis berbukit sampai bergunung. Lereng-lereng yang curam atau terjal dengan kemiringan berkisar 25%, dan ketinggian rata-rata 300 M diatas permukaan laut [mdpl]. Daerah ini meliputi Bukit Barisan dengan puncak tonjolan tonjolannya berada pada Gunung Tanggamus, Gunung Pasawaran, dan Gunung Rajabasa. Lokasi yang terakhir ini berlokasi di Kalianda dengan ketinggian, rata-rata 1.500 M. Puncak-puncak lainnya adalah Bukit Pugung, Bukit Pesagi, Sekincau yang terdapat di bagian utara. Daerah tersebut umumnya ditutupi oleh vegetasi hutan primer atau sekunder.

Daerah topografis berombak sampai bergelombang. Ciri-ciri khusus daerah ini adalah terdapatnya bukit-bukit sempit, kemiringannya antara 8 % sampai 15 % dan ketinggian antara 300 mdpl sampai 500 mdpl. Daerah ini membatasi daerah pegunungan dengan dataran alluvial, vegetasi yang terdapat di daerah ini adalah tanaman-tanaman perkebunan seperti: kopi, cengkeh, lada dan tanaman pertanian peladangan seperti: padi,jagung, dan sayur-sayuran. Daerah tersebut meliputi daerah-daerah; Kedaton di wilayah Kota Bandar Lampung, Gedong Tataan di Kabupaten Lampung Selatan, Sukoharjo dan Pulau Panggung di Kabupaten Tanggamus serta Kalirejo dan Bangunrejo di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

Daerah dataran Alluvial. Daerah ini sangat luas meliputi Lampung Tengah sampai mendekati pantai sebelah Timur, yang merupakan Bagian hilir (downstream) dari sungai-sungai yang besar seperti Way Sekampung, Way Tulang Bawang, dan Way Mesuji. Ketinggian di daerah ini berkisar antara 25 m sampai 75 m, dengan kemiringan 0% sampai 3%. Pada bagian pantai sebelah Barat dataran Alluvial menyempit dan memanjang menurut arah Bukit Barisan.

Daerah dataran Rawa Pasang Surut. Di sepanjang pantai timur adalah merupakan daerah rawa pasang surut dengan ketinggian 1/2 mspl sampai 1 mdpl.

Daerah River Basin. Di wilayah Lampung terdapat 5 (lima) River Basin yang utama dengan rincian sebagai berikut:

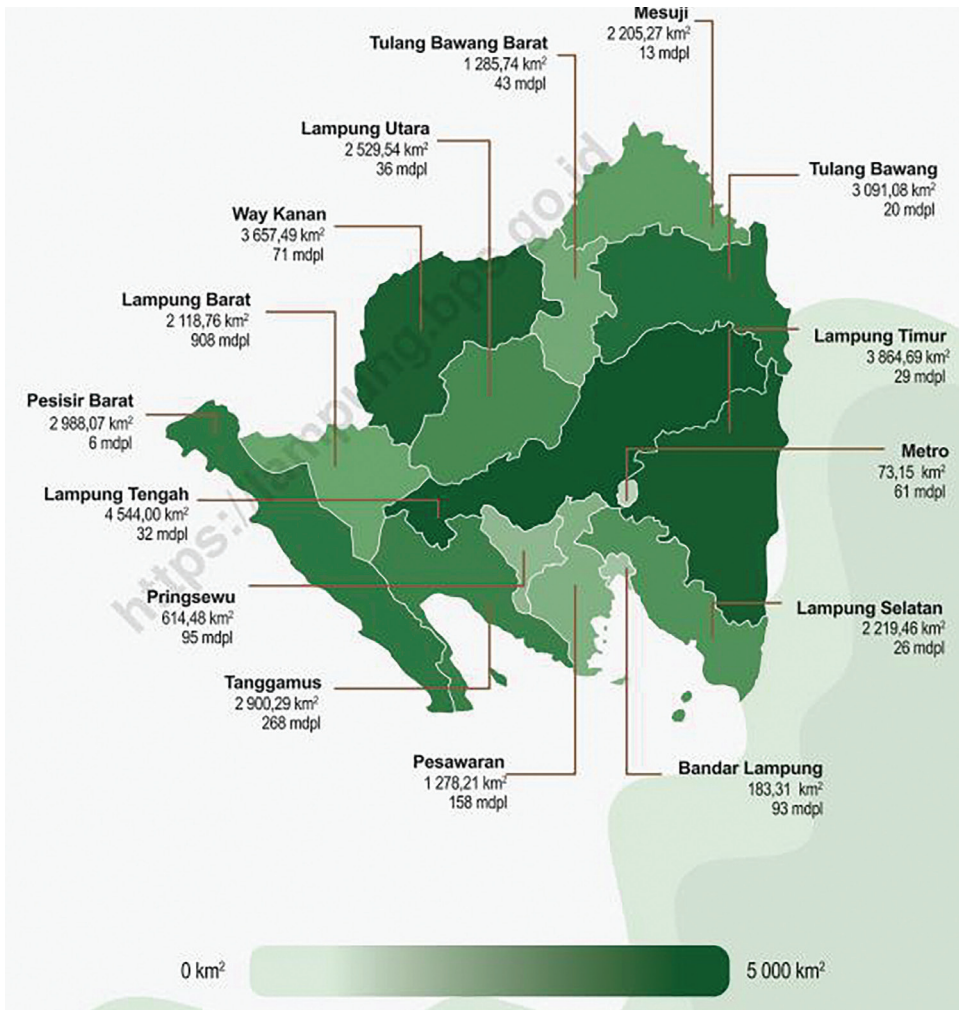
- River Basin Tulang Bawang
- River Basin Seputih
- River Basin Sekampung
- River Basin Semangka
- River Basin Way Mesuji

Secara administratif Provinsi Lampung dibagi dalam 13 Kabupaten dan 2 Kota, yang selanjutnya terdiri dari beberapa wilayah Kecamatan dengan perincian sebagai berikut:

- Kabupaten Lampung Barat dengan Ibukotanya Liwa, luas wilayahnya 2.142,78 Km² terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan.
- Kabupaten Tanggamus dengan Ibukotanya Kota Agung, luas wilayahnya 3.020,64 Km² Terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan.
- Kabupaten Lampung Selatan dengan Ibukotanya Kalianda, luas wilayahnya 700,32 Km² terdiri dari 7 (tujuh belas) kecamatan.
- Kabupaten Lampung Timur dengan Ibukotanya Sukadana, luas wilayahnya 5.325,03 Km² terdiri dari 24 (dua puluh empat) kecamatan.
- Kabupaten Lampung Tengah dengan Ibukotanya Gunung Sugih, luas wilayahnya 3.802,68 Km² terdiri dari 28 (dua puluh delapan) kecamatan.
- Kabupaten Lampung Utara dengan Ibukotanya Kotabumi, luas wilayahnya 2.725,87 Km² terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kecamatan.
- Kabupaten Way Kanan dengan Ibu kotanya Blambangan Umpu, luas wilayahnya 3.921,63 Km² terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan.
- Kabupaten Tulang Bawang dengan Ibukotanya Menggala, luas wilayahnya 3 466,32 Km² terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan.
- Kabupaten Pesawaran dengan Ibukota Gedong Tataan, luas wilayahnya 2.243,51 Km² terdiri dari 11 Kecamatan) kecamatan.
- Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu, luas wilayahnya 625,00 Km² terdiri 9 (sembilan) kecamatan.
- Kabupaten Mesuji dengan ibukota Mesuji, luas wilayahnya 2.184,00 Km² terdiri 7 (tujuh) kecamatan.
- Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan Jaya, luas wilayahnya 1.201,00 Km² tedriri 8 (delapan) kecamatan
- Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui, luas wilayahnya 2.907,23 Km² terdiri 11

(sebelas) kecamatan

- Kota Bandar Lampung dengan luas wilayah 296 Km² terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan.
- Kota Metro dengan luas wilayah 61,79 Km² terdiri dari 5 (lima) kecamatan



Gambar 2.2. Sebaran Luas Wilayah Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota (Sumber: Diadaptasi dari BPS Provinsi Lampung, 2022)

Berdasarkan kondisi topografi, Provinsi Lampung memiliki variasi topografi cukup beragam dimana jika dianalisis berdasarkan kategori desa pada tahun 2021 menunjukkan kategori wilayah desa dengan topografi datar (*flat*) paling dominan (2.037 desa), kategori topografi lereng/puncak (*slope*) sebanyak 616 desa dan desa dengan topografi lembah (*valley*) sebanyak 1 desa.

2.1.2. Kondisi Demografis

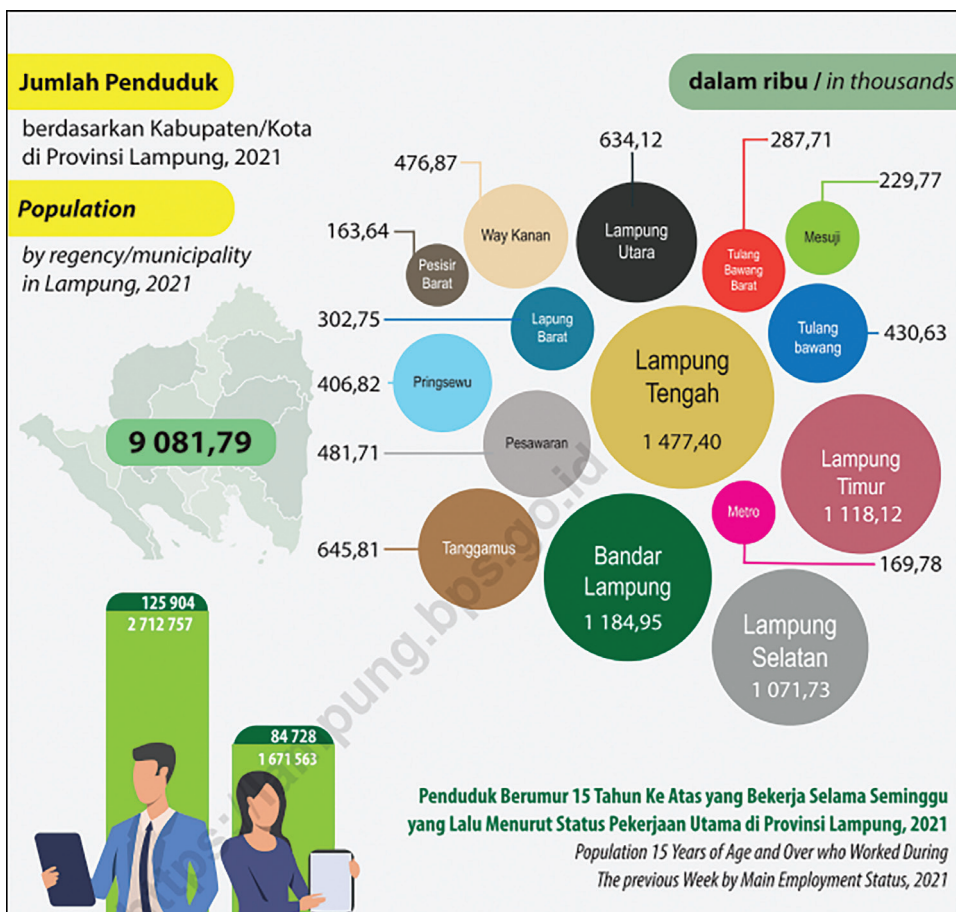
Total penduduk Provinsi Lampung sebagaimana dilaporkan pada tahun 2022 sebanyak 9.081.790 jiwa dengan lima besar jumlah penduduk kabupaten terbanyak adalah Lampung Tengah (1.477.400 jiwa), Bandar Lampung (1.184.950 jiwa), Lampung Timur (1.118.120 jiwa), Lampung Selatan (1.071.730 jiwa) dan Tanggamus (645.810 jiwa). Sedangkan wilayah dengan penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Pesisir Barat dengan populasi sebanyak 163.640 jiwa.

Berdasarkan struktur piramida penduduk di Provinsi Lampung, diketahui bahwa pola piramida penduduk cukup menonjol dimana pada usia paling muda sebagai dasar piramida proporsinya paling besar (kelompok umur 0-9 tahun), struktur relatif mengecil pada kelompok usia 10-19 tahun dan mulai kelompok umur 20 tahun sampai dengan 39 tahun struktur menggelembung, sedangkan untuk kelompok umur di atas 40 tahun proporsinya cenderung semakin mengecil.

Tabel 2.1. Topografi Desa di Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota

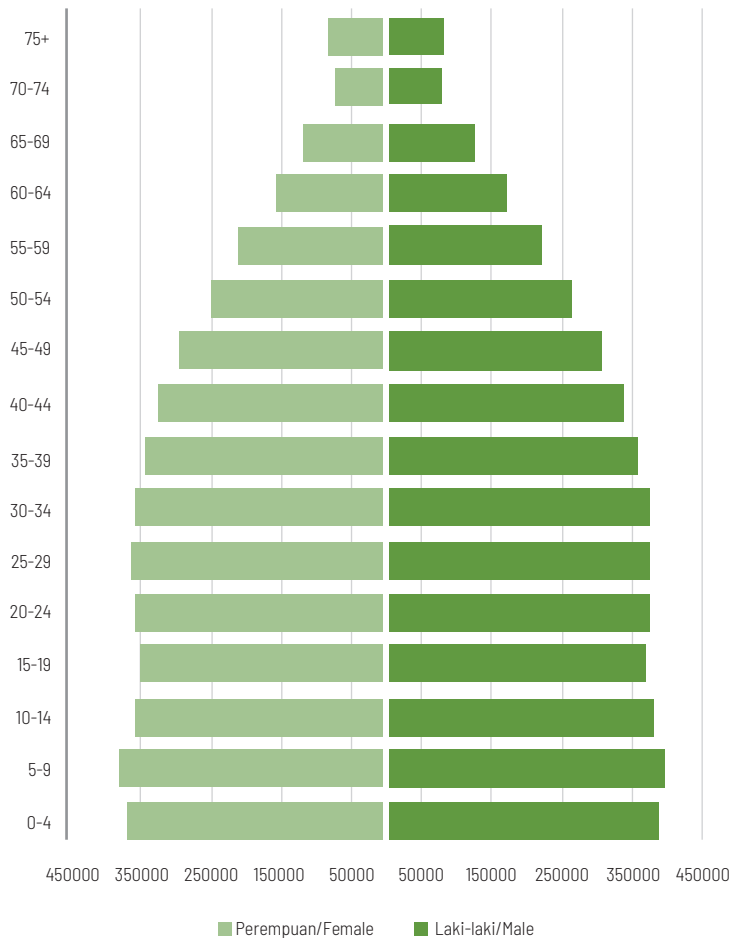
Kabupaten/ Kota Regency/ Municipality	Lembah Valley			Lereng/Puncak Slope			Dataran Flat		
	2014	2018	2021	2014	2018	2021	2014	2018	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lampung Barat	17	13		62	62	119	57	61	17
Tanggamus	27	1		60	73	75	215	228	227
Lampung Selatan	2		1	20	10	84	238	250	175
Lampung Timur					5	37	264	259	227
Lampung Tengah	3			8	7	11	296	307	303
Lampung Utara	2			24	21	17	221	226	230
Way Kanan	3	7		24	28	44	196	192	183
Tulang Bawang							151	151	151

Kabupaten/ Kota Regency/ Municipality	Lembah Valley			Lereng/Puncak Slope			Dataran Flat		
	2014	2018	2021	2014	2018	2021	2014	2018	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pasawaran	2	1		18	30	93	124	117	55
Pringsewu	3			5	1	2	123	130	129
Mesuji							105	105	105
Tulang Bawang Barat							96	103	103
Pesisir Barat				13	9	85	105	109	33
Kota Bandar Lampung	1	1		10	9	49	115	116	77
Kota Metro							22	22	22
Lampung	60	23	1	244	255	616	2.328	2.376	2



Catatan/Note: 'Data citra satelit yang sudah dikonfirmasi oleh aparat desa, Kategori Lereng/Puncak termasuk juga Tebing/Satellite image data that has been confirmed by village officials. The Slope category include Cliffs

Sumber/Source: BPS, Pendataan Potensi Desa (Pondes)/BPS-Statistic Indonesia, Village Potential Data Collection



Gambar 2.3. Struktur Kependudukan Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota (Sumber: Diadaptasi dari BPS Provinsi Lampung, 2022)

Gambar 2.4. Piramida Penduduk Provinsi Lampung (Sumber: Diadaptasi dari BPS Provinsi Lampung, 2022)

Data BPS Provinsi Lampung (2022) menggambarkan pada kondisi laporan tahun terakhir (2021) diketahui jumlah penduduk meningkat sebanyak 73.940 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020. Pertambahan penduduk yang cukup signifikan terjadi di Kabupaten Lampung Tengah, Bandar Lampung, Lampung Timur, Lampung Selatan dan Tanggamus yang memiliki kontribusi penting pada pertambahan penduduk di Lampung. Pertambahan penduduk yang cukup besar memiliki konsekuensi pada penyediaan berbagai fasilitas dan infrastruktur serta merubah pola pemanfaatan sumberdaya yang tersedia termasuk sumberdaya alam.

Dalam dua tahun terakhir menunjukkan angka pertumbuhan penduduk menurun dari 1,65% pada tahun 2020 menjadi 1,10% pada tahun 2021. Kondisi ini sedikit lebih rendah

dibandingkan dengan rerata pertumbuhan penduduk Indonesia yang berada pada angka 1,13%. Namun demikian, meskipun pertumbuhan penduduk di Provinsi Lampung lebih rendah dari rerata pertumbuhan nasional, namun karena total penduduk cukup besar mendekati 10 juta jiwa maka angka pertumbuhan penduduk yang ada tetap perlu menjadi perhatian dalam konteks relasi dengan pola pemanfaatan sumberdaya ekonomi yang tersedia pada masa-masa mendatang.

Lapangan usaha di Sektor A (pertanian, perikanan dan kehutanan) masih menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat di Provinsi Lampung dimana pada tahun 2021 jumlah penduduk yang bekerja dengan lapangan pekerjaan utama Sektor A (pertanian, perikanan dan kehutanan) sebanyak 1.843.505 orang yang terdiri dari 1.299.551 laki-laki dan 543.954 perempuan. Dikomparasikan dengan total orang berkarya di Provinsi Lampung sebesar 4.284.320 orang, maka proporsi kontribusi Sektor A sebesar 43,03%. Hal ini menunjukkan bahwa Sektor A (pertanian, perikanan dan kehutanan) masih memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam membangun dan menentukan struktur perekonomian Provinsi Lampung.

TABEL 2.2. | Perkembangan Penduduk Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	penduduk (ribu) Population (thousand)	
	2020	2021
1	2	3
Lampung Barat	302,14	302,75
Tanggamus	640,28	645,81
Lampung Selatan	1064,30	1071,73
Lampung Timur	1110,34	1118,12
Lampung Tengah	1460,05	1477,40
Lampung Utara	633,10	634,12
Way Kanan	473,58	476,87
Tulang Bawang	430,02	430,63
Pasawaran	477,47	481,71
Pringsewu	405,47	406,82

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	penduduk (ribu) Population (thousand)	
	2020	2021
1	2	3
Mesuji	227,52	229,77
Tulang Bawang Barat	286,16	287,71
Pesisir Barat	162,70	163,64
Kota Bandar Lampung	1166,07	1184,95
Kota Metro	168,68	196,78
Lampung	9007,85	9081,79

(Sumber: Diadaptasi dari BPS Provinsi Lampung, 2022)

TABEL 2.3. | Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2010-2020	2020-2021
1	4	5
Lampung Barat	0,83	0,27
Tanggamus	1,72	1,15
Lampung Selatan	1,50	0,93
Lampung Timur	1,50	0,93
Lampung Tengah	2,16	1,59
Lampung Utara	0,78	0,21
Way Kanan	1,50	0,93
Tulang Bawang	0,75	0,19

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2010-2020	2020-2021
1	4	5
Pasawaran	1,50	1,19
Pringsewu	0,75	0,45
Mesuji	1,89	1,32
Tulang Bawang Barat	1,29	0,72
Pesisir Barat	1,34	0,77
Kota Bandar Lampung	2,74	2,16
Kota Metro	1,65	0,87
Lampung	1,65	1,10

(Sumber: Diadaptasi dari BPS Provinsi Lampung, 2022)

TABEL 2.4. | Lapangan Usaha Penduduk Berdasarkan Sub-sektor di Provinsi Lampung

Lapangan Pekerjaan Utama Main Industry	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
1	2	3	4
A	1 299 551	543 954	1 843 505
B	21 960	2 136	24 096
C	254 531	143 384	397 915
D	6 161	633	6 749
E	8 046	2 414	10 460
F	249 970	1 040	251 010
G	390 207	439 121	829 328
H	145 072	3 247	148 319

Lapangan Pekerjaan Utama <i>Main Industry</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
1	2	3	4
I	58 138	136 677	194 815
J	12 341	4 887	17 228
K	13 507	10 524	24 031
L	1 114	459	1 573
M,N	18 735	6 162	24 897
O	96 478	35 806	132 284

TABEL 2.4. | Lapangan Usaha Penduduk Berdasarkan Sub-sektor di Provinsi Lampung (lanjutan)

Lapangan Pekerjaan Utama <i>Main Industry</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
1	2	3	4
P	57 899	127 422	185 321
Q	20 144	41 327	61 471
R,S,T,U	58 903	72 370	131 273
Jumlah/ Total	2 712 757	1 571 563	4 284 320

Catatan/Note:

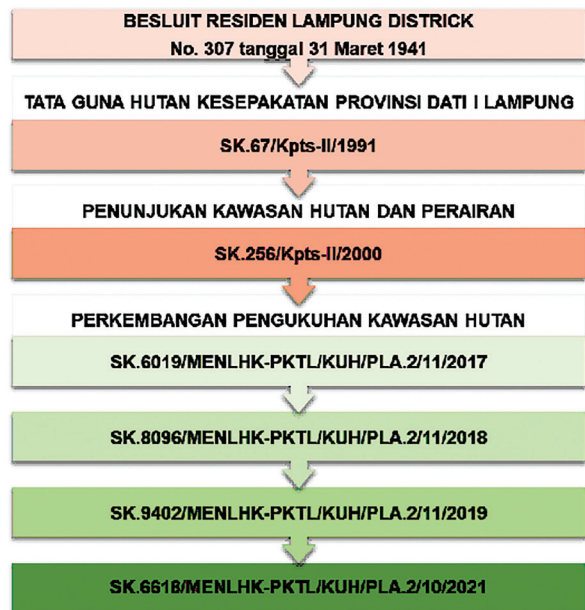
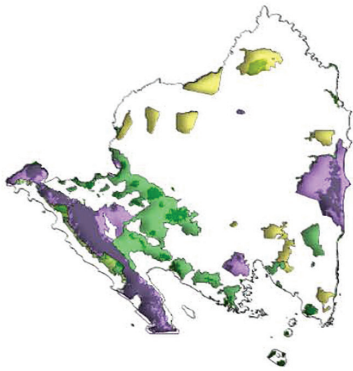
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing
B. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
C. Industri Pengolahan/Manufacturing
D. Pengadaan Listrik dan gas/Electricity and Gas
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang
F. Konstruksi/Construction
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicle, and Motorcycles
H. Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities
J. Informasi dan Komunikasi/Information and Communication
K. Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities
L. Real Estate/Real Estate Activities
M,N. Jasa Perusahaan/Business Activities
o. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defense, Compulsory Social Security
P. Jasa Pendidikan/Education
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities
R,S,T,U. Jasa Lainnya/Other Services Activities

Sumber/Source: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistic Indonesia, August National Labor Force Survey

2.1.3. Tata Guna Lahan

Luas Kawasan hutan di Provinsi Lampung sesuai SK Menhutbun No. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Lampung adalah seluas 1.004.735 ha yang terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas. Secara rinci luasan kawasan hutan di Provinsi Lampung sebagai berikut:

- Hutan Konservasi seluas 462.030 ha
- Hutan Lindung seluas 317.615 ha
- Hutan Produksi Terbatas seluas 33.358 ha
- Hutan Produksi Tetap seluas 191.732 ha



Gambar 2.5. Alur Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Lampung

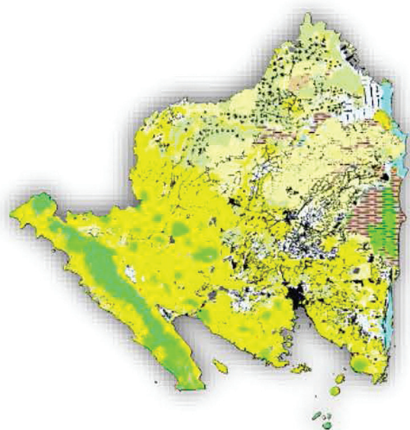
Sedangkan berdasarkan pemukhtahiran data kawasan hutan BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung s.d. Tahun 2022, luas Kawasan hutan dirinci sebagai berikut:

- Hutan Konservasi seluas 428.609,42 ha
- Hutan Lindung seluas 322.274,48 ha
- Hutan Produksi Terbatas seluas 28.924,90 ha
- Hutan Produksi Tetap seluas 168.832,27 ha

Berdasarkan data-data tersebut, maka total persentase kawasan hutan di Provinsi Lampung sebesar 28% dari total luas daratan di Provinsi Lampung.

2.2. Luas dan Perubahan Kawasan Hutan

Secara umum dilaporkan di Provinsi Lampung, lahan yang masih berhutan sebesar 10,02% sedangkan lahan dengan kondisi tidak berhutan 89,98%. Secara lebih khusus dilaporkan, sebesar 9,62% dari 10,02% lahan yang berhutan berada dalam kawasan hutan.



Gambar 2.6. Penutupan lahan Provinsi Lampung



Gambar 2.7. Lahan yang berhutan dan tidak berhutan di Provinsi Lampung

Data luas penutupan lahan secara lebih rinci dapat dkategorikan ke dalam 2 (dua) kategori yaitu lahan dengan yang berupa hutan (terdapat 7 kelas hutan) dan lahan dengan kelas non-hutan yang terbagi dalam 14 kategori.

TABEL 2.5 | Luas Penutupan Lahan di Provinsi Lampung

No	Penutupan Lahan	LUAS (Ha)	%
A. KELAS HUTAN			
1	Hutan Lahan Kering Primer	148 500	4,32
2	Hutan Lahan Kering Sekunder/Bekas Tebangan	143 000	4,16
3	Hutan Rawa Primer		
4	Hutan Rawa Sekunder/Bekas Tebangan	32 100	0,93
5	Hutan Mangrove Primer		

No	Penutupan Lahan	LUAS (Ha)	%
6	Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan	7300	0,21
7	Hutan Tanaman	13 400	0,39
B. KELAS NON HUTAN			
8	Semak Belukar	22 100	0,64
9	Semak Belukar Rawa	178 800	5,20
10	Savana/Padang Rumput		
11	Perkebunan/Kebun	341 100	9,93
12	Pertanian Lahan Kering	640 600	18,65
13	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	1 292 100	37,61
14	Transmigrasi	800	0,02
15	Sawah	274 100	7,98
16	Tambak	37 300	1,09
17	Lahan Terbuka	14 000	0,41
18	Pertambangan	300	0,01
19	Permukiman/Lahan Terbangun	281 200	8,19
20	Rawa	8 400	0,24
21	Bandara/Pelabuhan	300	0,01
TOTAL		3 435 400	100

Sumber : Buku Rekapitulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2020 KLHK

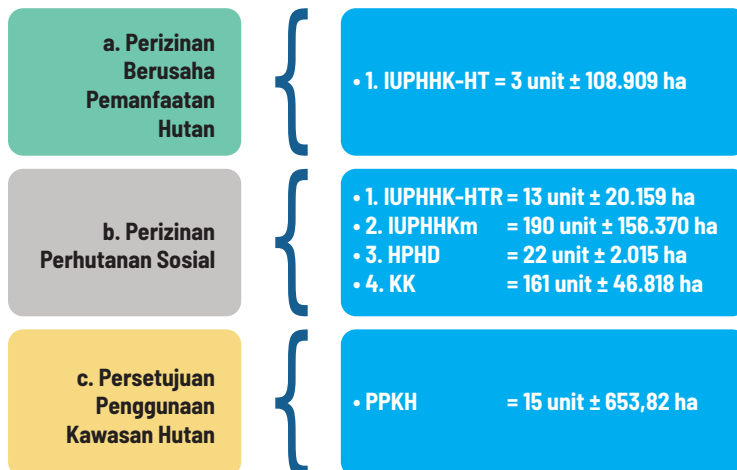
Total Kawasan hutan di Provinsi Lampung sebesar 330.550 ha dengan rincian HK seluas 253.300 ha, HL dengan luas 50.600 ha, HPT seluas 8.000 ha dan HP dengan total luas sebesar 330.500 ha. Secara rinci Kawasan hutan di Provinsi Lampung berdar 7 jenis penutupan lahan dan 4 kategori Kawasan hutan disajikan pada Tebl 2.6.

TABEL 2.6 | Luas Penutupan Lahan di dalam Kawasan Hutan di Provinsi Lampung

No	Penutupan Lahan	KAWASAN HUTAN					
		HK	HL	HPT	HP	JUMLAH	%
1	Hutan Lahan Kering Primer	144 600	2 200	1 000		147 900	4,31
2	Hutan Lahan Kering Sekunder/Bekas Tebangan	79 600	48 100	7 000		134 700	3,92
3	Hutan Rawa Primer						
4	Hutan Rawa Sekunder/Bekas Tebangan	31 700	100		100	31 900	0,93
5	Hutan Mangrove Primer						
6	Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan	2400	200			2600	0,08
7	Hutan Tanaman				13 400	13 400	0,39
Jumlah Hutan		253 300	50 600	8 000	13 500	330 500	9,62

Sumber : Buku Rekapitulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2020 KLHK

Pemanfaatan hutan dan perizinan yang ada di Provinsi Lampung dapat dikategorikan ke dalam 3 kategori yaitu: (a) perizinan berusaha pemanfaatan hutan, (b) perizinan perhutanan sosial dan (c) persetujuan penggunaan Kawasan hutan. Struktur perizinan pemanfaatan hutan di Provinsi Lampung secara rinci disajikan pada Gambar 2.8.



Sumber: a dan c = Data IGT KLHK Tahun 2022; b = Data PSKL Tahun 2022 Gambar 2.8. Skema Perizinan Pemanfaatan Hutan di Provinsi Lampung

2.3. Deforestasi di Provinsi Lampung

Deforestasi yang terjadi di Provinsi Lampung mencakup dua Jenis Kawasan yaitu (1) Kawasan Hutan dan (2) Area Penggunaan Lain (APL). Di Provinsi Lampung pernah terjadi deforestasi yang sangat masif dengan total luasan sebesar 16.700 ha tahun 2014-2015. Kondisi ini terus membaik hingga tahun 2019-2020 ketika deforestasi di Provinsi Lampung turun hingga 463,3 Ha.

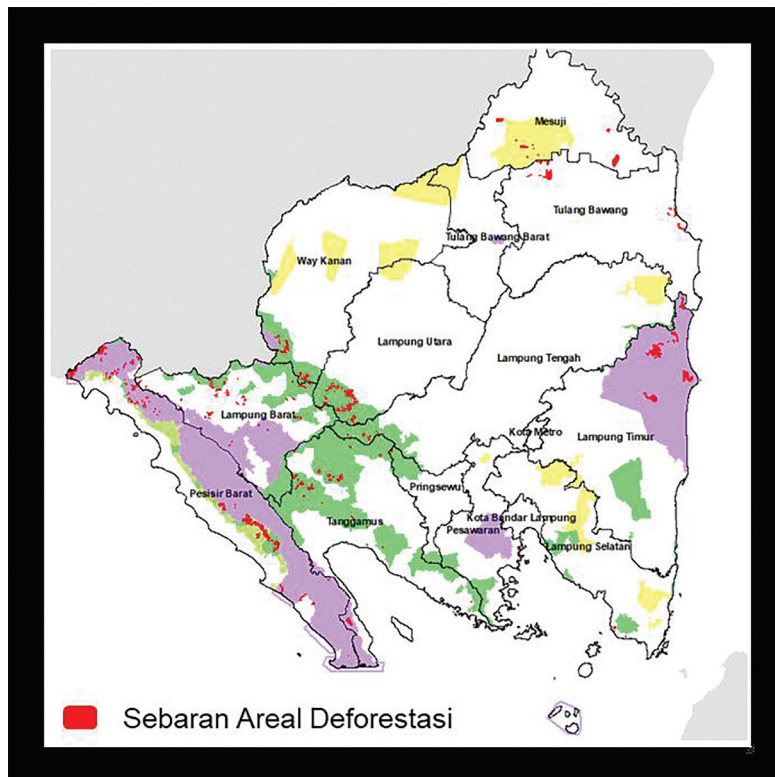
Berdasarkan kategori kawasan, deforestasi pada kawasan hutan lebih tinggi dibandingkan dengan pada APL. Selama periode 2013-2020, deforestasi paling luas pada kawasan hutan terjadi pada tahun 2014-2015 dengan luas 12.909 ha, berikutnya deforestasi yang lebih dari 1.000 ha terjadi pada tahun 2016-2017 seluas 2.989 ha, tahun 2015-2016 seluas 1.385 ha dan tahun 2017-2018 seluas 1.104 ha. Sedangkan pada tahun-tahun yang lain deforestasi kurang dari 1.000 ha. Pada Kawasan APL, deforestasi yang cukup besar terjadi tahun 2014-2015 seluas 3.790 ha dan tahun 2016-2017 seluas 1.430 ha.

Sebaran deforestasi di Provinsi Lampung secara visual disajikan pada Gambar 2.9, sedangkan sebaran deforestasi berdasarkan 2 tipe Kawasan menurut periode/tahun disajikan pada Tabel 2.7.

Gambar 2.9 Sebaran Deforestasi di Provinsi Lampung

TABEL 2.7. | Statistik Luas Deforestasi Netto Tahun 2013-2020 di Provinsi Lampung

Periode/Tahun	Deforestasi (Ha)		Total Deforestasi (Ha)
	Kawasan Hutan	APL (Areal Penggunaan Lain)	
Luas 2013-2014	197,8	0,2	98,00
Luas 2014-2015	12 909,9	3 790,3	16 700,20
Luas 2015-2016	1 384,1	-170,5	1 213,6
Luas 2016-2017	2 989,5	1 430,8	4 420,3
Luas 2017-2018	1 104,7	253,8	1 358,5
Luas 2018-2019	182,3	443,2	625,4
Luas 2019-2020	384,1	79,2	463,3



Sumber : BPS Prov Lampung dan Buku Deforestasi Indonesia Tahun 2013 – 2020 KLHK

2.4. Kontribusi sub-sektor Kehutanan [Ekonomi, Ekologi dan Sosial Budaya]

Pada bagian berikut akan diulas peran dan kontribusi sub-sektor kehutanan dalam konteks pembangunan wilayah berdasarkan aspek ekonomi, ekologi dan sosial-budaya. Sub- sektor kehutanan sebagai bagian dari sektor agro dalam arti luas atau perspektif makro, maka sub-sektor kehutanan memiliki multifungsi (sering dikenal dengan *multifunctionality of agriculture*) yang mencakup fungsi ekonomi, ekologi dan sosial-budaya. Multifungsi dan peran penting sektor agro secara global mulai direkognisi sejak dilaksanakannya Konferensi Bumi di Rio de Janeiro Brasil Tahun 1992.

Sehubungan dengan fungsi kegiatan sektor agro dalam arti luas, Huylenbrock, et., al., (2007) dalam Subejo (2012) mengkategorikan mereka ke dalam fungsi hijau (*green function*), layanan biru (*blue service*) dan layanan kuning (*yellow service*). Di antara fungsi hijau adalah pengelolaan lanskap, pemeliharaan keanekaragaman hayati dan pembuatan habitat satwa liar. Layanan biru meliputi pengelolaan air, perbaikan air kualitas dan pengendalian banjir. Jasa kuning dapat berupa kohesi dan vitalitas perdesaan, pemeliharaan warisan budaya, menciptakan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam, dan orientasi perubahan teknologi dan kelembagaan sedemikian rupa untuk memastikan pencapaian dan kepuasan

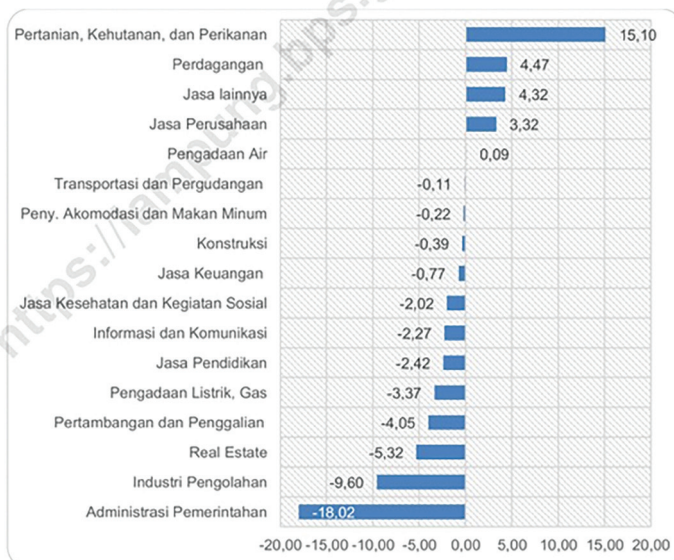
berkelanjutan kebutuhan manusia untuk generasi sekarang dan mendatang.

Multifungsionalitas sub-sektor kehutanan sangat sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diadvokasi oleh Badan Pangan Dunia FAO sejak tahun 1988 dimana pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang melestarikan tanah, air, sumber daya genetik tanaman dan hewan, tidak merusak lingkungan, sesuai secara teknis, layak secara ekonomi dan dapat diterima secara sosial, identitas daerah dan agrowisata lokal.

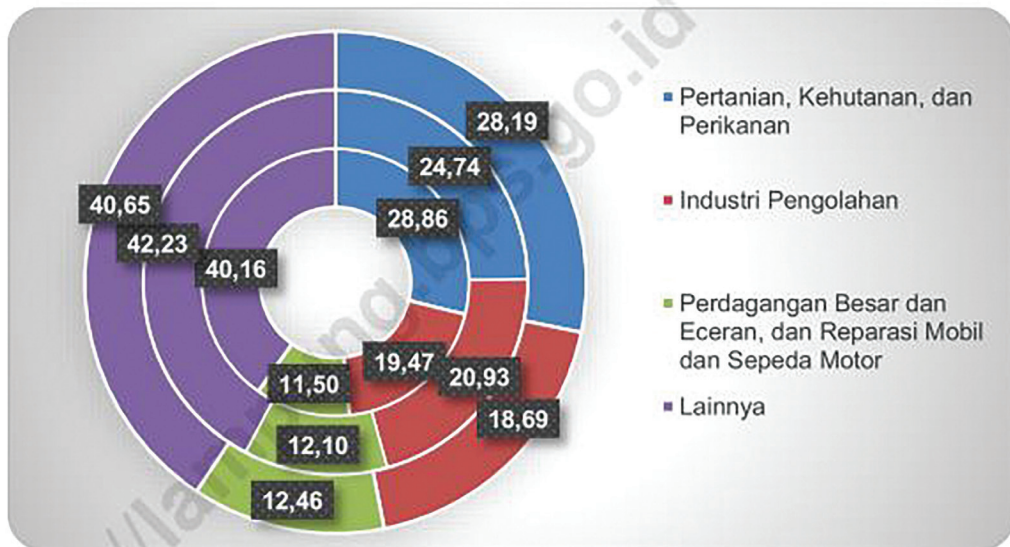
2.4.1 Kontribusi pada Aspek Ekonomi

BPS Lampung (2022) melaporkan pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan pada Triwulan 1 tahun 2022 menunjukkan angka pertumbuhan yang cukup dramatis yaitu sebesar 15,10% dimana dari 15 sektor ekonomi hanya ada 5 sektor yang pertumbuhannya positif. Pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan jauh di atas angka pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa yang tumbuhnya di bawah 5%.

Sedangkan peninjauan dari struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung, dilaporkan struktur PDRB menurut lapangan usaha (%) pada Triwulan 1-2021, Triwulan IV-2021 dan Triwulan 1-2022 secara umum diantara 3 sektor utama, proporsi paling besar masih ditempati oleh sektor agro [pertanian, perikanan dan kehutanan] dengan kontribusi pada Triwulan 1-2021, Triwulan IV-2021 dan Triwulan 1-2022 secara berturut-turut sebesar 27,5% dan 24,74% serta 28,19%. Sedangkan proporsi kontribusi 2 sektor utama lainnya yaitu industri pengolahan dan perdagangan masih dibawah 20%. Kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan pada PDRB Provinsi Lampung menggambarkan kinerja yang positif dan sumbangan sektor tersebut pada struktur perekonomian daerah dimana meskipun pada masa pandemi Covid-19 ternyata tetap mampu tumbuh positif serta secara makro memberikan kontribusi lebih dari 20%.



Gambar 2.10. Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Q to Q (%) Triwulan 1 2022 [Sumber: Diadaptasi dari BPS Lampung, 2022]



Keterangan: Lingkaran terdalam Triwulan I-2021, tengah Triwulan IV-2021 dan terluar Triwulan I-2022

Gambar 2.11. Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Triwulan 1-2021, Triwulan IV-2021 dan Triwulan 1-2022
[Sumber: Diadaptasi dari BPS Lampung, 2022]

Ditinjau dari besarnya PDRB, kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan juga cukup besar, berdasarkan harga konstan, rerata PDRB/kapita pada Triwulan 1-2021, Triwulan IV-2021 dan Triwulan 1-2022 secara berturut-turut sebesar 16,6 juta rupiah dan 14,32 juta rupiah serta 16,48 juta rupiah. Kontribusi ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan rerata atas total PDRB Provinsi Lampung yang terdiri dari 15 sektor ekonomi pada Triwulan 1-2021, Triwulan IV-2021 dan Triwulan 1-2022 secara berturut-turut sebesar 59,15 juta rupiah dan 60,32 juta rupiah serta 60,90 juta rupiah.

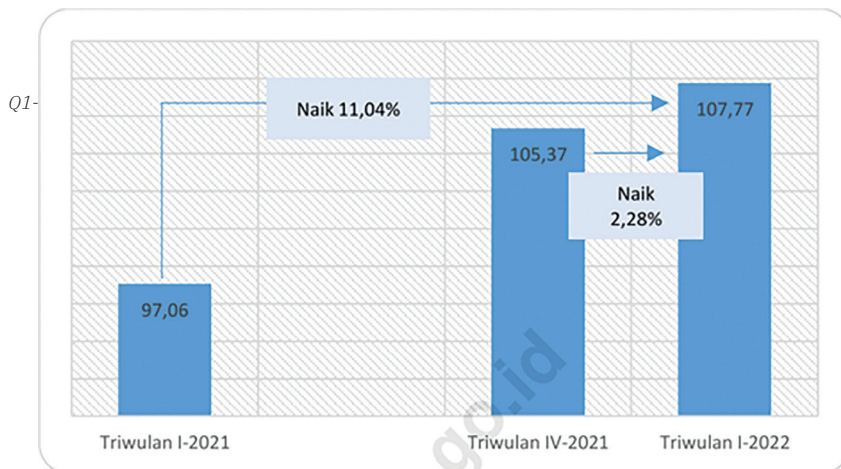
TABEL 2.8. | Struktur PDRB Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Q1-2021 sd. Q2-2022

Kategori		Harga Berlaku			Harga konstan		
		Triwulan I-2021	Triwulan IV-2021	Triwulan I-2022	Triwulan I-2021	Triwulan IV-2021	Triwulan I-2022
1		2	3	4	5	6	7
A	"Pertanian, Kehutanan dan Perikanan"	25 366,39	22 826,35	26 725,46	16 613,74	14 323,69	16 486,08
B	"Pertambangan dan Penggalian"	4 954,59	5 512,48	5 773,90	3 220,30	3 193,01	3 063,76
C	"Industri Pengolahan"	17 113,22	19 313,13	17 719,15	10 960,04	12 090,23	10 930,00
D	Pengadaan Listrik,Gas	123,89	137,92	134,16	96,15	106,57	102,98
E	Pengadaan Air	98,26	108,34	108,76	64,80	71,09	71,16
F	Konstruksi	8 872,44	9 680,24	9 767,16	6 215,46	6 554,63	6 528,78
G	"Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor"	10 108,12	11 170,64	11 813,08	7 125,24	7 850,63	8 201,72
H	"Transportasi dan Pergudangan"	4 160,77	4 906,55	4 929,19	2 813,76	3 296,56	3 293,01
I	"Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum"	1 314,35	1 438,49	1 447,37	821,38	894,28	892,35
J	Informasi dan Komunikasi	3 770,09	3 779,51	3 699,86	3 293,66	3 284,47	3 209,79
K	Jasa Keuangan	1 982,35	2 139,40	2 120,62	1 282,23	1 313,49	1 303,43
L	Real Estate	2 604,89	2 836,21	2 718,94	1 799,59	1 943,86	1 840,43
M,N	Jasa Perusahaan	128,07	142,64	149,22	79,09	88,04	90,96

Kategori		Harga Berlaku			Harga konstan		
		Triwulan I-2021	Triwulan IV-2021	Triwulan I-2022	Triwulan I-2021	Triwulan IV-2021	Triwulan I-2022
1		2	3	4	5	6	7
O	"Administrasi pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib"	2 892,68	3 501,74	2 906,80	1 774,08	2 139,71	1 754,19
P	Jasa Pendidikan	2 664,42	2 916,51	2 871,32	1 786,41	1 893,91	1 848,05
Q	"Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial"	925,59	1 049,83	1 038,31	646,48	720,86	706,29
R,S,T,U	Jasa lainnya	804,40	822,26	864,64	547,14	558,81	582,95
	PDRB	87 884,51	92 282,19	94 788,15	59 157,54	60 323,84	60 905,95

Sumber: Diadaptasi dari BPS Lampung, 2022]

Peninjauan pada aspek yang lebih mikro, kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam sektor ekonomi dapat dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP). BPS Provinsi Lampung (2022) mencatat rerata nilai NTP pada Triwulan 1-2021, Triwulan IV-2021 dan Triwulan 1-2022 secara berturut-turut sebesar 97,06% dan 105,37% serta 107,77%. Hal ini menggambarkan bahwa pada dua triwulan terakhir para pelaku usaha memiliki surplus karena nilai NTP-nya di atas 100 dimana jumlah penerimaannya lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluarannya selama satu tahun berjalan.



Gambar 2.12. Rata-rata NTP Provinsi Lampung (2018=100), Q1-2021 sd. 2022 [Sumber: Diadaptasi dari BPS Lampung, 2022]

Kajian yang spesifik terkait kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian masyarakat dan daerah telah dilakukan oleh Syahputra, Bakti dan Qurniati (2021) dengan suatu studi tentang kebijakan tentang pengaruh tutupan hutan terhadap sektor pertanian dan perekonomian di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa hutan negara memiliki hubungan yang nyata terhadap PDRB sektor pertanian di Provinsi Lampung berdasarkan hasil uji t dan koefisien determinasi dengan $p\text{-value}=0,000$. Koefisien sebesar 35,270 menunjukkan bahwa setiap penurunan satu persen hutan negara akan menurunkan PDRB sektor pertanian sebesar 35,270 atau Rp35.270.000,- per kapita penduduk pada satu tahun berikutnya. Hal ini diprediksi dikarenakan pemanfaatan hutan negara pada program perhutanan sosial sehingga berkontribusi pada intensifikasi dan peningkatan produktivitas sektor pertanian. Kebijakan pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Provinsi Lampung diimplementasikan dengan pola pemberian akses legal masyarakat sekitar kawasan hutan selama 35 tahun dengan tidak merubah fungsi pokok hutan. Pada penerapannya, pengelolaan lahan HKm menggunakan sistem agroforestri dengan mengkombinasikan berbagai jenis tanaman dalam satu lahan. Aren, madu, rotan, bambu, dan lainnya merupakan produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dihasilkan oleh kelompok petani pada lahan HKm. Hasil ini turut berkontribusi penting terhadap PDRB sektor pertanian di Provinsi Lampung.

2.4.2. Kontribusi pada Aspek Ekologi

Sektor kehutanan di Provinsi Lampung sebagaimana fungsi ekologi atau fungsi lingkungan dari hutan secara umum diidentifikais dari kemampuan atau kapaitas hutan untuk melindungi Potensi hutan dan keanekaragaman hayati dapat berfungsi sebagai penyangga keseimbangan, perlindungan kehidupan, memelihara kesuburan tanah, proteksi daerah aliran sungai, pengendali erosi, penyimpang cadangan, penyerap CO₂, dan pengendali O₂. Fungsi hutan tersebut sebagai penyangga tanah dan tata air, sumber hayati dan keanekaragaman hayati, serta penyangga iklim.

Fungsi hutan sebagai penyangga tanah dan tata air mempunyai keterkaitan yang erat, yakni apa yang terjadi dengan hutan akan terpengaruh pada kondisi tanah dan tata air. Sebaliknya jenis tanah dan pola tataran air akan sangat berpengaruh kepada kelangsungan hutan. Secara Hidrologi, hutan dapat menaikkan laju serapan air kedalam tanah sehingga memperbesar simpanan air tanah yang dapat memperbesar aliran air pada musim kemarau. Berbagai upaya untuk menjamin keberhasilan dalam pengelolaan kawasan hutan secara hidgrologis, dapat dicirikan oleh terpeliharanya kesuburan tanah, ketersediaan sumber air dan debit yang tidak berkelebihan (banjir) dimusim hujan. Ini berarti proses hidrologis yang ideal pada daerah aliran dalam konteks produksi air yang berasal dari kawasan hutan yang dikelola, masih berada dalam batas-batas kuantitas, kualitas, dan waktu lamanya aliran berlangsung. Sehubungan itu, hutan selain mempunyai fungsi penting sebagai penyangga tanah dan tata air, juga sebagai sumber daya hayati dan keanekaragaman hayati.

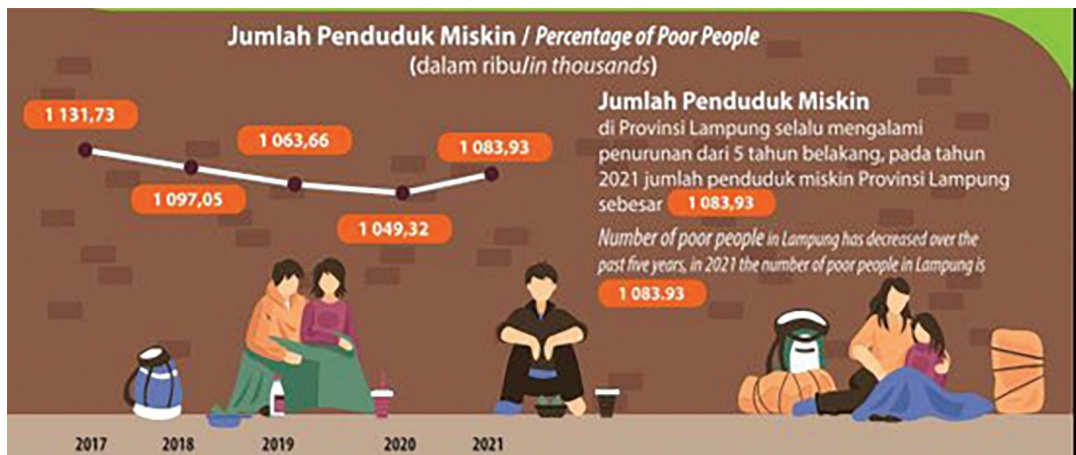
Salah satu fungsi fundamental hutan adalah sebagai penyangga iklim bumi, secara klimatologi hutan mempunyai fungsi yang penting, khususnya dengan penyerap CO₂ dalam proses fotosintesis dan sekaligus melepaskan O₂ dalam proses yang sama. Salah satu penyebab kenaikan CO₂ yang merupakan gas rumah kaca terpenting adalah penebangan kayu hutan kebakaran hutan. Kegiatan penebangan dan kebakaran hutan sebagai penyebab utama

terjadinya pemanasan global karena hutan kurang mampu menyerap CO₂ dan menyimpan karbon atau endapan karbon. Oleh karenanya upaya yang terintegrasi untuk menjaga kondisi hutan supaya dapat menjamin fungsi ekologi/lingkungan menjadi isu yang sangat penting dalam pembangunan sektor kehutanan di Provinsi Lampung.

Pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pengendalian Kawasan Hutan di Provinsi Lampung dijelaskan hutan memiliki fungsi ekologi dan konservasi yang sangat penting antara lain untuk penanggulangan bahaya erosi dan bencana alam berupa banjir, kekeringan, dan tanah longsor.

2.4.3. Kontribusi pada Aspek Sosial Budaya

Secara makro, Provinsi Lampung masih memiliki persoalan kemiskinan yang cukup serius. Dalam Laporan Provinsi Lampung dalam Angka 2022 [BPS Provinsi Lampung, 2022] tercatat dalam rentang waktu tahun 2017-2021 jumlah penduduk miskin fluktuatif dan secara kumulatif masih di atas angka 1 juta penduduk. Pada tahun 2021 tercatat jumlah orang miskin sebanyak 1.083.930 orang dan meningkat dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 sebanyak 1.049.320 orang.

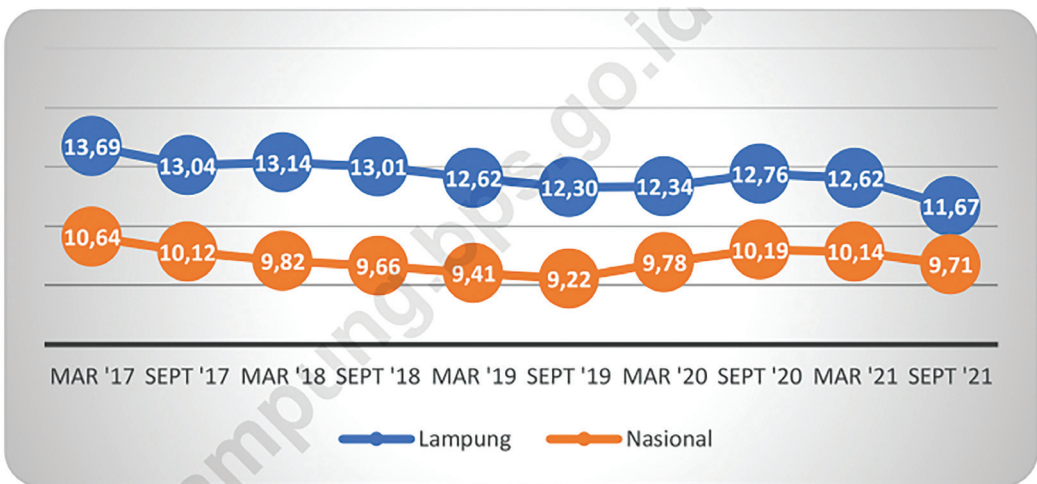


Gambar 2.13. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Tahun 2017-2021 [Sumber: Diadaptasi dari BPS Lampung, 2022]

Selain dari segi jumlah orang miskin, perhatian yang cukup serius untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung dengan mempertimbangkan proporsi penduduk miskin. Dalam rentang waktu 2017-2021, proporsi penduduk miskin di Provinsi Lampung masih di atas rerata proporsi penduduk miskin nasional. Pada Maret 2017 proporsi penduduk miskin di Provinsi Lampung sebesar 13,69% sedangkan rerata nasional 10,64%, pada data terakhir yang dilaporkan yaitu September 2021 proporsi penduduk miskin di Provinsi Lampung sebesar 11,67% sedangkan rerata nasional sebesar 9,71%. Secara rinci komparasi proporsi penduduk miskin di Provinsi Lampung dibandingkan dengan proporsi penduduk miskin di Indonesia pada periode 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.9.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam konteks keterkaitan antara sumber daya hutan dengan problematika kemiskinan adalah dengan melihat proporsi kemiskinan di daerah perdesaan dimana umumnya merupakan lokasi yang berdekatan atau berbatasan dengan Kawasan hutan dan juga lokasi pengembangan hutan rakyat. Pada masa mendatang pengelolaan sumberdaya hutan yang lebih optimal dan berkelanjutan diharapkan dapat menekan problematika kemiskinan di daerah perdesaan di Provinsi Lampung.

Berdasarkan data Provinsi Lampung dan Angka (2022) seperti disajikan pada Tabel 2.10. dilaporkan proporsi kemiskinan di perdesaan antara tahun 2014-2021 cenderung menurun dimana kondisi pada akhir tahun (September) secara ringkas sebagai berikut: tahun 2014 (15,46%), 2015 (15,105%), 2016 (15,24%), 2017 (14,56%), 2018 (14,73%), 2019 (13,96%), 2020 (14,22%) dan 2021 (11,67%). Pencermatan pada proporsi pendudukan miskin di wilayah perdesaan dan perkotaan Provinsi Lampung tahun 2014-2021 menunjukkan proporsi penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi dibandingkan penduduk perkotaan, hal ini menunjukkan bahwa problem dan upaya penanganan kemiskinan menjadi isu yang sangat penting pada wilayah perdesaan di Provinsi Lampung.



Gambar 2.14. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung 2017-2021 [Sumber: Diadaptasi dari BPS Lampung, 2022]

TABEL 2.9 | Proporsi Penduduk Miskin di Perdesaan dan Perkotaan Di Provinsi Lampung Tahun 2014-2021

Tahun Year		Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People		
		Perkotaan Urban	Perdesaan Rural	Perkotaan+Perdesaan Urban+Rural
1		2	3	4
2014	Maret/March	11,08	15,41	14,28
2014	September/ September	10,68	15,46	14,21
2015	Maret/March	10,94	15,56	14,35
2015	September/ September	9,25	15,05	13,53
2016	Maret/March	10,51	15,69	14,29
2016	September/ September	10,15	15,24	13,85
2017	Maret/March	10,03	15,08	13,09
2017	September/ September	9,13	14,56	13,04
2018	Maret/March	9,27	14,76	13,14
2018	September/ September	9,06	14,73	13,01
2019	Maret/March	8,92	14,27	12,62
2019	September/ September	8,60	13,96	12,30
2020	Maret/March	9,02	13,83	12,34
2020	September/ September	9,59	14,22	12,76
2021	Maret/March	9,29	14,18	12,62
2021	September/ September	8,50	13,18	11,67

Sumber: Lampung dalam Angka 2022 [BPS Lampung, 2022]

Kondisi kemiskinan berdasarkan wilayah administrasi sebagaimana dilaporkan BPS Provinsi Lampung 2022 yang tersaji pada Tabel 2.10 teridentifikasi pada tahun 2021 proporsi kemiskinan tertinggi terjadi di Kabupaten Lampung Utara (19,30%) diikuti oleh Kabupaten Pesawaran (15,11%) dan Kabupaten Lampung Timur (15,08%). Sedangkan Kabupaten/kota yang proporsi penduduk miskinnya pada kondisi yang relatif rendah (kurang dari 10%) adalah: Tulang Bawang (9,67%), Bandar Lampung (9,11%) dan Metro (8,93%), Tulang Bawang Barat (8,32%) dan Mesuji (7,54%).

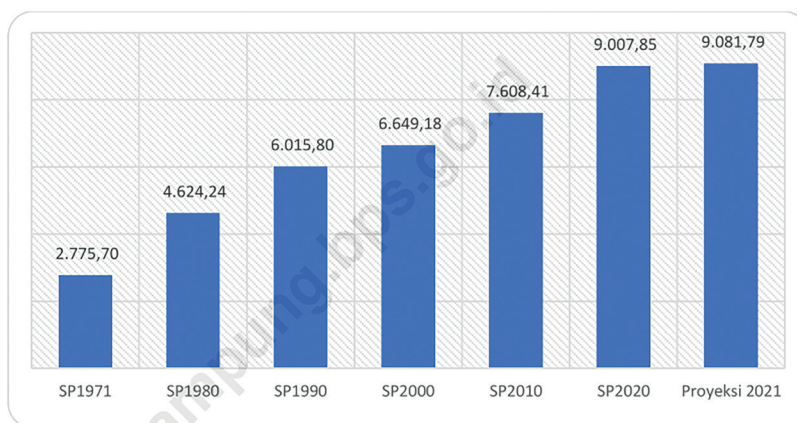
TABEL 2.10. | Proporsi Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020-2021

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People			
	Maret March		September September	
	2020	2.021	2.020	2.021
1	10	11	12	13
Lampung Barat	12,52	12,82		
Tanggamus	11,68	11,81		
Lampung Selatan	14,08	14,19		
Lampung Timur	14,62	15,08		
Lampung Tengah	11,82	11,99		
Lampung Utara	19,30	19,63		
Way Kanan	12,90	13,09		
Tulang Bawang	9,33	9,67		
Pesawaran	14,76	15,11		
Pringsewu	9,97	10,11		
Mesuji	7,33	7,54		
Tulang Bawang Barat	7,39	8,32		
Pesisir Barat	14,29	14,81		

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People			
	Maret March		September September	
	2020	2.021	2.020	2.021
1	10	11	12	13
Bandar Lampung	8,81	9,11		
Metro	8,47	8,93		
Lampung	12,34	12,62		

Sumber: Lampung dalam Angka 2022 [BPS Lampung, 2022]

Selain problem kemiskinan, aspek sosial budaya yang lain yang penting adalah terkait dengan komposisi penduduk. Dalam 30 tahun terakhir penambahan jumlah penduduk di Provinsi Lampung sangat signifikan dimana pada Sensus Penduduk 2000 dilaporkan jumlah penduduk masih sebesar 6.649.180 jiwa, meningkat menjadi 7.608.410 jiwa pada Sensus Penduduk tahun 2010. Sedangkan pada Sensus Penduduk yang terakhir tahun 2020, jumlah penduduk di Provinsi Lampung telah mencapai 9.007.850 jiwa. Besarnya jumlah penduduk ini dapat dipastikan akan menjadi tekanan terhadap ketersediaan sumberdaya termasuk sumber daya produksi dimana di Provinsi Lampung masih didominasi sektor agro (pertanian, kehutanan dan perikanan). Penambahan penduduk yang signifikan akan berimplikasi pada tekanan penduduk terhadap penggunaan lahan baik lahan pertanian maupun lahan-lahan yang ada dalam kawasan hutan.



Gambar 2.15. Jumlah Penduduk Lampung (000 jiwa) Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Th 1971-2020 dan Proyeksi 2021 [Sumber: Diadaptasi dari BPS Lampung, 2022]

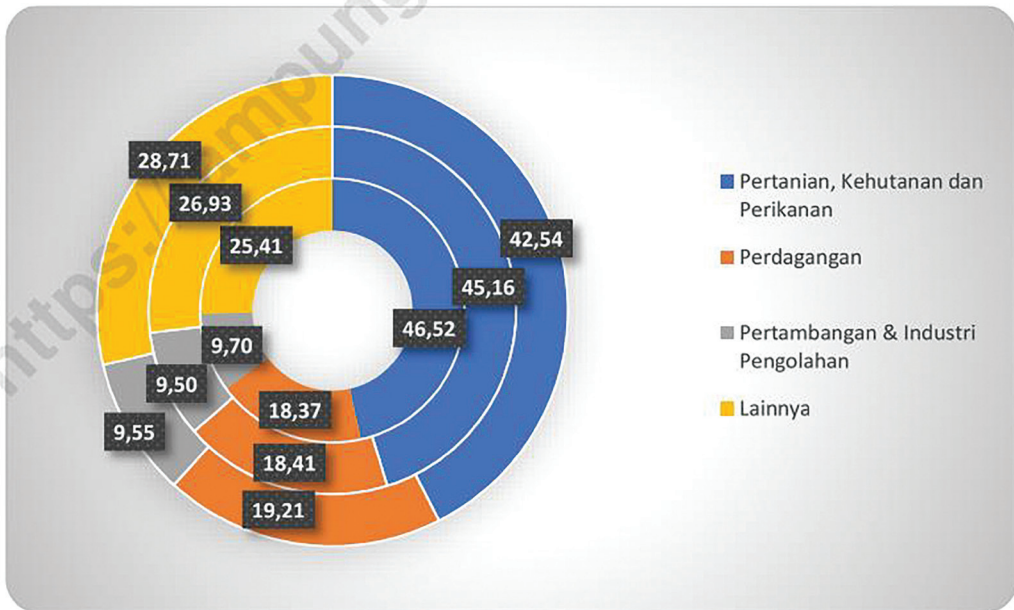
TABEL 2.11. | Indikator Penduduk Provinsi Lampung 1990-2020 dan Proyeksi 2021

Uraian	1990	2.000	2.010	2.020	Proyeksi 2021
1	2	3	4	5	6
Kepadatan penduduk (jiwa/km)	174	192	220	268	270
Sex Ratio	106	107	106	105	105
Laju Pertumbuhan	2,67	1,17	1,24	1,65	1,10

[Sumber: Diadaptasi dari BPS Lampung, 2022]

Pertumbuhan penduduk di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 40 tahun terakhir (1990-2020) cenderung fluktuatif dan masih cukup tinggi dibandingkan dengan rerata pertumbuhan penduduk nasional. Pada tahun 2020 pertumbuhan penduduk di Provinsi Lampung sebesar 1,65% jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rerata pertumbuhan penduduk nasional sebesar 1,25%. Sedangkan proyeksi pertumbuhan penduduk di Lampung pada tahun 2021 sebesar 1,20%, sedikit dibawah rerata pertumbuhan penduduk nasional sebesar 1,13%.

Jumlah dan pertumbuhan penduduk di Provinsi Lampung erat kaitannya dengan struktur tenaga kerja. Laporan BPS Lampung selama 3 tahun terakhir (2020-2022) menggambarkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sumber penghidupan mayoritas masyarakat (*livelihood*). Selama 3 tahun, proporsi penduduk Provinsi Lampung yang berkerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan lebih dari 40% dimana pada tahun 2020-2022 secara berurutan adalah 46,52% dan 45,16% serta 42,54%. Kontribusi sektor perdagangan sebagai penyedia lapangan kerja selama 3 tahun terakhir bervariasi antara 25,41%-28,71%, sedangkan kontribusi sektor pertambangan dan industri masih jauh lebih kecil yang berkisar antara 9,50%-9,70%.



Keterangan:

Lingkaran terdalam Februari 2020, tengah Februari 2021, dan terluar Februari 2022

Gambar 2.16. Persentase Penduduk Lampung yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Februari 2020-Februari 2022 [Sumber: Diadaptasi dari BPS Lampung, 2022]



BAB 03



RENCANA KERJA AKSI MITIGASI SUB
NASIONAL LAMPUNG TAHUN 2023-2030

BAB III. RENCANA KERJA AKSI MITIGASI SUB NASIONAL LAMPUNG TAHUN 2023-2030

3.1. Alur Proses Penetapan Lokasi Arahan Aksi Mitigasi FOLU Net Sink 2030

Penetapan areal untuk penyusunan rencana penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan menuju *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Sub-Nasional Lampung menggunakan analisis spasial tingkat tapak menggunakan 3 informasi utama tingkat spasial, yaitu (1) Arahan Optimasi Kawasan Hutan Berdasarkan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi (IJLT), (2) Peta Tipologi Kelembagaan, dan (3) Peta Indeks Biogeofisik (IBGF) (Biro Perencanaan KLHK, 2021). Peta IBGF dianalisis untuk menghasilkan informasi emisi, serapan dan kebakaran hutan dan lahan. Akan tetapi Peta IBGF ini tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan kemampuan lahan, karakteristik DAS dan informasi keanekaragaman hayati pada suatu area.

Peninjauan kebijakan dengan menggunakan template dilakukan dalam rangka; (1) memastikan terjadinya penurunan yang signifikan atas laju deforestasi, (2) mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta pengaruh negatifnya pada lingkungan, kesehatan, transportasi dan pertumbuhan ekonomi, (3) menerapkan prinsip-prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan, (4) menyelaraskan arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*), (5) mendukung terwujudnya kerjasama global untuk menangani perubahan iklim melalui komitmen untuk sebuah kontribusi yang ditentukan secara nasional (*Nationally Determined Contribution-NDC*) dengan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui upaya sendiri maupun dengan bantuan internasional, dan melibatkan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan serta memberikan tanggung jawab kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya, agar kawasan hutan beserta ekosistemnya tetap terjaga.

Informasi spasial tentang arahan optimasi pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan indeks jasa lingkungan hidup (IJLH) diperlukan untuk membantu perencanaan yang sudah menerapkan prinsip-prinsip daya dukung dan daya tampung. Informasi spasial Indeks Biogeofisik memberikan gambaran tentang kondisi kawasan pada tingkat unit pengelola dalam hubungannya dengan emisi dan serapan gas rumah kaca yang dapat digunakan sebagai landasan dalam penetapan lokasi prioritas pelaksanaan program sehingga berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi serta Karhutla, dan peningkatan serapan gas rumah kaca sejalan dengan komitmen NDC. Informasi spasial tipologi kelembagaan memberikan gambaran tentang kemampuan lembaga dan modal sosial (kondisi masyarakat) pada tingkat tapak yang sangat diperlukan dalam penyusunan strategi pelaksanaan program yang terintegratif dan bersinergi dengan pelibatan peran serta masyarakat dan pihak lain di dalam kawasan agar hutan beserta ekosistemnya tetap terjamin keberadaannya dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan SDGs. Penguatan koordinasi dan sinergi perlu memperhatikan keberadaan kelembagaan di tingkat tapak.

Penggunaan template (ketiga informasi spasial) tersebut di atas, disertai informasi spasial

yang spesifik atau tematik, dapat membantu penyusunan langkah-langkah korektif yang dapat dilakukan oleh setiap Unit Kerja Eselon I di lingkup KLHK. Langkah korektif diarahkan untuk dapat; (1) mengubah arah pengelolaan hutan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan kayu ke arah pengelolaan bentang alam hutan, (2) menyelesaikan konflik-konflik yang terkait dengan kasus tenurial kehutanan, (3) menerapkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat melalui program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, (4) menginternalisasikan prinsip-prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan ke dalam penyusunan revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) tahun 2011-2030 sebagai arahan spasial makro pembangunan kehutanan dan (5) menerapkan pola kebijakan “ekonomi hijau” (*green economy*) yakni menyeimbangkan antara nilai tambah ekonomi dari usaha kehutanan dan pemanfaatan jasa lingkungan dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan kualitas lingkungan serta keseimbangan ekosistem untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Keberhasilan dalam melaksanakan langkah korektif akan mengarah pada terjadinya penurunan emisi yang sangat signifikan pada sektor FOLU ini. Hubungan antara ke tiga peta tersebut dengan peta tematik terkait dalam penetapan arahan program dan kegiatan yang terintegrasi disajikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Analisis Spasial Penentuan Prioritas Lokasi, Program/Kegiatan, dan Pola Pelaksanaan Kegiatan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca menuju FOLU Net Sink 2030

3.1.1. Peta Arahan Optimasi Kawasan Hutan Berdasarkan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi (IJLT)

Peta arahan optimasi pemanfaatan kawasan hutan disusun dengan memperhatikan kualitas hutan yang didasarkan pada cadangan karbon tinggi dan tingkat tutupan tajuk hutan, kemudian Nilai Konservasi Tinggi atau *High Conservation Value* (HCV) yang ditetapkan berdasarkan keberadaan mega fauna (satwa dilindungi; Harimau, Gajah, Orangutan, Owa, Macan tutul, Babi Rusa, dll), ekosistem esensial (mangrove, karst, savana, gambut dan

eksosistem lumut di pegunungan tinggi) dan kawasan konservasi (Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam dan Taman Buru), serta Jasa Lingkungan Ekosistem Tinggi Terkait Air



Gambar 3.2. Analisis Spasial Arahan Optimasi Kawasan Hutan Berdasarkan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi

Arahan optimasi pemanfaatan kawasan dikelompokkan menjadi empat yang ditetapkan berdasarkan kondisi ke tiga komponen tersebut yaitu:

- 1) Arahan Lindung yaitu area yang memiliki HCV, atau tidak memiliki HCV tinggi tetapi kualitas hutan dan Jasa lingkungan ekosistem Tinggi dengan rating tinggi;
- 2) Arahan Produksi yaitu area yang tidak memiliki HCV, tetapi kualitas hutan baik dan Jasa lingkungan ekosistem Tinggi rating tidak tinggi;
- 3) Arahan Rehabilitasi yaitu area yang memiliki HCV, kualitas hutan rendah dan Jasa lingkungan ekosistem Tinggi rating rendah ataupun rating tinggi. Area dalam kawasan yang walaupun kondisi hutan sudah rusak, tidak produktif dan/atau sudah diokupasi oleh masyarakat tetap harus dipertahankan sebagai kawasan hutan. Area arahan rehabilitasi yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan budidaya pertanian ataupun perkebunan dapat direhabilitasi dalam bentuk kegiatan rehabilitasi agroforestri;
- 4) Arahan Konversi yaitu area yang tidak memiliki HCV, kualitas hutan rendah dan Jasa lingkungan ekosistem Tinggi rating rendah maupun rating tinggi. Arahan konversi umumnya sudah dalam bentuk area terbangun dan diokupasi oleh masyarakat.

3.1.2. Peta Tipologi Kelembagaan

Salah satu strategi pemilihan kelembagaan pengelolaan sumber daya hutan yang optimal dapat dilakukan berdasarkan pada dua kondisi objektif, yaitu: kapasitas pemerintah dan kekuatan modal sosial (Birner dan Wittmer, 2003). Mengacu hal tersebut, maka dalam kelembagaan pengelola KPH dilakukan berdasarkan pendekatan tipologi dengan menggunakan tiga indikator, yaitu; (1) modal sosial, (2) kapasitas kelembagaan, dan (3) potensi kawasan KPH.

Kondisi modal sosial kawasan dalam unit pengelola dinyatakan dalam bentuk Indeks Modal Sosial yang ditetapkan dari dua indikator, yaitu; (1) indikator berdasarkan aktivitas pertanian dan keberadaan penduduk di dalam kawasan yang diukur berdasarkan persentase luas lahan pertanian dan pemukiman terhadap luas total KPH, (2) indikator keberadaan masalah sosial yang diukur dari keberadaan 3 jenis program tahunan KPH, yaitu; penyelesaian konflik lahan, program pemberdayaan masyarakat, dan penanganan masalah kebakaran.

Kapasitas kelembagaan dinyatakan dalam Indeks Kapasitas Lembaga (IKL) yang ditetapkan dari dua indikator, yaitu; (1) kapasitas Pemerintah Daerah yang mengacu kepada Kepmen LHK No. SK.651/2016, dan (2) kemampuan kelembagaan KPH yang diukur dari empat faktor, yaitu; (a) kondisi sumber daya manusia, (b) sarana/prasarana KPH, (c) keberadaan RPHJP dan (d) umur KPH yang ditentukan berdasarkan waktu pengesahan SK RPHJP. Berdasarkan tahapan kondisi modal sosial dan kapasitas kelembagaan tersebut, maka diperoleh empat tipe tata kelola SDH yaitu; (1) KPH yang masuk kelompok dengan kondisi sosial kapital tinggi dan kapasitas lembaga tinggi (Tipe-1), (2) KPH yang masuk kelompok dengan kondisi sosial kapital tinggi dan kapasitas lembaga rendah (Tipe-2), (3) KPH yang masuk kelompok dengan kondisi sosial kapital rendah dan kapasitas lembaga besar (Tipe-3), dan (4) KPH yang masuk kelompok dengan kondisi sosial kapital rendah dan kapasitas lembaga kecil (Tipe-4).

Potensi kawasan KPH ditetapkan berdasarkan luasan KPH dan persentase area KPH yang sudah dibebani oleh izin. Berdasarkan faktor ini, kondisi sumber daya KPH dibagi menjadi empat kelompok yaitu; (1) Kelompok A; KPH yang luas wilayah pengelolaan lebih besar 100.000 ha dan area pengelolaan yang sudah dibebani izin kurang dari 50% luas area,

(2) Kelompok B; KPH yang luas wilayah pengelolaan lebih besar 100.000 ha dan area 30 pengelolaan yang sudah dibebani izin lebih dari 50% luas area, (3) Kelompok C; KPH yang luas wilayah pengelolaan kurang dari 100.000 ha dan area pengelolaan yang sudah dibebani izin kurang dari 50% luas area, dan (4) Kelompok D; KPH yang luas wilayah pengelolaan kurang dari 100.000 ha dan area pengelolaan yang sudah dibebani izin lebih dari 50% luas area.

3.1.3. Peta Indeks Biogeofisik (IBGF)

Penyusunan peta Indeks Biogeofisik (IBGF) dikembangkan berdasarkan kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Reducing *Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks*. Dalam hal ini IBGF disusun dalam 3 jenis informasi yaitu IBGF Emisi, IBGF Serapan dan IBGF Kebakaran.

- 1) IBGF Emisi ditetapkan berdasarkan laju deforestasi historis (Indeks Emisi Historis, IEH) dan persentase tutupan hutan alam yang masih tersisa saat ini pada wilayah tersebut (Indeks Tutupan Hutan, ITH). Wilayah yang memiliki ranking IBGF Emisi tertinggi merupakan wilayah yang laju deforestasi masa lalu (emisi historis) tinggi sementara luas fraksi wilayah yang masih berhutan alam sudah sangat rendah. Wilayah yang IBGF Emisi memiliki ranking pertama akan memiliki risiko yang sangat tinggi untuk kehilangan

hutan alam dalam waktu yang tidak terlalu lama atau dapat dikatakan memiliki tingkat risiko emisi sangat tinggi. Pada wilayah ini, keberadaan faktor-faktor pendorong (*drivers*) deforestasi sudah sangat tinggi sehingga perlu mendapat prioritas untuk penanganan faktor pendorong. Sebaliknya pada wilayah yang ranking IBGF Emisi rendah.

- 2) IBGF Serapan ditetapkan berdasarkan tren perubahan luas lahan tidak produktif historis (Indeks Luas Lahan Non Produktif; ILNP) dan persentase tutupan lahan tidak produktif yang ada saat ini pada wilayah tersebut (Indeks Tutupan non-Produktif; ITNP). Wilayah yang memiliki ranking IBGF Serapan tertinggi merupakan wilayah yang tren perubahan luas lahan tidak produktif cenderung meningkat dan luas lahan tidak produktif saat ini sudah sangat tinggi (>75%). Artinya, wilayah yang IBGF Serapan memiliki ranking pertama akan memiliki potensi serapan yang sangat tinggi.
- 3) IBGF Kebakaran menggambarkan tingkat kerentanan atau kemudahan suatu kawasan terkena kebakaran yang ditetapkan berdasarkan keberadaan titik api historis dan kondisi biofisik. IBGF Kebakaran pada prinsipnya menentukan tingkat kerentanan wilayah terhadap kebakaran berdasarkan kedekatan wilayah terhadap faktor pemicu atau pendorong terjadinya kebakaran diantaranya kedekatan dengan jalan, pemukiman, keberadaan gambut dan lainnya.

Masing-masing indeks dibagi menjadi tiga kelas, yaitu rendah, sedang dan tinggi dan masing-masing memiliki skor 1, 2 dan 3. Khusus IBGF Emisi dan Kebakaran memiliki skor 0 untuk kawasan yang sudah tidak memiliki hutan dan tidak memiliki masalah kebakaran. Integrasi ketiga nilai indeks dinyatakan sebagai Indeks Prioritas Lokasi (IPL)

$$\text{IPL} = \text{IBGF}_{\text{emisi}} + \text{IBGF}_{\text{serapan}} + \text{IBGF}_{\text{kebakaran}}$$

Nilai IPL berkisar dari 1 sampai 9, semakin tinggi nilai IPL semakin tinggi tingkat urgensi atau prioritas lokasi tersebut untuk dijadikan sebagai lokasi sasaran pelaksanaan program. Indeks Prioritas Lokasi (IPL) dapat digunakan sebagai arahan untuk menentukan lokasi prioritas pelaksanaan program pengelolaan kawasan hutan. Informasi spasial sebaran hutan alam pada setiap unit pengelola yang disertai dengan informasi IPL memberikan informasi tingkat ancaman area yang masih berhutan alam akan mengalami deforestasi. Informasi ini dapat dijadikan petunjuk dalam penentuan area prioritas untuk penanganan masalah deforestasi dan potensi sinergi dengan kegiatan pengelolaan kawasan lainnya.

Selanjutnya, informasi spasial sebaran lahan tidak produktif pada setiap unit pengelola yang disertai dengan informasi IPL memberikan informasi tingkat prioritas area lahan tidak produktif untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan cadangan karbon (serapan karbon) dan potensi sinerginya dengan kegiatan penanganan ancaman deforestasi dan kebakaran lahan.

TABEL 3.1. | Pengelompokan Prioritas Lokasi untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengelolaan Hutan Berdasarkan Nilai IPL

Prioritas	IBGFI 1 Emisi	IBGFI 2 Emisi	IBGFI 3 Emisi	IPL	Deskripsi
Ekstrim Tinggi	3	3	3	9	Wilayah kelompok ini memiliki tutupan hutan alam sangat rendah namun ancaman deforestasi sangat tinggi, lahan tidak produktif luas dan cenderung meningkat dan masalah kebakaran sangat tinggi
Sangat Tinggi	3	3	3	8	
	3	2	3	8	
	2	3	3	8	
Tinggi	3	3	1	7	Wilayah kelompok ini memiliki tutupan hutan alam yang sangat rendah dengan ancaman deforestasi sangat tinggi, lahan tidak produktif cukup luas dan masalah kebakaran cukup tinggi
	3	2	2	7	
	3	1	3	7	
	2	3	2	7	Wilayah kelompok ini umumnya memiliki tutupan hutan alam yang cukup tinggi dengan ancaman deforestasi sedang, lahan tidak produktif sangat luas dan masalah kebakaran sangat tinggi
	2	2	3	7	
	1	3	3	7	
Agak Tinggi	3	3	0	6	Wilayah kelompok ini memiliki tutupan hutan alam rendah dengan ancaman deforestasi tinggi, lahan tidak produktif secara umum cukup luas, masalah kebakaran yang relatif rendah
	3	2	1	6	
	3	1	2	6	

Prioritas	IBGFI 1 Emisi	IBGFI 2 Emisi	IBGFI 3 Emisi	IPL	Deskripsi
	2	3	1	6	Wilayah kelompok ini umumnya memiliki tutupan hutan alam cukup tinggi dengan ancaman deforestasi sedang sampai tinggi, lahan tidak produktif cukup luas dan umumnya masih memiliki masalah kebakaran yang cukup tinggi
	2	2	2	6	
	2	1	3	6	
	1	3	2	6	
	1	2	3	6	
	0	3	3	6	Tidak memiliki hutan alam, lahan tidak produktif luas dan cenderung meningkat dan masalah kebakaran sangat tinggi
Sedang	3	2	0	5	Wilayah kelompok ini memiliki umumnya masih memiliki tutupan hutan alam rendah sampai sedang dengan ancaman deforestasi umumnya cukup tinggi, lahan tidak produktif sedang dan masalah kebakaran relatif rendah
	3	1	1	5	
	2	3	0	5	
	2	2	1	5	
	2	1	2	5	
	1	3	1	5	Wilayah kelompok ini umumnya masih memiliki persentase tutupan hutan alam tinggi dengan ancaman deforestasi rendah, lahan tidak produktif sedang dan masalah kebakaran sedang sampai tinggi
	1	2	2	5	
	1	1	3	5	
	0	3	2	5	Tidak memiliki hutan alam, lahan tidak produktif dan masalah kebakaran cukup tinggi
	0	2	3	5	

Prioritas	IBGFI 1 Emisi	IBGFI 2 Emisi	IBGFI 3 Emisi	IPL	Deskripsi
Agak Rendah	3	1	0	4	Wilayah kelompok ini memiliki umumnya masih memiliki tutupan hutan alam yang tinggi dengan ancaman deforestasi umumnya rendah sampai sedang, lahan tidak produktif relatif sedang dan masalah kebakaran umumnya sangat rendah
	2	2	0	4	
	2	1	1	4	
	1	3	0	4	
	1	2	1	4	
	1	1	2	4	
	0	3	1	4	Tidak memiliki hutan alam, lahan tidak produktif relatif sedang dan masalah kebakaran umumnya juga sudah sedang
	0	2	2	4	
	0	1	3	4	
Rendah	2	1	0	3	Wilayah ini memiliki tutupan hutan alam sangat tinggi, ancaman deforestasi umumnya sangat rendah, lahan tidak produktif sedikit dan kebakaran sangat rendah
	1	2	0	3	
	1	1	1	3	
	0	3	0	3	Tidak memiliki hutan alam, lahan tidak produktif relatif sedang dan masalah kebakaran sudah rendah
	0	2	1	3	
	0	1	2	3	
Sangat Rendah	1	1	0	2	Wilayah ini memiliki tutupan hutan alam sangat tinggi, ancaman deforestasi sangat rendah dan tidak ada masalah kebakaran
	0	2	0	2	Tidak memiliki tutupan hutan alam, lahan tidak produktif rendah dan cenderung menurun, masalah kebakaran hampir tidak ada
	0	1	1	2	
Ekstrim Rendah	0	1	0	1	

Gambar 3.3. Diagram Alur Penyusunan Aksi Mitigasi

Indeks Serapan (*IBGFs*) dihitung berdasarkan kecenderungan Perubahan Luas Lahan Tidak Produktif Historis dan Persentase Tutupan Lahan Tidak Produktif yang ada saat ini pada wilayah analisis (kawasan hutan, unit pengelolaan, atau arahan pemanfaatan). Perhitungan Indeks Serapan pada kemudian disusun dalam tiga kategori Tutupan Lahan Tidak Produktif Historis dan enam kategori Tutupan Lahan Tidak Produktif saat ini. Hasil perhitungan Indeks emisi tersebut kemudian disederhanakan menjadi menjadi tiga kategori yaitu; Tinggi, Sedang, dan Rendah (Tabel 2.10).

TABEL 3.2. | Perhitungan Indeks Serapan

Tutupan Tidak Produktif Historis	Tutupan Lahan Tidak Produktif Tahun Akhir Analisis (%)					
	>75	50-75	25-50	15-25	5-15	<5
Naik	ET	ST	T	AT	S	AR
Tetap	T	AT	S	AR	R	SR
Turun	S	AR	R	SR	ER	ER

Keterangan : Ekstrem Tinggi (ET); Sangat Tinggi (ST); Tinggi (T); Agak Tinggi (AT); Sedang (S); Agak Rendah (AR); Rendah (R); Sangat Rendah (SR); Ekstrem Rendah (ER); dan tidak ada hutan (TAH)

TABEL 3.3. | Tingkat Indeks Emisi

Kelas Indeks Emisi	Reklasifikasi Indeks Emisi
Ekstrem Tinggi (ET)	Tinggi
Sangat Tinggi (ST)	
Tinggi (T)	
Agak Tinggi (AT)	
Sedang (S)	Sedang
Agak Rendah	
Rendah	Rendah
Sangat Rendah (SR)	
Ekstrem Rendah (ER)	
Tidak ada hutan (TAH)	Tidak ada hutan (TAH)

Indeks Kebakaran (*IBGFs*) dibangun dengan mengadopsi metode analisis kerentanan kebakaran yang didasarkan kepada keberadaan Titik Panas (hotspot) dan keberadaan Faktor Pendorong Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan

Metode ini pada prinsipnya menentukan tingkat kerentanan wilayah (kawasan hutan, unit pengelolaan, dan arahan pemanfaatan) terhadap kebakaran berdasarkan kedekatan wilayah terhadap faktor pemicu atau pendorong terjadinya kebakaran (diantaranya kedekatan dengan jalan, pemukiman, keberadaan gambut dan lainnya). Metode ini menghasilkan lima kategori tingkat kerentanan kabakaran atau IBGF Kebakaran, yaitu: 1) Sangat rendah, 2) Rendah, 3) Sedang, 4) Tinggi, dan 5) Sangat tinggi.

TABEL 3.4. | Pengelompokkan Prioritas Lokasi untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengelolaan Hutan Berdasarkan Nilai IPL

Kategori	Skor	Nilai IBGF Kebakaran
Tinggi	3	4.0-5.0
Sedang	2	3.0
Rendah	1	1.0-2.0
Sangat Rendah	0	0

TABEL 3.5. | Indeks Prioritas Lokasi Pelaksanaan FOLU Net Sink 2030

Prioritas	Indeks Emisi	Indeks Serapan	Indeks Kebakaran	IPL	Deskripsi
Ekstrim Tinggi	3	3	3	9	Wilayah kelompok ini memiliki tutupan hutan alam sangat rendah namun ancaman deforestasi sangat tinggi, lahan tidak produktif luas dan cenderung meningkat dan masalah kebakaran sangat tinggi
Sangat Tinggi	3	3	2	8	
	3	2	3	8	
	2	3	3	8	

Prioritas	Indeks Emisi	Indeks Serapan	Indeks Kebakaran	IPL	Deskripsi
Tinggi	3	3	1	7	Wilayah kelompok ini umumnya memiliki tutupan hutan alam yang sangat rendah dengan ancaman deforestasi sangat tinggi, lahan tidak produktif cukup luas dan masalah kebakaran cukup tinggi
	3	2	2	7	
	3	1	3	7	
	2	3	2	7	Wilayah kelompok ini umumnya memiliki tutupan hutan alam yang cukup tinggi dengan ancaman deforestasi sedang, lahan tidak produktif sangat luas dan masalah kebakaran sangat tinggi
	2	2	3	7	
	1	3	3	7	

Prioritas	Indeks Emisi	Indeks Serapan	Indeks Kebakaran	IPL	Deskripsi
Agak Tinggi	3	3	0	6	Wilayah kelompok ini memiliki tutupan hutan alam rendah dengan ancaman deforestasi tinggi, lahan tidak produktif secara umum cukup luas, masalah kebakaran yang relatif rendah
	3	2	1	6	
	3	1	2	6	
	2	3	1	6	Wilayah kelompok ini umumnya memiliki tutupan hutan alam cukup tinggi dengan ancaman deforestasi sedang sampai tinggi, lahan tidak produktif cukup luas dan umumnya masih memiliki masalah kebakaran yang cukup tinggi
	2	2	2	6	
	2	1	3	6	
	1	3	2	6	
	1	2	3	6	
	0	3	3	6	Tidak memiliki hutan alam, lahan tidak produktif luas dan cenderung meningkat dan masalah kebakaran sangat tinggi

Prioritas	Indeks Emisi	Indeks Serapan	Indeks Kebakaran	IPL	Deskripsi
Sedang	3	2	0	5	Wilayah kelompok ini memiliki umumnya masih memiliki tutupan hutan alam rendah sampai sedang dengan ancaman deforestasi umumnya cukup tinggi, lahan tidak produktif sedang dan masalah kebakaran relatif rendah
	3	1	1	5	
	2	3	0	5	
	2	2	1	5	
	2	1	2	5	
	1	3	1	5	Wilayah kelompok ini umumnya masih memiliki persentase tutupan hutan alam tinggi dengan ancaman deforestasi rendah, lahan tidak produktif sedang dan masalah kebakaran sedang sampai tinggi
	1	2	2	5	
	1	1	3	5	
	0	3	2	5	Tidak memiliki hutan alam, lahan tidak produktif dan masalah kebakaran cukup tinggi
	0	2	3	5	

Prioritas	Indeks Emisi	Indeks Serapan	Indeks Kebakaran	IPL	Deskripsi
Agak Rendah	3	1	0	4	Wilayah kelompok ini memiliki umumnya masih memiliki tutupan hutan alam yang tinggi dengan ancaman deforestasi umumnya rendah sampai sedang, lahan tidak produktif relatif sedang dan masalah kebakaran umumnya sangat rendah
	2	2	0	4	
	2	1	1	4	
	1	3	0	4	
	1	2	1	4	
	1	1	2	4	
	0	3	1	4	Tidak memiliki hutan alam, lahan tidak produktif relatif sedang dan masalah kebakaran umumnya juga sudah sedang
	0	2	2	4	
	0	1	3	4	

Prioritas	Indeks Emisi	Indeks Serapan	Indeks Kebakaran	IPL	Deskripsi
Rendah	2	1	0	3	Wilayah ini memiliki tutupan hutan alam sangat tinggi, ancaman deforestasi umumnya sangat rendah, lahan tidak produktif sedikit dan kebakaran sangat rendah
	1	2	0	3	
	1	1	1	3	
		3	0	3	Tidak memiliki hutan alam, lahan tidak produktif relatif sedang dan masalah kebakaran sudah rendah

Prioritas	Indeks Emisi	Indeks Serapan	Indeks Kebakaran	IPL	Deskripsi
Sangat Rendah	1	1	0	2	Wilayah ini memiliki tutupan hutan alam sangat tinggi, ancaman deforestasi sangat rendah dan tidak ada masalah kebakaran
	0	2	0	2	Tidak memiliki tutupan hutan alam, lahan tidak produktif rendah dan cenderung menurun, masalah kebakaran hampir tidak ada
	0	1	1	2	
Rendah	0	1	0	1	

Catatan : (*) IPL 9 = Ekstrem Tinggi, 8 = Sangat Tinggi, 7 = Tinggi, 6 = Agak Tinggi, 5 = Sedang, 4 = Agak Rendah, 3 = Rendah, 2 = Sangat Rendah, 1 = Ekstrem Rendah

3.2. Sinkronisasi Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia's (FOLU) Net Sink 2030 di Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil analisis IPL dapat dikategorikan dalam 9 kategori dan 8 jenis tutupan hutan, total luasan prioritas sebesar 3.371.365 ha. Berdasarkan kategori IPL, proporsi yang paling besar pada IPL agak rendah seluas 1.891.107 ha disusul dengan IPL sedang seluas

520.065 ha. Berdasarkan kategori tutupan hutan maka teridentifikasi luasan terbesar pada APL/Tubuh air seluas 2.422.724 ha, diikuti oleh Taman Nasional seluas 378.537 dan HP seluas 168.832 ha. Sedangkan berdasarkan Kategori IJL, hasil analisis menunjukkan luasan terbesar pada APL, disusul oleh rehabilitasi-agroforestri dan hutan lindung.

TABEL 3.6 | Indeks Prioritas Lokasi dan Indeks Jasa Lingkungan Provinsi Lampung

No	IPL	LUAS (Ha)								TOTAL
		TAHURA & TWA	HL	CA & CAL	SM	TN	HP	HPT	APL/ Tubuh Air	
1	Tubuh Air	-	691,24	12.418,31	0,00	27,53	5,48	0,00	3,667,46	16,810,02
2	Ekstrim Rendah	-	8.005,83	-	-	-	72.274,34	-	7,231,25	87,511,42
3	Sangat Rendah	48,12	82,18	-	-	-	-	-	175,929,21	176.059,51
4	Rendah	1.373,55	46.661,41	-	-	-	60.152,61	-	6,271,03	114,458,59
5	Agak Rendah	21.647,13	69.158,04	11,24	0,00	250.323,56	165,32	0,04	1,549,802,51	1.891,107,85
6	Sedang	-	172.654,89	10.475,13	0,00	128.186,80	141,80	28,924,86	179,681,99	520,065,47
7	Agak Tinggi	-	3.858,53	-	-	0,09	13.774,91	-	204,159,17	221,792,70
8	Tinggi	-	21.162,37	-	4.097,96	0,00	22,296,10	0,00	295,584,58	343.141,00
9	Ekstrim Tinggi	-	-	-	-	-	21,70	-	397,35	419,06
TOTAL		23.068,79	322.274,48	22.904,68	4,097,96	378.537,98	168,832,26	28,924,90	2,422,724,56	3,371,365,62

No	IPL	LUAS (Ha)								TOTAL
		TAHURA & TWA	HL	CA & CAL	SM	TN	HP	HPT	APL/ Tubuh Air	
1	LINDUNG	6,859,92	70,709,91	0,02	470,84	264,777,62	8,4	3,232,26	9,805,02	355,863,98
2	PRODUKSI	0,00	180,9	-	-	2,57	19,233,97	1,596,00	39.880,34	60,893,78
3	REHABILITASI	1,374,58	831,00	-	-	11,382,13	16.730,08	599,71	14,496,54	45,414,04
4	REHABILITASI - AGROFOR	14,767,03	245,774,29	-	3,626,64	100,382,81	0,62	5,700,56	2,244,30	372,496,25
5	KONVERSI	-	12,76	-	-	1,39	131,892,09	17,794,92	113,23	149,814,40

6	APL	67,27	3,353,19	-	0,48	189,77	257,57	0,35	2,339,406,13	2,343,274,75
7	NO DATA/ TUBUH AIR	-	789,72	2,536,77	-	1,748,79	708,48	-	18,906,73	24,690,50
TOTAL		23,068,80	321,651,78	2,536,77	4,097,96	378,485,07	168,831,21	28,923,79	2,424,852,29	3,352,447,69

Tabel 3.7.mengambakan secara rinci Nilai IK dan Unit KPHP, KPHL dan KPH yang ada di dalam pengelolaanya.

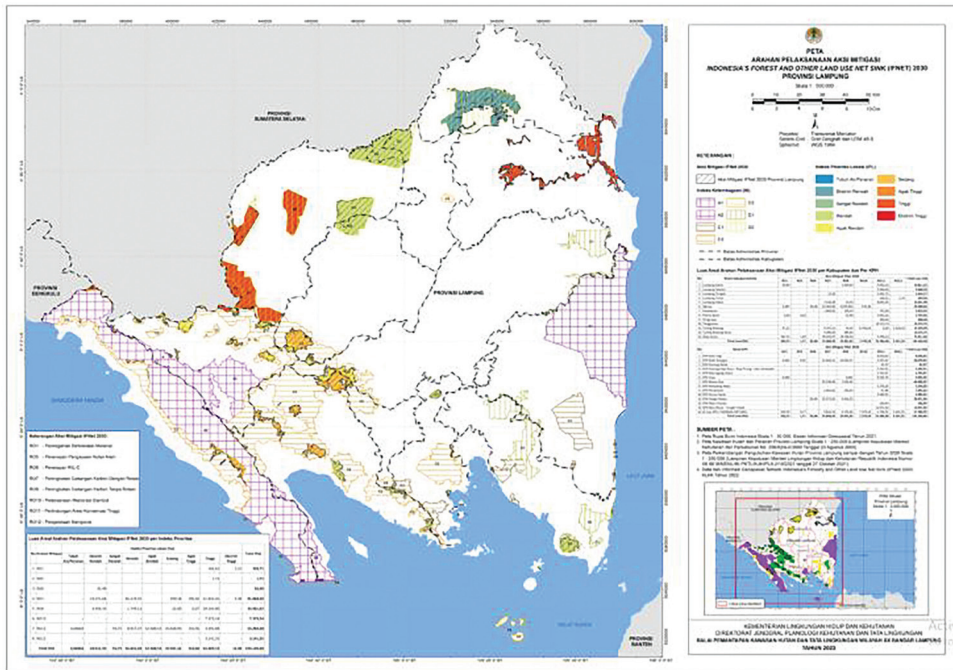
TABEL 3.7. | Indeks Kelembagaan Provinsi Lampung

No	IK	No	IK	Organisasi
1	A1	1	KPHP UNIT I	KPH Pesisir Barat
	TNWK	2	KPHL UNIT II	kPH Liwa
2	A2	3	KPHP UNIT III	KPH Bukit Punggur
	TNBSS	4	KPHP UNIT IV	KPH Muara Dua
3	C1	5	KPHP UNIT V	KPH Sungai Buaya
	Lampung UNIT XII - KHPL	6	KPHP UNIT VI	KPH Way terusan
	Lampung UNIT XIII - KHPL	7	KPHP UNIT VII	KPH Way Waya - Tangkit Tebak
	Lampung UNIT XV - KHPL	8	KPHP UNIT VII	KPH Way Waya - Tangkit Tebak
4	C2	9	KPHP UNIT IX	KPH Batu Tegi
	SM GUNUNG RAYA	10	KPHP UNIT X	KPH Kota Agung Utara
	Lampung UNIT I - KPHP	11	KPHP UNIT XI	KPH Pematang Neba
	Lampung UNIT II - KPHL	12	KPHP UNIT XII	KPH Pesawaran
	Lampung UNIT III - KPHP	13	KPHP UNIT XIII	KPH Gunung Raja Basa-Way Pisang- Batu Serampok

No	IK
	Lampung UNIT VII - KPHL
	Lampung UNIT VIII - KPHL
	Lampung UNIT IX - KPHL
	Lampung UNIT X - KPHL
	Lampung UNIT XI - KPHL
5	C3
	CA
	CA DAN TWA
6	D1
	Lampung UNIT VI - KPHP
	Lampung UNIT XIV - KPHP
	Lampung UNIT XVI - KPHP
7	D2
	Lampung UNIT III - KPHP
	Lampung UNIT IV - KPHP
	Lampung UNIT V - KPHP

No	IK	Organisasi
14	KPHP UNIT XIV	KPH Gunung Raja Basa-Way Pisang-Batu Serampok
15	KPHP UNIT XV	KPH Gunung Balak
16	KPHP UNIT XVI	KPH Gedong Wani

Berdasarkan analisis IPL, IJL dan IK, selanjutnya secara spasial dapat digambarkan Peta Arahana Pelaksanaan Mitigasi Indonesia FOLU Net Sink 2030 Provinsi Lampung.



No	Penu- tupan Lahan	Aksi Mitigasi IFNet 2030								Total Luas (Ha)
		R01	R05	R06	R07	R08	R010	R011	R012	
3	Hutan Lindung	0,01		0,97		1,37	17 749,00	50 962,20		68 713,55
4	Hutan Produksi Tetap				83,48	82 046,99	14 087,90	8,4		96 226,77
5	Hutan Produksi Terbatas						0	2 424,46		2 424,46
6	Areal Peng- gunaan Lain	52,67	7,379,24			9 819,83	424,82	1 873,11	3 141,35	22 691,02
TOTAL		509,71	7,379,24	1,71	83,48	91 868,20	35 901,42	55 284,38	3 141,35	194 169,48

Berdasarkan wilayah administrasi, areal pelaksanaan aksi kitiasi INFNET Lampung akan dilakukan di 13 kabupaten dimana 5 besar luasan di way Kanan (73.311 ha) disusul Mesuji (29.298 ha), Tuang Bawang (19.339 ha), Tanggamus (18.115 ha) dan Lamung Utara (15.611 ha). Sedangkan luasan paling kecil di Lampung Timur seluas 169 ha.

TABEL 3.9 | Areal Pelaksanaan Aksi Mitigasi IFNET 2030 Per Kabupaten di Provinsi Lampung

No	Penu- tupan Lahan	Aksi Mitigasi IFNet 2030								Total Luas (Ha)
		R01	R05	R06	R07	R08	R010	R011	R012	
1	Lampung Barat	69,89				1 049,05		9 692,22		10 811,15
2	Lampung Selatan							3 648,16		3 648,16
3	Lampung Tengah				13,42			5 402,75		5 416,17
4	Lampung Timur							166,61	2,76	169,38
5	Lampung Utara				7 532,29	24,76		8 054,35		15 611,40

No	Penu- tupan Lahan	Aksi Mitigasi IFNet 2030								Total Luas (Ha)
		R01	R05	R06	R07	R08	R010	R011	R012	
6	Mesuji	5 097		83,48	23 581,82	4 955,942	672,3			29 298,63
7	Pe- sawaran				1 083,81	190,54		745,00		2 019,35
8	Pesisir Barat	0.00	0.02			92,98		5 662,02		5 755,02
9	Pringsewu							398,3		398,3
10	Tang- gamus							18,115,74		18 115,74
11	Tulang Bawang	47,21			9 347,10	99,56	6 706,94	0.00	3 138,59	19 339,40
12	Tulang Bawang Barat				9 386,09	889,66				10 275,75
13	Way Kanan	387,51	1,69		40 923,67	28 598,94		3 399,24		73 311,04
TOTAL		509,71	1,71	83,48	91 868,20	35 901,42	7 379,24	55 284,38	3 141,35	194 169,48

Berdasarkan kategori KPH yang terdiri dari 14 kategori, areal pelaksanaan aksi mitigasi IFNET Provinsi Lampung memiliki total luasan 194.169 ha. Ditinjau dari luasan per KPH untuk 5 besar luasan ada di KPH Muara Dua (46.698 ha), disusul oleh KPH Bukit Punggur (40.019 ha), KPH Sungai Buaya (28.411 ha), Luar KPH (27.790 ha) dan KPH Way Waya-Tangkit Tebak (12.071 ha). Sedangkan KPH dengan luasan yang paling kecil adalah KPH Gunung Batak (12 ha).

TABEL 3.10. | Areal Pelaksanaan Aksi Mitigasi IFNET 2030 Per KPH di Provinsi Lampung

No	Penu- tupan Lahan	Aksi Mitigasi IFNet 2030								Total Luas (Ha)
		R01	R05	R06	R07	R08	R010	R011	R012	
1	KPH Batu Tegi							8 926,63		8 926,63
2	KPH Bukit Punggur	0.001	0.95		12 460,51	25 004,71		2 553,47		40 019,63
3	KPH Gunung Balak							42,07		42,07
4	KPH Gunung Raja Basa-Way Pisang-Batu Serampok							3 569,91		3 569,91
5	KPH Kota Agung Utara							5 753,47		5 753,47
6	KPH Liwa	0.005				0.001		9 525,75		9 525,76
7	KPH Muara Dua				45 108,46	1 590,49				46 698,95
8	KPH Pematang Neba							5 270,29		5 270,29
9	KPH Pe-sawaran				1 083,81	190,54		67,86		1 342,22
10	KPH Pesisir Barat							4 589,55		4 589,55
11	KPH Sungai Buaya			83,48	23 371,65	4 956,23				28 411,36
12	KPH Way Terusan							156,94		156,94

No	Penu- tupan Lahan	Aksi Mitigasi IFNet 2030								Total Luas (Ha)
		R01	R05	R06	R07	R08	R010	R011	R012	
13	KPH Way Waya - Tangkit Tebak							12 071,92		12 071,92
14	di Luar KPH (TN/ SM/HL/ HPT/APL)	509.70	0.77		9 843,76	4 159,46	7 379,24	2 756,52	3 141,35	27 790,79
TOTAL		509.71	1.71	83,48	9 868,20	35 901,42	7 379,24	55 284,38	3 141,35	194 169,48

3.3. Publikasi, Sosialisasi, Monitoring Evaluasi, Penegakan Hukum dan Standarisasi

Salah satu bidang di Tim FOLUNETSINK 2030 Nasional, yaitu Bidang V Instrumen dan Informasi yang mempunyai tugas untuk menyiapkan informasi hasil kerja, penegakan hukum, menyiapkan standar menurut kebutuhan, monitoring evaluasi (monev) dan melakukan transformasi “sarana pojok iklim” menurut kebutuhan tahapan kerja, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri. Berdasarkan cakupan tugas Bidang V, dapat dikatakan bahwa semua tugasnya merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin keberlanjutan program setiap RO di Provinsi Lampung oleh semua pihak [UPT KLHK, KPH, maupun OPD Non Kehutanan lainnya].

Sesungguhnya semua program yang dijalankan dalam mendukung tujuan FOLUNETSINK 2030 pada semua RO memerlukan adanya tahapan sosialisasi dan komunikasi publik yang baik dan lancar. Komunikasi publik disini maksudnya adalah komunikasi dengan semua pihak yang relevan dengan suatu program yang dijalankan oleh suatu lembaga baik UPT KLHK, KPH, UPT atau Dinas-dinas di Non Kehutanan di Provinsi Lampung. Di Tim Bidang V, semuanya yang telah diuraikan diatas adalah tugas dari Kelompok Kerja I. Selanjutnya, untuk Kelompok Kerja II di Bidang V mempunyai tugas Law Enforcement. Tugas ini sangat penting mengingat bahwa pelaksanaan semua program FOLUNETSINK 2030 merupakan kerja kolaborasi banyak pihak pada suatu wilayah yang tentu saja berpotensi untuk timbulnya konflik. Selanjutnya, di Bidang V ada Kelompok Kerja III yang bertugas untuk mengevaluasi Review, Renew dan Establish (RRE) dan Menyusun Standarisasi yang diperlukan agar pelaksanaan program terjamin kesahihannya (validitasnya).

Khusus untuk Provinsi Lampung, pada prinsipnya semua program yang dilaksanakan pada semua RO memerlukan semua tahapan yang merupakan tugas-tugas dari 3 kelompok kerja Bidang V. Sebagai contoh untuk pengembangan Kampung Program Iklim (Proklm) di beberapa kabupaten oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pendampingan Kelompok-kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang dilakukan oleh para KPH, Pendampingan Masyarakat Peduli Api

(MPA) oleh UPT PPIKarhutla tentu saja akan dimulai dengan sosialisasi. Agar masyarakat mengetahui perkembangan yang terjadi maka diperlukan adanya publikasi yang rutin. Agar program-program ini terjamin keberlanjutannya tentu harus memenuhi suatu standar pada setiap fasenya, dengan demikian perlu ada penyusunan standar untuk mengukur keberhasilan programnya melalui Monev. Kegiatan Monev program-program ini wajib dilakukan setiap periode waktu yang disepakati dan berdasarkan indikator atau variabel keberhasilan pada setiap periode yang juga disepakati. Monev disarankan tidak dilakukan hanya pada akhir program saja, sebaiknya dilakukan secara periode tahunan. Guna mendukung keberhasilan capaian program-program tersebut pada setiap periode tentu saja diperlukan adanya kolaborasi berbagai pihak, yang saling berkoordinasi dan berkomunikasi dua arah dengan disertai saling menghargai. Semua proses pelaksanaan program dan hasil monev diharapkan akan didokumentasikan dengan tertib, secara time series, terjamin kebenarannya dan *open access* untuk publik. Adanya sistem dokumentasi program yang baik tentu akan sangat mendukung untuk pengembangan dan penguatan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan tujuan *FOLUNET SINK 2030*.

3.4. Rencana Operasional Aksi Mitigasi - Pencegahan Deforestasi Mineral [RO1]

Target luasan rencana operasional aksi mitigasi Pencegahan Deforestasi Mineral [RO-1] di Provinsi Lampung seluas 509,71 ha yang mencakup APL dan Kawasan hutan. Ditinjau dari lokasi administratif, target luasan terbesar RO-1 di Way Kanan seluas 387,51 ha, disusul Lampung Barat (69,89 ha), Tulang Bawang (47,21 ha), Mesuji (5 ha) dan Pesisir Barat dengan luasan sangat kecil yaitu kurang dari 1 ha. Ditinjau dari kategori tutupan lahan, target luasan areal RO-1 terbesar pada lahan APL di Tulang Bawang dengan luas total 47,21 ha.

TABEL 3.11 | Luas Areal RO1 – Pencegahan Deforestasi Mineral per Kabupaten dan Fungsi Kawasan

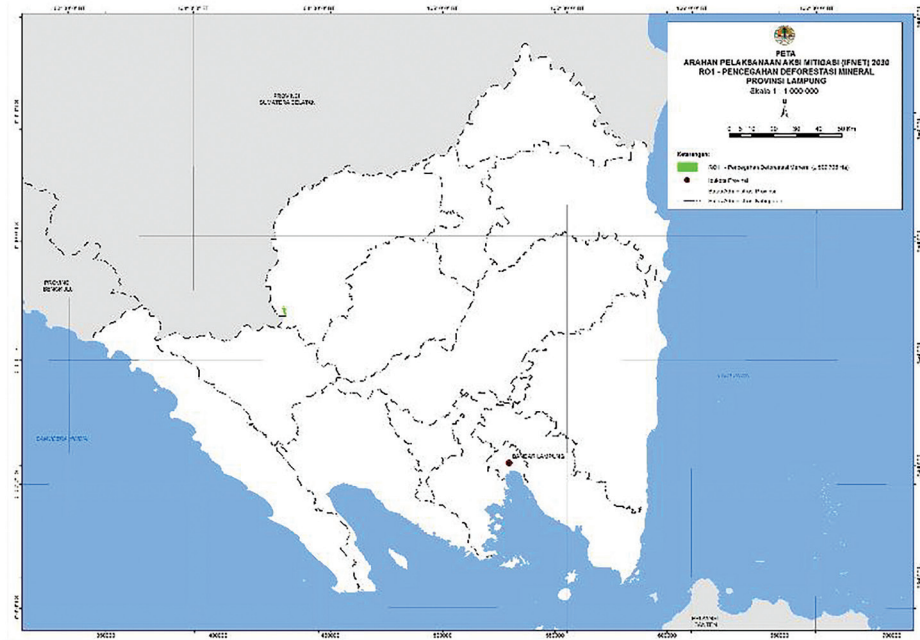
Kabupaten	APL (Ha)	Fungsi Kawasan Hutan (Ha)			Luas (Ha)
		HL	SM	TN	
Lampung Barat	0.36	0.005	69,52	-	69,89
Mesuji	5.10	-	-	-	5,1
Pesisir Barat	-	-	-	0.000001	0,000001
Tulang Bawang	47,21	-	-	-	47,21
Way kanan	0.001	0.001	387,51	-	387,51
Luas (Ha)	52,67	0.006	457,03	0.000001	509,71

Sedangkan target luasan total untuk rencana operasional aksi mitigasi Pencegahan Deforestasi Mineral [RO-1] pada wilayah kerja KPH di Provinsi Lampung seluas 0,006 ha yang terbagi dalam KPH Liwa, KPH Way Kanan dan KPH Bukit Punggur.

TABEL 3.12. | Pencegahan Deforestasi Mineral pada KPH per Kabupaten dan Fungsi Kawasan

Kabupaten /KPH	HL (Ha)	Luas (Ha)
Lampung Barat		
KPH Liwa	0.005	0.005
Way Kanan		
KPH Bukit Punggur	0.001	0.001
Luas (Ha)	0.006	0.006

Secara spasial, sebaran areal RO1-Pencegahan Deforestasi Mineral di Provinsi Lampung disajikan pada peta sebagai berikut.



Gambar 3.5. Sebaran Areal RO1 - Pencegahan Deforestasi Mineral di Provinsi Lampung

Adapun rincian program kerja RO1 yang akan dilaksanakan oleh UPT KLHK dan berbagai dinas terkait atau OPD di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 3.13.

TABEL 3.13. | Rencana Kerja Operasional Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi Meneral (R01)
oleh UPT KLHK

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
1	Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral (R01)	Lampung Barat Mesuji Tulang Bawang Way Kanan Total	69,89 5,10 47,21 387,51 509,71	KPH Bukit Punggur, KPH Liwa, TN, SM, HL, APL		51,08	51,08	
1.1	Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi	(*) PHL						
	• Organisasi KPH yang Efektif BPHPVerifikasi penilaian organisasi KPH Efektif)				BPHP, Dinas Kehutanan, KPH, BPDAS, BPKH, Direktorat BRPH	1 (KPH Way Pisang Lamsel)	1 KPH Way Kanan	
1.2.	BPHP Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan Hutan				BPHP, Dinas Kehutanan, KPH, KTH, PBPH	2 KPH	2 KPH	
	• Pembinaan masyarakat sekitar hutan untuk peningkatan produktivitas usahatani BPDAS				Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan	1	1	
	• Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat BPSKL	Definitif PS	277,43					

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	51,08	51,08	51,08	51,08	51,08	51,08	51,08	
			1 KPH Liwa			1 KPH Mesuji		Terverifikasinya penilaian organisasi KPH Efektif (4 KPH)
	2 KPH	2 KPH	2 KPH	2 KPH	2 KPH	2 KPH	2 KPH	Terkendalinya kebakarann hutan dan lahan (hot spot dan luasan terbakar)
	1	1	1	1	1	1	1	Jumlah kegiatan penyulhan/ demplot per desa per tahun (kegiatan)

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	Penyusunan Rencana Kerja/ Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial untuk mendapatkan pengesahan BPSKL				- Pemerintah Pusat (KLHK: Ditjen PSKL, BP2SDM - Pusluh, Ditjen PKTL). - Pemerintah Daerah (Dishut/ DLH K, KPH). - Pokja Perhutanan Sosial Provinsi. - Mitra Pembangunan. Pendamping Perhutanan Sosial	-	-	
	Pengembangan fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan				- Pemerintah Pusat (KLHK: Ditjen PSKL; Kementan; KemenKop UKM; Kemenperind; KKP; Kemendes, Kemenparekraf). - Pemerintah Daerah (Dishut/ DLH K, OPD terkait lainnya). - Dunia Usaha (BUMN, BUMD, BUMS) - Mitra Pembangunan.	-	-	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	1	2	-	-	-	-	-	
	1	2	-	-	-	-	-	

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk ditingkatkan menjadi kelas gold/ platinum				• Pemerintah Pusat (KLHK: Ditjen PSKL, Kementan; Kemenko UKM; Kemenperin d; KKP; Kemendes, Kemenparekraf) • Pemerintah Daerah (Dishut/ DLH K, OPD terkait lainnya). • Dunia Usaha (BUMN, BUMD, BUMS, BUMDES). • Pokja Perhutanan Sosial Provinsi. • Mitra Pembangunan. • Pendamping Perhutanan Sosial			
1.4	• Kemitraan Lingkungan	Definitif PS	277,43					

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
								Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas Gold/Platinum

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	Pengembangan dan peningkatan tenaga pendamping Perhutanan Sosial				- Pemerintah Pusat (KLHK: Ditjen PSKL) - Pokja Perhutanan Sosial Nasional dan Provinsi (Divisi Pendampingan) - Pemerintah Daerah (Dishut/ DL HK, OPD terkait lainnya) - Dunia Usaha (BUMN, BUMD, BUMS, BUMDES) - Mitra Pembangunan - Pendamping Perhutanan Sosial: - Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil, - Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, - Bakti Rimbawan, - Penyuluh K/L Terkait, - Penyuluh Kehutanan Swasta, - Badan Usaha Milik Negara, - Lembaga Swadaya Masyarakat, - Organisasi Masyarakat, - Praktisi, - Akademisi, Tokoh Masyarakat	3	3	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	3	3	3	3	3	3	3	Jumlah tenaga pendamping perhutanan sosial

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	Pengembangan kemitraan kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan				1. Pemerintah Pusat (KLHK dan K/L terkait) 2. Pemerintah Daerah (OPD Terkait) 3. Lembaga Legislatif 4. Dunia Usaha (BUMN, BUMD, BUMS, BUMDES) 5. Akademi/ Perguruan Tinggi 6. Mitra Pembangunan 7. Lembaga Penelitian Tokoh Masyarakat.	2	2	
1.5	Penyiapan Kawasan perhutanan sosial	Indikatif PS	28.822					
	Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, HTR, KK				1. Pemerintah Pusat (KLHK: Ditjen PSKL, BIG, Kemendes, Kemendagri, Kemen ATR/ BPN) 2. Pemerintah Daerah (Dishut/ DL HK, OPD terkait lainnya) 3. Pokja Perhutanan Sosial Provinsi. 4. Mitra Pembangunan. Pendamping Perhutanan Sosial	28.822		

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	2	2	2	2	2	2	2	Jumlah Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
								Luas Prakondisi Persetujuan PS dalam

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	Penetapan kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat				Pemerintah Pusat (KLHK: Ditjen PSKL, Ditjen PKTL, Ditjen PPKL, Ditjen Gakkum, Ditjen PHL)	28.822		
1.6	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat	Indikatif PS	28.822					
	Penyusunan Rencana Kerja/ Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial untuk mendapatkan pengesahan				- Pemerintah Pusat (KLHK: Ditjen PSKL, BP2SDM - Pusluh, Ditjen PKTL). - Pemerintah Daerah (Dishut/ DLHK, KPH). - Pokja Perhutanan Sosial Provinsi. - Mitra Pembangunan Pendamping Perhutanan Sosial	-	2	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	5	12	12	12	12	5	5	Jumlah Rencana Kerja/ Pengelolaan Kelompok Per- hutanan Sosial yang Disahkan

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	Pengembangan fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan				- Pemerintah Pusat (KLHK; Ditjen PSKL; Kementan; KemenKop UKM; Kemenperind; KKP; Kemendes, Kemenparekraf). - Pemerintah Daerah (Dishut/ DLH K, OPD terkait lainnya). - Dunia Usaha (BUMN, BUMD, BUMS) - Mitra Pembangunan.	-	2	
	Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk ditingkatkan menjadi kelas gold/ platinum				- Pemerintah Pusat (KLHK; Ditjen PSKL, Kementan; Kemenko UKM; Kemenperind; KKP; Kemendes, Kemenparekraf) - Pemerintah Daerah (Dishut/ DLH K, OPD terkait lainnya). - Dunia Usaha (BUMN, BUMD, BUMS, BUMDES). - Pokja Perhutanan Sosial Provinsi. - Mitra Pembangunan. Pendamping Perhutanan Sosial	-	2	
1.7	Kemitraan Lingkungan	Indikatif PS	28.822					

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	5	12	12	12	12	5	5	Jumlah Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan
	5	12	12	12	12	5	5	Jumlah Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	Pengembangan dan peningkatan tenaga pendamping Perhutanan Sosial				- Pemerintah Pusat (KLHK: Ditjen PSKL) - Pokja Perhutanan Sosial Nasional dan Provinsi (Divisi Pendampingan) - Pemerintah Daerah (Dishut/ DL HK, OPD terkait lainnya) - Dunia Usaha (BUMN, BUMD, BUMS, BUMDES) - Mitra Pembangunan. - Pendamping Perhutanan Sosial: - Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil, - Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, - Bakti Rimbawan, - Penyuluh K/L Terkait, - Penyuluh Kehutanan Swasta, - Badan Usaha Milik Negara, - Lembaga Swadaya Masyarakat, - Organisasi Masyarakat, - Praktisi, - Akademisi, - Tokoh Masyarakat, atau Tokoh Adat.	-	65	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	65	65	65	65	65	65	65	Jumlah Tenaga Penamping Per- hutanan Sosial

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	Pengembangan kemitraan kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan				1. Pemerintah Pusat (KLHK dan K/L terkait) 2. Pemerintah Daerah (OPD Terkait) 3. Lembaga Legislatif 4. Dunia Usaha (BUMN, BUMD, BUMS, BUMDES) 5. Akademisi/ Perguruan Tinggi 6. Mitra Pembangunan 7. Lembaga Penelitian Tokoh Masyarakat.	-	33	
1.8	Pengendalian kebakaran hutan dan lahan	(*)PPI						
	- Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan - BKSDA (SKW III)	Tulang Bawang Barat	1373	KPA			1373	
	- Pencegahan kebakaran hutan dan lahan - BKSDA	Tulang Bawang Barat	1373	KPA			1373	
	Patroli Terpadu (Patdu) Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	PPIKarhutla (Posko Desa)			Manggala Agni, TNI, POLRI, Masyarakat Peduli Api (MPA)	1	2	
	Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	PPIKarhutla (kelompok masy)			Manggala Agni, Masyarakat, dinas terkait, UPT Ditjen KSDAE	1	2	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	33	33	33	33	33	33	33	Jumlah Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
	1373	1373	1373	1373	1373	1373	1373	
	1373	1373	1373	1373	1373	1373	1373	
	2	2	2	2	2	2	2	
	2	2	2	2	2	2	2	

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Darat	PPIKarthutla			Manggala Agni, BPBD, TNI, POLRI, Brigdalkar UPT KLHK, dinas, perusahaan pemegang ijin, masyarakat			
	• Program Kampung Iklim (Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim)	PPIKarthutla (desa/ lokasi)			Masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, perusahaan/ swasta, dll.	3	10	
1.9	Dinas LH Prov Mitigas dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dinas LH						

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	10	10	10	10	10	10	10	

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	Dinas LH Prov Penyelenggaraan dan Dukungan Program Kampung Iklim (ProKlim)	Kab. Tanggamus (7 proklam) Kab. Pringsewu (3 proklam) Kab.Lampung Barat (6 proklam) Kab. Lampung Timur (4 proklam) Kab. Lampung Tengah (3 proklam) Kota Metro (1 proklam dan 1 mitigasi enegi) Kab. Pesawaran (1 proklam) Kab. Mesuji (2 proklam)		APL	DLH Provinsi, DLH Kab/Kota, dan LSM terkait			

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	Dinas LH Prov Pembuatan Taman Kehati	Kab. Lampung Barat (2 lokasi Taman Kehati) - Pekon Keagungan - Pekon Kubu Perahu Kab. Mesuji - Desa Mekar Sari Kab. Lampung Timur - Desa Sukacari Kab. Tanggamus Pekon Teba	8 ha 86,68 10 ha 10 ha 3,2 ha	APL	DLH Provinsi, DLH Kab/Kota, dan LSM terkait.			

TABEL 3.14. | Rencana Aksi Mitigasi RO-1 dari Dinas Kehutanan [KPH] di Provinsi Lampung

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
R0-8	Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral (R01)	Lampung Barat Mesuji Tulang Bawang Way Kanan Total	69,89 5,10 47,21 387,51 509,71	KPH Bukit Punggur, KPH Liwa, TN, SM, HL, APL		51,08	51,08	
OPD	Dinas Kehutanan							
1	Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi							
	• Organisasi KPH yang Efektif	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	1.116	1.116	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	51,08	51,08	51,08	51,08	51,08	51,08	51,08	
	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	Akumulasi luas areal (ha)

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Sosialisasi	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	1.116	1.116	
	• Perlindungan	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	1.116	1.116	
	• Penanaman	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	1.116	1.116	
	Wasdal	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	1.116	1.116	
	Pengelolaan hutan lestari dan usaha kehutanan							
	• Pengembangan pengelolaan melalui HKM	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	1.116	1.116	
	• Pengembangan luasan pemanfaatan HHBK di hutan lindung	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	1.116	1.116	
	• Pembinaan masyarakat sekitar hutan peningkatan produktivitas usahatani	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	1.116	1.116	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	Akumulasi luas areal (ha)
	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	Akumulasi luas areal (ha)
	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	Akumulasi luas areal (ha)
	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	Akumulasi luas areal (ha)
	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	Akumulasi luas areal (ha)
	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	Akumulasi luas areal (ha)
	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	Akumulasi luas areal (ha)

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	Pembinaan konservasi ekosistem esensial	KPH Pematang Neba (Tanggamus, Pringsewu)	15	HL	KPH, KTH, BKSDA	1.8	1.8	
	Bina usaha perhutanan sosial dan hutan adat	KPH Pematang Neba (Tanggamus, Pringsewu)	20.000	HL	KPH, KTH, BPHL, BPSKL		2.500	
	Bina usaha perhutanan sosial dan hutan adat							
	• Industri nilai tambah produk	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	1.116	1.116	
	• Kemitraan investasi/usaha	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	1.116	1.116	
	• Pemasaran/ promosi produk perhutanan sosial	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	1.116	1.116	
	• Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	1.116	1.116	
	• Pembinaan masyarakat sekitar hutan untuk peningkatan produktivitas usahatani	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	HL Reg.41	1.116	1.116	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	Luas KEE yang dibina
	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Luas lahan PS dan hutan adat yang dibina untuk usaha PS
	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	Akumulasi luas areal (ha)
	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	Akumulasi luas areal (ha)
	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	Akumulasi luas areal (ha)
	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	Akumulasi luas areal (ha)
	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	Akumulasi luas areal (ha)

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	Penyiapan kawasan perhutanan sosial	KPH Pematang Neba (Tanggamus, Pringsewu)	1.300	HL	KPH, KTH, BPHL, BPSKL	1.116	1.116	
	Penyiapan kawasan perhutanan sosial	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	1.116	1.116	
	Pencegahan dan pengamanan hutan	KPH Pematang Neba (Tanggamus, Pringsewu)	5.236	HL	KPH, KTH, GAKKUM		650	
	Pencegahan dan pengamanan hutan							
	• Operasi pengamanan Kawasan hutan	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	1.116	1.116	
	• Operasi peredaran hasil hutan ilegal	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	1.116	1.116	
	• Kegiatan patroli, sosialisasi dan operasi lapang untuk pencegahan ancaman/ gangguan	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	1.116	1.116	
	• Penagakan hukum pidana untuk penegahan kebakaran, pembalakan dan perambahan	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	1.116	1.116	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	Akumulasi luas areal (ha)
	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	Akumulasi luas areal (ha)
	650	650	650	650	650	650	686	
	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	Akumulasi luas areal (ha)
	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	Akumulasi luas areal (ha)
	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	Akumulasi luas areal (ha)
	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	Akumulasi luas areal (ha)

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Penyadartahuan tentang pengamanan hutan	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	1.116	1.116	
	Pengendalian kebakaran hutan dan lahan							
	• Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	KPH Way Waya	23.146	HL	KPH, MPA		23.146	
	• Pencegahan kebakaran hutan dan lahan	KPH Way Waya	23.146	HL	KPH, MPA	23.146	23.146	
	• Kegiatan operasi pemadaman untuk penurunan luas kebakaran hutan	KPH Way Waya	23.146	HL	KPH, MPA	23.146	23.146	
	• Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	1.116	1.116	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	Akumulasi luas areal (ha)
		23.146		23.146		23.146		Terbentuknya 3 Regu MPA dan Tersedianya Sarpras di wilayah Kerja KPH Way Waya Seluas 23.146 Ha
	23.146	23.146	23.146	23.146	23.146	23.146	23.146	Tercegahnya Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kerja KPH Way Waya Seluas 23.146 Ha
	23.146	23.146	23.146	23.146	23.146	23.146	23.146	Pemadaman Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kerja KPH Way Waya Seluas 23.146 Ha
	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	Akumulasi luas areal (ha)

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Pencegahan kebakaran hutan dan lahan	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	1.116	1.116	
	• Kegiatan operasi pemadaman untuk penurunan luas kebakaran hutan	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	1.116	1.116	
	• Penerapan penyiapan lahan tanpa bakar	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	1.116	1.116	
	• Pembinaan peladang berpindah melakukan kegiatan pertanian menetap	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	1.116	1.116	
	• Penyadartahuan tentang kebakaran hutan dan lahan	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	1.116	1.116	
	• Fasilitas penyelenggaraan mitigasi perubahan iklim	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	1.116	1.116	
	• Kajian dan penelitian mengenai kegiatan pengendalian karhutla	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK			
	Peningkatan penyuluhan dan pengembangan SDM							

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	Akumulasi luas areal (ha)
	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	Akumulasi luas areal (ha)
	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	Akumulasi luas areal (ha)
	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	Akumulasi luas areal (ha)
	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	Akumulasi luas areal (ha)
	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	Akumulasi luas areal (ha)

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Peningkatan penyuluhan	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK			
	• Penyelenggaraan diklat aparatur/non aparatur	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK			
	• Penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK			
	Pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan							
	• Pemulihan kerusakan lahan bekas tambang	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK			
	• Pembinaan kepada para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemulihan kerusakan lahan bekas tambang	KPH Bukit Punggur	1.116	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK			

[illegible]

TABEL 3.15. | Rencana Aksi Mitigasi R0-1 dari OPD Terkait [OPD Non-Kehutanan] di Provinsi Lampung

No	Rencana Operasional (R0), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
R0-1	Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral (R01)	Lampung Barat Mesuji Tulang Bawang Way Kanan Total	69,89 5,10 47,21 387,51 509,71	KPH Bukit Punggur, KPH Liwa, TN,SM,HL, APL		51,08	51,08	
OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)								
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	
	• Penyusunan,dan pemantauan pelaksanaan RPJMD dan Review RPJMD yang mengintegrasikan isu pembangunan rendah emisi				OPD Prov, UPT KLHK	1	1	
	• Penyusunan,dan pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah-Gas Ruamh Kaca (RAD-GRK)				OPD Prov, UPT KLHK	1	1	
OPD Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura								
1	Pengembangan penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan				OPD Prov, UPT KLHK	90	90	
	• Pengembangan pekarangan dan diversifikasi pangan lokal				OPD Prov, UPT KLHK	20	20	
2	Pengembangan distribusi pangan				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	

[illegible]

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Pengembangan lumbung pangan masyarakat				OPD Prov, UPT KLHK	40	40	
3	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	
	• Pengembangan tanaman terpadu, pengembangan budidaya tanaman pangan				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	
4	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	
	• Pengembangan, hortikultura, buah dan urban farming				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	
5	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura.				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	
	• Pengembangan pola tumpang sari dan pemanfaatan lahan kering				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	
6	Program Peningkatan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH.				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	

[illegible]

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Pengolahan produk dan fasilitasi pemasaran produk pertanian				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	
7	Program Peningkatan Pelayanan dan pengembangan Agribisnis Pertanian.				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	
	• Fasilitasi permodalan dan pendampingan usaha agribisnis				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	
OPD	Dinas Perkebunan							
1	Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	
	• Intensifikasi tanaman perkebunan				OPD Prov, UPT KLHK	2.7	2.7	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkebunan				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	
	• Ketersediaan sarana dan prasarana perkebunan				OPD Prov, UPT KLHK	100	100	
3	Peningkatan pasca panen produk perkebunan				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	
	• Ketersediaan sarana dan prasarana perkebunan				OPD Prov, UPT KLHK	100	100	

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
OPD Dinas Peternakan dan Keswan								
	Program Peningkatan PDRB peternakan				OPD Prov, UPT KLHK	5	5	
	• Peningkatan produksi ternak (daging dan telur)				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	
	• Pengolahan limbah dan biogas				OPD Prov, UPT KLHK		4	
	• Pengembangan pakan (legume)				OPD Prov, UPT KLHK		4	
OPD Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif								
1	Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	
	• Peningkatan kapasitas SDM dan fasilitasi ekonomi kreatif				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	
	• Pengembangan industri hijau				OPD Prov, UPT KLHK	10	10	
OPD Perindustrian dan Perdagangan								
1	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	
	• Peningkatan jumlah unit usaha industri				OPD Prov, UPT KLHK	50	50	
2	Program Pengembangan Sumber Daya Industri				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	

[illegible]

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Peningkatan akses pada sumberdaya industri				OPD Prov, UPT KLHK	50	50	
3	Peningkatan perdagangan dalam negeri				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	
	• Peningkatan volume perdagangan				OPD Prov, UPT KLHK	5	5	
4	Peningkatan perdagangan luar negeri				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	
	• Peningkatan volume perdagangan				OPD Prov, UPT KLHK	5	5	
OPD	Pertanahan							
	Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pertanahan				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	
	• Peningkatan tata Kelola dan pengendalian pertanahan				OPD Prov, UPT KLHK	100	100	
OPD	Lingkungan Hidup							
1	Program Tata Lingkungan dan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	
	• Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi				OPD Prov, UPT KLHK	100	100	
2	Program Penegakan Hukum terhadap Kerusakan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	Peningkatan penataan pelaku usaha terkait aspek lingkungan				OPD Prov, UPT KLHK	100	100	
OPD	Penanaman Modal							
1	Program peningkatan jumlah investasi				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	
	Peningkatan layanan investasi				OPD Prov, UPT KLHK	100	100	

[illegible]

3.5. Rencana Operasional Aksi Mitigasi - Penerapan Pengayaan Hutan Alam [R05]

Rencana Operasional aksi Mitigasi untuk Penerapan Pengayaan Hutan Alam [RO-5] di Provinsi Lampung mencakup luasan 1,71 ha yang akan dilakukan pada kawasan hutan dengan rincian HL=0,97 ha dan SM=0,74 ha. Sedangkan ditinjau dari wilayah administratif, rencana operasional aksi mitigasi akan dilakukan di wilayah Pesisir Barat seluas 0,02 ha dan di Way Kanan seluas 1,69 ha.

TABEL 3.16. | Luas Areal R05 - Penerapan Pengayaan Hutan Alam per Kabupaten dan Fungsi Kawasan

Kabupaten	APL (Ha)	Fungsi Kawasan Hutan (Ha)		Luas (Ha)
		HL	SM	
Pesisir Barat	-	0,02	-	0,02
Way Kanan	-	0,95	0,74	1,69
Luas (Ha)	-	0,97	0,75	1,71

Sedangkan rencana aksi Penerapan Pengayaan Hutan Alam pada wilayah KPH hanya dilakukan di KPH Bukit Punggur dengan target luasan 0,95 ha.

TABEL 3.16. | Luas Areal R05 - Penerapan Pengayaan Hutan Alam pada KPH per Kabupaten dan Fungsi Kawasan

Kabupaten	HL	Luas (Ha)
Way Kanan		
KPH Bukit Punggur	0,95	0,95
Luas (Ha)	0,95	0,95

Secara spasial, sebaran areal areal RO5 - Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Provinsi Lampung di Provinsi Lampung disajikan pada peta sebagai berikut.



Gambar 3.6. Sebaran areal RO5 - Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Provinsi Lampung

Adapun rincian program kerja RO5 - Penerapan Pengayaan Hutan Alam yang akan dilaksanakan oleh UPT KLHK dan berbagai dinas terkait atau OPD di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 3.18.

TABEL 3.18. | Rencana Kerja Operasional Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan (R05) oleh UPT KLHK

No	Rencana Operasional (R0), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
R05	Penerapan Pengayaan Hutan Alam (R05)	Way Kanan	0,74	Konservasi		0,74	0,74	
1	Peningkatan usaha jasa lingkungan dan HHBK	(*) PHL						
	Produksi HHBK		1.116					
	Pengayaan jenis Tanaman Pendukung Produksi HHBK jasa lingkungan	Blok Rehabilitasi – Blok Tradisional TAHURA WAR (Kabupaten Pesawaran)	1.116	525,98 472,02	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD KPHK TAHURA WAR, BPDASHL WSS, Ditjen KSDAE, Mitra NGO, KTH, Akademisi	5,98 2,02	50 20	

TABEL 3.19. | Rencana Kerja Operasional Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan (R05) oleh Dinas Kehutanan [KPH] Provinsi Lampung

No	Rencana Operasional (R0), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
R05	Penerapan Pengayaan Hutan Alam (R05)	Pesisir Barat, Way Kanan	1,71	KPH Bukit Punggur, TN, SM, HL, APL	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD KPHK TAHURA WAR, BPDASHL WSS, Ditjen KSDAE, Mitra NGO, KTH, Akademisi	1,71	1,71	
1	Peningkatan usaha jasa lingkungan dan HHBK							

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	Akumulasi luas (ha)
	50 50	100 100	50 50	50 50	20 20			Luas (ha)

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	Akumulasi luas (ha)

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	Pengayaan Jenis Tanaman Pendukung Produksi HHBK Jasa Lingkungan	KPH Tahura Wan Abdul Rahman, Kabupaten Pesawaran (Blok Rehabilitasi)	525,98	Kawasan Konservasi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD KPHK TAHURA WAR, BPDASHL WSS, Ditjen KSDAE, Mitra NGO, KTH, Akademisi	5,98	50	
	Pengayaan Jenis Tanaman Pendukung Produksi HHBK Jasa Lingkungan	KPH Tahura Wan Abdul Rahman, Kabupaten Pesawaran (Blok Tradisional)	472,02	Kawasan Konservasi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD KPHK TAHURA WAR, BPDASHL WSS, Ditjen KSDAE, Mitra NGO, KTH, Akademisi	2,02	20	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	50	100	100	100	50	50	20	Luas (ha)
	50	100	100	50	50	50	50	

3.6. Rencana Operasional Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C – RO6

Pengembangan pengelolaan hutan lestari difokuskan untuk lahan yang rendah produktivitas sehingga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lahan tersebut. Rencana pengelolaan hutan lestari dan usaha kehutanan merupakan upaya optimalisasi fungsi hutan antara lain melalui optimalisasi pembangunan hutan tanaman, Pengembangan hutan tanaman energi (PHE), Bina usaha perhutanan sosial (PS) dan hutan adat, Pengembangan Usaha PS dan Hutan Adat, dan sistem pengelolaan hutan RIL-C.

Kegiatan pemanenan hutan alam akan meningkatkan emisi karbon sehingga perlu pengembangan prosedur dan penggunaan teknologi pembalakan yang lebih ramah lingkungan. *Reduce impact logging* (RIL) adalah aktivitas pemanenan hutan dalam rangka mengurangi kerusakan tegakan tinggal dan lingkungan. Penyempurnaan RIL untuk memaksimalkan manfaat karbon hutan ini disebut sebagai *Reduced impact logging – carbon* (RIL-C). Diketahui bahwa *Reduced Impact Logging-Carbon* (RIL-C) adalah teknik pemanenan hutan yang berdampak rendah karbon sehingga mendapatkan volume produksi sesuai target tanpa berdampak pada degradasi hutan dan tetap meningkatkan pertumbuhan stok karbon hutan. Di Provinsi Lampung, rencana operasional aksi mitigasi penerapan RIL-C (RO 6) yaitu di KPH Sungai Buaya yang saat ini dikelola oleh PT Silva Inhutani – Lampung seluas 83,48 Ha yang merupakan Hutan Rawa Sekunder.

TABEL 3.20. | Luas Areal RO6 – Penetapan RIL-C per Kabupaten dan Fungsi Kawasan

Kabupaten	APL (Ha)	Fungsi Kawasan Hutan (Ha)	Luas (Ha)
		HP	
Mesuji		83,48	83,48
Luas (Ha)		83,48	83,48

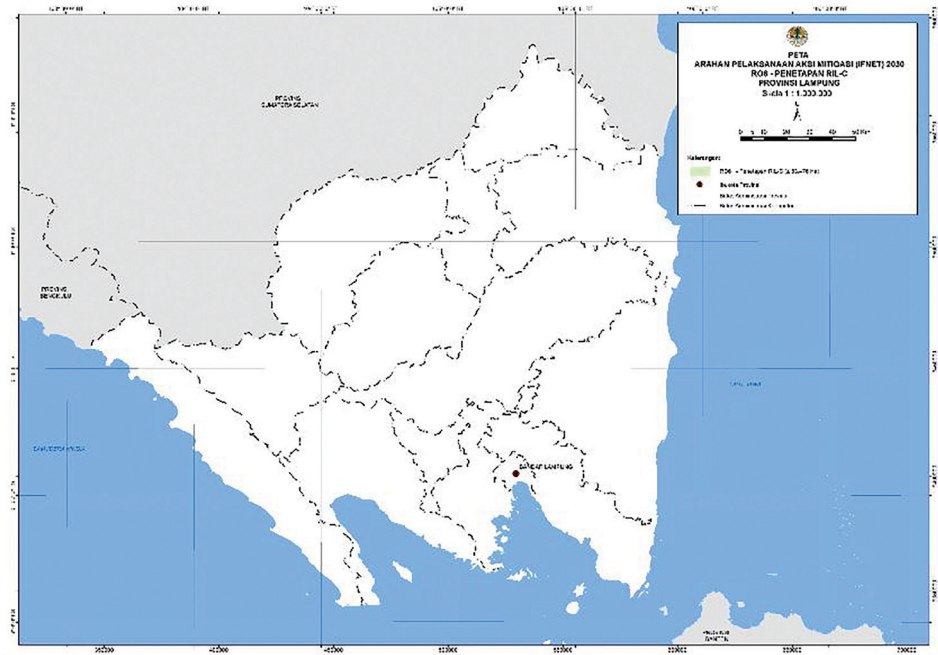
TABEL 3.21. | Luas Areal RO6 – Penetapan RIL-C pada KPH per Kabupaten dan Fungsi Kawasan

Kabupaten / KPH	HL	Luas (Ha)
Mesuji		
KPH Sungai Buaya	83,48	83,48
Luas (Ha)	83,48	83,48

TABEL 3.22. | Luas Areal RO6 - Penetapan RIL-C pada PBPH per KPH

KPH / PBPH	Luas (Ha)
KPH Sungai Buaya	
PT SILVA INHUTANI LAMPUNG	83,48
Luas (Ha)	83,48

Secara spasial, sebaran areal areal RO6 - Penerapan RIL-C di Provinsi Lampung disajikan pada peta sebagai berikut.

*Gambar 3.7. Sebaran Areal RO6 - Penetapan RIL-C di Provinsi Lampung*

Aksi Mitigasi untuk Pengelolaan Hutan Lestari (RO-6) secara rinci disajikan pada Tabel 3.23 [diampu oleh unit dibawah KLHK] dan Tabel 3.24 [diampu oleh Dinas Kehutanan/KPH] di Provinsi Lampung serta Tabel 3.25 (Diampu oleh OPD Terkait di Provinsi Lampung).

TABEL 3.23. | Aksi Mitigasi RO-6 yang diampu oleh UPT Kementerian KLHK di Provinsi Lampung

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
R05	Pengelolaan Hutan Lestari (R06)	Mesuji	0,95	PD	• Pemerintah Pusat (KLHK: Ditjen PSKL, BP2SDM - Pusluh, Ditjen PKTL). • Pemerintah Daerah (Dishut/DLHK, KPH) • Pokja Perhutanan Sosial Provinsi • Mitra Pembangunan. Pendamping Perhutanan Sosial	0,95	0,95	
1	Pengembangan Usaha PS dan Hutan Adat							
	• Penyusunan Rencana Kerja/ Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial untuk mendapatkan pengesahan				• Pemerintah Pusat (KLHK: Ditjen PSKL, BP2SDM - Pusluh, Ditjen PKTL) • Pemerintah Daerah (Dishut/DLHK, KPH) • Pokja Perhutanan Sosial Provinsi • Mitra Pembangunan. Pendamping Perhutanan Sosial			
	• Pengembangan fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan				• Pemerintah Pusat (KLHK: Ditjen PSKL; Kementan; KemenKop UKM; Kemenperind; KKP; Kemendes, Kemenparekraf) • Pemerintah Daerah (Dishut/DLHK, OPD terkait lainnya) • Dunia Usaha (BUMN, BUMD, BUMS) Mitra Pembangunan.		1	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	Akumulasi luas (ha)
	1							Jumlah Rencana Kerja/ Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan
								Jumlah fasilitasi Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk ditingkatkan menjadi kelas gold/ platinum				- Pemerintah Pusat (KLHK: Ditjen PSKL, Kementan; Kemenko UKM; Kemenperind; KKP; Kemendes, Kemenparekraf) - Pemerintah Daerah (Dishut/DLHK, OPD terkait lainnya). - Dunia Usaha (BUMN, BUMD, BUMS, BUMDES). - Pokja Perhutanan Sosial Provinsi. - Mitra Pembangunan. Pendamping Perhutanan Sosial			
2	Kemitraan Lingkungan	Definitif PS	0.95					
	Pengembangan dan peningkatan tenaga pendamping Perhutanan Sosial				- Organisasi Masyarakat, - Praktisi, - Akademisi, - Tokoh Masyarakat atau, Tokoh Adat.	1	1	
	Pengembangan kemitraan kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan				- Pemerintah Pusat (KLHK dan K/L terkait) - Pemerintah Daerah (OPD Terkait) - Lembaga Legislatif - Dunia Usaha (BUMN, BUMD, BUMS, BUMDES) - Akademisi/ Perguruan Tinggi - Mitra Pembangunan - Lembaga Penelitian Tokoh Masyarakat	1	1	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
								Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas Gold/Platinum
	1	1	1	1	1	1	1	Jumlah tenaga pendamping perhutanan sosial
	1	1	1	1	1	1	1	Jumlah Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

TABEL 3.24. | Aksi Kititigas R0-6 yang diampu oleh Dinas Kehutanan [KPH] di Provinsi Lampung

No	Rencana Operasional (R0), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
R06	Pengelolaan Hutan Lestari (R06)	Mesuji	83,48	KPH Sungai Buaya, HP Reg. 45	Dishut Prop, KPH, PT. SIL		10,56	
1	Penyiapan Kawasan perhutanan sosial							
	Pemberian akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat	KHP 45	HP Reg. 45	Dishut Prop, KPH, PT. SIL			10,56	

TABEL 3.25. | Aksi Kititigas R0-6 yang diampu oleh OPD Terkait di Provinsi Lampung

No	Rencana Operasional (R0), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
1	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura							
1.1	Program Peningkatan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH.	Mesuji	83.48	HP	Dishut Prop, KPH, PT. SIL	1	1	
	Pengolahan produk dan fasilitasi pemasaran produk pertanian	Mesuji	83.48	HP	Dishut Prop, KPH, PT. SIL	1	1	

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
1.2	Program Peningkatan Pelayanan dan pengembangan Agribisnis Pertanian.	Mesuji	83.48	HP	Dishut Prop, KPH, PT. SIL	1	1	
	• Fasilitas permodalan dan pendampingan usaha agribisnis	Mesuji	83.48	HP	Dishut Prop, KPH, PT. SIL	1	1	
1.3	Program Pengembangan, Peningkatan Kualitas SDM Pertanian, dan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan.	Mesuji	83.48	HP	Dishut Prop, KPH, PT. SIL	1	1	
	• Penguatan kelembagaan petani dan kapasitas penyuluh	Mesuji	83.48	HP	Dishut Prop, KPH, PT. SIL	1	1	
2	Dinas Perkebunan							
2.1	Peningkatan kelembagaan perkebunan	Mesuji	83.48	HP	Dishut Prop, KPH, PT. SIL	1	1	
	Pendampingan kelembagaan petani perkebunan	Mesuji	83.48	HP	Dishut Prop, KPH, PT. SIL	100	100	
3	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif							
3.1	Program Peningkatan daya Tarik pariwisata	Mesuji	83.48	HP	Dishut Prop, KPH, PT. SIL	1	1	

[illegible]

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Pengelolaan daya Tarik dan kawasan stratgeis pariwisata	Mesuji	83.48	HP	Dishut Prop, KPH, PT. SIL	1	1	
4 Perindustrian dan Perdagangan								
4.1	Program Peningkatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri	Mesuji	83.48	HP	Dishut Prop, KPH, PT. SIL	1	1	
	• Peningkatan nilai investasi	Mesuji	83.48	HP	Dishut Prop, KPH, PT. SIL	50	50	
5 Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pemukiman								
5.1	Penyelenggaraan penetaan ruang	Mesuji	83.48	HP	Dishut Prop, KPH, PT. SIL	1	1	
	• Pengendlaian pemanfaatan ruang	Mesuji	83.48	HP	Dishut Prop, KPH, PT. SIL	100	100	
	• Penyusunan dokumen evaluasi lingkungan hidup untuk infrastruktur jalan	Mesuji	83.49	HP	Dishut Prop, KPH, PT. SIL	1	1	

[illegible]

3.7. Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi [RO7]

Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) sebagai salah satu aksi mitigasi adalah tindakan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan terdegradasi. Dengan demikian akan dapat meningkat kualitas dan produktivitasnya sehingga dapat mendukung sistem ekologi dan jasa lingkungan termasuk peningkatan simpanan karbon. Adapun tujuan dari RHL adalah menurunkan laju deforestasi juga degradasi hutan maupun lahan sekaligus memulihkan lahan kritis sehingga bisa memperbaiki tata air dan fungsi ekonomi dari lahan berbasis lanskap. Dengan demikian dalam pemilihan lokasi hutan dan lahan untuk kegiatan mitigasi peningkatan cadangan karbon (RO7) hendaknya memenuhi kriteria pemilihan lokasi kawasan, sebagai berikut: kawasan hutan di lahan mineral kecuali PBPHm PIAPS, APL dan HGU. Adapun rincian rencana operasional aksi tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.26.

TABEL 3.26. | Luas Areal RO7 - Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi per Kabupaten dan Fungsi Kawasan

Kabupaten	APL (Ha)	Fungsi Kawasan Hutan (Ha)		Luas (Ha)
		HL	HP	
Lampung Tengah	13,42	-	-	13,42
Lampung Utara	0,02	-	7.532	7.532,29
Mesuji	210,78	-	23.371	23.581,82
Pesawaran	0,00003	-	1.083,81	1.083,81
Tulang Bawang	9.346,50	-	0.61	9.347,10
Tulang Bawang Barat	0.40	-	9.386	9.386,09
Way Kanan	248,71	1,37	4.0673,58	40.923,67
Luas (Ha)	9.819,83	1,37	82.047	91.868,20

Berdasarkan table 3,23, Luas Areal RO7 per Kabupaten dan Fungsi Kawasan dapat diketahui bahwa terdapat 9.819,83 di APL, 1,37 Ha di HL dan 82.046,99 Ha di HP, sehingga totalnya seluas 91.868,20 Ha. Selanjutnya ketika diuraikan berdasarkan luasan rencana mitigasi pe KPH pada Tabel 3.27 di bawah ini maka dapat dilihta bahwa ada perbedaan luasan 23,93 Ha karena ada tambahan Kawasan hutan dari Sumatera Selatan dan belum masuk menjadi wilayah KPH di Provinsi Lampung.

TABEL 3.27. | Luas Areal R07 - Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi pada KPH per Kabupaten dan Fungsi Kawasan

Kabupaten / KPH	Fungsi Kawasan Hutan (Ha)		Luas (Ha)
	HL	HP	
Lampung Utara			
KPH Muara Dua	-	7.532.27	7.532.27
Mesuji			
KPH Sungai Buaya	-	23.371,03	23.371,03
Pesawaran			
KPH Pesawaran	-	1.083.81	1.083,81
Tulang Bawang			
KPH Sungai Buaya	-	0.61	0,61
Tulang Bawang Barat			
KPH Muara Dua	-	9.385.68	9.385,68
KPH Sungai Buaya	-	0.01	0,01
Way Kanan			
KPH Bukit Punggur	1,37	12.459.14	12.460,51
KPH Muara Dua	-	28.190.51	2,8190,51
Luas (Ha)	1,37	82.023	82,024,43

Di KPH Sungai Buaya, kawasan hutan yang akan dipakai untuk mitigasi seluas 23.371,65 Ha yang semuanya berada di lokasi PT Silva Inhutani. Dari total luas ini, seluas 2.227,73 Ha merupakan perkebunan dan seluas 20.770,61 Ha merupakan pertanian lahan kering. Pada lokasi KPH Pesawaran, seluas 1.083,81 Ha merupakan lahan pertanian lahan kering campur yang diperuntukan untuk mitigasi dan berada di wilayahnya PT Inhutani V Way Rebang Muara Dua. Adapun di KPH Muara Dua terdapat 45.108,46 Ha yang direncanakan untuk mitigasi secara R07. Dari luasan total tersebut dikelola oleh PT Budi Lampung Sejahtera seluas 9.059,91 Ha dan seluas 36.030,75 Ha dikelola PT Inhutani V Way Rebang Muara Dua. Berdasarkan peta yang ada diketahui bahwa seluas 13.646,234 Ha merupakan perkebunan (yang seluas 8.890,78 terletak di PT Budi Lampung Sejahtera dan 4.755,16 Ha di PT Inhutani V), seluas

31.404,85 Ha adalah pertanian lahan kering (123,44 Ha di lokasi PT Budi Lampung Sejahtera dan 31.266,29 Ha di PT Inhutani V), dan seluas 55,75 Ha merupakan lahan pertanian lahan kering campur (45,69 Ha di PT Budi Lampung Sejahtera dan 9,30 Ha di PT Inhutani V), serta seluas 1,63 Ha merupakan sawaah. Di lokasi KPH Bukit Punggur terdapat seluas 12.460,51 Ha yang direncanakan untuk kegiatan mitigasi secara RO7, merupakan hutan lindung seluas 1,37 Ha dan 12.459,14 Ha hutan produksi. Dari luas total di KPH Bukit Punggur ini, seluas 367,38 Ha merupakan perkebunan dimana seluas 313,81 berada di PT Inhutani V, seluas 24,65 Ha merupakan lahan terbuka, seluas 3.681,09 Ha merupakan lahan pertanian lahan kering (seluas 1.745,54 Ha berada di PT Inhutani V), dan seluas 8.387,40 Ha merupakan pertanian lahan kering campur dimana seluas 2.999,88 Ha ada di lokasi PT Inhutani V.

Data pada Tabel 3.28., diketahui Luas Areal RO7 pada PBPH per KPH di bawah ini menunjukkan adanya 74.720,55 Ha kawasan hutan yang dikelola oleh PBPH dan seluas 2,27 Ha dikelola oleh Perusahaan Gas Negara. Artinya, dari 82.024,43 Ha hutan di Provinsi Lampung yang untuk mitigasi berdasarkan RO7 maka terdapat 74.722,82 Ha yang dikelola oleh PBPH dan Perusahaan Gas Negara.

TABEL 3.28 | Luas Areal RO7 – Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi pada BPH per KPH

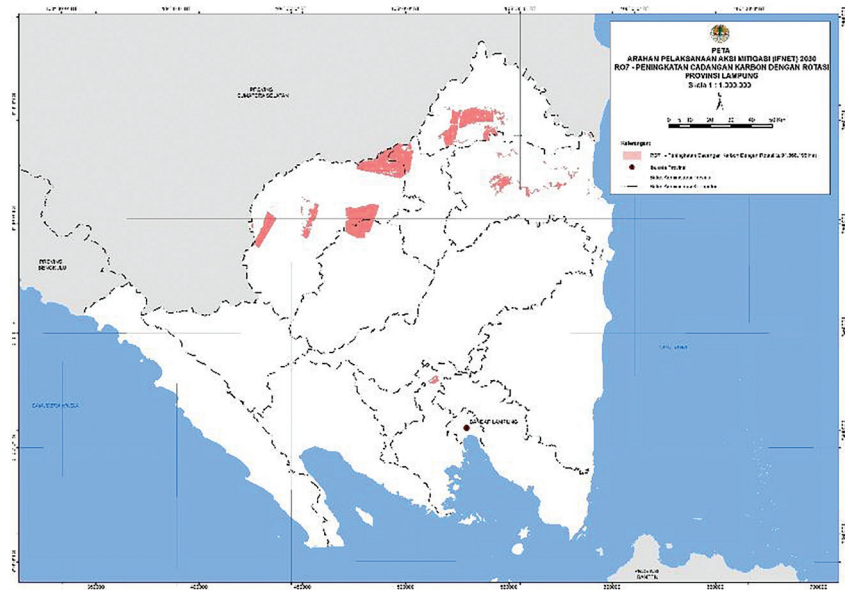
KPH / PBPH	Luas (Ha)
KPH Bukit Punggur	
PT INHUTANI V WAY REBANG MUARA DUA	5.059,22
KPH Muara Dua	
PT BUDI LAMPUNG SEJAHTERA	9.059,91
PT INHUTANI V WAY REBANG MUARA DUA	36.030,75
KPH Pesawaran	
PT INHUTANI V WAY REBANG MUARA DUA	1.083,81
KPH Sungai Buaya	
PT SILVA INHUTANI LAMPUNG	23.371,65
APL	
PT BUDI LAMPUNG SEJAHTERA	0,00
PT INHUTANI V WAY REBANG MUARA DUA	0,08

KPH / PBPH	Luas (Ha)
PT SILVA INHUTANI LAMPUNG	115,12
Luas (Ha)	74.720,55

TABEL 3.29. | Luas Areal RO7 – Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi pada PPKH per KPH

Kabupaten / KPH	Luas (Ha)
KPH Muara Dua	
Perusahaan Gas Negara, PT	2,27
Luas (Ha)	2,27

Berdasarkan uraian sebelumnya tentang rencana mitigasi berdasarkan RO7 di Provinsi Lampung maka dapat digambarkan sebagaimana peta di bawah ini (Gambar 3.8)



Gambar 3.8. Sebaran Areal RO7 - Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Provinsi Lampung

Di Provinsi Lampung juga ada beberapa UPT KLHK yang mempunyai rencana kegiatan mitigasi melalui RO7. Data dan informasi tentang rencana kegiatan mitigasi UPT KLHK

tersebut sebagaimana yang diuraikan pada Tabel 3.31.

Secara rinci aksi mitigasi yang dilakukan oleh UPT KLHK, Dinas Kehutanan/KPH dan OPD Provinsi Lampung yang terkait disajikan pada Tabel 3.30 sd. Tabel 3.32

TABEL 3.30. | Rencana Operasional Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi (R07) oleh UPT KLHK di Provinsi Lampung

No	Rencana Operasional (R0), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
1	Peningkatan cadangan Karbon Dengan Rotasi (R07) BPHP	1. Lampung Tengah 2. Lampung Utara 3. Mesuji 4. Pesawaran 5. Tulang Bawang 6. Tulang Bawang Barat 7. Way Kanan	13 7.532 23.581 1.083 9.347 9.386 40.923	APL	Dishut, UPT KLHK, OPD Prov	2.620 120.4 1.042,8 4.465	2.620 120.4 1.042,8 4.465	
1.1	Pengelolaan hutan lestari dan usaha kehutanan BPHP (Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfatan Hutan)	(*)PHL		APL	Dishut, UPT KLHK, OPD Prov	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	
1.2	BPHP Peningkatan Tertib luran dan Penatausahaan Hasil Hutan			APL	Dishut, UPT KLHK, OPD Prov			

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	"	"	"	"	"	"	"	luas Areal (Ha)
	2.620 120.4	2.620 120.4	2.620 120.4	2.620 120.4	2.620 120.4	2.620 120.4	2.620 120.4	
	1.042,8	1.042,8	1.042,8	1.042,8	1.042,8	1.042,8	1.042,8	
	4.465"	4.465"	4.465"	4.465"	4.465"	4.465"	4.465"	
	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	Terfasilitasi dan Terbinanya PBPH

	- BPHP - Fasilitasi dan Pembinaan tertib iuran dan penatausahaan hasil hutan			APL	Dishut, UPT KLHK, OPD Prov	2 badan usaha	2 badan usaha	
	- BPHP - Iuran dan Penatausahaan hasil hutan yang diawasi dan dikendalikan			APL	Dishut, UPT KLHK, OPD Prov	2 badan usaha	2 badan usaha	

TABEL 3.31. | Rencana Aksi Mitigasi RO-7 yang dilakuakn oleh Dinas Kehutanan [KPH] di Provinsi Lampung

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
OPD	Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi (R07)	Lampung Tengah, Lampung Utara, Mesuji Pesawaran, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan	91,868.2	KPH Bukit Punggur, KPH Muara Dua, KPH Pesawaran, KPH Sungai Buaya, di Luar KPH (TN/SM/HL /HPT/APL)	KPH Bukit Punggur, KPH Muara Dua, KPH Pesawaran, KPH Sungai Buaya, di Luar KPH (TN/SM/HL /HPT/APL)	91,868	91,868	
1	Peningkatan usaha jasa lingkungan hutan produksi dan HHBK							
	Penanaman/ pengkayaan pada hutan produksi	KPH Bukit Punggur	12.460,51		Dishutprov,KPH Pemkab Way Kanan,UPT KLHK	12.460	12.460	

	2 badan usaha	2 badan usaha	2 badan usaha	2 badan usaha	2 badan usaha	2 badan usaha	2 badan usaha	Terfasilitasi dan terbinanya tertib iuran dan penatausahaan hasil hutan badan usaha
	2 badan usaha	2 badan usaha	2 badan usaha	2 badan usaha	2 badan usaha	2 badan usaha	2 badan usaha	Terfasilitasi dan terbinanya tertib iuran dan penatausahaan hasil hutan badan usaha

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	91,868	91,868	91,868	91,868	91,868	91,868	91,868	Akumulasi luas (ha)
	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	Akumulasi luas areal (Ha)

2	Pengelolaan hutan lestari dan usaha kehutanan	KPH Bukit Punggur	12.460,51					
	• Produksi hasil hutan kayu	KPH Bukit Punggur	12.460,51		Dishutprov,KPH Pemkab Way Kanan,UPT KLHK	12.460	12.460	
	• Pembangunan kebun bibit rakyat (KBR)	KPH Bukit Punggur	12.460,51		Dishutprov,KPH Pemkab Way Kanan,UPT KLHK	12.460	12.460	
	Pemberian izin perhutanan sosial	KPH Bukit Punggur	12.460,51		Dishutprov,KPH Pemkab Way Kanan,UPT KLHK	12.460	12.460	
3	Pemanfaatan hutan melalui kegiatan rehabilitasi rotasi							
	• Pembinaan teknis pemanfaatan hutan pada kegiatan rehabilitasi HT	KPH Bukit Punggur	12.460,51		Dishutprov,KPH Pemkab Way Kanan,UPT KLHK	12.460	12.460	
	• Fasilitas implementasi mulitiusaha pada PBPH	KPH Bukit Punggur	12.460,51		Dishutprov,KPH Pemkab Way Kanan,UPT KLHK	12.460	12.460	
	• Pembinaan dan pendampingan KPH	KPH Bukit Punggur	12.460,51		Dishutprov,KPH Pemkab Way Kanan,UPT KLHK	12.460	12.460	
	• Dukungan agroforestry di tingkat tapak	KPH Bukit Punggur	12.460,51		Dishutprov,KPH Pemkab Way Kanan,UPT KLHK	12.460	12.460	
	• Pembinaan dan pendampingan KPH	KPH Sungai Buaya	5 000	KHP 45	Dishut, KPH, Perusahaan		625	
	• Dukungan agroforestry di tingkat tapak	KPH Sungai Buaya	800	KHP 45	Dishut, KPH, Perusahaan		100	

	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	Akumulasi luas areal (Ha)
	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	Akumulasi luas areal (Ha)
	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	Akumulasi luas areal (Ha)
	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	Akumulasi luas areal (Ha)
	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	Akumulasi luas areal (Ha)
	12.460	12.460	12.460	12.460	1.116	1.116	1.116	Akumulasi luas areal (Ha)
	12.460	12.460	12.460	12.460	1.8	1.8	1.8	Akumulasi luas areal (Ha)
	625	625	625	625	625	625	625	Terciptanya luasan pembinaan KPH
	100	100	100	100	100	100	100	Terciptanya pola tanam Agroforestry

	• Fasilitas implementasi mulitiusaha pada PBPH	KPH Pesawaran	1 083,81	KHP Reg.18	PT. Inhutani V, Dishut, BPHP VI	120	120	
	• Pembinaan dan pendampingan KPH	KPH Pesawaran	1 083,81	KHP Reg.18	PT. Inhutani V, Dishut, BPHP VI	2 kali	2 kali	
	• Peningkatan jumlah dan kapasitas SD kegiatan rehabilitasi secara rotasi		1 083,81	KHP	PT. Inhutani V, Dishut, BPHP VI	4 kali	4 kali	
4	Bina usaha perhutanan sosial dan hutan adat							
	• Kemitraan investasi/usaha	KPH Bukit Punggur	12.460,51		Dishutprov,KPH Pemkab Way Kanan,UPT KLHK	12.460	12.460	
	• Pemasaran/ promosi produk perhutanan sosial	KPH Bukit Punggur	12.460,51		Dishutprov,KPH Pemkab Way Kanan,UPT KLHK	12.460	12.460	
	• Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat	KPH Bukit Punggur	12.460,51		Dishutprov,KPH Pemkab Way Kanan,UPT KLHK	12.460	12.460	
	• Pembinaan masyarakat sekitar hutan untuk peningkatann produktiviatas usahatani	KPH Bukit Punggur	12.460,51		Dishutprov,KPH Pemkab Way Kanan,UPT KLHK	12.460	12.460	
	• Industri nilai tambah produk	KPH Sungai Buaya	4 000	KHP 45	Perusahaan		500	
	• Kemitraan investasi/usaha	KPH Sungai Buaya	6 000	KHP 45	Perusahaan, Masyarakat		625	
	• Pemasaran/ promosi produk perhutanan sosial	KPH Sungai Buaya	6 000	KHP 45	Perusahaan, Masyarakat		625	

	120	120	120	120	120	120	120	Terbangunnya Hutan Tanaman Industri
	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Terlaksananya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dengan baik
	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	Terlaksananya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dengan baik
	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	Akumulasi luas areal (Ha)
	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	Akumulasi luas areal (Ha)
	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	Akumulasi luas areal (Ha)
	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	12.460	Akumulasi luas areal (Ha)
	500	500	500	500	500	500	500	Terciptanya nilai tambah produksi
	625	625	625	625	625	625	625	Meningkatnya hasil kemitraan
	625	625	625	625	625	625	625	Meningkatnya Pemasaran Hasil

5	Penyiapan Kawasan perhutanan sosial							
	• Pemberian akses Kelola Kawasan hutan oleh masyarakat	KPH Bukit Punggur	12.460,51		Dishutprov,KPH Pemkab Way Kanan,UPT KLHK	12.460	12.460	
	• Pemberian akses Kelola Kawasan hutan oleh masyarakat	KPH Sungai Buaya	3 500	KHP 45	Dishut,KPH Perusahaan		500	
6	Peningkatan penyuluhan							
	• Peningkatan jumlah dan kapasitas SD kegiatan rehabilitasi secara rotasi	KPH Bukit Punggur	12.460,51		Dishutprov,KPH Pemkab Way Kanan,UPT KLHK	12.460	12.460	

Selain itu, ada juga beberapa dinas yang relevan dengan program FOLUNETSINK 2030 di Provinsi Lampung yang mempunyai Rencana Operasional Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotai (RO7) seperti yang diuraikan pada tabel berikut ini:

[illegible]

TABEL 3.32. | Rencana Aksi Mitigasi RO-7 yang dilakukan oleh OPD Terkait di Provinsi Lampung

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
OPD	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura							
1.1	Program Pengembangan, Peningkatan Kualitas SDM Pertanian, dan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan.	Lampung Tengah, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Way Kanan	91.868	APL	UPT KLHK, OPD Prov	7	7	
	• Penguatan kelembagaan petani dan kapasitas penyuluh	Lampung Tengah, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Way Kanan	91.868	APL	UPT KLHK, OPD Prov	15	15	

[illegible]

3.8. Rencana Operasional Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa (Non) Rotasi [R08]

Pengelolaan hutan dan lahan untuk meningkatkan stok karbon non-rotasi dapat dilakukan di kawasan yang tidak berorientasi pada pemanenan kayu lokal (yang ada di lokasi tersebut). Kegiatan ini berlangsung di hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi yang belum dibebani izin pengelolaan dan perhutanan sosial. Sesungguhnya, kegiatan ini dapat dilakukan pada lahan kritis, lahan terbuka dan/atau lahan pasca kebakaran, dan atau di sekitar daerah aliran sungai (DAS) sebagai wilayah prioritas, termasuk danau, bendungan, tanggul atau waduk, serta daerah rawan bencana. Kondisi DAS dapat mencakup batas dan dapat berupa DAS, destinasi wisata nasional, atau ekosistem tertentu. Oleh karena itu, konversi spesies atau pilhan jenis untuk meningkatkan cadangan karbon lokal harus diselaraskan dengan kondisi lokal, tingkat degradasi, dan tujuan lokal, seperti halnya kegiatan penghijauan memperkuat status dan fungsi lokal.

Kriteria tapak yang bisa dipakai mendukung peningkatan stok karbon non-siklus atau non rotasi merupakan areal HP, HL dan HPK (wilayah yang tidak tercakup dalam izin PBPH), juga PIAPS pada tanah mineral (kecuali HTR). Adapun rincian rencana operasional aksi mitigasi yang dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3.33.

TABEL 3.33. | Luas Areal R08 - Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi per Kabupaten dan Fungsi Kawasan

Kabupaten	APL (Ha)	Fungsi Kawasan Hutan (Ha)				Luas (Ha)
		HL	SM	HP	HPT	
Lampung Barat	0,001	236,97	812,08	-	-	1.049,05
Lampung Utara	0,002	0,55	-	24,21	-	24,76
Mesuji	0,15	-	-	4.955,80	-	4.955,94
Pesawaran	-	-	-	190,54	-	190,54
Pesisir Barat	-	92,98	-	-	-	92,98
Tulang Bawang	99,14	-	-	0,42	-	99,56
Tulang Bawang Barat	0,01	-	-	889,65	-	889,66
Way Kanan	325,52	17.418,50	2.827,63	8.027,29	0,001	28.598,94
Luas (Ha)	424,82	17.749,00	3.639,70	14.087,90	0,001	35.901,42

Berdasarkan Tabel 3.33 diatas diketahui bahwa total luasan 35.901,42 Ha di Provinsi Lampung diperuntukan untuk kegiatan mitigasi lewat RO8 yang terdiri atas APL, HL, HP dan SM. Ternyata ada perbedaan luasan 94,93 Ha pada HL karena adanya tambahan luasan hutan dari Sumsel dan belum masuk ke dalam areal kelola KPH di Lampung. Khusus untuk HP, dari 2 tabel tersebut diketahui bahwa ada perbedaan luasan 191,39 Ha HP yang tidak dikelola oleh PBPH di Provinsi Lampung.

TABEL 3.34. | Luas Areal R08 - Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi pada KPH per Kabupaten dan Fungsi Kawasan

Kabupaten	Fungsi Kawasan Hutan (Ha)			Luas (Ha)
	HL	HP	HPT	
Lampung Barat	236,97	-	-	1.049,05
KPH Bukit Punggur	235,02	-	-	235,02
KPH Liwa	0,001	-	-	0,001
Lampung Utara	-	190,54	-	190,54
KPH Bukit Punggur	0,55	-	-	0,55
KPH Muara Dua	-	24,21	-	24,21
Mesuji	-	889,65	-	889,66
KPH Sungai Buaya	-	4.955,80	-	4.955,80
Pesawaran	17.749,00	14.087,90	0,001	35.901,42
KPH Pesawaran	-	190,54	-	190,54
Tulang Bawang				
KPH Sungai Buaya	-	0,42	-	0,42
Tulang Bawang Barat				
KPH Muara Dua	-	889,64	-	889,64
KPH Sungai Buaya	-	0,01	-	0,01

Kabupaten	Fungsi Kawasan Hutan (Ha)			Luas (Ha)
	HL	HP	HPT	
Way Kanan	17.418,50	8.027,29	0,001	25.445,79
KPH Bukit Punggur	17.418,50	7.350,64	0,001	24.769,15
KPH Muara Dua	-	676,65	-	676,65
Luas (Ha)	17.654,06	14.087,90	0,001	31.741,97

Berdasarkan tabel-tabel yang ada maka diketahui bahwa luasan KPH Bukit Punggur yang direncanakan akan dimanfaatkan untuk mitigasi kegiatan melalui RO8 adalah 25.004,71 Ha, yang merupakan 17.654,06 Ha di HL, 7.350,64 Ha di HP dan seluas 0,001 Ha di HPT. Dari luasan total di KPH ini, seluas 7.191,19 Ha dikelola oleh PT Inhutani V Way Rebang. Diketahui bahwa Kawasan untuk mitigasi RO8 di KPH ini merupakan semak belukar seluas 67,31 Ha, perkebunan seluas 5.856,33 Ha, lahan terbuka seluas 18,91 Ha, pertanian lahan kering seluas 535,69 Ha dan pertanian lahan kering campur seluas 18.526,46 Ha. Adapun di KPH Liwa ada seluas 0,0008 Ha di hutan lindung yang ditujukan untuk mitigasi RO8. Di KPH Muara Dua terdapat hutan produksi seluas 1.590,49 Ha yang direncanakan untuk mitigasi RO8. Seluas 6,50 Ha merupakan lahan pertanian lahan kering didalam wilayah PT Budi Lampung Sejahtera. Selain itu seluas 1.552,06 Ha ada dalam wilayah PT Inhutani V (82,38 Ha merupakan perkebunan, 1.398,17 Ha merupakan lahan pertanian lahan kering dan seluas 71,51 Ha adalah pertanian lahan kering campur). Di KPH Pesawaran ada 190,54 Ha merupakan hutan produksi dan dikelola oleh PT Inhutani V. Pada KPH Sungai Buaya ada luasan 4.956,33 Ha yang direncanakan untuk kegiatan mitigasi RO8. Seluruh luasan hutan lindung ini dikelola oleh PT Silva Inhutani Lampung dan terdiri atas perkebunan (368,53 Ha), lahan terbuka (6,57 Ha), semak belukar rawa (616,24 Ha), pertanian lahan kering (3.523,91 Ha) dan pertanian lahan kering campuran (440, 99 Ha).

Tabel 3.35. Luas Areal RO8 - Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi pada PBPH per KPH

TABEL 3.33. | Luas Areal RO8 - Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi per Kabupaten dan Fungsi Kawasan

KPH/PBPH	Luas (Ha)
KPH Bukit Punggur	
PT INHUTANI V WAY REBANG MUARA DUA	7,191,19

KPH/PBPH	Luas (Ha)
KPH Muara Dua	
PT BUDI LAMPUNG SEJAHTERA	6,5
PT INHUTANI V WAY REBANG MUARA DUA	1,552,06
KPH Pesawaran	
PT INHUTANI V WAY REBANG MUARA DUA	190,54
KPH Sungai Buaya	
PT SILVA INHUTANI LAMPUNG	4,956,23
APL	
PT INHUTANI V WAY REBANG MUARA DUA	0,1
PT SILVA INHUTANI LAMPUNG	0,08
Luas (Ha)	13,896,61

Berdasarkan semua rencana kegiatan untuk mitigasi berdasarkan RO8 di Provinsi Lampung maka dapat dipetakan sebagaimana peta pada Gambar 3.9.

Gambar 3.9. Sebaran Areal RO8 - Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Lampung

Selain di semua KPH di Provinsi Lampung, kegiatan mitigasi melalui RO8 juga direncanakan akan dilaksanakan oleh UPT UPT KLHK yang wilayah kerjanya di Provinsi Lampung. Demikian pula dinas-dinas yang relevan dengan program mitigasi berdasarkan RO8 di Provinsi Lampung juga mempunyai rencana-rencana sebagaimana yang disebutkan pada Tabel 3.37. Aksi mitigasi oleh UPT KLHK dan OPD Non Kehutanan pada Tabel 3.36 dan Tabel 3.38

TABEL 3.36. | Rencana Operasional Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa (Non) Rotasi (R08) oleh UPT KLHK

No	Rencana Operasional (R0), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
1	Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa (Non) Rotasi (R08) BPHP	1. Lampung Barat 2. Lampung Utara 3. Mesuji 4. Pesawaran 5. Pesisir Barat 6. Tulang Bawang 7. Tulang Bawang Barat 8. Way Kanan	1.049 24 4.944 190 92 99 899 28.598	5.263,34	UPT KLHK, OPD Prov	550,66 20,17 584,82	550,66 20,17 584,82	
1.1	Pengelolaan hutan lestari dan usaha kehutanan BPHP (Pengawasan dan Pengendalian Penanaman/ Produksi hasil hutan/multtiusaha kehutanan)	(*) PHL		5.263,34	UPT KLHK, OPD Prov	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	
	• Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS	BPDAS	4.500	HL, APL, TN		500	500	
	• Restorasi Kawasan yang terdegradasi untuk perind. sumber air		225	HL, APL		25	25	
	• Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada area rawan/pasca bencana		450	HL, TN, APL		50	50	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Rehabilitasi ekosistem Kawasan konservasi/ pemulihan Kawasan konservasi	Blok Rehabilitasi TAHURA WAR (Kabupaten Pesawaran)	526	Kawasan Konservasi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD,KPHK TAHURA WAR, BPDASHL WSS, Ditjen KSDAE, Mitra NGO, KTH, Akademisi	5.98	50	
1.2	Pengelolaan Kawasan konservasi TNBBS	(*)KSDAE	8.356,16 9.301,36 (target PE NBBS) 445,2 (yg sudah dilakukan) 500 (target permintaan tahura)			100	2 564	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator

TABEL 3.37. | Rencana Aksi Mitigasi R08 yang diampu oleh Dinas Kehutanan [KPH] di Provinsi Lampung

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
R0-8	Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa (Non) Rotasi (R08)	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, PesisirBarat Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan	35,901.42	KPH Bukit Punggur, KPHGunung Balak, KPH Gunung Raja Basa -Way Pisang - Batu Serampok, KPH Kota Agung Utara, KPH Liwa, KPH Muara Dua, KPH Pematang Neba, KPH Pesawaran, KPH Pesisir Barat, KPH Sungai Buaya, KPH Way Terusan, KPH Way Waya - Tangkit Tebak, di Luar KPH (TN/SM/HL /HPT/APL)	UPT KLHK, OPD Prov	35,901.42	35,901.42	
1	Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi							
	• Organisasi KPH yang efektif	KPH Way Pisang (Lampung Selatan Reg 1 dan Reg 2)	1.410	HPT	KPH, Dishut, Pemda, BPHP, PSKL, NGO	156.67	156.67	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	35,901.42	35,901.42	35,901.42	35,901.42	35,901.42	35,901.42	35,901.42	Akumulasi luas areal (Ha)
	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	156.67	Luas Perencanaan Pengelolaan HP

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Organisasi KPH yang efektif	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan, Reg 5,35,37,40)	10 paket	HPT	KPH, Dishut, Pemda, BPHP, PSKL, NGO	0	2	
2	Peningkatan Jasa lingkungan hutan dan HHBK							
	• Produk HHBK	KPH Way Pisang (Lampung Selatan Reg 1, 2 dan 3)	3.747	HL dan HPT	KPH, Dishut, Pemkab, BPHP, PSKL, NGO, Koperasi	416.33	416.33	
	• Produk HHBK dan Jasa Lingkungan di wilayah PS	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Reg 40 Lampung Timur Reg 37)	27.260 Ha	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, BPHP, NGO, Swasta		3,407.50	
3	Pengelolaan hutan lestari dan usaha kehutanan							
	• Pengembangan luasan pemanfaatan HHBK di hutan lindung	KPH Way Pisang (Lampung Selatan Reg 3)	2.015	HL	KPH, Dishut, Pemkab, BPHP, PSKL, NGO, Koperasi	223.89	223.89	
	• Pelaksanaan restorasi ekosistem hutan produksi	KPHPesawaran (Reg.18)	190.54	KHP	PT. Inhutani V	21.17	21.17	
	• Pengembangan luasan pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan di hutan produksi	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Reg5, 35, 37, 40)	21.536Ha	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, BPHP, NGO, Swasta	0	2.692	

[illegible]

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Pengembangan usaha HHBK dan Jasa Lingkungan di hutan produksi	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Reg5, 35, 37, 40)	100 KUPS	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, BPHP, NGO, Swasta	0	5	
4	Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan, perencanaan dan pengendalian DAS							
	• Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS	KPH Way Pisang (Lampung Selatan Reg 1, 2,3 dan HL Pantai Timur)	3.747	HL dan HPT	KPH, Dishut, Pemkab, BPDAS, NGO, Koperasi	416.33	416.33	
	• Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Register 40, Reg 35)	400 ha	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, BPDAS, NGO, Swasta	0	50	
5	Pengelolaan Kawasan konservasi							
	• Rehabilitasi ekosistem kawasan konservasi/ pemulihan Kawasan konservasi	• Rehabilitasi ekosistem kawasan konservasi/ pemulihan Kawasan konservasi Pesawaran)	525.98	Kawasan Konservasi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD KPHK TAHURA WAR, BPDASHL WSS, Ditjen KSDAE, Mitra NGO, KTH, Akademisi	5.98	50	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	10	10	10	15	15	15	15	Peningkatan Jumlah KUPS dan Pengembangan Usahanya
	416.33	416.33	416.33	416.33	416.33	416.33	416.33	Luas Rehabilitasi dan Reklamasi KH
	50	50	50	50	50	50	50	Rencana rehabilitasi dalam 8 th = di Blok perlindungan atau pemanfaatan
	50	100	100	100	50	50	20	

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Rehabilitasi ekosistem kawasan konservasi/ pemulihan Kawasan konservasi	Blok Tradisional TAHURA WAR (Kabupaten Pesawaran)	472.02	Kawasan Konservasi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD KPHK TAHURA WAR, BPDASHL WSS, Ditjen KSDAE, Mitra NGO, KTH, Akademisi	2.02	20	
	• Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada Kawasan konservasi dan lindung	KPH Way Waya	13.680	HL	KPH, KTH		1.710	
6	Bina usaha perhutanan sosial dan hutan adat							
	• Pembinaan masyarakat sekitar hutan untuk peningkatan produktivitas usahatani	KPH Way Pisang (Lampung Selatan Reg 1, 2 dan 3)	3.743	HL dan HPT	KPH, Dishut, Pemkab, PSKL, NGO	415.89	415.89	
	• Peningkatan nilai tambah produk (KUPS)	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Reg5, 35, 37, 40)	100 KUPS	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, PSKL, NGO	0	5	
	• Kemitraan investasi/usaha	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Reg5, 35, 37, 40)	100 KUPS	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, PSKL, NGO	0	5	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	50	100	100	50	50	50	50	
	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	Areal hutan terrehabilitasi
	415.89	415.89	415.89	415.89	415.89	415.89	415.89	Luas Binus PS
	10	10	10	15	15	15	20	Jumlah KUPS yang difasilitasi
	10	10	10	15	15	15	20	Jumlah KUPS yang difasilitasi

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Pemasaran/ promosi produk perhutanan sosial	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Reg5, 35, 37, 40)	100 KUPS	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, PSKL, NGO	0	5	
	• Peningkatan kapasitas masyarakat	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Reg5, 35, 37, 40)	100 KUPS	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, PSKL, NGO	0	5	
	• Pembinaan masyarakat sekitar hutan untuk peningkatan produktivitas usahatani	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Reg5, 35, 37, 40)	48 Desa	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, PSKL, NGO	0	6	
7	Penyiapan Kawasan perhutanan sosial							
	• Pemberian akses Kelola Kawasan hutan oleh masyarakat	KPH Way Pisang (Lampung Selatan Reg 1 dan 2)	8.500	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, PSKL, NGO	944.44	944.44	
	• Pemberian akses Kelola Kawasan Hutan oleh masyarakat	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan, Lampung Timur Reg 5, 35, 37, 40)	120 Kelompok PS	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, PSKL, NGO	0	15	
8	Pemulihan kerusakan lahan akses terbuka							
	• Jumlah industri yang melakukan pengendalian kerusakan lahan dan reklamasi tambang	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan, Register 40 dan 37)	115,5 Ha	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, PSKL, NGO, Swasta	0	17.5	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	10	10	10	15	15	15	20	Jumlah KUPS yang difasilitasi
	10	10	10	15	15	15	20	Jumlah KUPS yang difasilitasi
	6	6	6	6	6	6	6	Jumlah Desa Binaan
	944.44	944.44	944.44	944.44	944.44	944.44	944.44	Luas akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat
	15	15	15	15	15	15	15	Terbentuknya kelompok PS
	20	28	50	0	0	0	0	Luas areal penggunaan kawasan hutan IPPKH

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Peningkatan luasan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan, Lampung Timur Reg 5,35, 37, 40)	90 Ha	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, PSKL, NGO, Swasta	0	20	
9	Peningkatan penyuluhan							
	• Peningkatan jumlah dan kapasitas SD kegiatan rehabilitasi secara regenerasi	KPH Way Pisang (Lampung Selatan Reg 1, 2 dan 3)	15.375	HL dan HPT	KPH, Dishut, Pemkab, Pusluh, BP2SDM, NGO	1708.28	1708.28	
	• Peningkatan jumlah dan kapasitas Sumber daya penyuluh	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Reg5, 35, 37, 40)	8 paket	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, PSKL, NGO, Swasta	0	1	
	• Penguatan kapasitas PKSM (Insentif PKSM)	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Reg5, 35, 37, 40)	368 orang bulan (OB	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, PSKL, NGO, Swasta	0	46	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	10	10	10	10	10	10	10	reklamasi areal eks tambang rakyat
	1708.28	1708.28	1708.28	1708.28	1708.28	1708.28	1708.28	Luas areal penyuluhan dan peningkatan SDM
	1	1	1	1	1	1	1	Paket Kegiatan : Bimtek, Pembinaan, Diklat, Penyegaran, Administrasi
	46	46	46	46	46	46	46	INSENTIF PKSM 500rb/org/bulan

TABEL 3.38. | Rencana Aksi Mitigasi R08 yang diampu oleh OPD Teknis di Provinsi Lampung

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
1	Lingkungan Hidup							
1.1	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Lampung Barat, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan	424	APL	OPD Prov, UPT KLHK	8	8	
	• Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan				OPD Prov, UPT KLHK	100	100	
1.2	Program pengembangan laboratorium lingkungan	Lampung Barat, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan	424	APL	OPD Prov, UPT KLHK	100	100	
	• Peningkatan layanan laboratorium lingkungan			APL	OPD Prov, UPT KLHK	100	100	

[illegible]

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
1.4	Pembedayaan Masyarakat dan Desa	Lampung Barat, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan	424	APL	OPD Prov, UPT KLHK			
	• Pengembangan, Keberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Kawasan Pedesaan			APL	OPD Prov, UPT KLHK	8	8	
	• Peningkatan kinerja lembaga ekonomi desa			APL	OPD Prov, UPT KLHK	70	70	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	8	8	8	8	8	8	8	Cakupan kabupaten
	70	70	70	70	70	70	70	Persentase Lem ekonomi desa baik

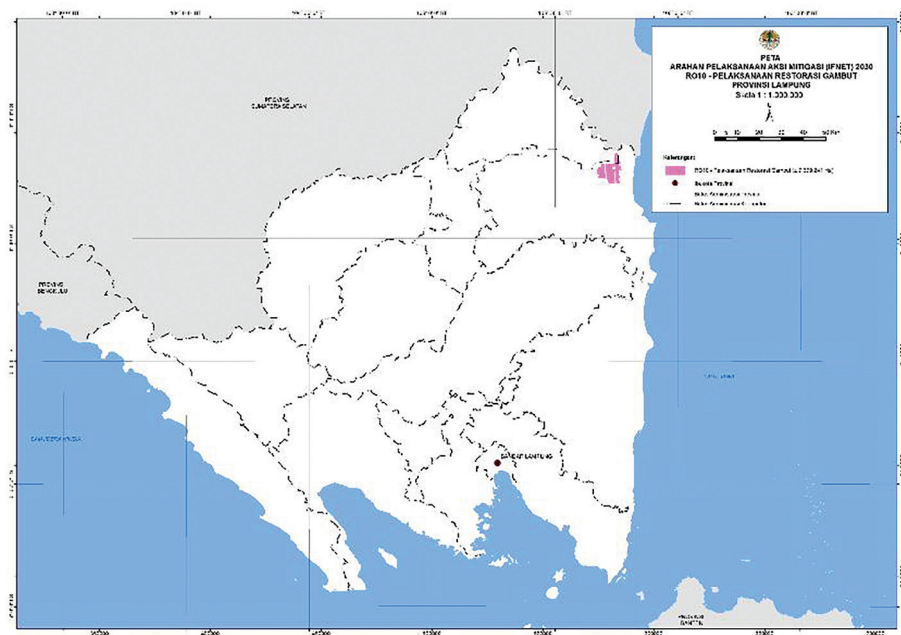
3.9. Rencanan Aksi Mitigasi - Pelaksanaan Restorasi Gambut [RO-10]

Rencana aksi mitigasi pelaksanaan restorasi gambut di Provinsi Lampung ditargetkan mencakup toal luasan 7.379 ha dengan sebaran wilayah di Kabupaten Mesuji (672 ha) dan Kabupaten Tulang Bawang seluas 6.706 ha. Restoarsi gambut tersebut bearada di APL (lihat Tabel 3.39)

TABEL 3.39. | Luas Areal RO10 - Pelaksanaan Restorasi Gambut per Kabupaten dan Fungsi Kawasan di Provinsi Lampung

Kabupaten	APL (Ha)	Luas (Ha)
Mesuji	672,30	672,30
Tulang Bawang	6.706,94	6.706,94
Luas (Ha)	7.379,241	7.379,241

Secara spasial, Sebaran Areal RO10 - Pelaksanaan Restorasi Gambut di Provinsi Lampung disajikan pada Gambar 3.10.



Gambar 3.10. Sebaran Areal RO10 - Pelaksanaan Restorasi Gambut di Provinsi Lampung

Rencana aksi mitigasi pelaksanaan restorasi gambut oleh UPT di lingkungan KLHK dan OPD terkait di Provinsi Lampung disajikan pada Tabel 3.40 dan 3.41.

TABEL 3.40. | Rencana Aksi Mitigasi Pelaksanaan Restorasi Gambut (RO-10) oleh UPT di Lingkungan KLHK

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	Pelaksanaan Restorasi Gambut (RO10)	Mesuji Tulang Bawang Total	672 6.706 7.378	APL	UPT KLHK, OPD Prov	7.378	7.378	
1	Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan, perencanaan dan pengendalian DASi	PDASRH						
	• Rehabilitasi hutan mangrove/ panta	BPDAS	225	APL	UPT KLHK, OPD Prov	25	25	

TABEL 3.41. | Rencana Aksi Mitigasi Pelaksanaan Restorasi Gambut (RO-10) oleh OPD Terkait di Provinsi Lampung

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	Pelaksanaan Restorasi Gambut (RO10)	Mesuji Tulang Bawang Total	672 6.706 7.378	APL	UPT KLHK, OPD Prov	7.378	7.378	
OPD	Pekerjaan Umum, Penataan							
1	Program penatagunaan sumberdaya air		7378	APL	UPT KLHK, OPD Prov	100	100	
	• Optimalisasi pemanfaatan sumbedaya air		7378	APL	UPT KLHK, OPD Prov	100	100	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	7.378	7.378	7.378	7.378	7.378	7.378	7.378	Cakupan kabupaten
	15	15	15	15	15	15	15	Cakupan kabupaten
	25	25	25	25	25	25	25	Luasan (ha)

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	7.378	7.378	7.378	7.378	7.378	7.378	7.378	Akumulasi luasan (ha)
	100	100	100	100	100	100	100	Persentase penatagunaan
	100	100	100	100	100	100	100	Cakupan pemanfaatan yang optimal

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
2	Program pengembangan sumberdaya air		7378	APL	UPT KLHK, OPD Prov	2	2	
	• Perbaikan tata kelola pemanfaatan sumberdaya air		7378	APL	UPT KLHK, OPD Prov	100	100	

[illegible]

3.10. Rencana Aksi Mitigasi - Perlindungan Areal Konservasi Tinggi [RO-11]

Luas Areal RO11 - Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Provinsi Lampung secara total mencakup areal 55.324 ha dengan luasan terbesar pada HL (50.962 ha), disusul HPT (2.424 ha) dan APL (1.873 ha). Sedangkan berdasarkan kabupaten luasan terbesar di Tanggamus (18.115 ha), disusul oleh Lampung Barat (9.692 ha) dan Lampung Utara (8.054 ha). Secara rinci sebaran Luas Areal RO11 - Perlindungan Areal Konservasi Tinggi per Kabupaten dan Fungsi Kawasan disajikan pada Tabel 3.42.

TABEL 3.42. | Luas Areal RO11 - Perlindungan Areal Konservasi Tinggi per Kabupaten dan Fungsi Kawasan di Provinsi Lampung

Kabupaten	APL (Ha)	Fungsi Kawasan Hutan (Ha)					Luas (Ha)
		HL	SM	TN	HP	HPT	
Lampung Barat	1.065,69	8.626,52	0,001	0,002	-	-	9.692,22
Lampung Selatan	78,25	3.561,51	-	-	8,40	-	3.648,16
Lampung Tengah	0,14	5.402,61	-	0,00	-	-	5.402,75
Lampung Timur	100,06	50,39	-	16,16	-	-	166,61
Lampung Utara	-	8.054,35	-	-	-	-	8.054,35
Pesawaran	442,22	302,78	-	-	-	-	745,00
Pesisir Barat	149,26	3.088,26	-	0,04	-	2.424,46	5.662,02
Pringsewu	0,11	398,19	-	-	-	-	398,30
Tanggamus	37,37	18.078,36	-	0,004	-	-	18.115,74
Tulang Bawang	0,0005	-	-	-	-	-	0,0005
Way Kanan	0,0004	3.399,24	0,001	-	-	-	3.399,24
Luas (Ha)	1.873,11	50.962,20	0,001	16,21	8,40	2.424,46	55.284,38

Berdasarkan fungsi Kawasan, luas areal rencana aksi untuk areal konservasi tinggi didominasi fungsi HL (50.095 ha) disusul HPT (2,424 ha). Sedangkan berdasarkan KPH pengampu, luasan terbesar ada di KPH Liwa (8.393 ha), disusul oleh KPH Batu Tegi (7.404 ha) dan KPH Tangkit Tebal (7.002 ha). Secara rinci Luas Areal RO11 - Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada KPH per Kabupaten dan Fungsi Kawasan disajikan pada Tabel 3.43.

TABEL 3.43. | Luas Areal RO11 - Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada KPH per Kabupaten dan Fungsi Kawasan di Provinsi Lampung

Kabupaten	Fungsi Kawasan Hutan (Ha)			Luas (Ha)
	HL	HP	HPT	
Lampung Barat				
KPH Batu Tegi	65,40	-	-	65,40
KPH Bukit Punggur	7,46	-	-	7,46
KPH Kota Agung Utara	6,24	-	-	6,24
KPH Liwa	8.393,54	-	-	8.393,54
KPH Way Waya	153,89	-	-	153,89
Lampung Selatan				
KPH Way Pisang	3.561,51	8,4	-	3.569,91
Lampung Tengah				
KPH Batu Tegi	1.193,91	-	-	1.193,91
KPH Way Terusan	148,61	-	-	148,61
KPH Way Waya	4.060,08	-	-	4.060,08
Lampung Timur				
KPH Gunung Balak	42,07	-	-	42,07
KPH Way Terusan	8,32	-	-	8,32

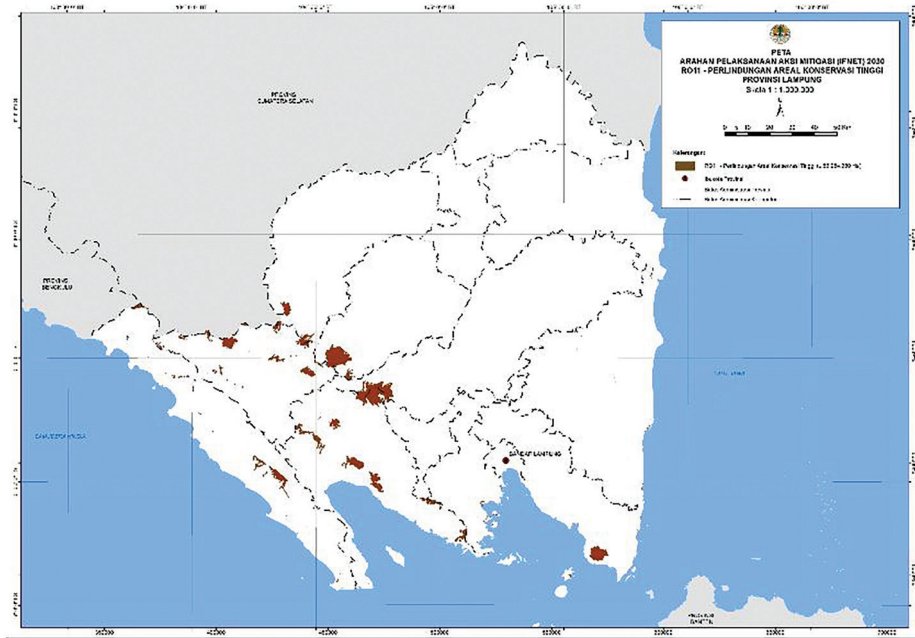
Kabupaten	Fungsi Kawasan Hutan (Ha)			Luas (Ha)
	HL	HP	HPT	
Lampung Utara				
KPH Liwa	278,99	-	-	278,99
KPH Way Waya	772,38	-	-	772,38
KPH Tangkit Tebak	7.002,99	-	-	7.002,99
Pesawaran				
KPH Pematang Neba	239,79	-	-	239,79
KPH Pesawaran	62,99	-	-	62,99
Pesisir Barat				
KPH Kota Agung Utara	55,97	-	-	55,97
KPH Pesisir Barat	2.165,10	-	2.424,46	4.589,55
Pringsewu				
KPH Batu Teji	262,99	-	-	262,99
KPH Pematang Neba	132,92	-	-	132,92
KPH Pesawaran	2,27	-	-	2,27
Tanggamus				
KPH Batu Teji	7.404,33	-	-	7.404,33
KPH Kota Agung Utara	5.691,26	-	-	5.691,26
KPH Pematang Neba	4.897,58	-	-	4.897,58
KPH Pesawaran	2,60	-	-	2,60
KPH Way Waya	82,58	-	-	82,58
Way Kanan				

Kabupaten	Fungsi Kawasan Hutan (Ha)			Luas (Ha)
	HL	HP	HPT	
KPH Bukit Punggur	2.546,01	-	-	2.546,01
KPH Liwa	853,22	-	-	853,22
Luas (Ha)	50.095,01	8.40	2.424,46	52.527,86

Total Luas Areal RO11 - Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada PPKH per KPH seluas 5,35 ha yang terdiri dari KPH Kota Agung Utara dan KPH Pesisir Barat. Secara rinci Total Luas Areal RO11 - Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada PPKH disajikan pada Tabel 3.44.

TABEL 3.44. | Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada PPKH per KPH

Kabupaten	Luas (Ha)
KPH Kota Agung Utara	
Natarang Mining, PT	0,62
KPH Pesisir Barat	
PLN (Persero), PT	4,73
Luas (Ha)	5,35



Gambar 3.11. Sebaran Areal RO11 - Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Provinsi Lampung

Rencana aksi mitigas perlindungan areal lahan konservasi tinggi di Provinsi Lampung dilakukan oleh UPT dilingkungan KLHK dan KPH di Provinsi Lampung (Tabel 3.45) dan 3.46).



TABEL 3.45 | Rencana Aksi Mitiasi Perindungan Areal Konservasi Tinggi [R0-11] oleh UPT KLHK

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
R011	Perindungan Areal Konservasi Tinggi (R011)	Lampung Barat Lampung Selatan Lampung Tengah Lampung Timur Lampung Utara Pesawaran Pesisir Barat Pringsewu Tanggamus Way Kanan	9.684 3.648 5.402 166 8.054 745 4.822 398 18.115 853	APL, HL, SM, TN, HP, HPT	UPT KLHK, OPD Prov	55,284	55,285	
1	Peningkatan efektivitas pengelolaan KEE; BKSDA (SKW III)	Lahan Basah Tulang Bawang Barat	1.373	KPA	-	1.373	1.373	
2	Pemolaan dan informasi konservasi alam BKSDA	(*)KSDAE SKW III Lampung		Cagar ALam dan KPA				
3	Pengelolaan Kawasan konservasi	(*)KSDAE						
	• Pemberdayaan masyarakat di Kawasan konservasi TAHURA WAR	Blok Tradisiona l TAHURA WAR (Kabupaten Pesawaran)	525,98	Kawasan konservasi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD KPHK TAHURA WAR, BPDASHL WSS, Ditjen KSDAE, Mitra NGO, KTH, Akademisi	5,98	50	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	7.378	7.378	7.378	7.378	7.378	7.378	7.378	Cakupan kabupaten
	15	15	15	15	15	15	15	Cakupan kabupaten
	25	25	25	25	25	25	25	Luasan (ha)

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
4	Pengembangan Usaha PS dan Hutan Adat	Definitif PS	5.740,85					
	• Penyusunan Rencana Kerja/ Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial untuk mendapatkan pengesahan				• Pemerintah Pusat (KLHK: Ditjen PSKL, BP2SDM - Pusluh, Ditjen PKTL) • Pemerintah Daerah (Dishut/ DLH K, KPH) • Pokja Perhutanan Sosial Provinsi • Mitra Pembangunan • Pendamping Perhutanan Sosial	-	2	
	• Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial				• Pemerintah Pusat (KLHK: Ditjen PSKL, Kementan; Kemenko UKM; Kemenperind; KKP; Kemendes, Kemenparekraf) • Pemerintah Daerah (Dishut/ DLH K, OPD terkait lainnya) • Dunia Usaha (BUMN, BUMD, BUMS, BUMDES) • Pokja Perhutanan Sosial Provinsi • Mitra Pembangunan • Pendamping Perhutanan Sosial	-	1	
5	Kemitraan Lingkungan	Definitif PS	5.740,85					

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	Pengembangan dan peningkatan tenaga pendamping Perhutanan Sosial				- Pemerintah Pusat (KLHK: Ditjen PSKL) - Pokja Perhutanan Sosial Nasional dan Provinsi (Divisi Pendampingan) - Pemerintah Daerah (Dishut/DLH K, OPD terkait lainnya) - Dunia Usaha (BUMN, BUMD, BUMS, BUMDES) - Mitra Pembangunan - Pendamping Perhutanan Sosial: - Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil, - Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat - Bakti Rimbawan, - Penyuluh K/L Terkait, - Penyuluh Kehutanan Swasta, - Badan Usaha Milik Negara, - Lembaga Swadaya Masyarakat, - Organisasi Masyarakat, - Praktisi, - Akademisi, - Tokoh Masyarakat, atau Tokoh Adat.	55	55	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	Pengembangan kemitraan kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan				1. Pemerintah Pusat (KLHK dan K/L terkait) 2. Pemerintah Daerah (OPD Terkait) 3. Lembaga Legislatif 4. Dunia Usaha (BUMN, BUMD, BUMS, BUMDES) 5. Akademisi/ Perguruan Tinggi 6. Mitra Pemb. 7. Lembaga Penelitian Tokoh Masy.	28	28	
6	Penyiapan Kawasan PS	Indikatif PS	9					
	Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, HTR, KK				1. Pemerintah Pusat (KLHK: Ditjen PSKL, BIG, Kemendes, Kemendagri, Kemen ATR/BPN) 2. Pemerintah Daerah (Dishut/ DL HK, OPD terkait lainnya) 3. Pokja Perhutanan Sosial Provinsi 4. Mitra Pembangunan. Pendamping Perhutanan Sosial	-	-	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Penetapan kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat				Pemerintah Pusat (KLHK: Ditjen PSKL, Ditjen PKTL, Ditjen PPKL, Ditjen Gakkum, Ditjen PHL)	-	-	
7	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat	Indikatif PS	9					
	• Penyusunan Rencana Kerja/ Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial untuk mendapatkan pengesahan				• Pemerintah Pusat (KLHK: Ditjen PSKL, BP2SDM - Pusluh, Ditjen PKTL) • Pemerintah Daerah (Dishut/ DLH K, KPH) • Pokja Perhutanan Sosial Provinsi • Mitra Pembangunan • Pendamping Perhutanan Sosial • Mitra Pembangunan	-	-	
8	Kemitraan Lingkungan	Indikatif PS	9					

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	Pengembangan dan peningkatan tenaga pendamping Perhutanan Sosial				- Pemerintah Pusat (KLHK: Ditjen PSKL) - Pokja Perhutanan Sosial Nasional dan Provinsi (Divisi Pendampingan) - Pemerintah Daerah (Dishut/DLH K, OPD terkait lainnya) - Dunia Usaha (BUMN, BUMD, BUMS, BUMDES) - Mitra Pembangunan - Pendamping Perhutanan Sosial: - Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil, - Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, - Bakti Rimbawan, - Penyuluh K/L Terkait, - Penyuluh Kehutanan Swasta, - Badan Usaha Milik Negara, - Lembaga Swadaya Masyarakat, - Organisasi Masyarakat, - Praktisi, - Akademisi, - Tokoh Masyarakat, atau Tokoh Adat.	-	-	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	Pengembangan kemitraan kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan				1. Pemerintah Pusat (KLHK dan K/L terkait) 2. Pemerintah Daerah (OPD Terkait) 3. Lembaga Legislatif 4. Dunia Usaha (BUMN, BUMD, BUMS, BUMDES) 5. Akademisi/ Perguruan Tinggi 6. Mitra Pembangunan 7. Lembaga Penelitian Tokoh Masyarakat.	-	-	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator

TABEL 3.46 | Rencana Aksi Mitiasi Perindungan Areal Konservasi Tinggi [R0-11] oleh Dinas Kehutanan [KPH] Provinsi Lampung

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
R011	Perindungan Areal Konservasi Tinggi (R011)	Lampung Barat Lampung Selatan Lampung Tengah Lampung Timur Lampung Utara Pesawaran Pesisir Barat Pringsewu Tanggamus Way Kanan	9.684 3.648 5.402 166 8.054 745 4.822 398 18.115 853					
OPD	Dinas Kehutanan							
1	Konservasi species dan genetik	KPH Liwa	1000	HL	KPH, KSDAE, KPS			
	Luasan Kawasan yang diversifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman spesies dan genetika TSL	KPH Liwa	500	HL	KPH, KSDAE, KPS	-	80	
	• Perlindungan dan penyelamatan satwa liar	KPH Liwa	1000	HL	KPH, KSDAE, KPS	-	125	
	• Penetapan site monitoring species	KPH Liwa	1000	HL	KPH, KSDAE, KPS	-	125	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	60	60	60	60	60	60	60	Terjaganya areal perlindungan keanekaragaman hayati dan genetika TSL
	125	125	125	125	125	125	125	Patroli perlindungan dan penyelamatan satwa
	125	125	125	125	125	125	125	Terbentuknya site monitoring species

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Pengendalian invasive species untuk mencegah kerusakan ekosistem alam	KPH Liwa	1	HL	KPH, KSDAE, KPS	-	125	
	• Perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan langka/endemik	KPH Liwa	1	HL	KPH, KSDAE, KPS	-	125	
1	• Konservasi species dan genetik	KPH Pematang Neba (Tanggamus. Pringsewu)	5270,29	HL	KPH, KTH, BKSDA		660	
1	Konservasi species dan genetik	KPH Pesisir Barat	1.000	HPT	KPH, KSDAE, KPS			
	Luasan Kawasan yang diversifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman spesies dan genetika TSL	KPH Pesisir Barat	1.000	HPT	KPH, KSDAE, KPS	-	125	
	• Perlindungan dan penyelamatan satwa liar	KPH Pesisir Barat	500	HPT	KPH, KSDAE, KPS	-	100	
	• Penetapan site monitoring species	KPH Pesisir Barat	500	HPT	KPH, KSDAE, KPS	-	100	
	• Pengendalian invasive species untuk mencegah kerusakan ekosistem alam	KPH Pesisir Barat	500	HPT	KPH, KSDAE, KPS	-	100	
	• Perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan langka/endemik	KPH Pesisir Barat	500	HPT	KPH, KSDAE, KPS	-	100	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	125	125	125	125	125	125	125	Patroli perlindungan dan penyelamatan satwa
	125	125	125	125	125	125	125	Patroli perlindungan dan penyelamatan satwa
	660	660	660	660	660	660	650	
	125	125	125	125	125	125	125	Terjaganya areal perlindungan keanekaragaman hayati dan genetika TSL
	100	50	50	50	50	50	50	Patroli perlindungan dan penyelamatan satwa
	100	50	50	50	50	50	50	Terbentuknya site monitoring species
	100	50	50	50	50	50	50	Patroli perlindungan dan penyelamatan satwa
	100	50	50	50	50	50	50	Patroli perlindungan dan penyelamatan satwa

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
1	• Konservasi species dan genetik	KPH Tangkit Tebak (Blok Lindung KPH dan Blok Lindung KPS)	7.003	HL	KPH, MMP			
	Perlindungan dan penyelamatan satwa liar	KPH Tangkit Tebak (Blok Lindung KPH dan Blok Lindung KPS)	7.003	HL	KPH, MMP	4 Kali	24 kali	
	• Perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan langka/endemik	KPH Tangkit Tebak (Blok Lindung KPH dan Blok Lindung KPS)	7.003	HL	KPH, MMP	4 Kali	24 kali	
1	• Konservasi species dan genetik	KPH Bukit Punggur	2.553,47		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK			
	Luasan Kawasan yang diverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman spesies dan gentika TSL							
	• Pengembangan entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati							
	• Perlindungan dan penyelamatan satwa liar							
	• Penetapan site monitoring species							

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	Konflik satwa dengan manusia rendah
	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	Tidak adanya Pengambilan dan Penjualan Tumbuhan Langka / Endemik

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Pengendalian invasive species untuk mencegah kerusakan ekosistem alam							
	• Pembinaan populasi tumbuhan dan satwa liar							
	• Perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan langka/endemik							
1	• Konservasi species dan genetik	KPH Way Waya	5.402	HL	Dishut, BKSDA, KPH, MMP			
	Perlindungan dan penyelamatan satwa liar	KPH Way Waya	5.402	HL	KPH, MMP	5.402	5.402	
	• Perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan langka/endemik	KPH Way Waya	5.402	HL	KPH, MMP	5.402	5.402	
1	• Konservasi species dan genetik	KPH Kotaagung Utara	5753 ha	HUTAN LINDUNG	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi			
	• Luasan Kawasan yang diverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman spesies dan genetika TSL	KPH Kotaagung Utara	5753 ha	HUTAN LINDUNG	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi		719 ha	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	5.402	5.402	5.402	5.402	5.402	5.402	5.402	Tidak adanya Pemasangan Perangkap dan Perburuan Satwa Liar
	5.402	5.402	5.402	5.402	5.402	5.402	5.402	Tidak adanya Pengambilan dan Penjualan Tumbuhan Langka / Endemik
	719 ha	719 ha	719 ha	719 ha	719 ha	719 ha	719 ha	Tersusunnya Dokumen kawasan perlindungan keanekaragaman spesies dan genetika TSL KPH Kotaagung Utara

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Perlindungan dan penyelamatan satwa liar	KPH Kotaagung Utara	5753 ha	HUTAN LINDUNG	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi		1600 ha	
	Penetapan site monitoring species	KPH Kotaagung Utara	100 ha	HUTAN LINDUNG	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi		100 ha	
	• Pembinaan populasi tumbuhan dan satwa liar	KPH Kotaagung Utara	600 ha	HUTAN LINDUNG	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi		300 ha	
	Perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan langka/endemik	KPH Kotaagung Utara	100 ha	HUTAN LINDUNG	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi		100 ha	
2	• Pembinaan konservasi ekosistem esensial	KPH Way Pisang Lampung Selatan (Reg. 3 Gn. Rajabasa dan Pantai Timur)	3.648	HL	KPH, Dishut, Pemda, BPDAS, BPHP, PSKL, NGO			
	Penjagaan Kawasan konservasi, ekosistem esensial dan hutan lindung	KPH Way Pisang Lampung Selatan (Reg. 3 Gn. Rajabasa dan Pantai Timur)	3.648	HL	KPH, Dishut, Pemda, BPDAS, BPHP, PSKL, NGO	405.33	405.33	
2	• Pembinaan konservasi ekosistem esensial	KPH Pesawaran, Reg. 21	67,86	KHL	Dishut. Prov, Pemkab. Pesawaran, BKSDA			

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	1600 ha	1600 ha	1600 ha	1600 ha	1600 ha	1600 ha	1600 ha	Terlaksananya Perlindungan (penanganan konflik satwa liar) di KPH Kotaagung Utara (mitigasi konflik satwa, patroli rutin, blokade, pembangunan menara pantau, koordinasi multi pihak)
								Ditetapkannya 4 lokasi untuk monitoring spesies bunga Rafflesia, Hutan Lumut, Siamang dan Ficus Pencekik sebagai habitat burung
	300 ha							Pengkayaan tanaman pakan satwa di jalur jelajah (homerange) satwa liar
	100 ha	100 ha	100 ha	100 ha	100 ha	100 ha	100 ha	Terlaksananya perlindungan hutan (10 kali patroli setiap tahun, tersedianya papan informasi/peringatan, tanda bata, Koordinasi multi pihak)
	405.33	405.33	405.33	405.33	405.33	405.33	405.33	Luas Perlindungan Areal Konservasi Tinggi

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	Penjagaan Kawasan konservasi, ekosistem esensial dan hutan lindung	KPH Pesawaran, Reg. 21	67,86	KHL	Dishut. Prov, Pemkab. Pesawaran, BKSDA	67,86	67,86	
2	• Pembinaan konservasi ekosistem esensial	KPH Batutegi (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8.927	HL	KLHK, PEMPROV, PEMKAB, SWASTA, AKADEMISI, PRAKTISI, NGO, MASYARAKAT			
	Penjagaan Kawasan konservasi, ekosistem esensial dan hutan lindung	KPH Batutegi (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8.927	HL	KLHK, PEMPROV, PEMKAB, SWASTA, AKADEMISI, PRAKTISI, NGO, MASYARAKAT		1,115.83	
2	Pembinaan konservasi ekosistem esensial	KPH Way Terusan (Register 08 Rumbia)	157	HL	KPH, MMP dan PKSM			
	• Penjagaan Kawasan konservasi, ekosistem esensial dan hutan lindung	KPH Way Terusan (Register 08 Rumbia)	157	HL	KPH, MMP dan PKSM		156,94	
2	Pembinaan konservasi ekosistem esensial	KPH Pematang Neba (Tanggamus, Pringsewu)	15	HL	KPH, KTH, BKSDA		1.875	
2	• Pembinaan konservasi ekosistem esensial	KPH Batutegi (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8.927	HL	KLHK, PEMPROV, PEMKAB, SWASTA, AKADEMISI, PRAKTISI, NGO, MASYARAKAT			
	Peningkatan efektivitas pengelolaan KEE	KPH Batutegi (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8.927	HL	KLHK, PEMPROV, PEMKAB, SWASTA, AKADEMISI, PRAKTISI, NGO, MASYARAKAT		1,115.83	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	67,86	67,86	67,86	67,86	67,86	67,86	67,86	
	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	terlindunginya kawasan ekosistem hutan lindung seluas 8.926,63 ha
	156,94	156,94	156,94	156,94	156,94	156,94	156,94	terpantaunya kawasan hutan lindung seluas 156.94 ha
	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	
	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	terpantaunya kawasan hutan lindung seluas 8.926,63 ha

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
2	• Pembinaan konservasi ekosistem esensial	KPH Tangkit Tebak (Blok Lindung KPH dan Blok Lindung KPS)	7.003	HL	KPH, MMP			
	Penjagaan Kawasan konservasi, ekosistem esensial dan hutan lindung	KPH Tangkit Tebak (Blok Lindung KPH dan Blok Lindung KPS)	7.003	HL	KPH, MMP	4 Kali	24 kali	
3	• Pemolaan dan informasi konservasi alam	KPH Pesawaran, Register 21 Perintian batu, Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran	67,86	KHL	Dishut. Prov, Pemkab. Pesawaran, BKSDA			
	Inventarisasi dan verifikasi Kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	KPH Pesawaran, Register 21 Perintian batu, Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran	67,86	KHL	Dishut. Prov, Pemkab. Pesawaran, BKSDA	-	20	
3	• Pemolaan dan informasi konservasi alam	KPH Way Terusan (Register 08 Rumbia)	157	HL	KPH dan anggota PS			
	Inventarisasi dan verifikasi Kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	KPH Way Terusan (Register 08 Rumbia)	157	HL	KPH dan anggota PS		20	
3	• Pemolaan dan informasi konservasi alam	KPH Bukit Punggur	2.553,47		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK			

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	Menurunnya Kejahatan Bidang Kehutanan (Perambahan Hutan, Illegal Logging dan Penambangan tanpa Ijin)
	-	20	-	20	-	7,86	-	
	20	20	20	20	20	20	17	Terkumpulnya data inventarisasi keanekaragaman hayati seluas 156.94 ha

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	Inventarisasi dan verifikasi Kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	KPH Bukit Punggur	2.553,47		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK			
3	• Pemolaan dan informasi konservasi alam	KPH Way Waya	5.402	HL	Dishut, BKSDA, KPH, MMP			
	• Inventarisasi dan verifikasi Kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	KPH Way Waya	5.402	HL	Dishut, BKSDA, KPH, MMP	500	500	
3	• Pemolaan dan informasi konservasi alam	KPH Kotaagung Utara	5753 ha	HUTAN LINDUNG	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi			
	Inventarisasi dan verifikasi Kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	KPH Kotaagung Utara	5753 ha	HUTAN LINDUNG	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi		719 ha	
4	• Pengelolaan kawasan konservasi	KPH TAHURA WAR	525,98 ha	Kawasan Konservasi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD KPHK TAHURA WAR, BPDASHL WSS, Ditjen KSDAE, Mitra NGO, KTH, Akademisi			
	Pemberdayaan masyarakat di Kawasan konservasi	Blok Tradisional TAHURA WAR (Kabupaten Pesawaran)	525,98	Kawasan Konservasi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD KPHK TAHURA WAR, BPDASHL	5,98	50	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	500	500	500	500	500	500	1.402	Inventarisasi keragaman Jenis di Kawasan konservasi
	719 ha	719 ha	719 ha	719 ha	719 ha	719 ha	719 ha	Tersusunnya dokumen/laporan hasil inventarisasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi
	50	100	100	100	50	50	20	

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
					WSS, Ditjen KSDAE, Mitra NGO, KTH, Akademisi			
4	• Pengelolaan kawasan konservasi	KPH Pesawaran, Register 21 Perintian batu, Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran	67,86	KHL	Dishut. Prov, Pemkab. Pesawaran, BKSDA			
	• Pemberdayaan masyarakat di Kawasan konservasi	KPH Pesawaran, Register 21 Perintian batu, Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran	67,86	KHL	Dishut. Prov, Pemkab. Pesawaran, BKSDA	67,86	67,86	
4	• Pengelolaan kawasan konservasi	KPH Way Terusan (Register 08 Rumbia)	157	HL	KPH dan masyarakat			
	• Pembinaan daerah penyangga	KPH Way Terusan (Register 08 Rumbia)	157	HL	KPH dan masyarakat		20	
4	• Pengelolaan kawasan konservasi	KPH Batutegi (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8.927	HL	KLHK, PEMPROV, PEMKAB, SWASTA, AKADEMISI, PRAKTISI, NGO, MASYARAKAT			
	Pemberdayaan masyarakat di Kawasan konservasi	KPH Batutegi (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8.927	HL	KLHK, PEMPROV, PEMKAB, SWASTA, AKADEMISI, PRAKTISI, NGO, MASYARAKAT			

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	67,86	67,86	67,86	67,86	67,86	67,86	67,86	
	20	20	20	20	20	20	17	Terbinanya masyarakat sekitar hutan sebanyak 3.200 orang.
	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	Terbinanya masyarakat pengelola hutan pada KPH Batu Tegi 39 KTH

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Penanganan permasalahan di Kawasan konservasi (opened area)	KPH Batutegei (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8.927	HL	KLHK, PEMPROV, PEMKAB, SWASTA, AKADEMISI, PRAKTIISI, NGO, MASYARAKAT		1,115.83	
	Pengendalian Kawasan konservasi	KPH Batutegei (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8.927	HL	KLHK, PEMPROV, PEMKAB, SWASTA, AKADEMISI, PRAKTIISI, NGO, MASYARAKAT		1,115.83	
4	• Pengelolaan kawasan konservasi	KPH Way Waya	5.402	HL	Dishut, BPDAS, KPH, KTH			
	• Pemberdayaan masyarakat di Kawasan konservasi	KPH Way Waya	13.680	HL	Dishut, KPH, KTH		13.680	
	Penanganan permasalahan di Kawasan konservasi (opened area)	KPH Way Waya	5.402	HL	Dishut, BPDAS, KPH, KTH		675	
	• Pengembangan TN dan Taman wisata alam sebagai dukungan destinasi wisata	KPH Way Waya	30	HL	KPH, KUPS		30	
4	Pengelolaan kawasan konservasi	KPH Gunung Balak (Lampung Timur)	42,07	HL REG 15	PSKL, NGO, PEMKAB			
	• Pembinaan daerah penyangga	KPH Gunung Balak (Lampung Timur)	42,07	HL REG 15	PSKL, NGO, PEMKAB		5	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	terselesaikannya permasalahan di kawasan lindung seluas 8.926,63 ha
	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	terkendalinya kawasan hutan lindung seluas 8.926,63 ha
	13.680	13.680	13,680	13.680	13.680	13,680	13,680	Bantuan Alat Ekonomi Produktif 48 KTH
	675	675	675	675	675	675	675	Pembuatan Tanaman pada Areal Terbuka di Kawasan Konservasi
	30	30	30	30	30	30	30	Pembangunan Sarpras di 2 Lokasi Wisata
	50	50	50	50	50	50	50	Peningkatan kesadaran masy peningkatan Jumlah daerah penyangga yg dibina

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
4	• Pengelolaan kawasan konservasi	KPH Tangkit Tebak (Kec. Tj.Raja, Abung Tingi, Bk.Kemuning, Sumber jaya & Kebon tebu)			Dishut, UPT KLHK, Pemkab			
	Pembinaan daerah penyangga	KPH Tangkit Tebak (Kec. Tj.Raja, Abung Tingi, Bk.Kemuning, Sumber jaya & Kebon tebu)			Dishut, UPT KLHK, Pemkab		3 kec.	
5	• Pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan	KPH Liwa	1	HL	KPH, BPKH, KPS			
	• Perencanaan dan penetapan Kawasan hutan	KPH Liwa	1	HL	KPH, BPKH, KPS	-	125	
	• Penataan dan pemeliharaan batas Kawasan hutan	KPH Liwa	1	HL	KPH, BPKH, KPS	-	125	
5	• Pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan	KPH Way Waya	23.146	HL	Dishut, BPKH, KPH			
	• Penataan dan pemeliharaan batas Kawasan hutan	KPH Way Waya	23.146	HL	Dishut, BPKH, KPH		23.146	
5	• Pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan	KPH Way Terusan (Register 08 Rumbia)	5.666,72	HL	KPH dan BPKH			

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	3 kec.	3 kec.						Pertemuan Kelompok 2 kali setahun di 14 Pemegang Ijin PS
	125	125	125	125	125	125	125	Terlaksananya perencanaan dan penetapan kawasan hutan
	125	125	125	125	125	125	125	Terlaksananya penataan dan pemeliharaan batas kawasan hutan
	23.146	23.146	23,146	23,146	23,146	23,146	23,146	Pemasangan Tanda batas Antara Blok Inti dan Blok Pemanfaatan serta Penandaan Batas Wilayah antar KPH

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	Perencanaan dan penetapan Kawasan hutan	KPH Way Terusan (Register 08 Rumbia)	5.666,72	HL	KPH dan BPKH	5.666,72		
5	Pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan	KPH Pesisir Barat	500	HPT	KPH, BPKH, KPS			
	• Perencanaan dan penetapan Kawasan hutan	KPH Pesisir Barat	500	HPT	KPH, BPKH, KPS	-	100	
	• Penataan dan pemeliharaan batas Kawasan hutan	KPH Pesisir Barat	120 KM	HPT/HL	KPH, BPKH, KPS	-	25	
5	• Pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan	KPH Tangkit Tebak (Reg.34 dan Reg.24)	27,000 ha/ 2 kali	HL	Dishut, UPT KLHK, Pemkab			
	• Perencanaan dan penetapan Kawasan hutan	KPH Tangkit Tebak (Reg.34 dan Reg.24)	27,000 ha/ 2 kali	HL	Dishut, UPT KLHK, Pemkab		1 kali	
	• Perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan langka/endemik	KPH Pesisir Barat	500	HPT	KPH, KSDAE, KPS	-	100	
1	Konservasi species dan genetik	KPH Tangkit Tebak (Blok Lindung KPH dan Blok Lindung KPS)	7.003	HL	KPH, MMP			
	• Perlindungan dan penyelamatan satwa liar	KPH Tangkit Tebak (Blok Lindung KPH dan Blok Lindung KPS)	7.003	HL	KPH, MMP	4 Kali	24 kali	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
								SK Penetapan dan Pengukuhan HL register 08 seluas 5.666,72 Ha
	100	50	50	50	50	50	50	Terlaksananya perencanaan dan penetapan kawasan hutan
	25	25	15	10	10	5	5	Terlaksananya penataan dan pemeliharaan batas kawasan hutan
	1 kali							Pemasangan Tanda batas Antara Blok Inti dan Blok Pemanfaatan serta Penandaan Batas Wilayah antar KPH
	100	50	50	50	50	50	50	Patroli perlindungan dan penyelamatan satwa
	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	Konflik satwa dengan manusia rendah
	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	Tidak adanya Pengambilan dan Penjualan Tumbuhan Langka / Endemik

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan langka/endemik	KPH Tangkit Tebak (Blok Lindung KPH dan Blok Lindung KPS)	7.003	HL	KPH, MMP	4 Kali	24 kali	
1	Konservasi species dan genetik	KPH Bukit Punggur	2.553,47		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK			
	• Luasan Kawasan yang diverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman spesies dan gentika TSL							
	• Pengembangan entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati							
	• Perlindungan dan penyelamatan satwa liar							
	• Penetapan site monitoring species							
	• Pengendalian invasive species untuk mencegah kerusakan ekosistem alam							
	• Pembinaan populasi tumbuhan dan satwa liar							

[illegible]

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan langka/endemik							
1	Konservasi species dan genetik	KPH Kotaagung Utara	5753 ha	HUTAN LINDUNG	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi			
	• Luasan Kawasan yang diverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman spesies dan genetika TSL	KPH Kotaagung Utara	5753 ha	HUTAN LINDUNG	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi		719 ha	
	• Perlindungan dan penyelamatan satwa liar	KPH Kotaagung Utara	5753 ha	HUTAN LINDUNG	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi		1600 ha	
	• Penetapan site monitoring species	KPH Kotaagung Utara	100 ha	HUTAN LINDUNG	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi		100 ha	
	• Pembinaan populasi tumbuhan dan satwa liar	KPH Kotaagung Utara	600 ha	HUTAN LINDUNG	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi		300 ha	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	719 ha	719 ha	719 ha	719 ha	719 ha	719 ha	719 ha	Tersusunnya Dokumen kawasan perlindungan keanekaragaman spesies dan genetika TSL KPH Kotaagung Utara
	1600 ha	1600 ha	1600 ha	1600 ha	1600 ha	1600 ha	1600 ha	Terlaksananya Perlindungan (penanganan konflik satwa liar) di KPH Kotaagung Utara (mitigasi konflik satwa, patroli rutin, blokade, pembangunan menara pantau, koordinasi multi pihak)
								Ditetapkannya 4 lokasi untuk monitoring spesies bunga Rafflesia, Hutan Lumut, Siamang dan Ficus Pencekik sebagai habitat burung
	300 ha							Pengkayaan tanaman pakan satwa di jalur jelajah (homerange) satwa liar
	100 ha	100 ha	100 ha	100 ha	100 ha	100 ha	100 ha	Terlaksananya perlindungan hutan (10 kali patroli setiap tahun, tersedianya papan informasi/peringatan, tanda bata, Koordinasi multi pihak)

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan langka/endemik	KPH Kotaagung Utara	100 ha	HUTAN LINDUNG	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi		100 ha	
2	Pembinaan konservasi ekosistem esensial	KPH Way Pisang Lampung Selatan (Reg. 3 Gn. Rajabasa dan Pantai Timur)	3.648	HL	KPH, Dishut, Pemda, BPDAS, BPHP, PSKL, NGO			
	• Penjagaan Kawasan konservasi, ekosistem esensial dan hutan lindung	KPH Way Pisang Lampung Selatan (Reg. 3 Gn. Rajabasa dan Pantai Timur)	3.648	HL	KPH, Dishut, Pemda, BPDAS, BPHP, PSKL, NGO	405.33	405.33	
2	Pembinaan konservasi ekosistem esensial	KPH Pesawaran, Reg. 21	67,86	KHL	Dishut. Prov, Pemkab. Pesawaran, BKSDA			
	• Penjagaan Kawasan konservasi, ekosistem esensial dan hutan lindung	KPH Pesawaran, Reg. 21	67,86	KHL	Dishut. Prov, Pemkab. Pesawaran, BKSDA	67,86	67,86	
2	Pembinaan konservasi ekosistem esensial	KPH Batutegi (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8.927	HL	KLHK, PEMPROV, PEMKAB, SWASTA, AKADEMISI, PRAKTISI, NGO, MASYARAKAT			
	• Penjagaan Kawasan konservasi, ekosistem esensial dan hutan lindung	KPH Batutegi (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8.927	HL	KLHK, PEMPROV, PEMKAB, SWASTA, AKADEMISI, PRAKTISI, NGO, MASYARAKAT		1,115.83	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	405.33	405.33	405.33	405.33	405.33	405.33	405.33	Luas Perlindungan Areal Konservasi Tinggi
	67,86	67,86	67,86	67,86	67,86	67,86	67,86	
	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	terlindunginya kawasan ekosistem hutan lindung seluas 8.926,63 ha

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
2	Pembinaan konservasi ekosistem esensial	KPH Way Terusan	157	HL	KPH, MMP dan PKSM			
		(Register 08 Rumbia)						
	• Penjagaan Kawasan konservasi, ekosistem esensial dan hutan lindung	KPH Way Terusan (Register 08 Rumbia)	157	HL	KPH, MMP dan PKSM		157	
2	Pembinaan konservasi ekosistem esensial	KPH Pematang Neba (Tanggamus, Pringsewu)	15	HL	KPH, KTH, BKSDA		1.875	
2	Pembinaan konservasi ekosistem esensial	KPH Batuteji (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8.927	HL	KLHK, PEMPROV, PEMKAB, SWASTA, AKADEMISI, PRAKTISI, NGO, MASYARAKAT			
	• Peningkatan efektivitas pengelolaan KEE	KPH Batuteji (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8.927	HL	KLHK, PEMPROV, PEMKAB, SWASTA, AKADEMISI, PRAKTISI, NGO, MASYARAKAT		1,115.83	
2	Pembinaan konservasi ekosistem esensial	KPH Tangkit Tebak (Blok Lindung KPH dan Blok Lindung KPS)	7.003	HL	KPH, MMP			
	• Penjagaan Kawasan konservasi, ekosistem esensial dan hutan lindung	KPH Tangkit Tebak (Blok Lindung KPH dan Blok Lindung KPS)	7.003	HL	KPH, MMP	4 Kali	24 kali	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	157	157	156.94	157	157	156.94	156.94	terpantaunya kawasan hutan lindung seluas 156.94 ha
	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	
	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	terpantaunya kawasan hutan lindung seluas 8.926,63 ha
	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	Menurunnya Kejahatan Bidang Kehutanan (Perambahan Hutan, Illegal Logging dan Penambangan tanpa Ijin)

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
3	Pemolaan dan informasi konservasi alam	KPH Pesawaran, Register 21 Perintian batu, Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran	67,86	KHL	Dishut. Prov, Pemkab. Pesawaran, BKSDA			
	• Inventarisasi dan verifikasi Kawasan dengan nilai keekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	KPH Pesawaran, Register 21 Perintian batu, Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran	67,86	KHL	Dishut. Prov, Pemkab. Pesawaran, BKSDA	-	20	
3	Pemolaan dan informasi konservasi alam	KPH Way Terusan (Register 08 Rumbia)	157	HL	KPH dan anggota PS			
	• Inventarisasi dan verifikasi Kawasan dengan nilai keekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	KPH Way Terusan (Register 08 Rumbia)	157	HL	KPH dan anggota PS		20	
3	Pemolaan dan informasi konservasi alam	KPH Bukit Punggur	2.553,47		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK			
	• Inventarisasi dan verifikasi Kawasan dengan nilai keekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	KPH Bukit Punggur	2.553,47		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK			
3	Pemolaan dan informasi konservasi alam	KPH Kotaagung Utara	5753 ha	HUTAN LINDUNG	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi			

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	-	20	-	20	-	7,86	-	
	20	20	20	20	20	20	17	Terkumpulnya data inventarisasi keanekaragaman hayati seluas 156.94 ha
	719 ha	719 ha	719 ha	719 ha	719 ha	719 ha	719 ha	Tersusunnya dokumen/laporan hasil inventarisasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Inventarisasi dan verifikasi Kawasan dengan nilai keekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	KPH Kotaagung Utara	5753 ha	HUTAN LINDUNG	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi		719 ha	
4	Pengelolaan kawasan konservasi	KPH TAHURA WAR	525,98 ha	Kawasan Konservasi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD KPHK TAHURA WAR, BPDASHL WSS, Ditjen KSDAE, Mitra NGO, KTH, Akademisi			
	• Pemberdayaan masyarakat di Kawasan konservasi	Blok Tradisional TAHURA WAR (Kabupaten Pesawaran)	525,98	Kawasan Konservasi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD KPHK TAHURA WAR, BPDASHL WSS, Ditjen KSDAE, Mitra NGO, KTH, Akademisi	5,98	50	
4	Pengelolaan kawasan konservasi	KPH Pesawaran, Register 21 Perintian batu, Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran	67,86	KHL	Dishut. Prov, Pemkab. Pesawaran, BKSDA			
	• Pemberdayaan masyarakat di Kawasan konservasi	KPH Pesawaran, 22 dan Reg 32)	67,86	KHL	Dishut. Prov, Pemkab.	67,86	67,86	
4	Pengelolaan kawasan konservasi	KPH Way Terusan (Register 08 Rumbia)	156.94	HL	KPH dan masyarakat			
	• Pembinaan daerah penyangga	KPH Way Terusan (Register 08 Rumbia)	156.94	HL	KPH dan masyarakat		20	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	50	100	100	100	50	50	20	
	67,86	67,86	67,86	67,86	67,86	67,86	67,86	
	20	20	20	20	20	20	16.94	Terbinanya masyarakat sekitar hutan sebanyak 3.200 orang.

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
4	Pengelolaan kawasan konservasi	KPH Batuteги (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8,926.63	HL	KLHK, PEMPROV, PEMKAB, SWASTA, AKADEMISI, PRAKTISI, NGO, MASYARAKAT			
	Pemberdayaan masyarakat di Kawasan konservasi	KPH Batuteги (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8,926.63	HL	KLHK, PEMPROV, PEMKAB, SWASTA, AKADEMISI, PRAKTISI, NGO, MASYARAKAT			
	• Penanganan permasalahan di Kawasan konservasi (opened area)	KPH Batuteги (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8,926.63	HL	KLHK, PEMPROV, PEMKAB, SWASTA, AKADEMISI, PRAKTISI, NGO, MASYARAKAT			
	Pengendalian Kawasan konservasi	KPH Batuteги (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8,926.63	HL	KLHK, PEMPROV, PEMKAB, SWASTA, AKADEMISI, PRAKTISI, NGO, MASYARAKAT			
4	Pengelolaan kawasan konservasi	KPH Gunung Balak (Lampung Timur)	42,07	HL REG 15	PSKL, NGO, PEMKAB			
	• Pembinaan daerah penyangga	KPH Gunung Balak (Lampung Timur)	42,07	HL REG 15	PSKL, NGO, PEMKAB		5.0	
4	Pengelolaan kawasan konservasi	KPH Tangkit Tebak (Kec. Tj.Raja, Abung Tinggi, Bk.Kemuning, Sumber jaya & Kebon tebu)			Dishut, UPT KLHK, Pemkab			

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	Terbinanya masyarakat pengelola hutan pada KPH Batu Tegi 39 KTH
	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	terselesaikannya permasalahan di kawasan lindung seluas 8.926,63 ha
	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	terkendalinya kawasan hutan lindung seluas 8.926,63 ha
	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	Peningkatan kesadaran masy peningkatan Jumlah daerah penyangga yg dibina

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	Pembinaan daerah penyangga	KPH Tangkit Tebak (Kec. Tj.Raja, Abung Tingi, Bk.Kemuning, Sumber jaya & Kebon tebu)			Dishut, UPT KLHK, Pemkab		3 kec.	
5	Pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan	KPH Liwa	1.000	HL	KPH, BPKH, KPS			
	• Perencanaan dan penetapan Kawasan hutan	KPH Liwa	1.000	HL	KPH, BPKH, KPS	-	125	
	• Penataan dan pemeliharaan batas Kawasan hutan	KPH Liwa	1.000	HL	KPH, BPKH, KPS	-	125	
5	Pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan	KPH Way Waya	23,146	HL	Dishut, BPKH, KPH			
	• Penataan dan pemeliharaan batas Kawasan hutan	KPH Way Waya	23,146	HL	Dishut, BPKH, KPH		23,146	
5	Pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan	KPH Way Terusan (Register 08 Rumbia)	5.666,72	HL	KPH dan BPKH			
	Perencanaan dan penetapan Kawasan hutan	KPH Way Terusan (Register 08 Rumbia)	5.666,72	HL	KPH dan BPKH	5.666,72		
5	Pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan	KPH Pesisir Barat	500	HPT	KPH, BPKH, KPS			
	• Perencanaan dan penetapan Kawasan hutan	KPH Pesisir Barat	500	HPT	KPH, BPKH, KPS	-	100	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	3 kec.							Pertemuan Kelompok 2 kali setahun di 14 Pemegang Ijin PS
	125	125	125	125	125	125	125	Terlaksananya perencanaan dan penetapan kawasan hutan
	125	125	125	125	125	125	125	Terlaksananya penataan dan pemeliharaan batas kawasan hutan
	23,146	23,146	23,146	23,146	23,146	23,146	23,146	Pemasangan Tanda batas Antara Blok Inti dan Blok Pemanfaatan serta Penandaan Batas Wilayah antar KPH
								SK Penetapan dan Pengukuhan HL register 08 seluas 5.666,72 Ha
	100	50	50	50	50	50	50	Terlaksananya perencanaan dan penetapan kawasan hutan

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Penataan dan pemeliharaan batas Kawasan hutan	KPH Pesisir Barat	120 KM	HPT/HL	KPH, BPKH, KPS	-	25	
5	Penguatan dan penatagunaan Kawasan hutan	KPH Tangkit Tebak (Reg.34 dan Reg.24)	27,000 ha/ 2 kali	HL	Dishut, UPT KLHK, Pemkab			
	• Perencanaan dan penetapan Kawasan hutan	KPH Tangkit Tebak (Reg.34 dan Reg.24)	27,000 ha/ 2 kali	HL	Dishut, UPT KLHK, Pemkab		1 kali	
	• Perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan langka/endemik	KPH Pesisir Barat	500	HPT	KPH, KSDAE, KPS	-	100	
1	Konservasi species dan genetik	KPH Tangkit Tebak (Blok Lindung KPH dan Blok Lindung KPS)	7,002.99	HL	KPH, MMP			
	• Perlindungan dan penyelamatan satwa liar	KPH Tangkit Tebak (Blok Lindung KPH dan Blok Lindung KPS)	7,002.99	HL	KPH, MMP	4 Kali	24 kali	
	• Perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan langka/endemik	KPH Tangkit Tebak (Blok Lindung KPH dan Blok Lindung KPS)	7,002.99	HL	KPH, MMP	4 Kali	24 kali	
1	Konservasi species dan genetik	KPH Bukit Punggur	2.553,47		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK			
	• Luasan Kawasan yang diverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman spesies dan gentika TSL							

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	25	25	15	10	10	5	5	Terlaksananya penataan dan pemeliharaan batas kawasan hutan
	1 kali							Pemasangan Tanda batas Antara Blok Inti dan Blok Pemanfaatan serta Penandaan Batas Wilayah antar KPH
	100	50	50	50	50	50	50	Patroli perlindungan dan penyelamatan satwa
	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	Konflik satwa dengan manusia rendah
	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	Tidak adanya Pengambilan dan Penjualan Tumbuhan Langka / Endemik

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Pengembangan entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati							
	• Perlindungan dan penyelamatan satwa liar							
	• Penetapan site monitoring species							
	• Pengendalian invasive species untuk mencegah kerusakan ekosistem alam							
	• Pembinaan populasi tumbuhan dan satwa liar							
	• Perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan langka/endemik							
1	Konservasi species dan genetik	KPH Kotaagung Utara	5753 ha	HUTAN LINDUNG	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi			
	• Luasan Kawasan yang diverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman spesies dan genetika TSL	KPH Kotaagung Utara	5753 ha	HUTAN LINDUNG	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi		719 ha	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	719 ha	719 ha	719 ha	719 ha	719 ha	719 ha	719 ha	Tersusunnya Dokumen kawasan perlindungan keanekaragaman spesies dan genetika TSL KPH Kotaagung Utara

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Perlindungan dan penyelamatan satwa liar	KPH Kotaagung Utara	5753 ha	HUTAN LINDUNG	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi		1600 ha	
	• Penetapan site monitoring species	KPH Kotaagung Utara	100 ha	HUTAN LINDUNG	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi		100 ha	
	• Pembinaan populasi tumbuhan dan satwa liar	KPH Kotaagung Utara	600 ha	HUTAN LINDUNG	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi		300 ha	
	• Perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan langka/endemik	KPH Kotaagung Utara	100 ha	HUTAN LINDUNG	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi		100 ha	
2	Pembinaan konservasi ekosistem esensial	KPH Way Pisang Lampung Selatan (Reg. 3 Gn. Rajabasa dan Pantai Timur)	3648	HL	KPH, Dishut, Pemda, BPDAS, BPHP, PSKL, NGO			
	• Penjagaan Kawasan konservasi, ekosistem esensial dan hutan lindung	KPH Way Pisang Lampung Selatan (Reg. 3 Gn. Rajabasa dan Pantai Timur)	3648	HL	KPH, Dishut, Pemda, BPDAS, BPHP, PSKL, NGO	405.33	405.33	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	1600 ha	1600 ha	1600 ha	1600 ha	1600 ha	1600 ha	1600 ha	Terlaksananya Perlindungan (penanganan konflik satwa liar) di KPH Kotaagung Utara (mitigasi konflik satwa, patroli rutin, blokade, pembangunan menara pantau, koordinasi multi pihak)
								Ditetapkannya 4 lokasi untuk monitoring spesies bunga Rafflesia, Hutan Lumut, Siamang dan Ficus Pencekik sebagai habitat burung
	300 ha							
	100 ha	100 ha	100 ha	100 ha	100 ha	100 ha	100 ha	Terlaksananya perlindungan hutan (10 kali patroli setiap tahun, tersedianya papan informasi/peringatan, tanda bata, Koordinasi multi pihak)
	405.33	405.33	405.33	405.33	405.33	405.33	405.33	Luas Perlindungan Areal Konservasi Tinggi

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
2	Pembinaan konservasi ekosistem esensial	KPH Pesawaran, Reg. 21	67,86	KHL	Dishut. Prov, Pemkab. Pesawaran, BKSDA			
	• Penjagaan Kawasan konservasi, ekosistem esensial dan hutan lindung	KPH Pesawaran, Reg. 21	67,86	KHL	Dishut. Prov, Pemkab. Pesawaran, BKSDA	67,86	67,86	
2	Pembinaan konservasi ekosistem esensial	KPH Batutegi (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8,926.63	HL	KLHK, PEMPROV, PEMKAB, SWASTA, AKADEMISI, PRAKTISI, NGO, MASYARAKAT			
	• Penjagaan Kawasan konservasi, ekosistem esensial dan hutan lindung	KPH Batutegi (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8,926.63	HL	KLHK, PEMPROV, PEMKAB, SWASTA, AKADEMISI, PRAKTISI, NGO, MASYARAKAT			
2	Pembinaan konservasi ekosistem esensial	KPH Way Terusan (Register 08 Rumbia)	156.94	HL	KPH, MMP dan PKSM			
	• Penjagaan Kawasan konservasi, ekosistem esensial dan hutan lindung	KPH Way Terusan (Register 08 Rumbia)	156.94	HL	KPH, MMP dan PKSM		156.94	
2	Pembinaan konservasi ekosistem esensial	KPH Pematang Neba (Tanggamus, Pringsewu)	15	HL	KPH, KTH, BKSDA		1,875	

[illegible]

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
2	Pembinaan konservasi ekosistem esensial	KPH Batuteги (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8,926.63	HL	KLHK, PEMPROV, PEMKAB, SWASTA, AKADEMISI, PRAKTISI, NGO, MASYARAKAT			
	• Peningkatan efektivitas pengelolaan KEE	KPH Batuteги (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8,926.63	HL	KLHK, PEMPROV, PEMKAB, SWASTA, AKADEMISI, PRAKTISI, NGO, MASYARAKAT			
2	Pembinaan konservasi ekosistem esensial	KPH Tangkit Tebak (Blok Lindung KPH dan Blok Lindung KPS)	7,002.99	HL	KPH, MMP			
	• Penjagaan Kawasan konservasi, ekosistem esensial dan hutan lindung	KPH Tangkit Tebak (Blok Lindung KPH dan Blok Lindung KPS)	7,002.99	HL	KPH, MMP	4 Kali	24 kali	
3	Pemolaan dan informasi konservasi alam	KPH Pesawaran, Register 21 Perintian batu, Kec. Way Khilau Kab.Pesawaran	67,86	KHL	Dishut. Prov, Pemkab. Pesawaran, BKSDA			
	• Inventarisasi dan verifikasi Kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	KPH Pesawaran, Register 21 Perintian batu, Kec. Way Khilau Kab.Pesawaran	67,86	KHL	Dishut. Prov, Pemkab. Pesawaran, BKSDA	-	20	
3	Pemolaan dan informasi konservasi alam	KPH Way Terusan (Register 08 Rumbia)	156.94	HL	KPH dan anggota PS			

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	terpantaunya kawasan hutan lindung seluas 8.926,63 ha
	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	Menurunnya Kejahatan Bidang Kehutanan (Perambahan Hutan, Illegal Logging dan Penambangan tanpa Ijin)
	-	20	-	20	-	7,86	-	

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Inventarisasi dan verifikasi Kawasan dengan nilai keekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	KPH Way Terusan (Register 08 Rumbia)	156.94	HL	KPH dan anggota PS		20	
3	Pemolaan dan informasi konservasi alam	KPH Bukit Punggur	2.553,47		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK			
	• Inventarisasi dan verifikasi Kawasan dengan nilai keekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	KPH Bukit Punggur	2.553,47		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK			
3	Pemolaan dan informasi konservasi alam	KPH Kotaagung Utara	5753 ha	HUTAN LINDUNG	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi			
	• Inventarisasi dan verifikasi Kawasan dengan nilai keekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	KPH Kotaagung Utara	5753 ha	HUTAN LINDUNG	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi		719 ha	
4	Pengelolaan kawasan konservasi	KPH TAHURA WAR	525,98 ha	Kawasan Konservasi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD KPHK TAHURA WAR, BPDASHL WSS, Ditjen KSDAE, Mitra NGO, KTH, Akademisi			

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	20	20	20	20	20	20	16.94	Terkumpulnya data inventarisasi keanekaragaman hayati seluas 156.94 ha
	719 ha	719 ha	719 ha	719 ha	719 ha	719 ha	719 ha	Tersusunnya dokumen/laporan hasil inventarisasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Pemberdayaan masyarakat di Kawasan konservasi	Blok Tradisional TAHURA WAR (Kabupaten Pesawaran)	525,98 ha	Kawasan Konservasi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD KPHK TAHURA WAR, BPDASHL WSS, Ditjen KSDAE, Mitra NGO, KTH, Akademisi	5,98	50	
4	Pengelolaan kawasan konservasi	KPH Pesawaran, Register 21 Perintian batu, Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran	67,86	KHL	Dishut. Prov, Pemkab. Pesawaran, BKSDA			
	• Pemberdayaan masyarakat di Kawasan konservasi	KPH Pesawaran, Register 21 Perintian batu, Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran	67,86	KHL	Dishut. Prov, Pemkab. Pesawaran, BKSDA	67,86	67,86	
4	Pengelolaan kawasan konservasi	KPH Way Terusan (Register 08 Rumbia)	156.94	HL	KPH dan masyarakat			
	• Pembinaan daerah penyangga	KPH Way Terusan (Register 08 Rumbia)	156.94	HL	KPH dan masyarakat		20	
4	Pengelolaan kawasan konservasi	KPH Batutegi (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8,926.63	HL	KLHK, PEMPROV, PEMKAB, SWASTA, AKADEMISI, PRAKTISI, NGO, MASYARAKAT			
	• Pemberdayaan masyarakat di Kawasan konservasi	KPH Batutegi (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8,926.63	HL	KLHK, PEMPROV, PEMKAB, SWASTA, AKADEMISI, PRAKTISI, NGO, MASYARAKAT		1,115.83	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	50	100	100	100	50	50	20	
	67,86	67,86	67,86	67,86	67,86	67,86	67,86	
	20	20	20	20	20	20	16.94	Terbinanya masyarakat sekitar hutan sebanyak 3.200 orang.
	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	Terbinanya masyarakat pengelola hutan pada KPH Batu Tegi 39 KTH

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Penanganan permasalahan di Kawasan konservasi (opened area)	KPH Batutegi (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8,926.63	HL	KLHK, PEMPROV, PEMKAB, SWASTA, AKADEMISI, PRAKTIISI, NGO, MASYARAKAT		1,115.83	
	• Pengendalian Kawasan konservasi	KPH Batutegi (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8,926.63	HL	KLHK, PEMPROV, PEMKAB, SWASTA, AKADEMISI, PRAKTIISI, NGO, MASYARAKAT		1,115.83	
4	Pengelolaan kawasan konservasi	KPH Gunung Balak (Lampung Timur)	42,07	HL REG 15	PSKL, NGO, PEMKAB			
	• Pembinaan daerah penyangga	KPH Gunung Balak (Lampung Timur)	42,07	HL REG 15	PSKL, NGO, PEMKAB		5.0	
4	Pengelolaan kawasan konservasi	KPH Tangkit Tebak (Kec. Tj.Raja, Abung Tingi, Bk.Kemuning , Sumber jaya & Kebon tebu)			Dishut, UPT KLHK, Pemkab			
	• Pembinaan daerah penyangga	KPH Tangkit Tebak (Kec. Tj.Raja, Abung Tingi, Bk.Kemuning , Sumber jaya & Kebon tebu)			Dishut, UPT KLHK, Pemkab		3 kec.	
5	Penguksuhan dan penatagunaan Kawasan hutan	KPH Liwa	1.000	HL	KPH, BPKH, KPS			
	• Perencanaan dan penetapan Kawasan hutan	KPH Liwa	1.000	HL	KPH, BPKH, KPS	-	125	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	terselesaikannya permasalahan di kawasan lindung seluas 8.926,63 ha
	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	1,115.83	terkendalinya kawasan hutan lindung seluas 8.926,63 ha
	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.207	Peningkatan kesadaran masy peningkatan Jumlah daerah penyangga yg dibina
	3 kec.							Pertemuan Kelompok 2 kali setahun di 14 Pemegang Ijin PS
	125	125	125	125	125	125	125	Terlaksananya perencanaan dan penetapan kawasan hutan

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
	• Penataan dan pemeliharaan batas Kawasan hutan	KPH Liwa	1.000	HL	KPH, BPKH, KPS	-	125	
5	Pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan	KPH Way Terusan (Register 08 Rumbia)	5.666,72	HL	KPH dan BPKH			
	• Perencanaan dan penetapan Kawasan hutan	KPH Way Terusan (Register 08 Rumbia)	5.666,72	HL	KPH dan BPKH	5.666,72		
5	Pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan	KPH Pesisir Barat	500	HPT	KPH, BPKH, KPS			
	• Perencanaan dan penetapan Kawasan hutan	KPH Pesisir Barat	500	HPT	KPH, BPKH, KPS	-	100	
	• Penataan dan pemeliharaan batas Kawasan hutan	KPH Pesisir Barat	120 KM	HPT	KPH, BPKH, KPS	-	100	
5	Pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan	KPH Tangkit Tebak (Reg.34 dan Reg.24)	27,000 ha/ 2 kali	HL	Dishut, UPT KLHK, Pemkab			
	• Perencanaan dan penetapan Kawasan hutan	KPH Tangkit Tebak (Reg.34 dan Reg.24)	27,000 ha/ 2 kali	HL	Dishut, UPT KLHK, Pemkab		1 kali	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	125	125	125	125	125	125	125	Terlaksananya penataan dan pemeliharaan batas kawasan hutan
								SK Penetapan dan Pengukuhan HL register 08 seluas 5.666,72 Ha
	100	50	50	50	50	50	50	Terlaksananya perencanaan dan penetapan kawasan hutan
	100	50	50	50	50	50	50	Terlaksananya penataan dan pemeliharaan batas kawasan hutan
	1 kali							Pemasangan Tanda batas Antara Blok Inti dan Blok Pemanfaatan serta Penandaan Batas Wilayah antar KPH

3.11. Rencana Aksi Mitigasi - Pengelolaan Mangrove [RO-12]

Total Luas Areal RO12 - Pengelolaan Mangrove per Kabupaten dan Fungsi Kawasan mencakup luasan 3.141 ha yang semuanya merupakan APL dengan pembagian wilayah administrasi di Lampung Timur (2,76 ha) dan di Tulang bawang mencakup luasan yang cukup besar yaitu 3.138 ha. Secara rinci Luas Areal RO12 - Pengelolaan Mangrove per Kabupaten dan Fungsi Kawasan disajikan pada Tabel 3.44. Sedangkan secara spasial, sebaran rencana aksi pengelolaan mangrove berdasarkan kabupaten disajikan pada Gambar 3.13.

TABEL 3.47. | Luas Areal R012 - Pengelolaan Mangrove per Kabupaten dan Fungsi Kawasan

Kabupaten	APL (Ha)	Luas (Ha)
Lampung Timur	2,76	2,76
Tulang Bawang	3.138,59	3.138,59
Luas (Ha)	3.141,35	3.141,35



Gambar 3.13. Sebaran Areal RO12 – Pengelolaan Mangrove di Provinsi Lampung Rencana Aksi Pengelolaan Mangrove di Provinsi Lampung secara rinci disajikan pada

Tabel 3.48, Tabel 3.49 dan Tabel 3.50. Rencana aksi akan melibatkan UPT KLHK di Provinsi Lampung dan OPD Teknis terkait Daerah dan Dinas Kehutanan/KPH di Provinsi Lampung.

TABEL 3.48. | Rencana Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove [RO-12] oleh unit di lingkungan KLHK

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
R012	Pengelolaan Mangrove (RO 12)	12) Mesuji Tulang Bawang Lampung Tengah	3.141	APL	UPT KLHK, OPD Prov	3.141	3.141	
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan mangrove TAHURA WAR	KTH Pelestari Mangrove	153	Mangrove	Dinas Kehutanan Provinsi	13	20	
2	Pengendalian penebangan kayu mangrove TAHURA WAR	KTH Bina Jaya Lestari, Kel. Gebang, Kab Pesawaran	20		Lampung, UPTD KPHK TAHURA WAR, BPDASHL WSS	10	10	

TABEL 3.49. | Rencana Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove [R0-12] oleh Dinas Kehutanan [KPH] di Provinsi Lampung

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
R012	Pengelolaan Mangrove (RO 12)	Lampung Timur Tulang Bawang	2.76 3,138.59					
OPD	Dinas Kehutanan							

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
1	Promosi dan peningkatan perekonomian HHBK dan jasa lingkungan	KPH Gunung Balak (Lampung Timur)	42.07	HL REG 15	BRGM, NGO, PEMKAB		5.0	
2	2 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan mangrove	KPH Gunung Balak (Lampung Timur)	42.07	HL REG 15	BRGM, NGO, PEMKAB		5.0	
3	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan mangrove	KPH Tahura WAR	152 ha	Mangrove	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD KPHK TAHURA WAR, BPDASHL WSS			
	• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan mangrove	KPH Tahura WAR – KTH Pelestari Mangrove (Kelurahan Gebang Kabupaten Pesawaran)	152 ha	Mangrove	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD KPHK TAHURA WAR, BPDASHL WSS	13	20	
	• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan mangrove	KPH Tahura WAR – KTH Pelestari Mangrove (Kelurahan Gebang Kabupaten Pesawaran)	20 ha	Mangrove	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD KPHK TAHURA WAR, BPDASHL WSS	10	10	
5	Peningkatan produktivitas mangrove	KPH Gunung Balak (Lampung Timur)	42.07	HL REG 15	PSKL, NGO, PEMKAB		5.0	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.207	Peningkatan Jumlah kunjungan wisata
	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.207	Peningkatan Jumlah masy memanfaatkan mangrove
	20	30	30	20	10	10		
	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.207	Peningkatan varian produk mangrove

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
6	Kemitraan dalam rehabilitasi mangrove	KPH Gunung Balak (Lampung Timur)	42.07	HL REG 15	BRGM, NGO, PEMKAB		5.0	
7	Penegakan hukum dalam pengendalian mangrove	KPH Gunung Balak (Lampung Timur)	42.07	HL REG 15	GAKKUM, KEPOLISIAN, PEMKAB		5.0	

TABEL 3.50. | Rencana Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove [R0-12] oleh OPD Terkait di Provinsi Lampung

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
R012	Pengelolaan Mangrove (R0 12)	Mesuji Tulang Bawang Lampung Tengah	3.141	APL	UPT KLHK, OPD Prov	3.141	3.141	
OPD	Dinas Perikanan dan Kelautan							
1	Program pengelolaan perikanan tangkap	Mesuji Tulang Bawang Lampung Tengah	3.141	APL	Mesuji Tulang Bawang Lampung Tengah	3	3	
	• Pengelolaan daerah tangkapan perikanan	Mesuji Tulang Bawang Lampung Tengah	3.141	APL	Mesuji Tulang Bawang Lampung Tengah	100	100	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.207	Jumlah pihak yang bermitra
	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.207	Tanaman mangrove aman dari ulah manusia

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	3.141	3.141	3.141	3.141	3.141	3.141	3.141	Akumulasi luas (ha)
	3	3	3	3	3	3	3	Peningkatan % penerimaan nelayan
	100	100	100	100	100	100	100	Persen cakupan kab yang memiliki potensi SD perikana laut

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat	2022 (Ha)	2023 (Ha)	
2	Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Mesuji Tulang Bawang Lampung Tengah	3.141	APL	Mesuji Tulang Bawang Lampung Tengah	100	100	
	• Pengawasan sumberdaya laut dan perikanan	Mesuji Tulang Bawang Lampung Tengah	3.141	APL	Mesuji Tulang Bawang Lampung Tengah	100	100	

	2024 (Ha)	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)	Indikator
	100	100	100	100	100	100	100	Persen cakupan kab yang memiliki potensi SD perikana laut
	100	100	100	100	100	100	100	Persen cakupan kab yang memiliki potensi SD perikana laut

BAB 04



PENDANAAN KEGIATAN

BAB IV. PENDANAAN KEGIATAN

4.1. Rancangan Pendanaan Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral [R01]

Rancangan Pendanaan Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral [R01] berasal dari APBN untuk pembiayaan unit-unit di daerah yang merupakan unit Kementerian dan Lingkungan Hidup maupun DAK APBN kepada OPD teknis di Daerah di Provinsi Lampung. Selain itu sumberd pendanaan juga berasal APBD Provinsi.

TABEL 4.1. | Rencana Pendanaan Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral [R01] oleh Unit di Lngkungan KLHK

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
OPD	Dinas Kehutanan								
6	Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral (R01)	Lampung Barat Mesuji Tulang Bawang Way Kanan	69,89 5,10 47,21 387,51	APL, HL, SM, TN	UPT KLHK, OPD Prov				
1.1	Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi	(*) PHL							
	Organisasi KPH yang Efektif BPHP Verifikasi penilaian organisasi KPH Efektif)				BPHP, Dinas Kehutanan, KPH, BPDAS, BPKH, Direktorat BRPH	20 jt	40 jt	0	
1.2	BPHP Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan Hutan				BPHP, Dinas Kehutanan, KPH, BPDAS, BPKH, Direktorat BRPH	100 jt	100 jt	100 jt	

[illegible]

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat			2024 (Ha)	
						2022 (Ha)	2023 (Ha)		
1.3	Pengembangan Usaha PS dan Hutan Adat; BPSKL	Definitif PS	277.43						
	Penyusunan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial untuk mendapatkan pengesahan							20	
	Pengembangan fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan							100	
	Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk ditingkatkan menjadi kelas gold/platinum								
1.15	Kemitraan Lingkungan BPSKL	Definitif PS	28.822						
	Pengembangan dan peningkatan tenaga pendamping Perhutanan Sosial					108	54	108	
	Pengembangan kemitraan kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan					37.5	37.5	37.5	

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat			2024 (Ha)	
						2022 (Ha)	2023 (Ha)		
1.16	Penyiapan Kawasan PS BPSKL	Indikatif PS	28.822						
	Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD,HKm, HTR, KK								
	Penetapan kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat								
1.17	Pengembangan Usaha PS dan Hutan Adat BPSKL	Indikatif PS	28.822						
	Penyusunan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial untuk mendapatkan pengesahan								
	Pengembangan fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan								

[illegible]

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat			2024 (Ha)	
						2022 (Ha)	2023 (Ha)		
	Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk ditingkatkan menjadi kelas gold/ platinum								
1.18	Kemitraan Lingkungan BPSKL	Indikatif PS	28.822						
	Pengembangan dan peningkatan tenaga pendamping Perhutanan Sosial								
	Pengembangan kemitraan kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan								
1.10	Pengendalian kebakaran hutan dan lahan	*)PPI							
	• Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan BKSDA	Tulang Bawang Barat	1.373	KPA	SKW III Lampung	5.560	5.560	5.560	
	• Pencegahan kebakaran hutan dan lahan BKSDA	Tulang Bawang Barat	1.373	KPA	SKW III Lampung	13.200	13.200	13.200	

[illegible]

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Kajian dan penelitian mengenai kegiatan pengendalian karhutla								
	• Patroli Terpadu (Patdu) Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	PPIKarhutla				27.000	54.000	54.000	
	• Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	PPIKarhutla				40.000	80.000	80.000	
	• Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Darat	PPIKarhutla							
	• Program Kampung Iklim (Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim)	PPIKarhutla				68.000	110.000	110.000	
1.14	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dinas LH							

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000		APBN
	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		APBN
								APBN
	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		APBN/APBD/ Korporasi

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat			2024 (Ha)	
						2022 (Ha)	2023 (Ha)		
	• Penyelenggaraan dan Dukungan Program Kampung Iklim (ProKlim)	Kab. Tanggamus (7 proklam) Kab. Pringsewu (3 proklam) Kab.Lampung Barat (6 proklam) Kab. Lampung Timur (4 proklam) Kab. Lampung Tengah (3 proklam) Kota Metro (1 proklam dan 1 mitigasi enegi) Kab. Pesawaran (1 proklam) Kab. Mesuji (2 proklam)							
	• Pembuatan Taman Kehati	Kab. Lampung Barat (2 lokasi Taman Kehati) - Pekon Keagungan - Pekon Kubu Perahu Kab. Mesuji - Desa Mekar Sari Kab.Lampung Timur - Desa Sukacari Kab. Tanggamus Pekon Teba	8 ha 86, 68 10 ha 10 ha 3,2 ha	APL	DLH Provinsi, DLH Kab/Kota, dan LSM terkait.				

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		

TABEL 4.2. | Rencana Pendanaan Aksi Mitigasi RO-1 yang bersumber dari Dinas Kehutanan [KPH]
Provinsi Lampung

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
A	Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral (RO1)	Lampung Barat Mesuji Tulang Bawang Way Kanan Total	69,89 5,10 47,21 387,51 509,71	KPH Bukit Punggur, KPH Liwa, TN, SM, HL, APL					
OPD	Dinas Kehutanan								
1	Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK				
	• Organisasi KPH yang Efektif	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	315	120	132	
	• Sosialisasi	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	54.63	54.63	54.63	
	• Perlindungan	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	136.44	136.44	136.44	
	• Penanaman	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	471.2	471.2	471.2	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
							Anggaran tahunan	APBD 1
	145	159	175	193	212	233	Anggaran tahunan	APBD 1
	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	Anggaran tahunan	APBD 1
	136.44	136.44	136.44	136.44	136.44	136.44	Anggaran tahunan	APBD 1
	471.2	471.2	471.2	471.2	471.2	471.2	Anggaran tahunan	APBD 1

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Wasdal	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	15	15	15	
4	Pengelolaan hutan lestari dan usaha kehutanan	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK				
	• Pengembangan pengelolaan melalui HKM	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	250	250	250	
	• Pengembangan luasan pemanfaatan HHBK di hutan lindung	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	45	45	45	
	• Pembinaan masyarakat sekitar hutan peningkatan produktivitas usahatani	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	54.63	54.63	54.63	
5	Pembinaan konservasi ekosistem esensial	KPH Pematang Neba (Tanggamus, Pringsewu)	15 ha	HL	KPH, KTH, BKSDA		18.75	18.75	
7	Bina usaha perhutanan sosial dan hutan adat	KPH Pematang Neba (Tanggamus, Pringsewu)	20.000 ha	HL	KPH, KTH, BPHL, BPSKL		1.250	1.250	
7	Bina usaha perhutanan sosial dan hutan adat	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK				

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	15	15	15	15	15	15	Anggaran tahunan	APBD 1
							Anggaran tahunan	APBD 1
	250	250	250	250	250	250	Anggaran tahunan	APBD 1
	45	45	45	45	45	45	Anggaran tahunan	APBD 1
	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	Anggaran tahunan	APBD 1
	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	Dana Dekon	APBN
	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	Dana Dekon	APBN
							Anggaran tahunan	APBD 1

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Industri nilai tambah produk	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	150	150	150	
	• Kemitraan investasi/usaha	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	75	75	75	
	• Pemasaran/ promosi produk perhutanan sosial	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	75	75	75	
	• Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	25	25	25	
	• Pembinaan masyarakat sekitar hutan untuk peningkatan produktivitas usahatani	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	54.63	54.63	54.63	
8	Penyiapan kawasan perhutanan sosial	KPH Pematang Neba (Tanggamus, Pringsewu)	1.300ha	HL	KPH, KTH, BPHL, BPSKL		234.75	234.75	
8	Penyiapan kawasan perhutanan sosial	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK		50.000	50.000	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	150	150	150	150	150	150	Anggaran tahunan	APBD 1
	75	75	75	75	75	75	Anggaran tahunan	APBD 1
	75	75	75	75	75	75	Anggaran tahunan	APBD 1
	25	25	25	25	25	25	Anggaran tahunan	APBD 1
	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	Anggaran tahunan	APBD 1
	234.75	234.75	234.75	234.75	234.75	234.75	Anggaran tahunan	APBD 1
	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Anggaran tahunan	APBD 1

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
9	Pencegahan dan pengamanan hutan	KPH Pematang Neba (Tanggamus, Pringsewu)	5.234,84 ha	HL	KPH, KTH, GAKKUM		325	325	
9	Pencegahan dan pengamanan hutan	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK				
	• Operasi pengamanan Kawasan hutan	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	136.4	136.4	136.4	
	• Operasi peredaran hasil hutan ilegal	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	111.6	111.6	111.6	
	• Kegiatan patroli, sosialisasi dan operasi lapang untuk pencegahan ancaman/ gangguan	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	111.6	111.6	111.6	
	• Penagakan hukum pidana untuk penegahan kebakaran, pembalakan dan perambahan	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	100	100	100	
	• Penyadartahuan tentang pengamanan hutan	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	54.63	54.63	54.63	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	325	325	325	325	325	342.92	Anggaran tahunan	APBD 1
							Anggaran tahunan	APBD 1
	136.4	136.4	136.4	136.4	136.4	136.4	Anggaran tahunan	APBD 1
	111.6	111.6	111.6	111.6	111.6	111.6	Anggaran tahunan	APBD 1
	111.6	111.6	111.6	111.6	111.6	111.6	Anggaran tahunan	APBD 1
	100	100	100	100	100	100	Anggaran tahunan	APBD 1
	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	Anggaran tahunan	APBD 1

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
10	Pengendalian kebakaran hutan dan lahan	KPH Way Waya	23.146 ha	HL					
	• Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	KPH Way Waya	23.146 ha	HL	KPH, MPA		150.00		
	• Pencegahan kebakaran hutan dan lahan	KPH Way Waya	23.146 ha	HL	KPH, MPA	28.80	28.80	28.80	
	• Kegiatan operasi pemadaman untuk penurunan luas kebakaran hutan	KPH Way Waya	23.146 ha	HL	KPH, MPA	28.80	28.80	28.80	
10	Pengendalian kebakaran hutan dan lahan	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK				
	• Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	111.6	111.6	111.6	
	• Pencegahan kebakaran hutan dan lahan	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	54.63	54.63	54.63	
	• Kegiatan operasi pemadaman untuk penurunan luas kebakaran hutan	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	136.4	136.4	136.4	
	• Penerapan penyiapan lahan tanpa bakar	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	54.63	54.63	54.63	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
							Anggaran tahunan	APBD 1
	150.00		150.00		150.00		Hibah/ Swakelola	APBN, KORPORASI, DANA LN
	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80	Hibah/ Swakelola	APBN, KORPORASI, DANA LN
	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80	Hibah/ Swakelola	APBN, KORPORASI, DANA LN
							Anggaran tahunan	APBD 1
	111.6	111.6	111.6	111.6	111.6	111.6	Anggaran tahunan	APBD 1
	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	Anggaran tahunan	APBD 1
	136.4	136.4	136.4	136.4	136.4	136.4	Anggaran tahunan	APBD 1
	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	Anggaran tahunan	APBD 1

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Pembinaan peladang berpindah melakukan kegiatan pertanian menetap	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	54.63	54.63	54.63	
	• Penyadartahuan tentang kebakaran hutan dan lahan	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	54.63	54.63	54.63	
	• Fasilitas penyelenggaraan mitigasi perubahan iklim	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	100	100	100	
	• Kajian dan penelitian mengenai kegiatan pengendalian karhutla	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	100	100	100	
11	Peningkatan penyuluhan dan pengembangan SDM	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK				
	• Peningkatan penyuluhan	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	54.63	54.63	54.63	
	• Penyelengraaan diklat aparatur/non aparatur	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	54.63	54.63	54.63	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	Anggaran tahunan	APBD 1
	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	Anggaran tahunan	APBD 1
	100	100	100	100	100	100	Anggaran tahunan	APBD 1
	100	100	100	100	100	100	Anggaran tahunan	APBD 1
							Anggaran tahunan	APBD 1
	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	Anggaran tahunan	APBD 1
	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	Anggaran tahunan	APBD 1

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	54.63	54.63	54.63	
13	Pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK				
	• Pemulihan kerusakan lahan bekas tambang	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	54.63	54.63	54.63	
	• Pembinaan kepada para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemulihan kerusakan lahan bekas tambang	KPH Bukit Punggur	1.116 ha	HL Reg.41	Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	54.63	54.63	54.63	

TABEL 4.3. | Rencana Pendanaan Aksi Mitigasi RO-1 yang bersumber dari OPD Terkait di Provinsi Lampung

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
A	Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral (RO1)	Lampung Barat Mesuji Tulang Bawang Way Kanan Total	69,89 5,10 47,21 387,51 509,71	TN, SM, HL, APL [KPHL Unit II, KPHL Unit III]	OPD Prov, UPT KLHK				

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	Anggaran tahunan	APBD 1
							Anggaran tahunan	APBD 1
	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	Anggaran tahunan	APBD 1
	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	Anggaran tahunan	APBD 1

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
							Anggaran rutin	APBN, APBD

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat			2024 (Ha)	
						2022 (Ha)	2023 (Ha)		
OPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)				OPD Prov, UPT KLHK				
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				OPD Prov, UPT KLHK	1	1	1	
	• Penyusunan, dan pemantauan pelaksanaan RPJMD dan Review RPJMD yang mengintegrasikan isu pembangunan rendah emisi				OPD Prov, UPT KLHK	0.48	0.93	0.93	
	• Penyusunan, dan pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah- Gas Ruamh Kaca (RAD-GRK)				OPD Prov, UPT KLHK	0.48	0.93	0.93	
OPD	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura								
1	Pengembangan panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan				OPD Prov, UPT KLHK	90	90	96	
	• Pengembangan pekarangan dan diversifikasi pangan lokal				OPD Prov, UPT KLHK	0.82	0.82	0.82	
2	Pengembangan distribusi pangan				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	4	
	• Pengembangan lumbung pangan masyarakat				OPD Prov, UPT KLHK	0.08	0.08	0.08	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	1	1	1	1	1	1	Dokumen52	APBD 1
	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	Miliar rupiah	APBD 1
	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	Miliar rupiah	APBD 1
	96	96	96	96	96	96	Pencapaian skor PPH	
	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	Miliar rupiah	APBD 1
	4	4	4	4	4	4	Cakupan kab.	
	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	Miliar rupiah	APBD 1

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
3	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan				OPD Prov, UPT KLHK	10	10	10	
	• Pengembangan tanaman terpadu, pengembangan budidaya tanaman pangan				OPD Prov, UPT KLHK	1.18	1.18	1.18	
4	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura				OPD Prov, UPT KLHK	10	10	10	
	• Pengembangan, hortikultura, buah dan urban farming				OPD Prov, UPT KLHK	1.14	1.14	1.14	
5	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura.				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	4	
	• Pengembangan pola tumpang sari dan pemanfaatan lahan kering				OPD Prov, UPT KLHK	0.4	0.4	0.4	
	Program Peningkatan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH.				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	4	
	• Pengolahan produk dan fasilitasi pemasaran produk pertanian				OPD Prov, UPT KLHK	0.72	0.72	0.72	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	10	10	10	10	10	10	Persentase peningkatan produktivitas	
	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	Miliar rupiah	APBD 1
	10	10	10	10	10	10	% Kenaikan	
	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	Miliar rupiah	APBD 1
	4	4	4	4	4	4	Cakupan kab.	
	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Miliar rupiah	APBD 1
	4	4	4	4	4	4	Cakupan kab.	
	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	Miliar rupiah	APBD 1

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
7	Program Peningkatan Pelayanan dan pengembangan Agribisnis Pertanian.				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	4	
	• Fasilitas permodalan dan pendampingan usaha agribisnis				OPD Prov, UPT KLHK	0.88	0.88	0.88	
OPD	Dinas Perkebunan								
1	Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	4	
	• Intensifikasi tanaman perkebunan				OPD Prov, UPT KLHK	0.72	0.72	0.72	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkebunan				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	4	
	• Ketersediaan sarana dan prasarana perkebunan				OPD Prov, UPT KLHK	0.91	0.91	0.91	
3	Peningkatan pasca panen produk perkebunan				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	4	
	• Ketersediaan sarana dan prasarana perkebunan				OPD Prov, UPT KLHK	0.26	0.26	0.26	
OPD	Dinas Peternakan dan Keswan								
	Program Peningkatan PDRB peternakan				OPD Prov, UPT KLHK	5	5	5	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	4	4	4	4	4	4	Cakupan kab.	
	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	Miliar rupiah	APBD 1
	4	4	4	4	4	4	Cakupan kab.	
	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	Miliar rupiah	APBD 1
	4	4	4	4	4	4	Cakupan kab.	
	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	Miliar rupiah	APBD 1
	4	4	4	4	4	4	Cakupan kab.	
	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	Miliar rupiah	APBD 1
	5	5	5	5	5	5	Persen Pertumbuhan	

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Peningkatan produksi ternak (daging dan telur)				OPD Prov, UPT KLHK	1.06	1.06	1.06	
	• Pengolahan limbah dan biogas				OPD Prov, UPT KLHK	0.77	0.77	0.77	
	• Pengembangan pakan (legume)				OPD Prov, UPT KLHK	0.37	0.37	0.37	
OPD	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif								
	Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	4	
	• Peningkatan kapasitas SDM dan fasilitasi ekonomi kreatif				OPD Prov, UPT KLHK	0.28	0.28	0.28	
OPD	Perindustrian dan Perdagangan								
1	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	4	
	• Peningkatan jumlah unit usaha industri				OPD Prov, UPT KLHK	1.04	1.04	1.04	
	• Pengembangan industri hijau				OPD Prov, UPT KLHK	0.98	0.98	0.98	
2	Program Pengembangan Sumber Daya Industri				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	4	
	• Peningkatan akses pada sumberdaya industri				OPD Prov, UPT KLHK	0.77	0.77	0.77	
3	Peningkatan perdagangan dalam negeri				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	4	

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Peningkatan volume perdagangan				OPD Prov, UPT KLHK	1.48	1.48	1.48	
4	Peningkatan perdagangan luar negeri				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	4	
	• Peningkatan volume perdagangan				OPD Prov, UPT KLHK	1.48	1.48	1.48	
OPD	Pertanahan								
	Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pertanahan				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	4	
	• Peningkatan tata Kelola dan pengendalian pertanahan				OPD Prov, UPT KLHK	1.37	1.37	1.37	
OPD	Lingkungan Hidup								
	Program Tata Lingkungan dan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	4	
	• Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi				OPD Prov, UPT KLHK	0.39	0.39	0.39	
	Program Penegakan Hukum terhadap Kerusakan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	4	
	• Peningkatan penataan pelaku usaha terkait aspek lingkungan				OPD Prov, UPT KLHK	0.39	0.39	0.39	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	Miliar rupiah	APBD 1
	4	4	4	4	4	4	Cakupan kab.	
	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	Miliar rupiah	APBD 1
	4	4	4	4	4	4	Cakupan kab.	
	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	Miliar rupiah	APBD 1
	4	4	4	4	4	4	Cakupan kab.	
	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	Miliar rupiah	APBD 1
	4	4	4	4	4	4	Cakupan kab.	
	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	Miliar rupiah	APBD 1

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
OPD	Penanaman Modal								
	Program peningkatan jumlah investasi				OPD Prov, UPT KLHK	4	4	4	
	• Peningkatan layanan investasi				OPD Prov, UPT KLHK	0.48	0.48	0.48	

4.2. Rencana Pendanaan Penerapan Pengayaan Hutan Alam [R05]

TABEL 4.4. | Rencana Pendanaan Penerapan Pengayaan Hutan Alam [R0-5] oleh Unit di Lingkungan KLHK

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
R05	Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral (R01)	Way Kanan	0,74						
1	Peningkatan usaha jasa lingkungan dan HHBK	(*) PHL							
	• Produksi HHBK								

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	4	4	4	4	4	4	Cakupan kab.	
	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	Miliar rupiah	APBD 1

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	Pengayaan Jenis Tanaman	- Blok Rehabilitasi - Blok Tradisional TAHURA WAR (Kabupaten Pesawaran)	525.98	Kawasan Konservasi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD KPHK TAHURA WAR, BPDASHL WSS, Ditjen KSDAE, Mitra NGO, KTH, Akademisi	37.000.000	275.000.000	275.000.000	
	Pendukung Produksi HHBK Jasa Lingkungan		472,02			13.000.000	110.000.000	275.000.000	

TABEL 4.5. | Rencana Pendanaan Penerapan Pengayaan Hutan Alam [R0-5] oleh Dinas Kehutanan [KPH] Provinsi Lampung

No	Rencana Operasional (R0), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
B	Penerapan Pengayaan Hutan Alam (R05)	Pesawara n	998 ha	KPH Tahura WAR					
OPD	Dinas Kehutanan								

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	551.000.000	551.000.000	551.000.000	275.000.000	275.000.000	110.000.000	Anggaran Rutin	APBN
	551.000.000	551.000.000	275.000.000	275.000.000	275.000.000	275.000.000		

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
1	Peningkatan usaha jasa lingkungan dan HHBK	KPH Tahura Wan Abdul Rahman	998 ha	Kawasan Konservasi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD KPHK TAHURA WAR, BPDASHL WSS, Ditjen KSDAE, Mitra NGO, KTH, Akademisi				
	• Pengayaan Jenis Tanaman Pendukung Produksi HHBK Jasa Lingkungan	KPH Tahura Wan Abdul Rahman, Kabupaten Pesawaran (Blok Rehabilitasi)	998 ha	Kawasan Konservasi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD KPHK TAHURA WAR, BPDASHL WSS, Ditjen KSDAE, Mitra NGO, KTH, Akademisi	37	275	275	
	• Pengayaan Jenis Tanaman Pendukung Produksi HHBK Jasa Lingkungan	KPH Tahura Wan Abdul Rahman, Kabupaten Pesawaran (Blok Tradisional)	472.02	Kawasan Konservasi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD KPHK TAHURA WAR, BPDASHL WSS, Ditjen KSDAE, Mitra NGO, KTH, Akademisi	13	110	275	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	275	275	275	275	275	275	Anggaran Tahunan	APBN
	551	551	275	275	275	275	Anggaran Tahunan	APBN

Rencanan Pendanaan Rencana Aksi Ro 6, RO 7 dan RO8

TABEL 4.6. | Rekapitulasi Rencana Kegiatan Mitigasi RO 6, 7 dan 8 (Hektar dan Juta Rupiah) oleh UPT KLHK dan Dinas-dinas Non Kehutanan

Rencana Operasional		Luas Intervensi (Ha)		Estimasi Kebutuhan	
		Kehutanan	Non Kehutanan	Kehutanan	Non Kehutanan
R06	Pengelolaan Hutan Lestari	20,00	2.349	556,5	20.610,00
R07	Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi BBPH	74.233,80	198	3.150	990,00
R08	Rencana Operasional Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa (Non) Rotasi (R08)	24.457,95	-	38.678	24.930,00

Masing-masing rencana operasional membutuhkan anggaran yang telah dirinci dengan seksama berdasarkan program rencana operasional, lokasi pendanaan, luas areal dalam skala hektar, keterlibatan para pihak, kebutuhan anggaran tahunan, mekanisme pendanaan, hingga sumber pendanaan.

4.3. Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi Pengelolaan Hutan Lestari (RO6)

Rencana pengelolaan hutan lestari dan usaha kehutanan dalam hal ini termasuk optimalisasi pembangunan hutan tanaman, Pengembangan hutan tanaman energi (PHE), Bina usaha perhtananan sosial dan hutan adat, Pengembangan Usaha PS dan Hutan Adat, Penyiapan Kawasan perhutanan sosial, Peningkatan usaha industri kehutanan, Peningkatan usaha jasa lingkungan HHBK, Penerapan Teknik SILIN oleh BBPH Pelaksanaan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami, dan system pengelolaan hutan RIL-C. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan Rencana Operasional Aksi Mitigasi Pengelolaan Hutan Lestari (RO6) dapat dilihat pada Tabel 4.7, Tabel 4.8 dan Tabel 3.9.



TABEL 4.7. | Rincian Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi Pengelolaan Hutan Lestari (R06) oleh UPT KLHK

[illegible]

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
							Anggaran Rutin	APBN
								APBN
	36	36	36	36	36	36		

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Pengembangan kemitraan kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan					12,5	12,5	12,5	

TABEL 4.8. | Rincian Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi Pengelolaan Hutan Lestari Non Kehutanan (R06) oleh Dinas Kehutanan [KPH]

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
R06	Pengelolaan Hutan Lestari (R06)	Mesuji	83.48	KPH Sungai Buaya, HP Reg.45					
OPD	Dinas Kehutanan								
1	Penyiapan Kawasan perhutanan social	KPH Sungai Buaya, HP Reg.45	83.48	HP Reg.45	Dishut Prop, KPH, PT. SIL				
	• Pemberian akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat	KPH Sungai Buaya, HP Reg.45	83.48	HP Reg.45	Dishut Prop, KPH, PT. SIL		150	150	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5		

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	150	150	150	150	150	150	Swakelola/Hibah	APBN, Korporasi, Dana LN

TABEL 4.9. | Rincian Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi Pengelolaan Hutan Lestari Non Kehutanan (R06) oleh OPD Terkait

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
1	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura								
1.1	Program Peningkatan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH.	Mesuji		APL	UPT, KLHK, OPD Prov	1	1	1	
	• Pengolahan produk dan fasilitasi pemarkan produk pertanian	Mesuji		APL	UPT, KLHK, OPD Prov	0.70	0.70	0.70	
1.2	Program Peningkatan Pelayanan dan pengembangan Agribisnis Pertanian.	Mesuji		APL	UPT, KLHK, OPD Prov	1	1	1	
	• Fasilitasi permodalan dan pendampingan usaha agribisnis	Mesuji		APL	UPT, KLHK, OPD Prov	0.85	0.85	0.85	
1.3	Program Pengembangan, Peningkatan Kualitas SDM Pertanian, dan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan.	Mesuji		APL	UPT, KLHK, OPD Prov	1	1	1	
	• Penguatan kelembagaan petani dan kapasitas penyuluh	Mesuji		APL	UPT, KLHK, OPD Prov	0.06	0.06	0.06	
2	Dinas Perkebunan								
2.1	Peningkatan kelembagaan perkebunan	Mesuji		APL	UPT, KLHK, OPD Prov	1	1	1	

KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)							MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)			
	1	1	1	1	1	1	Cakupan kabupaten	APBD 1
	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	Miliar rupiah	APBD 1
	1	1	1	1	1	1	Cakupan kabupaten	
	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	Miliar rupiah	APBD 1
	1	1	1	1	1	1	Cakupan kabupaten	
	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	Miliar rupiah	APBD 1
	1	1	1	1	1	1	Cakupan kabupaten	

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Pendampingan kelembagaan petani perkebunan	Mesuji		APL	UPT, KLHK, OPD Prov	0.05	0.05	0.05	
3	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif								
3.1	Program Peningkatan daya Tarik pariwisata	Mesuji		APL	UPT, KLHK, OPD Prov	1	1	1	
	• Pengelolaan daya Tarik dan kawasan strategis pariwisata	Mesuji		APL	UPT, KLHK, OPD Prov	0.28	0.28	0.28	
4	Perindustrian dan Perdagangan	Mesuji		APL	UPT, KLHK, OPD Prov				
4.1	Program Peningkatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri	Mesuji		APL	UPT, KLHK, OPD Prov	1	1	1	
	• Peningkatan nilai investasi	Mesuji		APL	UPT, KLHK, OPD Prov	0.19	0.19	0.19	
5	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pemukiman								
5.1	Penyelenggaraan penataan ruang	Mesuji		APL	UPT, KLHK, OPD Prov	1	1	1	
	• Pengendalian pemanfaatan ruang	Mesuji		APL	UPT, KLHK, OPD Prov	0.16	0.16	0.16	
	• Penyusunan dokumen evaluasi lingkungan hidup untuk infrastruktur jalan	Mesuji		APL	UPT, KLHK, OPD Prov	0.20	0.20	0.20	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	Miliar rupiah	APBD 1
	1	1	1	1	1	1	Cakupan kabupaten	
	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	Miliar rupiah	APBD 1
	1	1	1	1	1	1	Cakupan kabupaten	
	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	Miliar rupiah	APBD 1
	1	1	1	1	1	1	Cakupan kabupaten	
	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	Miliar rupiah	APBD 1
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	Miliar rupiah	APBD 1

4.4. Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi dengan Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi (R07)

Aksi mitigasi sebagai upaya meningkatkan simpanan karbon berupa rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) bertujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan sehingga dapat meningkat kualitas dan produktivitas lahan terdegradasi yang nantinya dapat mendukung sistem ekologi dan jasa lingkungan lainnya. Kegiatan RHL, terutama di luar kawasan hutan, dapat meningkatkan fungsi hutan dan juga meningkatkan stok karbon. Untuk mendukung terlaksananya program RHL dalam Rencana Operasional Aksi Mitigasi dengan Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi (R07) maka dibutuhkan pendanaan dengan rincian pada Tabel 4.10, Tabel 4.11 dan Tabel 4.12.

TABEL 4.10. | Rincian Pendanaan RO Aksi Mitigasi dengan Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi (R07) oleh UPT KLHK

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
1	Peningkatan cadangan Karbon Dengan Rotasi (R07)	1.Lampung Tengah 2.Lampung Utara 3.Mesuji 4.Pesawaran 5.Tulang Bawang 6.Tulang Bawang Barat 7.Way Kanan	13 7.532 23.581 1.083 9.347 9.386 40.923	APL, HL dan HP	UPT KLHK, OPD Prov				
1.1	Pengelolaan hutan lestari dan usaha kehutanan BPHP (Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfatan Hutan)	(*)PHL		APL, HL dan HP	UPT KLHK, OPD Prov	100 jt	100 jt	100 jt	
1.2	BPHP Peningkatan Tertib luran dan Penatausahaan Hasil Hutan								

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
							Anggaran Rutin	APBN
	150 jt	150 jt	150 jt	200 jt	200 jt	200 jt	Anggaran Rutin	APBN

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	BPHP Fasilitas dan Pembinaan tertib iuran dan penatausahaan hasil hutan					100 jt	100 jt	100 jt	
	BPHP iuran dan Penatausahaan hasil hutan yang diawasi dan dikendalikan					100 jt	100 jt	100 jt	

TABEL 4.11. | Rincian Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi dengan Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi Non Kehutanan (R07) oleh Dinas Kehutanan [KPH]

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
R07	Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi (R07)	Lampung Tengah, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan	91.868.2	KPH Bukit Punggur, KPH Muara Dua, KPH Pesawaran, KPH Sungai Buaya, di Luar KPH (TN/SM/H / HPT/APL)	UPT KLHK, OPD Prov				
OPD Dinas Kehutanan									
2	Peningkatan usaha jasa lingkungan hutan produksi dan HHBK	KPH Bukit Punggur	12,460.51		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK				
	• Penanaman/ pengkayaan pada hutan produksi	KPH Bukit Punggur	12,460.51		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	5,261	5,261	5,261	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	100 jt	100 jt	100 jt	100 jt	100 jt	100 jt	Anggaran Rutin	APBN
	100 jt	100 jt	100 jt	100 jt	100 jt	100 jt	Anggaran Rutin	APBN

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
							Anggaran Rutin	APBN
	5,261	5,261	5,261	5,261	5,261	5,261	Anggaran tahunan	APDB 1

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
3	Pengelolaan hutan lestari dan usaha kehutanan	KPH Bukit Punggur	12,460.51		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK				
	• Produksi hasil hutan kayu	KPH Bukit Punggur	12,460.51		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	58.8	58.8	58.8	
	• Pembangunan kebun bibit rakyat (KBR)	KPH Bukit Punggur	12,460.51		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	500	500	500	
	• Pemberian izin perhutanan sosial	KPH Bukit Punggur	12,460.51		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	100	100	100	
4	Pemanfaatan hutan melalui kegiatan rehabilitasi rotasi	KPH Bukit Punggur	12,460.51		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK				
	• Pembinaan teknis pemanfaatan hutan pada kegiatan rehabilitasi HT	KPH Bukit Punggur	12,460.51		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	54.63	54.63	54.63	
	• Fasilitas implementasi mulitiusaha pada PBPH	KPH Bukit Punggur	12,460.51		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	58.8	58.8	58.8	
	• Pembinaan dan pendampingan KPH	KPH Bukit Punggur	12,460.51		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	58.8	58.8	58.8	
	• Dukungan agroforestry di tingkat tapak	KPH Bukit Punggur	12,460.51		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	6,922	6,922	6,922	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
							Anggaran tahunan	APDB 1
	58.8	58.8	58.8	58.8	58.8	58.8	Anggaran tahunan	APDB 1
	500	500	500	500	500	500	Anggaran tahunan	APDB 1
	100	100	100	100	100	100	Anggaran tahunan	APDB 1
							Anggaran tahunan	APDB 1
	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	Anggaran tahunan	APDB 1
	58.8	58.8	58.8	58.8	58.8	58.8	Anggaran tahunan	APDB 1
	58.8	58.8	58.8	58.8	58.8	58.8	Anggaran tahunan	APDB 1
	6,922	6,922	6,922	6,922	6,922	6,922	Anggaran tahunan	APDB 1

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat			2024 (Ha)	
						2022 (Ha)	2023 (Ha)		
4	Pemanfaatan hutan melalui kegiatan rehabilitasi rotasi	KPH Sungai Buaya	5,000	KHP 45	Dishut, KPH, Perusahaan				
	• Pembinaan dan pendampingan KPH	KPH Sungai Buaya	5,000	KHP 45	Dishut, KPH, Perusahaan		78	78	
	• Dukungan agroforestry di tingkat tapak	KPH Sungai Buaya	800	KHP 45	Dishut, KPH, Perusahaan		120	120	
4	Pemanfaatan hutan melalui kegiatan rehabilitasi rotasi	KPH Pesawaran	1.083.81	KHP Reg. 18	PT. Inhutani V, Dishut, BPHP VI				
	• Fasilitas implementasi mulitiusaha pada PBPH	KPH Pesawaran	1.083.81	KHP Reg. 18	PT. Inhutani V, Dishut, BPHP VI	660	660	665.5	
	• Pembinaan dan pendampingan KPH	KPH Pesawaran	1.083.81	KHP Reg. 18	PT. Inhutani V, Dishut, BPHP VI	3	3	3	
4	Pemanfaatan hutan melalui kegiatan rehabilitasi rotasi	KPH Muara Dua (REG 46 BUDI LAMPUNG SEJAHTERA)	9.059,91 ha/8 Paket	HP	BLS,KPH, DISHUT ,BPHP				
	• Pembinaan dan pendampingan KPH (Monitoring dan Evaluasi terhadap Rencana Kerja Areal IUPHKK-HTI)	KPH Muara Dua (REG 46 BUDI LAMPUNG SEJAHTERA)	9.059,91 ha/8 Paket	HP	BLS,KPH, DISHUT ,BPHP		30	30	
	• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi terhadap pemegang IUPHKK-HTI	KPH Muara Dua (REG 46 BUDI LAMPUNG SEJAHTERA)	9.059,91 ha/8 Paket	HP	BLS,KPH, DISHUT ,BPHP		30	30	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
							Anggaran tahunan	APDB 1
	78	78	78	78	78	78	Anggaran tahunan	APBN/APBD/Korp orasi/ Dana LN
	120	120	120	120	120	120	Anggaran tahunan	APBN/APBD/Korp orasi/ Dana LN
	660	660	665.5	660	660	670	Anggaran tahunan	APBN/APBD/Korp orasi/ Dana LN
	3	3	3	3	3	3	Anggaran tahunan	APBN/APBD/Korp orasi/ Dana LN
	30	30	30	30	30	30	SWAKELOLA/ HIBAH	APBN/APBD/Korp orasi/ Dana LN
	30	30	30	30	30	30	SWAKELOLA/ HIBAH	APBN/APBD/Korp orasi/ Dana LN

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Patroli dan identifikasi konflik dan Ground Check titik api	KPH Muara Dua (REG 46 BUDI LAMPUNG SEJAHTERA)	9.059,91 ha/8 Paket	HP	BLS,KPH, DISHUT ,BPHP		120	120	
	• Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS	KPH Muara Dua (REG 46 BUDI LAMPUNG SEJAHTERA)	2,400	HP	INHUTANI ,KPH, DISHUT,B PHP		300	300	
4	Pemanfaatan hutan melalui kegiatan rehabilitasi rotasi	KPH Muara Dua (REG 44 dan 46 INHUTANI)	36,030.75 ha/ 8 PAKET	HP	INHUTANI ,KPH, DISHUT,B PHP				
	• Pembinaan dan pendampingan KPH (Monitoring dan Evaluasi terhadap Rencana Kerja Areal IUPHKK-HTI)	KPH Muara Dua (REG 44 dan 46 INHUTANI)	36,030.75 ha/ 8 PAKET	HP	INHUTANI ,KPH, DISHUT,B PHP		50	50	
	• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi terhadap pemegang IUPHKK-HTI	KPH Muara Dua (REG 44 dan 46 INHUTANI)	36,030.75 ha/ 8 PAKET	HP	INHUTANI ,KPH, DISHUT,B PHP		50	50	
	• Patroli dan identifikasi konflik dan Ground Check titik api	KPH Muara Dua (REG 44 dan 46 INHUTANI)	36,030.75 ha/ 8 PAKET	HP	INHUTANI ,KPH, DISHUT,B PHP		150	150	
	• Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS	KPH Muara Dua (REG 44 dan 46 INHUTANI)	30.000ha	HP	INHUTANI ,KPH, DISHUT ,BPHP		3,750	3,750	
	• Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS	KPH Muara Dua (REG 44 WILAYAH TERTENTU)	dari 1,085 ha ditargetkan 500 ha	HA	KPH, DISHUT,B PHP DAN BPDAS		260	260	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	120	120	120	120	120	120	SWAKELOLA/ HIBAH	APBN/APBD/Korp orasi/ Dana LN
	300	300	300	300	300	300	SWAKELOLA/ HIBAH	APBN/APBD/Korp orasi/ Dana LN
	50	50	50	50	50	50	SWAKELOLA/ HIBAH	APBN/APBD/Korp orasi/ Dana LN
	50	50	50	50	50	50	SWAKELOLA/ HIBAH	APBN/APBD/Korp orasi/ Dana LN
	150	150	150	150	150	150	SWAKELOLA/ HIBAH	APBN/APBD/Korp orasi/ Dana LN
	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	SWAKELOLA/ HIBAH	Korporasi
	260	260	260	260	260	260	SWAKELOLA/ HIBAH	Korporasi

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat			2024 (Ha)	
						2022 (Ha)	2023 (Ha)		
5	Bina usaha perhutanan sosial dan hutan adat	KPH Bukit Punggur	12,461		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK				
	• Kemitraan investasi/usaha	KPH Bukit Punggur	12,461		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	109.25	109.25	109.25	
	• Pemasaran/ promosi produk perhutanan sosial	KPH Bukit Punggur	12,461		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	73.5	73.5	73.5	
	• Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat	KPH Bukit Punggur	12,461		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	54.63	54.63	54.63	
	• Pembinaan masyarakat sekitar hutan untuk peningkatann produktiviatas usahatani	KPH Bukit Punggur	12,461		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	54.63	54.63	54.63	
5	Bina usaha perhutanan sosial dan hutan adat	KPH Sungai Buaya	6,000	KHP 45	Perusahaan, Masyarakat				
	• Industri nilai tambah produk	KPH Sungai Buaya	4,000	KHP 45	Perusahaan,		76	76	
	• Kemitraan investasi/usaha	KPH Sungai Buaya	6000	KHP 45	Perusahaan, Masyarakat		76	76	
	• Pemasaran/ promosi produk perhutanan sosial	KPH Sungai Buaya	6,000	KHP 45	Perusahaan, Masyarakat		76	76	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
							Anggaran tahunan	APBD 1
	109.25	109.25	109.25	109.25	109.25	109.25	Anggaran tahunan	APBD 1
	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	Anggaran tahunan	APBD 1
	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	Anggaran tahunan	APBD 1
	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	Anggaran tahunan	APBD 1
	76	76	76	76	76	76	SWAKELOLA/ HIBAH	APBN/APBD/ Korporasi/ Dana LN
	76	76	76	76	76	76	SWAKELOLA/ HIBAH	APBN/APBD/ Korporasi/ Dana LN
	76	76	76	76	76	76	SWAKELOLA/ HIBAH	APBN/APBD/ Korporasi/ Dana LN

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat			2024 (Ha)	
						2022 (Ha)	2023 (Ha)		
6	Penyiapan Kawasan perhutanan sosial	KPH Bukit Punggur	12.460.51		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK				
	• Pemberian akses Kelola Kawasan hutan oleh masyarakat	KPH Bukit Punggur	12.460.51		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	54.63	54.63	54.63	
6	Penyiapan Kawasan perhutanan sosial	KPH Sungai Buaya	3500	KHP 45	Dishut, KPH, Perusahaan				
	• Pemberian akses Kelola Kawasan hutan oleh masyarakat	KPH Sungai Buaya	3500	KHP 45	Dishut, KPH, Perusahaan		250	250	
7	Peningkatan penyuluhan	KPH Bukit Punggur	12.460.51		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK				
	• Peningkatan jumlah dan kapasitas SD kegiatan rehabilitasi secara rotasi	KPH Bukit Punggur	12.460.51		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	100	100	100	
7	Peningkatan penyuluhan	KPH Pesawaran	1.083.81	KHP	PT. Inhutani V, Dishut. Prov, BPHP Wil. VI				
	• Peningkatan jumlah dan kapasitas SD kegiatan rehabilitasi secara rotasi	KPH Pesawaran	1.083.81	KHP	PT. Inhutani V, Dishut. Prov, BPHP Wil. VI	4.8	4.8	4.8	
7	Peningkatan penyuluhan	Karya Tiga KPH Muara Dua	8 Paket	HP	KPH, DISHUT, BPHP				

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	Anggaran tahunan	APBD 1
	250	250	250	250	250	250	Anggaran tahunan	APBD 1
	100	100	100	100	100	100	Anggaran tahunan	APBD 1
	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	Anggaran tahunan	APBN/APBD/ Korporasi/ Dana LN

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Peningkatan jumlah dan kapasitas Sumber daya penyuluh	Karya Tiga KPH Muara Dua	8 Paket	HP	KPH, DISHUT,B PHP	50	50	50	

TABEL 4.12. | Rincian Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi dengan Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi Non Kehutanan (R07) oleh Dinas-dinas Non Kehutanan

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
1	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura								
1.1	Program pengembangan , peningkatan kualitas sdm pertanian, dan sistem penyelenggara an penyuluhan	Lampung Tengah, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Way Kanan	9,819	APL	UPT KLHK, OPD Prov				
	• Penguatan kelembaga an petani dan kapasitas penyuluh	Lampung Tengah, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Way Kanan	9,820	APL	UPT KLHK, OPD Prov				

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	50	50	50	50	50	50	Anggaran tahunan	APBD 1

[illegible]

4.5. Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa (Non) Rotasi (R08)

Aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon non rotasi berfungsi untuk mendukung pengelolaan hutan dan lahan untuk meningkatkan stok karbon non-rotasi. Dibutuhkan pendanaan yang memadai sehingga kegiatan ini dapat dilakukan pada lahan kritis, lahan terbuka dan/atau lahan pasca kebakaran, dan sebagai daerah aliran sungai prioritas, termasuk danau, bendungan, tanggul atau waduk, serta daerah rawan bencana. Adapun rincian pendanaan untuk mendukung Rencana Operasional Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa (Non) Rotasi (R08) dapat dilihat pada Tabel 4.13, Tabel 4.14 dan Tabel 4.15 sebagai berikut.

TABEL 4.13. | Rencana Pendanaan Operasional Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa (Non) Rotasi (R08) oleh UPT KLHK

No	Rencana Operasional (R0), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
R08	Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa (Non) Rotasi (R08)	1.Lampung Barat 2.Lampung Utara 3.Mesuji 4.Pesawaran 5.Pesisir Barat 6.Tulang Bawang 7.Tulang Bawang Barat 8.Way Kanan	1.049 24 4.944 190 92 99 899 28.598	APL, HL, SM, HP, HPT	UPT KLHK, OPD Prov				
	Pengelolaan hutan lestari dan usaha kehutanan BPHP (Pengawasan dan Pengendalian Penanaman/ Produksi hasil hutan/multiusaha kehutanan)	(*) PHL		APL, HL, SM, HP, HPT		100 jt	101 jt	102 jt	
2	Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan, perencanaan dan pengendalian DAS	(*) PDASRH							

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
							Anggaran Rutin	APBN
	103 jt	104 jt	105 jt	106 jt	107 jt	108 jt	Anggaran Rutin	APBN

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS	BPDAS	4,500	APL, HL, SM, HP, HPT	BPDAS	3,650	3,650	3,650	
	• Restorasi Kawasan yang terdegradasi untuk perlindungan sumber air		225	APL, HL, SM, HP, HPT	BPDAS	182,5	182,5	182,5	
	• Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada area rawan/ pasca bencana		450	APL, HL, SM, HP, HPT	BPDAS	365	365	365	

TABEL 4.14. | Rencana Pendanaan Operasional Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa (Non) Rotasi Non Kehutanan (R08) oleh Dinas Kehutanan [KPH]

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
E	Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa (Non) Rotasi (R08)	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan	35,901.42	KPH Bukit Punggur, KPH Gunung Balak, KPH Gunung Raja Basa - Way Pisang - Batu Serampok, KPH Kota Agung Utara, KPH Liwa, KPH Muara Dua, KPH Pematang Neba, KPH Pesawaran, KPH Pesisir Barat, KPH Sungai Buaya, KPH Way Terusan, KPH Way Waya - Tangkit Tebak, di Luar KPH (TN/SM/HL / HPT/APL)					

[illegible]

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
							Anggaran Rutin	APBN

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
OPD	Dinas Kehutanan								
1	Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi	KPH Way Pisang (Lampung Selatan Reg 1 dan Reg 2)	1,410	HPT	KPH, Dishut, Pemda, BPHP, PSKL, NGO				
	• Organisasi KPH yang efektif	KPH Way Pisang (Lampung Selatan Reg 1 dan Reg 2)	1,411	HPT	KPH, Dishut, Pemda, BPHP, PSKL, NGO	50	50	50	
1	Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan, Reg 5,35,37,40)	10 paket	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, BPHP, NGO				
	• Organisasi KPH yang efektif	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan, Reg 5,35,37,40)	10 paket	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, BPHP, NGO	0	100	100	
1	Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi	KPH Bukit Punggur	25.004.71		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK				
	• Organisasi KPH yang efektif	KPH Bukit Punggur	25.004.72		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	315.000.00	120,000	132,000	
1	Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi	Karya Tiga KPH MUARA DUA	9 paket	HP	KPH, DISHUT,BPHP				
	• Organisasi KPH yang Efektif	Karya Tiga KPH MUARA DUA	9 paket	HP	KPH, DISHUT,BPHP	50	50	50	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	50	50	-	-	-	-	Swakelola	APBN/APBD/Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat
	50	50	50	50	50	50	Swakelola	APBN/APBD/Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat
	145,200	159,720	175,692	193,261	212,587	233,846		
	50	50	50	50	50	50	SWAKELOLA/ HIBA H	KOORPORASI

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
2	Peningkatan Jasa lingkungan hutan dan HHBK	KPH Way Pisang (Lampung Selatan Reg 1, 2 dan 3)	3,747	HL dan HPT	KPH, Dishut, Pemkab, BPHP, PSKL, NGO, Koperasi				
	• Produk HHBK	KPH Way Pisang (Lampung Selatan Reg 1, 2 dan 3)	3,748	HL dan HPT	KPH, Dishut, Pemkab, BPHP, PSKL, NGO, Koperasi	150	150	150	
2	Peningkatan Jasa lingkungan hutan dan HHBK	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Reg 40 Lampung Timur Reg 37)	27.260 Ha	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, BPHP, PSKL, NGO, Koperasi				
	• Produk HHBK dan Jasa Lingkungan di wilayah PS	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Reg 40 Lampung Timur Reg 37)	27.260 Ha	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, BPHP, PSKL, NGO, Koperasi	0	200	200	
2	Peningkatan Jasa lingkungan hutan dan HHBK	KPH Liwa	1.000 ha	HL	KPH, PSKL, BPHP, KPS				
	• Produk HHBK	KPH Liwa	1,000	HL	KPH, PSKL, BPHP, KPS	-	250	250	
2	Peningkatan Jasa lingkungan hutan dan HHBK	KPH Pesisir Barat	2.000 ha	HPT	KPH, PSKL, BPHP, KPS				
	• Produk HHBK	KPH Pesisir Barat	2,000	HPT	KPH, PSKL, BPHP, KPS	-	500	500	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	150	150	150	150	150	200	Hibah/Swakelola	APBN/APBD/Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat
	200	200	200	200	200	200	Swakelola/hibah	APBN, APBD, pihak ketiga yang tidak mengikat
								APBN
	250	250	250	250	250	250		APBN
	500	500	500	500	500	500		APBN

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
2	Peningkatan Jasa lingkungan hutan dan HHBK	KPH Tangkit Tebak (14 KPS/139 KTH+ 18 KUPS)	16.295 ha/ 14 KTH	HL	Dishut, UPT KLHK, Pemkab				
	• Produk HHBK	KPH Tangkit Tebak (14 KPS/139 KTH+ 18 KUPS)	16.295 ha/ 14 KTH	HL	Dishut, UPT KLHK, Pemkab		350.00	350.00	
2	Peningkatan Jasa lingkungan hutan dan HHBK	KPH Bukit Punggur	25.004.71		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK				
	• Produk HHBK dan Jasling	KPH Bukit Punggur	25.004.72		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	45,76	45,76	45,76	
3	Pengelolaan hutan lestari dan usaha kehutanan	KPH Way Pisang (Lampung Selatan Reg 3)	2,015	HL	KPH, Dishut, Pemkab, BPHP, PSKL, NGO, Koperasi				
	• Pengembangan luasan pemanfaatan HHBK di hutan lindung	KPH Way Pisang (Lampung Selatan Reg 3)	2,015	HL	KPH, Dishut, Pemkab, BPHP, PSKL, NGO, Koperasi	100	100	100	
3	Pengelolaan hutan lestari dan usaha kehutanan	KPH Pesawaran (Reg. 18)	191	KHP	PT.Inhutani V				
	• Pelaksanaan restorasi ekosistem hutan produksi	KPH Pesawaran (Reg. 18)	192	KHP	PT.Inhutani V	120	120	120	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
							Hibah / Swakelola	APBN, KORPORASI, DANA LAIN
	45,76	45,76	45,76	45,76	45,76	45,76		
	100	100	150	150	150	150	Hibah	APBN/APBD/Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat
	120	120	120	120	120	120		APBN/APBD/Korp orasi/ Dana LN

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
3	Pengelolaan hutan lestari dan usaha kehutanan	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Reg5, 35, 37, 40)	21.536 Ha	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, BPHP, NGO, Swasta				
	• Pengembangan luasan pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan di hutan produksi	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Reg5, 35, 37, 40)	21.536 Ha	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, BPHP, NGO, Swasta	0	150	150	
	• Pengembangan usaha HHBK dan Jasa Lingkungan di hutan produksi	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Reg5, 35, 37, 40)	100 KUPS	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, BPHP, NGO, Swasta	0	100	200	
3	Pengelolaan hutan lestari dan usaha kehutanan	KPH Batu Serampok (Reg. 17 dan Reg. 6)	5,383	HL	Pemprov Lampung, Dinas Kehutanan, BLH, Camat, Desa, Kelompok Masy. Adat, Klp Masy Lainnya, LSM dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan				
	• Pengembangan luasan pemanfaatan HHBK di hutan lindung	KPH Batu Serampok (Reg. 17 dan Reg. 6)	5,383	HL	Pemprov Lampung, Dinas Kehutanan, BLH, Camat, Desa, Kelompok Masy. Adat, Klp Masy Lainnya, LSM dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan	400	400	400	
3	Pengelolaan hutan lestari dan usaha kehutanan	KPH Liwa	125	HL	KPH, PSKL, BPHP, KPS				

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	150	150	150	150	150	150	Swakelola/hibah	APBN, APBD, pihak ketiga yang tidak mengikat
	200	200	300	300	300	400	Swakelola/hibah	APBN, APBD, pihak ketiga yang tidak mengikat
	400	400	400	400	400	400		APBN, APBD Prov.
	125	125	125	125	125	125		APBN

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Pengembangan luasan pemanfaatan HHBK di hutan lindung	KPH Liwa	125	HL	KPH, PSKL, BPHP, KPS		125	125	
3	Pengelolaan hutan lestari dan usaha kehutanan	KPH Pesisir Barat	800	HL	KPH, PSKL, BPHP, KPS				
	• Pengembangan luasan pemanfaatan HHBK di hutan lindung	KPH Pesisir Barat	800	HL	KPH, PSKL, BPHP, KPS	-	200	200	
	• Pelaksanaan restorasi ekosistem hutan produksi	KPH Pesisir Barat	500	HPT	KPH, PSKL, BPHP, KPS	-	200	200	
3	Pengelolaan hutan lestari dan usaha kehutanan	KPH Bukit Punggur	17.654,.06		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK				
	• Pengembangan luasan pemanfaatan HHBK di hutan lindung	KPH Bukit Punggur	17.654,.06		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	60	60	60	
5	Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan, perencanaan dan pengendalian DAS	KPH Way Pisang (Lampung Selatan Reg 1, 2,3 dan HL Pantai Timur)	3,747	HL dan HPT	KPH,Dishut, Pemkab, BPDAS, NGO,Koperasi				

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	200	200	200	200	200	200		APBN
	125	125	125	125	125	125		APBN
	60	60	60	60	60	60		
	656.25	656.25	656.25	656.25	656.25	656.25	Hibah/Swakelola	APBN/APBD/Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS	KPH Way Pisang (Lampung Selatan Reg 1, 2,3 dan HL Pantai Timur)	3,747	HL dan HPT	KPH,Dishut, Pemkab, BPDAS, NGO,Koperasi	656.25	656.25	656.25	
5	Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan, perencanaan dan pengendalian DAS	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Register 40, Reg 35)	400 ha	HPT	KPH,Dishut, Pemkab, BPDAS, NGO,Koperasi				
	• Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Register 40, Reg 35)	401 ha	HPT	KPH,Dishut, Pemkab, BPDAS, NGO,Koperasi	0	960	960	
5	Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan, perencanaan dan pengendalian DAS	KPH Batu Serampok (Reg. 17)	2,614	HL	Pemprov Lampung, Dinas Kehutanan, BLH, Camat, Desa, Kelompok Masy. Adat, Klp Masy Lainnya, LSM dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan				
	• Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS	KPH Batu Serampok (Reg. 17)	2,614	HL	Pemprov Lampung, Dinas Kehutanan, BLH, Camat, Desa, Kelompok Masy. Adat, Klp Masy Lainnya, LSM dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan	200	200	200	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	960	960	960	960	960	960	Swakelola/hibah	APBN, APBD, pihak ketiga yang tidak mengikat
	200	200	200	200	200	200		APBN, APBD Prov.

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
5	Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan, perencanaan dan pengendalian DAS	KPH Pematang Neba (Tanggamus, Pringsewu)	843.75	HL	KPH, KTH, BPDHL				
	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS	KPH Pematang Neba (Tanggamus, Pringsewu)	843.76	HL	KPH, KTH, BPDHL		703.13	703.13	
5	Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan, perencanaan dan pengendalian DAS	KPH Liwa	1,000	HL	KPH, BPDASHL, KPS				
	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS	KPH Liwa	100	HL	KPH, BPDASHL, KPS	-	500	500	
	• Restorasi Kawasan yang terdegradasi untuk perlindungan sumber air	KPH Liwa	1,000	HL	KPH, BPDASHL, KPS	-	500	500	
	• Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada area rawan/ pasca bencana	KPH Liwa	200	HL	KPH, BPDASHL, KPS	-	500	500	
	• Kajian dan penelitian mengenai kegiatan rehabilitasi secara regenerasi	KPH Liwa	500	HL	KPH, BPDASHL, KPS	-	200	200	
5	Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan, perencanaan dan pengendalian DAS	KPH Pesisir Barat	1,000	HL	KPH, BPDASHL, KPS				

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	703.13	703.13	703.13	703.13	703.13	703.13		APBN
	500	500	500	500	500	500		APBN
	500	500	500	500	500	500		APBN
	500	500	500	500	500	500		APBN
	200	200	200	200	200	200		APBN
	125	125	125	125	125	125		APBN

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS		500	HL	KPH, BPDASHL, KPS	-	200	200	
	• Restorasi Kawasan yang terdegradasi untuk perlindungan sumber air		1,000	HL	KPH, BPDASHL, KPS	-	250	250	
	• Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada area rawan/ pasca bencana		200	HL	KPH, BPDASHL, KPS	-	100	100	
	• Kajian dan penelitian mengenai kegiatan rehabilitasi secara regenerasi		500	HPT	KPH, BPDASHL, KPS	-	200	200	
5	Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan, perencanaan dan pengendalian DAS	KPH Tangkit Tebak (Blok Lindung areal KPS)	1,000	HL	Dishut, UPT KLHK, Pemkab				
	• Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS	KPH Tangkit Tebak (Blok Lindung areal KPS)	1,000	HL	Dishut, UPT KLHK, Pemkab	-	625.00	625.00	
5	Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan, perencanaan dan pengendalian DAS	KPH Bukit Punggur	25.004.71		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK				
	• Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS					19.670	19.670	19.670	
	• Restorasi Kawasan yang terdegradasi untuk perlindungan sumber air					6,668	6,668	6,668	

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada area rawan/pasca bencana					2,533	2,533	2,533	
	• Kajian dan penelitian mengenai kegiatan rehabilitasi secara regenerasi					100	100	100	
5	Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan, perencanaan dan pengendalian DAS	KPH Muara Dua (REG 44 dan 46 INHUTANI)	1,590.49 ha	HP	INHUTANI, BLS, KPH, DISHUT, BPHP				
	• Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS	KPH Muara Dua (REG 44 dan 46 INHUTANI)	1,590.49 ha	HP	INHUTANI, BLS, KPH, DISHUT, BPHP	-	500	500	
	• Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS	KPH Muara Dua (REG 44 WILAYAH TERTENTU)	1,590.49 ha	HP	INHUTANI, BLS, KPH, DISHUT, BPHP dan BPDAS	-	175	175	
6	Pengelolaan Kawasan konservasi	KPH TAHURA WAR	998 ha	Kawasan Konservasi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD KPHK TAHURA WAR, BPDASHL WSS, Ditjen KSDAE, Mitra NGO, KTH, Akademisi				

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	100	100	100	100	100	100		
	500	500	500	500	500	476	Hibah / Swakelola	APBN, KORPORASI, DANA LAIN
	175	175	175	175	175	188	Hibah / Swakelola	APBN, KORPORASI, DANA LAIN
	551	551	275	275	275	275		

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Rehabilitasi ekosistem kawasan konservasi/ pemulihan Kawasan konservasi	Blok Rehabilitas TAHURA WAR (Kabupaten Pesawaran)	525.98	Kawasan Konservasi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD KPHK TAHURA WAR, BPDASHL WSS, Ditjen KSDAE, Mitra NGO, KTH, Akademisi	13	110	275	
6	Pengelolaan Kawasan konservasi	KPH Way Waya	13,68	HL	KPH, KTH				
	• Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada Kawasan konservasi dan lindung	KPH Way Waya	13,68	HL	KPH, KTH		12,42	17,480	
6	Pengelolaan Kawasan konservasi	KPH Tangkit Tebak (Blok Lindung areal KPH)	1,000	HL	Dishut, UPT KLHK, Pemkab				
	• Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada Kawasan konservasi dan lindung	KPH Tangkit Tebak (Blok Lindung areal KPH)	1,000	HL	Dishut, UPT KLHK, Pemkab		625.00	625.00	
7	Bina usaha perhutanan sosial dan hutan adat	KPH Way Pisang (Lampung Selatan Reg 1, 2 dan 3)	3,743	HL dan HPT	KPH, Dishut, Pemkab, PSKL, NGO				
	• Pembinaan masyarakat sekitar hutan untuk peningkatan produktivitas usahatani	KPH Way Pisang (Lampung Selatan Reg 1, 2 dan 3)	3,744	HL dan HPT	KPH, Dishut, Pemkab, PSKL, NGO	150	150	150	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	21,505	21,505	21,505	20,857	8,821	3,815	Hibah / Swakelola	APBN, KORPORASI, DANA LN
	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	Hibah / Swakelola	APBN, KORPORASI, DANA LN
	150	150	150	150	150	200	Hibah	APBN/APBD/Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
7	Bina usaha perhutanan sosial dan hutan adat	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Reg5, 35, 37, 40)	100 KUPS	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, PSKL, NGO				
	Peningkatan nilai tambah produk (KUPS)	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Reg5, 35, 37, 40)	101 KUPS	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, PSKL, NGO	0	125	250	
	• Kemitraan investasi/usaha	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Reg5, 35, 37, 40)	102 KUPS	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, PSKL, NGO	0	100	200	
	Pemasaran/promosi produk perhutanan sosial	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Reg5, 35, 37, 40)	103 KUPS	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, PSKL, NGO	0	100	200	
	• Peningkatan kapasitas masyarakat	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Reg5, 35, 37, 40)	104 KUPS	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, PSKL, NGO	0	50	100	
	• Pembinaan masyarakat sekitar hutan untuk peningkatan produktivitas usahatani	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Reg5, 35, 37, 40)	105 KUPS	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, PSKL, NGO	0	120	120	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	250	250	375	375	375	500	Swakelola/hibah	APBN, APBD, pihak ketiga yang tidak mengikat
	200	200	300	300	300	400	Swakelola/hibah	APBN, APBD, pihak ketiga yang tidak mengikat
	200	200	300	300	300	400	Swakelola/hibah	APBN, APBD, pihak ketiga yang tidak mengikat
	100	100	150	150	150	200	Swakelola/hibah	APBN, APBD, pihak ketiga yang tidak mengikat
	120	120	120	120	120	120	Swakelola/hibah	APBN, APBD, pihak ketiga yang tidak mengikat

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
7	Bina usaha perhutanan sosial dan hutan adat	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Reg5, 35, 37, 40)	100 KUPS	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, BPHP, PSKL, NGO				
	• Peningkatan nilai tambah produk (KUPS)	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Reg5, 35, 37, 40)	100 KUPS	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, BPHP, PSKL, NGO	0	125	250	
	• Kemitraan investasi/usaha	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Reg5, 35, 37, 40)	100 KUPS	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, BPHP, PSKL, NGO	0	100	200	
	• Pemasaran/ promosi produk perhutanan sosial	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Reg5, 35, 37, 40)	100 KUPS	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, BPHP, PSKL, NGO	0	100	200	
	• Peningkatan kapasitas masyarakat	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Reg5, 35, 37, 40)	100 KUPS	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, BPHP, PSKL, NGO	0	50	100	
	• Pembinaan masyarakat sekitar hutan untuk peningkatan produktivitas usahatani	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Reg5, 35, 37, 40)	48 Desa	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, BPHP, PSKL, NGO	0	120	120	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	250	250	375	375	375	500	Swakelola/hibah	APBN, APBD, pihak ketiga yang tidak mengikat
	200	200	300	300	300	400	Swakelola/hibah	APBN, APBD, pihak ketiga yang tidak mengikat
	200	200	300	300	300	400	Swakelola/hibah	APBN, APBD, pihak ketiga yang tidak mengikat
	100	100	150	150	150	200	Swakelola/hibah	APBN, APBD, pihak ketiga yang tidak mengikat
	120	120	120	120	120	120	Swakelola/hibah	APBN, APBD, pihak ketiga yang tidak mengikat

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Ka-wasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
7	Bina usaha perhutanan sosial dan hutan adat	KPH Batu Serampok (Reg. 17 dan Reg. 6)	0,80	HL	Pemprov Lampung, Dinas Kehutanan, BLH,Camat, Desa, Kelompok Masy Adat, Klip Masy Lainnya, LSM dan Lembaga Penelitian dan Pengem bangan				
	• Industri nilai tambah produk	KPH Batu Serampok (Reg. 17 dan Reg. 6)	0,80	HL	Pemprov Lampung, Dinas Kehutanan, BLH,Camat, Desa, Kelompok Masy. Adat, Klip Masy Lainnya, LSM dan Lembaga Penelitian dan Pengem bangan	-	-	-	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	-	200	200	100	-	-		APBN, APBD Prov.
	25	25	25	25	25	25		APBN, APBD Prov.

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	Pemasaran/promosi produk perhutanan sosial	KPH Batu Serampok (Reg. 17 dan Reg. 6)	0,81	HL	Pemprov Lampung, Dinas Kehutanan, BLH,Camat, Desa, Kelompok Masy. Adat, Klip Masy Lainnya, LSM dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan	-	25	25	
	• Peningkatan kapasitas masyarakat	KPH Batu Serampok	-	HL	Pemprov Lampung, Dinas Kehutanan, BLH,Camat, Desa, Kelompok Masy. Adat, Klip Masy Lainnya, LSM dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan	240	240	240	
7	Bina usaha perhutanan sosial dan hutan adat	KPH Tangkit Tebak, 14 KPS (Reg.34, Reg.24)	16,295	HL	Dishut, UPT KLHK, Pemkab				
	Kemitraan investasi/ usaha	KPH Tangkit Tebak, 14 KPS (Reg.34, Reg.24)	16,296	HL	Dishut, UPT KLHK, Pemkab		300	300	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	240	240	240	240	240	240		APBN, APBD Prov.
	300	300	300	300	300		Hibah / Swakelola	APBN, KORPORASI, DANA LAIN
	450	450	450				Hibah / Swakelola	APBN, KORPORASI, DANA LAIN

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Pemasaran/ promosi produk perhutanan sosial	KPH Tangkit Tebak, 14 KPS (Reg.34, Reg.24)	18 Unit	HL	Dishut, UPT KLHK, Pemkab	450	450	450	
	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat	KPH Tangkit Tebak, 14 KPS (Reg.34, Reg.24)	148 KTH	HL	Dishut, UPT KLHK, Pemkab		500.00	500.00	
	Pembinaan masyarakat sekitar hutan untuk peningkatann produktiviatas usaha tani	KPH Tangkit Tebak (Kec. Tj.Raja,Ab. Tinggi, B.Kemuning, Sumberjaya, Kebun Tebu)	6 Kecamatan	HL			450.00	450.00	
7	Bina usaha perhutanan sosial dan hutan adat	KPH Bukit Punggur	25.004.71		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK				
	• Industri nilai tambah produk	KPH Bukit Punggur	25.004.72		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	150	150	150	
	• Kemitraan investasi/usaha	KPH Bukit Punggur	25.004.73		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	75	75	75	
	• Pemasaran/ promosi prduk perhutanan sosial	KPH Bukit Punggur	25.004.74		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	75	75	75	
	• Peningkatan kapasitas masyarakat	KPH Bukit Punggur	25.004.75		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	54,6	54,6	54,6	

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Pembinaan masyarakat sekitar hutan untuk peningkatan produktivitas usahatani	KPH Bukit Punggur	25.004.76		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	54,6	54,6	54,6	
7	• Bina usaha perhutanan sosial dan hutan adat	KPH Sungai Buaya	2,000	KHP Reg. 45	Perusahaan masyarakat				
	• Kemitraan investasi/usaha	KPH Sungai Buaya	2,001	KHP Reg. 45	Perusahaan masyarakat	-	125	125	
	• Peningkatan kapasitas masyarakat	KPH Sungai Buaya	2,002	KHP Reg. 475	Perusahaan masyarakat	-	125	125	
8	Penyiapan Kawasan perhutanan sosial	KPH Way Pisang (Lampung Selatan Reg 1 dan 2)	8,500	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, PSKL, NGO				
	• Pemberian akses Kelola Kawasan hutan oleh masyarakat	KPH Way Pisang (Lampung Selatan Reg 1 dan 2)	8,501	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, PSKL, NGO	500	500	500	
8	Penyiapan Kawasan perhutanan sosial	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan, Lampung Timur Reg 5, 35, 37, 40)	120 Kelompok PS	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, BPHP, PSKL, NGO,				
	• Pemberian akses Kelola Kawasan hutan oleh masyarakat	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan, Lampung Timur Reg 5, 35, 37, 41)	120 Kelompok PS	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, BPHP, PSKL, NGO,	0	375	375	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	125	125	125	125	125	125		
	125	125	125	125	125	75		
	500	500	500	500	500	500	Hibah/ Swakelola	APBN/APBD/Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat
	375	375	375	375	375	375	Swakelola/hibah	APBN, APBD, pihak ketiga yang tidak mengikat

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
8	Penyiapan Kawasan perhutanan sosial	KPH Tangkit Tebak (Kec. Tj.Raja, Ab.Tinggi, B.Kemuning, Sumberjaya, Kebun Tebu)	12 KTH	HL	Dishut, UPT KLHK, Pemkab				
	• Pemberian akses Kelola Kawasan hutan oleh masyarakat	KPH Tangkit Tebak (Kec. Tj.Raja, Ab.Tinggi, B.Kemuning, Sumberjaya, Kebun Tebu)	12 KTH	HL	Dishut, UPT KLHK, Pemkab		6,000.00	6,000.00	
8	Penyiapan Kawasan perhutanan sosial	KPH Bukit Punggur	25.004.71		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK				
	• Pemberian akses Kelola Kawasan hutan oleh masyarakat	KPH Bukit Punggur	25.004.72		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	54,6	54,6	54,6	
8	Penyiapan Kawasan perhutanan sosial	KPH Sungai Buaya	2,000	KHP Reg. 45	Perusahaan masyarakat				
	• Pemberian akses Kelola Kawasan hutan oleh masyarakat	KPH Sungai Buaya	2,000	KHP Reg. 45	Perusahaan masyarakat	-	250	250	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	6,000.00						Hibah / Swakelola	APBN, KORPORASI, DANA LN
	54,6	54,6	54,6	54,6	54,6	54,6		
	250	250	250	250	250	250	Swakelola/hibah	APBN, APBD, pihak ketiga yang tidak mengikat

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
8	Penyiapan Kawasan perhutanan sosial	KPH Batu Serampok (Reg. 17)	2,614	HL	Pemprov Lampung, Dinas Kehutanan, BLH,Camat, Desa, Masy. Adat, Klip Masy Lainnya, LSM dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kelompok				
	• Pemberian akses Kelola Kawasan hutan oleh masyarakat	KPH Batu Serampok (Reg. 17)	2,615	HL	Pemprov Lampung, Dinas Kehutanan, BLH,Camat, Desa, Masy. Adat, Klip Masy Lainnya, LSM dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kelompok	50	50	50	
9	Pemulihan kerusakan lahan akses terbuka	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan, Register 40 dan 37)	115,5 Ha	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, BPHP, PSKL, NGO, Swasta				

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	50	50	50	50	50	50		APBN, APBD Prov.
	336	600	0	0	0	0	Swakelola/hibah	APBN, APBD, pihak ketiga yang tidak mengikat

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
		•Jumlah industri yang melakukan pengendalian kerusakan lahan dan reklamasi tambang	115,5 Ha	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, BPHP, PSKL, NGO, Swasta	0	210	240	
	• Peningkatan luasan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan, Lampung Timur Reg 5, 35, 37, 40)	90 Ha	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, BPHP, PSKL, NGO, Swasta	0	240	120	
11	Peningkatan penyuluhan	KPH Way Pisang (Lampung Selatan Reg 1, 2 dan 3)	15,375	HL dan HPT	KPH, Dishut, Pemkab, Pusluh, BP2SDM, NGO				
	• Peningkatan jumlah dan kapasitas SD kegiatan rehabilitasi secara regenerasi	KPH Way Pisang (Lampung Selatan Reg 1, 2 dan 3)	15,376	HL dan HPT	KPH, Dishut, Pemkab, Pusluh, BP2SDM, NGO	50	50	50	
11	Peningkatan penyuluhan	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Reg5, 35, 37, 40)	8 paket	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, BPHP, PSKL, NGO, Swasta				
	Peningkatan jumlah dan kapasitas Sumber daya penyuluh	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Reg5, 35, 37, 40)	8 paket	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, BPHP, PSKL, NGO, Swasta	0	200	200	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	120	120	120	120	120	120	Swakelola/hibah	APBN, APBD, pihak ketiga yang tidak mengikat
	50	50	50	50	50	50	Swakelola	APBN/APBD/Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat
	200	200	200	200	200	200	Swakelola/hibah	APBN, APBD, pihak ketiga yang tidak mengikat
	276	276	276	276	276	276	Swakelola/hibah	APBN, APBD, pihak ketiga yang tidak mengikat

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Ka-wasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	Penguatan kapasitas PKSM (Insentif PKSM)	KPH Gedong Wani (Lampung Selatan Reg5, 35, 37, 40)	9 paket	HPT	KPH, Dishut, Pemkab, BPHP, PSKL, NGO, Swasta	0	276	276	
11	Peningkatan penyuluhan	KPH Tangkit Tebak (Reg.34 dan Reg.24)	20,295	HL	Dishut, UPT KLHK, Pemkab				
	• Peningkatan jumlah dan kapasitas SD kegiatan rehabilitasi secara regenerasi	KPH Tangkit Tebak (Reg.34 dan Reg.24)	20,296	HL	Dishut, UPT KLHK, Pemkab		78		
11	Peningkatan penyuluhan	KPH Bukit Punggur	25,004,71		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK				
	Peningkatan jumlah dan kapasitas SD kegiatan rehabilitasi secara regenerasi	KPH Bukit Punggur	25,004,72		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	54,6	54,6	54,6	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
		56					Swakelola/hibah	APBN, APBD, pihak ketiga yang tidak mengikat
	54,6	54,6	54,6	54,6	54,6	54,6		

TABEL 4.15. | Rencana Pendanaan Operasional Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa (Non) Rotasi Non Kehutanan (R08) oleh Dinas-dinas Non Kehutanan di Provinsi Lampung

No	Rencana Operasional (R0), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
1	Lingkungan Hidup								
1.1	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Lampung Barat Lampung Utara Mesuji Pesawaran Pesisir Barat Tulang Bawang Tulang Bawang Barat Way Kanan	428	APL	UPT KLHK, OPD Prov	8	8	8	
	• Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Lampung Barat Lampung Utara Mesuji Pesawaran Pesisir Barat Tulang Bawang Tulang Bawang Barat Way Kanan	428	APL	UPT KLHK, OPD Prov	0.55	0.55	0.55	
1.2	Program pengembangan laboratorium lingkungan	Lampung Barat Lampung Utara Mesuji Pesawaran Pesisir Barat Tulang Bawang Tulang Bawang Barat Way Kanan	428	APL	UPT KLHK, OPD Prov	100	100	100	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	8	8	8	8	8	8	Cakupan kabupaten	
	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	Miliar Rupiah	APBD 1
	100	100	100	100	100	100	% layanan pada kab	

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Peningkatan layanan laboratorium lingkungan	Lampung Barat Lampung Utara Mesuji Pesawaran Pesisir Barat Tulang Bawang Tulang Bawang Barat Way Kanan	428	APL	UPT KLHK, OPD Prov	1.44	1.44	1.44	
1.3	Pembedayaan Masyarakat dan Desa	Lampung Barat Lampung Utara Mesuji Pesawaran Pesisir Barat Tulang Bawang Tulang Bawang Barat Way Kanan	428	APL	UPT KLHK, OPD Prov				
1.4	Pengembangan , Keberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Lampung Barat Lampung Utara Mesuji Pesawaran Pesisir Barat Tulang Bawang Tulang Bawang Barat Way Kanan	428	APL	UPT KLHK, OPD Prov	8	8	8	

[illegible]

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Peningkatan kinerja lembaga ekonomi desa	Lampung Barat Lampung Utara Mesuji Pesawaran Pesisir Barat Tulang Bawang Tulang Bawang Barat Way Kanan	428	APL	UPT KLHK, OPD Prov	0.78	0.78	0.78	

4.6. Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi Restorasi Gambut [RO-10]

TABEL 4.16. | Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi Restorasi Gambut [RO-10] dari UPT KLHK

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
RO10	Pelaksanaan Restorasi Gambut (RO 10)	Mesuji Tulang Bawang	672 6.706	APL	OPD Prov, UPT KLHK				
1	Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan, perencanaan dan pengendalian DAS [PDASRH]	Mesuji Tulang Bawang	672 6.706	APL	OPD Prov, UPT KLHK				
	• Rehabilitasi hutan mangrove/pantai	BPDAS WWS	225		BPDAS	475	475	475	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	Miliar Rupiah	APBD 1

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
							Anggaran rutin	APBN
	475	475	475	475	475	475	Anggaran rutin	APBN

TABEL 4.17. | Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi Restorasi Gambut [R0-10] dari OPD Terkait Provinsi Lampung

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
6	Pelaksanaan Restorasi Gambut (R010)	Mesuji Tulang Bawang Total	672 6.706 7.378	APL	UPT KLHK, OPD Prov				
OPD	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pemukiman								
1	Program penatagunaan sumberdaya air	Mesuji Tulang Bawang Total	672 6.706 7.378	APL	UPT KLHK, OPD Prov	100	100	100	
	• Optimalisasi pemanfaatan sumbedaya air	Mesuji Tulang Bawang Total	672 6.706 7.378	APL	UPT KLHK, OPD Prov	0.33	0.33	0.33	
2	Program pengembangan sumberdaya air	Mesuji Tulang Bawang Total	672 6.706 7.378	APL	UPT KLHK, OPD Prov	2	2	2	
	• Perbaikan tata kelola pemanfaatan sumberdaya air	Mesuji Tulang Bawang Total	672 6.706 7.378	APL	UPT KLHK, OPD Prov	0.52	0.52	0.52	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	100	100	100	100	100	100	Presentase Penatagunaan	
	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	Miliar Rupiah	APBD 1
	2	2	2	2	2	2	Cakupan Kabupaten	
	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	Miliar Rupiah	APBD 1

4.7. Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi Konservasi Kenakeragaman Hayati [RO-11]

TABEL 4.18. | Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi Konservasi Kenakeragaman Hayati dari UPT KLHK

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
R011	Perindungan Areal Konservasi Tinggi (R011)	Lampung Barat Lampung Selatan Lampung Tengah Lampung Timur Lampung Utara Pesawaran Pesisir Barat Pringsewu Tanggamus Way Kanan	9.684 3.648 5.402 166 8.054 745 4.822 398 18.115 853	APL, HL, SM, TN, HP, HPT	UPT KLHK, OPD Prov				
7.6	Pengembangan Usaha PS dan Hutan Adat	Definitif PS	5,740.85	APL, HL,SM, TN, HP, HPT	UPT KLHK, OPD Prov				
	• Penyusunan Rencana Kerja/ Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial untuk mendapatkan pengesahan						40	120	
	• Pengembangan fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan						200	600	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
							Anggaran Rutin	APBN
	160	220	220	160	140	40		
	800	1,100	1,100	800	700	200		

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk ditingkatkan menjadi kelas gold/ platinum						80	80	
7.7	Kemitraan Lingkungan	Definitif PS	5,740.85						
	• Pengembangan dan peningkatan tenaga pendamping Perhutanan Sosial					1980	1980	1980	
	• Pengembangan kemitraan kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan					687.5	687.5	687.5	
7.8	Penyiapan Kawasan PS	Indikatif PS	8,578						
	• Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, HTR, KK								

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	80	80	80	80				
								APBN
	1980	1980	1980	1980	1980	1980		
	687.5	687.5	687.5	687.5	687.5	687.5		
								APBN
				857.80				

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Penetapan kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat								
7.9	Pengembangan Usaha PS dan Hutan Adat	Indikatif PS	8,578						
	• Penyusunan Rencana Kerja/ Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial untuk mendapatkan pengesahan								
	• Pengembangan fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan								
	• Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk ditingkatkan menjadi kelas gold/ platinum								
7.10	Kemitraan Lingkungan	Indikatif PS	8,578						

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Pengembangan dan peningkatan tenaga pendamping Perhutanan Sosial								
	• Pengembangan kemitraan kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan								
7.4	Pengelolaan Kawasan konservasi	(*)KSDAE							
	• Pemberdayaan masyarakat di Kawasan konservasi TAHURA WAR	Blok Tradisonal TAHURA WAR (Kabupaten Pesawaran)	525.98	Kawasan Konservasi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD KPHK TAHURA WAR, BPDASHL WSS,Ditjen KSDAE, Mitra NGO, KTH, Akademisi	37,000,000	275,000,000	275,000,000	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
				1,944				
				6,750				
	551,000,000	551,000,000	551,000,000	275,000,000	275,000,000	110,000,000		

TABEL 4.19. | Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi Konservasi Kenakeragaman Hayati oleh Dinas Kehutanan [KPH] Provinsi Lampung

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
R011	Perindungan Areal Konservasi Tinggi (R011)	Lampung Barat Lampung Selatan Lampung Tengah Lampung Timur Lampung Utara Pesawaran Pesisir Barat Pringsewu Tanggamus Way Kanan	9.684 3.648 5.402 166 8.054 745 4.822 398 18.115 853	APL, HL, SM, TN, HP, HPT	UPT KLHK, OPD Prov				
OPD	Dinas Kehutanan								
1	Konservasi species dan genetik	KPH Liwa	1000	HL	KPH, KSDAE, KPS				
	• Luasan Kawasan yang diversifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman spesies dan genetika TSL	KPH Liwa	500	HL	KPH, KSDAE, KPS		500	500	
	• Perlindungan dan penyelamatan satwa liar	KPH Liwa	1000	HL	KPH, KSDAE, KPS		500	500	
	• Penetapan site monitoring species	KPH Liwa	1000	HL	KPH, KSDAE, KPS		500	500	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	500	500	500	500	500	500	Terjaganya areal perlindungan keanekaragaman hayati dan genetika TSL	APBN
	500	500	500	500	500	500	Patroli perlindungan dan penyelamatan satwa	APBN
	500	500	500	500	500	500	Terbentuknya site monitoring species	APBN
	500	500	500	500	500	500	Patroli perlindungan dan penyelamatan satwa	APBN

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Pengendalian invasive species untuk mencegah kerusakan ekosistem alam	KPH Liwa	1000	HL	KPH, KSDAE, KPS		500	500	
	• Perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan langka/endemik	KPH Liwa	1000	HL	KPH, KSDAE, KPS		500	500	
1	Konservasi species dan genetik	KPH Pematang Neba (Tanggamus .Pringsewu	5270.29	HL	KPH, KTH, BKSDA		330	330	
1	Konservasi species dan genetik	KPH Pesisir Barat	1000	HPT	KPH, KSDAE, KPS				
	• Luasan Kawasan yang diversifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman spesies dan genetika TSL	KPH Pesisir Barat	1000	HPT	KPH, KSDAE, KPS		250	250	
	• Perlindungan dan penyelamatan satwa liar	KPH Pesisir Barat	500	HPT	KPH, KSDAE, KPS		200	200	
	• Penetapan site monitoring species	KPH Pesisir Barat	500	HPT	KPH, KSDAE, KPS		200	200	
	• Pengendalian invasive species untuk mencegah kerusakan ekosistem alam	KPH Pesisir Barat	500	HPT	KPH, KSDAE, KPS		200	200	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	500	500	500	500	500	500	Patroli perlindungan dan penyelamatan satwa	APBN
	330	330	330	330	330	325.15	Dana Dekon	APBN
	250	250	250	250	250	250		APBN
	125	125	125	125	125	125		APBN
	125	125	125	125	125	125		APBN
	125	125	125	125	125	125		APBN
	125	125	125	125	125	125		APBN

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
1	• Perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan langka/endemik	KPH Pesisir Barat	500	HPT	KPH, KSDAE, KPS		200	200	
	Konservasi species dan genetik	KPH Tangkit Tebak (Blok Lindung KPH dan Blok Lindung KPS)	7,002.99	HL	KPH, MMP				
	• Perlindungan dan penyelamatan satwa liar	KPH Tangkit Tebak (Blok Lindung KPH dan Blok Lindung KPS)	7,002.99	HL	KPH, MMP	40.32	336.42	336.42	
	• Perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan langka/endemik	KPH Tangkit Tebak (Blok Lindung KPH dan Blok Lindung KPS)	7,002.99	HL	KPH, MMP	40.32	241.92	172.80	
1	Konservasi species dan genetik	KPH Bukit Punggur	2.553.47		Dishutprov, KPH, PemkabWay Kanan,UPT KLHK				
	• Luasan Kawasan yang diverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman spesies dan gentika TSL	KPH Bukit Punggur	25.004.71		Dishutprov, KPH, PemkabWay Kanan,UPT KLHK	54.6	54.6	54.6	

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Pengembangan entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati	KPH Bukit Punggur	25.004.71		Dishutprov, KPH, PemkabWay Kanan,UPT KLHK	54.6	54.6	54.6	
	• Perlindungan dan penyelamatan satwa liar	KPH Bukit Punggur	25.004.71		Dishutprov, KPH, PemkabWay Kanan,UPT KLHK	54.6	54.6	54.6	
	• Penetapan site monitoring species	KPH Bukit Punggur	25.004.71		Dishutprov, KPH, PemkabWay Kanan,UPT KLHK	54.6	54.6	54.6	
	• Pengendalian invasive species untuk mencegah kerusakan ekosistem alam	KPH Bukit Punggur	25.004.71		Dishutprov, KPH, PemkabWay Kanan,UPT KLHK	54.6	54.6	54.6	
	• Pembinaan populasi tumbuhan dan satwa liar	KPH Bukit Punggur	25.004.71		Dishutprov, KPH, PemkabWay Kanan,UPT KLHK	54.6	54.6	54.6	
	• Perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan langka/endemik	KPH Bukit Punggur	25.004.71		Dishutprov, KPH, PemkabWay Kanan,UPT KLHK	54.6	54.6	54.6	
1	Konservasi species dan genetik	KPH Way Waya	5,402	HL	Dishut, BKSDA, KPH, MMP				
	• Perlindungan dan penyelamatan satwa liar	KPH Way Waya	5,402	HL	KPH, MMP	28.80	232.80	232.80	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6		
	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6		
	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6		
	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6		
	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6		
	232.80	232.80	232.80	232.80	232.80	232.80	Hibah/ swakelola	APBN, KORPORASI, DANA LN
	172.80	172.80	172.80	172.80	172.80	172.80	Hibah/ swakelola	APBN, KORPORASI, DANA LN

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan langka/endemik	KPH Way Waya	5,402	HL	KPH, MMP	28.80	172.80	172.80	
1	Konservasi species dan genetik	KPH Kotaagung Utara	5753 ha	Hutan Lindung	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi				
	• Luasan Kawasan yang diverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman spesies dan genetika TSL	KPH Kotaagung Utara	5753 ha	Hutan Lindung	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi	30	30	30	
	• Perlindungan dan penyelamatan satwa liar	KPH Kotaagung Utara	5753 ha	Hutan Lindung	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi	160	160	160	
	• Penetapan site monitoring species	KPH Kotaagung Utara	100 ha	Hutan Lindung	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi		100		
	• Pembinaan populasi tumbuhan dan satwa liar	KPH Kotaagung Utara	600 ha	Hutan Lindung	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi		1800	1980	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	30	30	30	30	30	30	Dekon, Hibah, CSR, Dana Mitra (NGO)	APBN, KORPORASI, DANA LN
	160	160	160	160	160	160	Dekon, Hibah, CSR, Dana Mitra (NGO)	APBN, KORPORASI, DANA LN
							Dekon, Hibah, CSR, Dana Mitra (NGO)	APBN, KORPORASI, DANA LN
	360	180					Dekon, Hibah, CSR, Dana Mitra (NGO)	APBN, KORPORASI, DANA LN
	200	200	200	200	200	200	Dekon, Hibah, CSR, Dana Mitra (NGO)	APBN, KORPORASI, DANA LN

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan langka/endemik	KPH Kotaagung Utara	100 ha	Hutan Lindung	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi		200	200	
2	Pembinaan konservasi ekosistem esensial	KPH Way Pisang Lampung Selatan (Reg. 3 Gn.Rajabasa dan Pantai Timur)	3648	HL	KPH, Dishut, Pemda, BPDAS, BPHP, PSKL, NGO				
	• Penjagaan Kawasan konservasi, ekosistem esensial dan hutan lindung	KPH Way Pisang Lampung Selatan (Reg. 3 Gn.Rajabasa dan Pantai Timur)	3648	HL	KPH, Dishut, Pemda, BPDAS, BPHP, PSKL, NGO	2,026.67	2,026.67	2,026.67	
2	Pembinaan konservasi ekosistem esensial	KPH Pesawaran, Reg. 21	67.86	KHL	Dishut. Prov, Pemkab. Pesawaran, BKSDA				
	• Penjagaan Kawasan konservasi, ekosistem esensial dan hutan lindung	KPH Pesawaran, Reg. 21	67.86	KHL	Dishut. Prov, Pemkab. Pesawaran, BKSDA	22.94	22.94	22.94	
2	Pembinaan konservasi ekosistem esensial	KPH Batutegi (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8,926.63	HL	LHK, PEMPROV, PEMKAB, SWASTA AKADEMISI, PRAKTISI, NGO, MASYARAKAT				

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	2,026.67	2,026.67	2,026.67	2,026.67	2,026.67	2,026.67	Hibah/ swakelola	APBN/APBD/Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat
	22.94	22.94	22.94	22.94	22.94	22.94		APBN/APBD/Korp orasi/ Dana LN
	562.5	562.5	562.5	562.5	562.5	562.5		APBN, APBD, KORPORASI, DANA LN

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Penjagaan Kawasan konservasi, ekosistem esensial dan hutan lindung	KPH Batutegi (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8,926.63	HL	LHK, PEMPROV, PEMKAB, SWASTA AKADEMISI, PRAKTISI, NGO, MASYARAKAT		562.5	562.5	
2	Pembinaan konservasi ekosistem esensial	KPH Way Terusan (Register 08 Rumbia)	156.94	HL	KPH, MMP dan PKSM				
	• Penjagaan Kawasan konservasi, ekosistem esensial dan hutan lindung	KPH Way Terusan (Register 08 Rumbia)	156.94	HL	KPH, MMP dan PKSM		54	54	
2	Pembinaan konservasi ekosistem esensial	KPH Pematang Neba (Tanggamus , Pringsewu)	15	HL	KPH, KTH, BKSDA		31.25	31.25	
2	Pembinaan konservasi ekosistem esensial	KPH Batutegi (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8,926.63	HL	LHK, PEMPROV PEMKAB, SWASTA AKADEMISI, PRAKTISI, NGO, MASYARAKAT				
	• Peningkatan efektivitas pengelolaan KEE	KPH Batutegi (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8,926.63	HL	LHK, PEMPROV PEMKAB, SWASTA AKADEMISI, PRAKTISI, NGO, MASYARAKAT		625	625	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	54	54	54	54	54	54		APBN
	31.25	31.25	31.25	31.25	31.25	31.25		APBN
	625	625	625	625	625	625	Hibah/ swakelola	APBN, KORPORASI, DANA LN

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
2	Pembinaan konservasi ekosistem esensial	KPH Tangkit Tebak (Blok Lindung KPH dan Blok Lindung KPS)	7.002.99	HL	KPH, MMP				
	• Penjagaan Kawasan konservasi, ekosistem esensial dan hutan lindung	KPH Tangkit Tebak (Blok Lindung KPH dan Blok Lindung KPS)	7.002.99	HL	KPH, MMP	40.32	241.92	172.80	
3	Pemolaan dan informasi konservasi alam	KPH Pesawaran, Register 21 Perintian batu, Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran	67.86	KHL	Dishut. Prov, Pemkab. Pesawaran, BKSDA				
	• Inventarisasi dan verifikasi Kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	KPH Pesawaran, Register 21 Perintian batu, Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran	67.86	KHL	Dishut. Prov, Pemkab. Pesawaran, BKSDA		20		
3	Pemolaan dan informasi konservasi alam	KPH Way Terusan (Register 08 Rumbia)	156.94	HL	KPH dan anggota PS				

[illegible]

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Inventarisasi dan verifikasi Kawasan dengan nilai keekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	KPH Way Terusan (Register 08 Rumbia)	156.94		KPH dan anggota PS		17.58	17.58	
3	Pemolaan dan informasi konservasi alam	KPH Bukit Punggur	2.553.47		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK				
	• Inventarisasi dan verifikasi Kawasan dengan nilai keekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	KPH Bukit Punggur	25.004.71		Dishutprov, KPH, Pemkab Way Kanan, UPT KLHK	54.6	54.6	54.6	
3	Pemolaan dan informasi konservasi alam	KPH Way Waya	5.402	HL	Dishut, BKSDA, KPH, MMP				
	• Inventarisasi dan verifikasi Kawasan dengan nilai keekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	KPH Way Waya	5.402	HL	Dishut, BKSDA, KPH, MMP	28.80	165.20	165.20	
3	Pemolaan dan informasi konservasi alam	KPH Kotaagung Utara	5753 ha	Hutan Lindung	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi				

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6		
	165.20	165.20	165.20	165.20	165.20	165.20	Hibah/ swakelola	APBN, KORPORASI, DANA LN

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Inventarisasi dan verifikasi Kawasan dengan nilai keekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	KPH Kotaagung Utara	5753 ha	Hutan Lindung	KPH, Dishut Prov, Hkm, BKSDA, Pemkab, NGO, Perguruan Tinggi		160	160	
4	Pengelolaan kawasan konservasi	KPH TAHURA WAR	525,98 ha	Kawasan Konservasi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD KPHK TAHURA WAR, BPDASHL WSS, Ditjen KSDAE, Mitra NGO, KTH, Akademisi				
	• Pemberdayaan masyarakat di Kawasan konservasi	Blok Tradisional TAHURA WAR (Kabupaten Pesawaran)	525,98 ha	Kawasan Konservasi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD KPHK TAHURA WAR, BPDASHL WSS, Ditjen KSDAE, Mitra NGO, KTH, Akademisi	37	275	275	
4	Pengelolaan kawasan konservasi	KPH Pesawaran, Register 21 Perintian batu, Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran	67.86	KHL	Dishut. Prov, Pemkab. Pesawaran, BKSDA	13	110	275	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	160	160	160	160	160	160	Dekon, Hibah, CSR, Dana Mitra (NGO)	APBN, APBD, Korporasi, Dana LN
	275	275	275	275	275	110		APBN
	551	551	275	275	275	275		

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Pemberdayaan masyarakat di Kawasan konservasi	KPH Pesawaran, Register 21 Perintian batu, Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran	67.86	KHL	Dlshut. Prov, Pemkab. Pesawaran, BKSDA	15	15	15	
4	Pengelolaan kawasan konservasi	KPH Way Terusan (Register 08 Rumbia	156.94	HL	KPH dan masyarakat				
	• Pembinaan daerah penyangga	KPH Way Terusan (Register 08 Rumbia	156.94	HL	KPH dan masyarakat		26.2	26.2	
4	Pengelolaan kawasan konservasi	KPH Batutegi (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8.926.63	HL	KLHK, PEMPROV, PEMKAB, SWASTA AKADEMISI, PRAKTISI, NGO, MASYARAKAT				
	• Pemberdayaan masyarakat di Kawasan konservasi	KPH Batutegi (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8.926.63	HL	KLHK, PEMPROV, PEMKAB, SWASTA AKADEMISI, PRAKTISI, NGO, MASYARAKAT		500	500	
	• Penanganan permasalahan di Kawasan konservasi (opened area)	KPH Batutegi (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8.926.63	HL	KLHK, PEMPROV, PEMKAB, SWASTA AKADEMISI, PRAKTISI, NGO, MASYARAKAT		500	500	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	15	15	15	15	15	15		APBN/APBD/Korp orasi/ Dana LN
	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2		APBN
	500	500	500	500	500	500		APBN/APBD/ Korporasi/ Dana LN
	500	500	500	500	500	500		APBN/APBD/ Korporasi/ Dana LN

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Pengendalian Kawasan konservasi	KPH Batutegi (Reg 39, Reg 22 dan Reg 32)	8.926.63	HL	KLHK, PEMPROV, PEMKAB, SWASTA AKADEMISI, PRAKTISI, NGO, MASYARAKAT		437.5	437.5	
4	Pengelolaan kawasan konservasi	KPH Way Waya	5.402	HL	Dishut, BPDAS, KPH, KTH				
	• Pemberdayaan masyarakat di Kawasan konservasi	KPH Way Waya	13.680	HL	Dishut, KPH, KTH	28.80	300.00	300.00	
	• Penanganan permasalahan di Kawasan konservasi (opened area)	KPH Way Waya	5.402	HL	Dishut, BPDAS, KPH, KTH	28.80	200.00	200.00	
	• Pengembangan TN dan Taman wisata alam sebagai dukungan destinasi wisata	KPH Way Waya	30	HL	KPH, KUPS	28.80	1000.00	1000.00	
4	Pengelolaan kawasan konservasi	KPH Gunung Balak (Lampung Timur)	42.07	HL REG 15	PSKL, NGO, PEMKAB		50	50	
	• Pembinaan daerah penyangga	KPH Gunung Balak (Lampung Timur)	42.07	HL REG 15	PSKL, NGO, PEMKAB				

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	437.5	437.5	437.5	437.5	437.5	437.5		APBN/APBD/ Korporasi/ Dana LN
	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	Hibah / Swakelola	APBN, KORPORASI, DANA LN
	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	Hibah / Swakelola	APBN, KORPORASI, DANA LN
	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	Hibah / Swakelola	APBN, KORPORASI, DANA LN
	50	50	50	50	50	50	Hibah / Swakelola	APBN, KORPORASI, DANA LN

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat			2024 (Ha)	
						2022 (Ha)	2023 (Ha)		
4	Pengelolaan kawasan konservasi	KPH Tangkit Tebak (Kec. Tj.Raja, Abung Tingi, Bk.Kemuning, Sumberjaya & Kebon tebu)			Dishut, UPT KLHK, Pemkab				
	• Pembinaan daerah penyangga	KPH Tangkit Tebak (Kec. Tj.Raja, Abung Tingi, Bk.Kemuning, Sumberjaya & Kebon tebu)			Dishut, UPT KLHK, Pemkab		450.00	450.00	
5	Pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan	KPH Liwa	1,000	HL	KPH, BPKH, KPS				
	• Perencanaan dan penetapan Kawasan hutan	KPH Liwa	1,000	HL	KPH, BPKH, KPS		500	500	
	• Penataan dan pemeliharaan batas Kawasan hutan	KPH Liwa	1,000	HL	KPH, BPKH, KPS		500	500	
5	Pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan	KPH Way Waya	23,146	HL	Dishut, BPKH, KPH				
	• Penataan dan pemeliharaan batas Kawasan hutan	KPH Way Waya	23,146	HL	Dishut, BPKH, KPH	28.80	100.00	100.00	
5	Pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan	KPH Way Terusan (Register 08 Rumbia)	5.666.72	HL	KPH dan BPKH				
	• Perencanaan dan penetapan Kawasan hutan	KPH Way Terusan (Register 08 Rumbia)	5.666.72	HL	KPH dan BPKH	234			
5	Pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan	KPH Pesisir Barat	500	HPT	KPH, BPKH, KPS				

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	1.150.00	1.150.00	1.150.00	1.150.00	1.150.00	1.150.00	Hibah / Swakelola	APBN, KORPORASI, DANA LN
	500	500	500	500	500	500		APBN
	500	500	500	500	500	500		APBN
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
								APBN

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Perencanaan dan penetapan Kawasan hutan	KPH Pesisir Barat	500	HPT	KPH, BPKH, KPS		200	200	
	• Penataan dan pemeliharaan batas Kawasan hutan	KPH Pesisir Barat	120 KM	HPT/HL	KPH, BPKH, KPS		250	250	
5	Pengukuhan dan penatagunaan Kawasan hutan	KPH Tangkit Tebak (Reg.34 dan Reg.24)	27,000 ha/ 2 kali	HL	Dishut, UPT KLHK, Pemkab				
	• Perencanaan dan penetapan Kawasan hutan	KPH Tangkit Tebak (Reg.34 dan Reg.24)	27,000 ha/ 2 kali	HL	Dishut, UPT KLHK, Pemkab		1.500.00	1.500.00	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	125	125	125	125	125	125		APBN
	250	200	150	125	125	100		APBN

4.8. Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove [RO-12]

TABEL 4.20. | Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove [RO-12] dari UPT KLHK

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
RO-12	Pengelolaan Mangrove (RO 12)	Mesuji Tulang Bawang Lampung Tengah	3,141	APL	UPT KLHK, OPD Prov				
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan mangrove TAHURA WAR	KTH Pelestari Mangrove KTH Bina Jaya Lestari Kelurahan Gebang Kabupaten Pesawaran	153 20	Mangrove	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD KPHK TAHURA WAR, BPDASH LWSS	130,000,00	200,000,00	200,000,00	

TABEL 4.21. | Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove [RO-12] dari OPD Terkait di Provinsi Lampung

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
RO-12	Pengelolaan Mangrove (RO 12)	Mesuji Tulang Bawang Lampung Tengah	3,141	APL	UPT KLHK, OPD Prov				
OPD	Dinas Perikanan dan Kelautan								
1	Program pengelolaan perikanan tangkap	Mesuji Tulang Bawang Lampung Tengah	3,141	APL	UPT KLHK, OPD Prov	2	2	2	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	300,000,00	300,000,00	200,000,00	100,000,00	100,000,00	0	Anggaran Rutin	APBN

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	2	2	2	2	2	2	PeningPeningkatan % penerimaan nelayan	

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
	• Pengelolaan daerah tangkapan perikanan	Mesuji Tulang Bawang Lampung Tengah	3,142	APL	UPT KLHK, OPD Prov	0,95	0,95	0,95	
2	Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Mesuji Tulang Bawang Lampung Tengah	3,143	APL	UPT KLHK, OPD Prov	100	100	100	
	Pengawasan sumberdaya laut dan perikanan	Mesuji Tulang Bawang Lampung Tengah	3,144	APL	UPT KLHK, OPD Prov	0,95	0,95	0,95	

TABEL 4.21. | Pendanaan Rencana Operasional Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove [R0-12] dari Dinas Kehutanan (KPH) Provinsi Lampung

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
R0-12	Pengelolaan Mangrove (R0 12)	Lampung Timur Tulang Bawang	2.76 3,138. 59						
OPD	Dinas Kehutanan								
1	Promosi dan peningkatan perekonomian HHBK dan jasa lingkungan	KPH Gunung Balak (Lampung Timur)	42,07	HL REG 15	BRGM, NGO, PEMKAB		80 juta	80 juta	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	Miliar rupiah	APBD 1
	100	100	100	100	100	100	% kab yang memiliki potensi SD perikanan laut	
	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	Miliar rupiah	APBD 1

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	80 juta	80 juta	80 juta	80 juta	80 juta		HIBAH	APBN, APBD PROV, APBD KAB

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat			2024 (Ha)	
						2022 (Ha)	2023 (Ha)		
2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan mangrove	KPH Gunung Balak (Lampung Timur)	42,08	HL REG 16	BRGM, NGO, PEMKAB		50 juta	50 juta	
3	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan mangrove	KPH Tahura WAR	153 ha	Mangrove	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD KPHK TAHURA WAR, BPDASHL WSS				
	• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan mangrove	KPH Tahura WAR – KTH Pelestari Mangrove (Kelurahan Gebang Kabupaten Pesawaran)	154 ha	Mangrove	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD KPHK TAHURA WAR, BPDASHL WSS	130	200	200	
	• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan mangrove	KPH Tahura WAR – KTH Pelestari Mangrove (Kelurahan Gebang Kabupaten Pesawaran)	20 ha	Mangrove	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD KPHK TAHURA WAR, BPDASHL WSS	100	100		
4	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan mangrove	KPH Gunung Balak (Lampung Timur)	42,07	HL REG 15	PSKL, NGO, PEMKAB		50 juta	50 juta	
5	Peningkatan produktivitas mangrove	KPH Gunung Balak (Lampung Timur)	42,08	HL REG 16	PSKL, NGO, PEMKAB		70 juta	70 juta	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta	52,07	HIBAH	APBN, APBD PROV, APBD KAB
	300	300	200	100	100		Anggaran tahunan	APBN
							Anggaran tahunan	APBN
	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta	52,07		HIBAH	APBN, APBD PROV, APBD KAB
	70 juta	70 juta	70 juta	70 juta			HIBAH	APBN, APBD PROV, APBD KAB

No	Rencana Operasional (RO), Program dan Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	Status Kawasan	Pihak Terlibat				
						2022 (Ha)	2023 (Ha)	2024 (Ha)	
6	Kemitraan dala rehabilitasi mangrove	KPH Gunung Balak (Lampung Timur)	42,09	HL REG 17	PSKL, NGO, PEMKAB		40 juta	40 juta	
7	Penegakan hukum dalam pengendalian mangrove	KPH Gunung Balak (Lampung Timur)	42,10	HL REG 18	PSKL, NGO, PEMKAB		30 juta	30 juta	

	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) BERDASAR TAHUN (JUTA RP)						MEKANISME PENDANAAN	SUMBER PEN-DANAAN (APBN, APBD PROV, APBD KAB,
	2025 (Ha)	2026 (Ha)	2027 (Ha)	2028 (Ha)	2029 (Ha)	2030 (Ha)		
	40 juta	40 juta	40 juta	40 juta	52,07		HIBAH	APBN, APBD PROV, APBD KAB
	30 juta	30 juta	30 juta	30 juta			HIBAH	APBN, APBD PROV, APBD KAB

BAB 05



MONITORING DAN EVALUASI

BAB V. MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) merupakan suatu rangkaian dari suatu program yang sangat penting dan strategis dalam konteks kebijakan dan proram pembangunan sektor kehutanan dan secara spesifik terkait dengan seluruh rangkaian pada Program Indonesia *FOLUNET Sink* Sub-Nasional Provinsi Lampung 2030. Kegiatan monitoring dan evaluasi bertujuan untuk melihat ketercapaian tujuan Program Indonesia *FOLUNET Sink* Sub-Nasional Provinsi Lampung 2030 dan melihat input, proses/kemajuan dan output dari program tersebut dan dalam jangka panjang juga diharapkan dapat menjadi masukan dalam menilai *outcome* serta *impact* dari program.

MONEV bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat/publik atas penggunaan anggaran yang dikelola (prinsip akuntabilitas) dan untuk menginventarisir faktor-faktor pendukung dan penghambat sebagai bahan evaluasi agar program/kegiatan selanjutnya dapat lebih berdayaguna dan berhasil-guna (prinsip efektivitas dan efisiensi). Oleh karena itu, pelaksanaan MONEV sangat krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berdasar pada *Good Governance*.

Secara lebih spesifik, monitoring suatu program merupakan kegiatan rutin untuk menilai suatu program yang mencakup pengamatan terhadap input, proses, dan output sehingga dapat diketahui kesesuaiannya dengan rencana yang telah disusun. Monitoring dapat dilakukan dengan pengumpulan data dan analisis informasi berdasarkan kriteria dan indikator yang ditetapkan secara sistematis sehingga dapat diidentifikasi dan diantisipasi permasalahan yang muncul dan atau yang akan muncul.

Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Jika ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka dapat segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Hasil monitoring merupakan input yang sangat penting bagi kepentingan proses selanjutnya.

Evaluasi suatu program adalah penilaian dampak dari program dan kegiatan yang sudah dilakukan setelah waktu tertentu. Dalam praktik suatu manajemen program, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Secara makro, mekanisme evaluasi terdiri dari 3 aspek, yaitu: (a) relevansi,

(b) efektivitas, dan (c) efisiensi. Relevansi menggambarkan sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan yang dirumuskan. Efektifitas mengukur sejauh mana sebuah kegiatan telah mencapai tujuan yang diinginkan dalam periode waktu tertentu. Efisiensi mengukur keluaran secara kualitatif dan kuantitatif dibandingkan dengan input sumber daya. Melalui proses dan tahapan kegiatan evaluasi pada akhirnya akan didapatkan informasi dan pelajaran dari pengalaman pelaksanaan program/kegiatan, output, manfaat, dan dampak dari program yang baru selesai dilaksanakan maupun yang sudah berfungsi sebagai umpan balik bagi manajemen untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian untuk program dan kegiatan selanjutnya.

Pada Rencana Kerja Indonesia *FOLUNT Sink* 2030 Tingkat Sub Nasional Lampung ini, kegiatan monitoring dan evaluasi program secara umum dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

Monitoring dan Evaluasi Jangka Pendek (*Short Term*). Monitoring dan evaluasi jangka pendek dilakukan secara rutin tahunan, dimana penilaian dilakukan setiap akhir tahun kegiatan/anggaran, yang dilakukan terhadap capaian kuantitas dan kualitas setiap kegiatan yang direncanakan.

Monitoring dan Evaluasi Jangka Panjang (*Long Term*). Monitoring dan evaluasi jangka Panjang dilakukan diakhir program Indonesia FOLU Net Sink Sub-Nasional Provinsi Lampung taotu pada tahun 2030, dimana penilaian dilakukan terhadap seluruh capaian kuantitas dan kualitas pada kondisi terkair (tahun 2030) dari setiap kegiatan yang telah direncanakan.

1. Monitoring dan Evaluasi tertentu, dimana penilaian dilakukan apabila terjadi perubahan rencana dan pelaksanaan kegiatan yang bersifat mendadak akibat adanya perubahan arah kebijakan maupun faktor lainnya (misalnya terjadi bencana alam).

Monitoring dan evaluasi juga dilakukan berdasarkan target dan volume capaian yang telah ditetapkan dan jangka waktu untuk mencapai target dan volume capaian pada masing-masing kegiatan.

Secara teknis operasional, pelaksanaan tugas monitoring dan evaluasi Indonesia *FOLUN Net Sink* Sub-Nasional Provinsi Lampung dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca yaitu pihak pemerintah (Organisasi perangkat daerah terkait), Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, pelaku usaha terkait dan perwakilan masyarakat. Secara kelembagaan, perlu dibentuk tim koordinasi yang bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada institusi yang berkepentingan. Pengendalian kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan *FOLU Net Sink* 2030 di Provinsi Lampung dapat dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung khususnya dalam pengarusutamaan (*mainstreaming*) program-program OPD yang dapat berkaitan dengan emisi GRK dengan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup melalui UPT yang ada di Provinsi Lampung, sedangkan untuk pengukuran emisi dan kontribusi aksi-aksi mitigasi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup melalui UPT yang ada di Provinsi Lampung. Tim Koordinasi usaha implementasi kegiatan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi

Lampung antara lain yang dapat beranggotakan:

- Tim Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan RAD-GRK Provinsi Lampung
- Tim Perwakilan KLHK di Provinsi Lampung (UPT)
- Tim dari Organisasi Perangkat Daerah terkait;
- Tim Anggaran Pembangunan Daerah
- Perwakilan Akademisi/Perguruan Tinggi
- Perwakilan Lembaga Sosial Masyarakat
- Perwakilan Dunia Usaha

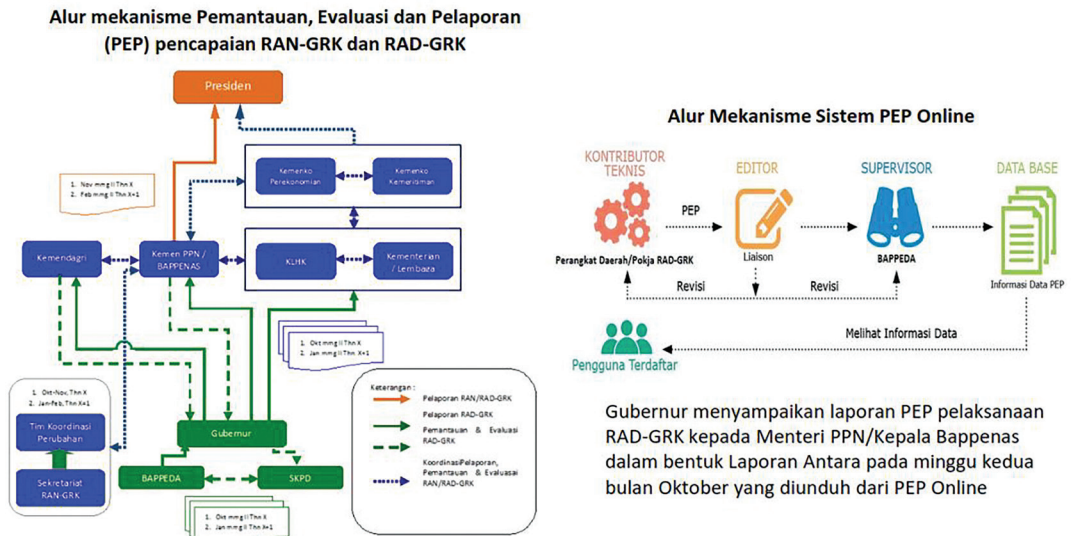
Secara teknis operasional, proses dan mekanisme serta pelaporan emisi GRK perlu dikelola oleh sebuah kelembagaan yang ada di daerah [provinsi dan kabupaten/kota] dengan komponen sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Sebagaimana dilaporkan oleh Dirjen PPI-KLHK (2017), pengaturan kelembagaan yang diterapkan dalam inventarisasi GRK Nasional diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri LHK Nomor P.73/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca. Sesuai mandat yang tercantum di Perpres 71/2011, penyusunan inventarisasi GRK nasional melibatkan partisipasi aktif pemerintah sub-nasional (provinsi, kabupaten dan kota). Namun demikian dalam pengembangan inventarisasi GRK nasional saat ini hanya melibatkan K/L pusat. Dalam pengembangan inventarisasi GRK nasional, peran pemerintah daerah diperkuat secara berkelanjutan. Sehingga di masa depan, pengembangan inventarisasi GRK akan dilengkapi melalui pendekatan *top-down* dan *bottom-up*, agar dapat dibandingkan perhitungan yang dilakukan di tingkat nasional dengan agregasi hasil perhitungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah [provinsi dan kabupaten/kota].

Penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi merupakan suatu proses yang berkesinambungan karena melibatkan upaya perbaikan yang dilakukan terus menerus sejalan dengan semakin berkembangnya ketersediaan data dan pengetahuan terkait dengan pendugaan emisi dan serapan GRK. Upaya perbaikan dalam peningkatan kualitas data, sistem dokumentasi dalam mendukung QA/QC dan transparansi data masih perlu ditingkatkan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan inventarisasi GRK dan monitoring, pelaporan dan verifikasi. Peningkatan kualitas data aktifitas maupun faktor emisi dari data terkecil, merupakan prioritas perbaikan dalam penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca pada sektor yang mempunyai *key category* dan *uncertainty* tinggi. Upaya perbaikan selanjutnya akan difokuskan pada sumber/roket yang sudah diidentifikasi sebagai kategori kunci serta untuk meningkatkan kualitas inventarisasi GRK ke *Tier* yang lebih tinggi [Dirjen PPI-KLHK, 2017].

Pemanfaatan aplikasi atau sistem informasi untuk proses monitoring dan pelaporan emisi GRK secara terintegrasi dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat akan lebih cepat, lebih efektif dan lebih efisien serta menjadi informasi penting dan strategis yang dapat dimanfaatkan untuk proses pengambilan keputusan (*decision support system*) terkait dengan aksi mitigasi

perubahan iklim dan penurunan gas rumah kaca berbasis sektoral maupun lintas sektoral pada masa-masa mendatang.

Secara ringkas mekanisme monitoring dan evaluasi emisi GRK dapat digambarkan dalam Gambar 5.1 sebagai berikut.



Gambar 5.1. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Emisi GRK

BAB 06



PENUTUP

BAB VI. PENUTUP

Rencana kerja [Renja] Indonesia FOLU Net Sink Sub-Nasional Provinsi Lampung ini merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Operasional Indonesia FOLU Net Sink 2030 yang dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan bagi seluruh UPT, OPD, dan para pihak yang berkepentingan di wilayah Provinsi Lampung. Seluruh rencana aksi, target, program, dan kegiatan yang tersusun pada rencana kerja diharapkan dapat menjadi komitmen kegiatan bersama dengan dukungan sarana-prasana, pendanaan dan SDM untuk dapat memenuhi target penurunan emisi yang ditargetkan untuk wilayah Provinsi Lampung.

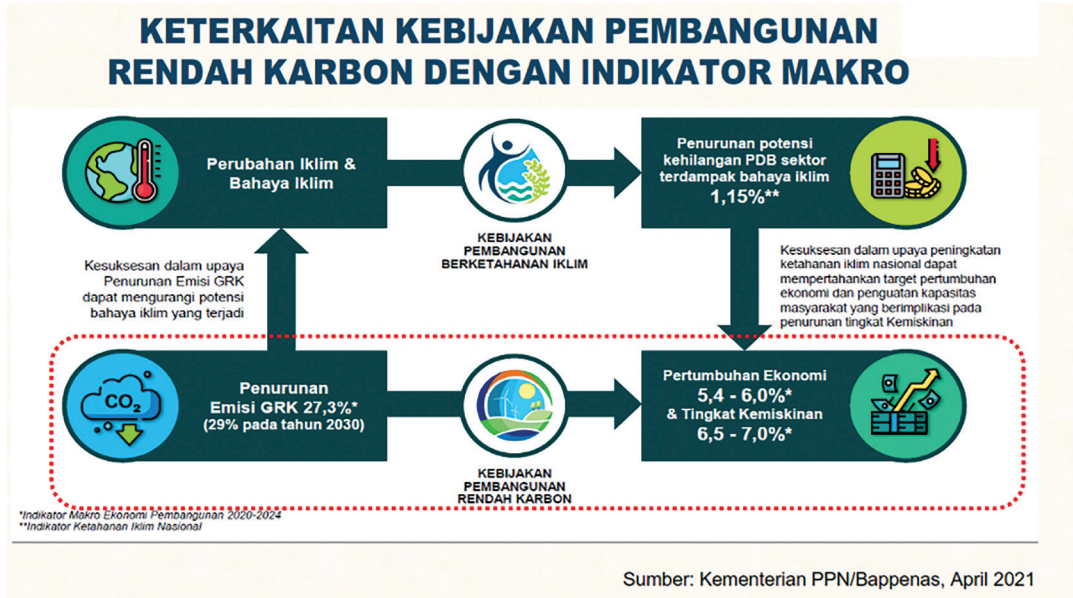
Secara teknokratik, Renja FOLU Net Sink 2020 merupakan dokumen perencanaan yang sangat strategis sebagai pedoman aksi mitigasi perubahan iklim global dan nasional yang dampak negatifnya semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari. Renja Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Sub-Nasional Lampung akan menjadi acuan dasar oleh berbagai pihak terkait untuk konsisten mengalokasikan sumberdayanya dengan upaya-upaya yang terstruktur dan sistematis serta terintegrasi dengan target pada pengurangan emisi karbon dioksida [CO₂] serta dan penyerapan emisi CO₂ di Provinsi Lampung yang juga secara agregatif akan berimplikasi terhadap capaian nasional pada masa-masa mendatang.

Sebagaimana telah dilaporkan oleh berbagai pihak, perubahan iklim yang terjadi secara global dan tali temali antar region, negara dan daerah telah berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi yang sangat signifikan dari waktu ke waktu memiliki risiko dan dampak yang semakin berat. Laporan Badan Meteorologi Internasional/ *World Meteorological Organization* [WMO] pada pertengahan Mei 2022 menyebutkan tingkat pemanasan bumi akibat naiknya level karbon dioksida dan metana di atmosfer mencapai titik yang mengkhawatirkan.

WMO (2022) melaporkan secara global suhu rata-rata dunia tahun lalu berada pada angka 1,1 derajat Celsius atau diatas suhu rata-rata dunia pada era pra industri. Angka ini telah mendekati ambang batas 1,5 derajat Celsius, Batasan tertinggi suhu global untuk melindungi dunia dari bencana iklim yang lebih luas. Perubahan suhu global tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia, seperti kualitas dan kuantitas air, habitat, hutan, kesehatan, lahan pertanian dan ekosistem wilayah pesisir. Kondisi ini secara nyata juga dialami oleh masyarakat dan wilayah di Provinsi Lampung sehingga penyusunan dokumen perencanaan Renja FOLU Net Sink merupakan harapan baru bagi aksi-kasi mitigasi yang konkrit dan akan berdampak nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Melalui Renja FOLU Net Sink 2030 yang terdokumentasi dan terstruktur dengan baik, diharapkan akan mempercepat aksi mitigasi dan pencapaian penurunan gas rumah kaca yang perimplikasi pada pengendalian perubahan iklim global dan nasional akan memiliki keterkaitan dengan upaya pencegahan pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan

daerah serta pada penanggulangan kemiskinan. Secara skematis keterkaitan tersebut dapat digambarkan pada Gambar 6.1.



Gambar 5.1. Keterkaitan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dengan Indikator Makro dalam Konteks Pembangunan Nasional dan Daerah

Dokumen Rencana Kerja ini merupakan dokumen hidup (*living document*) yang akan selalu diperbaharui secara berkala mengikuti dinamika yang terjadi di wilayah dan kondisi masing-masing lokus pelaksanaan dan perkembangan kebijakan yang ada. Penyesuaian dan adaptasi yang terstruktur dapat terus dilakukan dengan tujuan untuk tetap menjamin meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dengan tujuan utama pada penurunan emisi gas rumah kaca yang akan menjadi penggerak utama (*prime mover*) pada upaya pengendalian perubahan iklim nasional dan global (*global climate change*) sehingga dampak negatif terhadap seluruh aktivitas kehidupan dapat dikendalikan pada masa-masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

BPS Lampung, 2022, Provinsi Lampung dalam Angka 2022

BPS Lampung, 2022, Analisis Provinsi Penduduk Provinsi Lampung: Peran Penduduk dalam Pembangunan Daerah

BPS Lampung, 2022, Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Lampung Tahun 2021 BPS Lampung, 2022, Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Lampung Tahun 2021

BPS Lampung 2021, Perembangan Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Lampung 2021

BPS Lampung, 2020, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia: Air dan Lingkungan Tahun 2020 Dirjen PPI-KLHK, 2017, Kontribusi Penurunan Emisi GRK Nasional, Menuju NDC 2030,

<http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/3150-kontribusi-penurunan-emisi-grk-nasional,-menuju-ndc-2030.html>

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, 2021, Kajian Fiskal Regional [Provinsi Lampung] Tahun 2020

KLHK, 2022, Keputusan Menteri KLHK No. 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 Tentang INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE NET SINK (FOLU) NET SINK

2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim

Mustaqin, Wahyuni dan Rahayu, 2022, Analisis Kegiatan Perhutanan Sosial dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19, Bappenas Working Paper Vol. 9 Juli 2022

Nursalam, 2021, Kebijakan Pelestarian Sumber Daya Hutan dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan, Kertas Kerja Universitas Nusa Cendana Kupang

Subejo, 2012, Understanding Agriculture Multi Functionality, The Jakarta Post, Edisi 20 Februari 2012, Link: <https://www.thejakartapost.com/news/2012/02/20/understanding-multi-functionality-agriculture.html>

Subejo, 2022a, Indonesia's Farmers Adapt to Climate Change, Tempo English Edisi 30 Juni 2022, Link: <https://en.tempo.co/read/1607376/indonesias-farmers-adapt-to-climate-change>

- Subejo, 2022b, Isu, Trend, Problematika dan Strategi Menjamin Ketahanan Pangan: Pelajaran dari Indonesia dalam Winanti, P dan Masudi, W (eds.), G20 di Tengah Perubahan Besar: Momentum Kepemimpinan Global Indonesia? Gadjah Mada University Press.
- Syahputra, Bakri dan Qurniati, 2022, Pengaruh Tutupan Hutan Dan Lahan Terhadap Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Pendapatan Daerah: Studi di Provinsi Lampung, Ulin-Jurnal Hutan Tropis Vol. 6 (1) : 9-19.
- Wahyuni dan Suranto, 2020, Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia, JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Volume 6, Nomor 1, Tahun 2021; DOI: 10.14710/jiip.v6i1.10083.
- Wibowo dan Gingtings, 2020, Degradasi dan Upaya Pelestarian Hutan, Kertas Kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, KLHK

INDONESIA'S FOLU Net Sink 2030



Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia